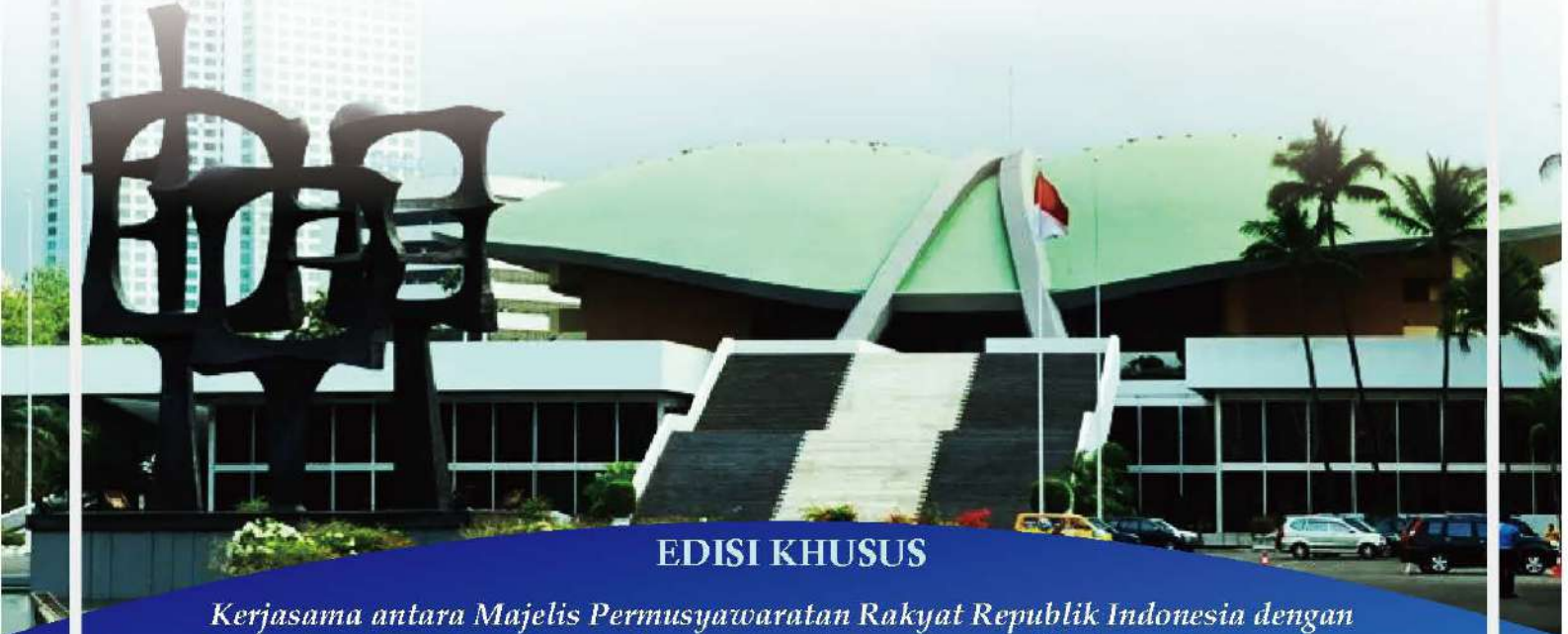
Prosiding Seminar Nasional
Program Doktor Ilmu Hukum UMS
2022

Aktualisasi Pancasila dalam Mewujukan Sistem Demokrasi Konstitusional Indonesia



EDISI KHUSUS

Kerjasama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Himpunan Indonesia untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS)

 ISSN: 2830-2699

MEREBUT TAFSIR PANCASILA: NORMA ISLAM SEBAGAI FONDASI "POLITIK *HALAL*" DALAM KEPOLITIKAN DEMOKRASI PEMILU DI INDONESIA

Chusnul Mar'iyah
Dosen Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik, Univeritas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: cmariyah2004@yahoo.com

Abstrak

Kondisi kepolitikan Nasional di Indonesia sejak dekade terakhir ini atau lebih jauh sejak reformasi bersamaan dengan kondisi kepolitikan global setelah peristiwa 9/11 menguatnya Islamophobia. Kondisi kepolitikan tersebut berpengaruh pada kontestasi kepolitikan yang pada dasarnya mulai muncul secara terbuka dalam pilkada 2012 DKI Jakarta serta menguat pada pemilu 2014 dan 2019. Jargon politik di antaranya "saya Pancasila"; "saya Bhinneka"; "toleransi dan intoleransi"; terorisme digunakan untuk memarginalkan kelompok oposisi yang kebetulan muslim sebagai senjata untuk meminggirkan. Dalam sejarah kepolitikan Orde Baru dasar negara Pancasila dirumuskan dan ditafsirkan dalam kehidupan bernegara oleh BP7, dengan pokok-2 nilai Pancasila. Regime yang berkuasa menggunakan tafsir Pancasila untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Sementara itu di Era Reformasi terutama dekade terakhir ini, Pancasila menjadi alat untuk meminggirkan mereka yang tidak mendukung istana. Bahkan tidak hanya regime yang berkuasa, namun para pendukungnya juga menggunakan Pancasila untuk meminggirkan kelompok yang bukan pendukung istana. Islamophobia berkembang lebih luas ke "agama- phobia", dan pada gilirannya menjadi "demokrasi-phobia". Dengan demikian Pancasila yang digunakan adalah jargon politik. Sementara substansi Pancasila tidak digunakan dalam diskursus politik. Salah satunya adalah tantangan untuk para politisi dapat berkompetisi dalam pemilu secara halal. Bagaimana para aktor politik melaksanakan prinsip2 dalam 5 Sila dalam Pancasila dalam praktik kepolitikan di Indonesia? Makalah ini menjawab pertanyaan tersebut dengan merebut tafsir Pancasila yang mengangkat nilai2 Islam sebagai fondasi politik halal di Indonesia. Dengan demikian mengimplementasikan Pancasila tidak hanya sebatas jargon tapi mempraktikkan nilai2 Pancasila yang di dalamnya ada ketuhanan, beradab, bersatu, bermuyawarah dan berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Islam sebagai sumber nilai agung perlu dipelajari dan menjadi daar nilai2 pelaksanaan pemilu. Untuk itu perlu menghadirkan etika "pemilu halal" agar tidak menjadi "pemilu bencana", yang akan menghasilkan political unrest berkelanjutan.

Kata Kunci: Tafsir Pancasila, Pemilu Halal, Politik Demokrasi Pemilu Indonesia

Abstract

In the last decade of Indonesian politic, or specially post reformasi, which is inline with global politics Islamophobia post 9/11. This condition has influence to the contestation of regional politics during Pilkada DKI 2012 and the national elections 2014 and 2019. Political jargon such as "saya Pancasila"; "saya Bhinneka"; "toleransi dan intoleransi"; terororisme have been used as a weapon to marginalised the other who are opposition and "muslim" group. In the era of New Order, Pancasila has been tafsir by BP7, the institution which controlled by the government, especially 37 pointss values of Pancasila. The regime used the mono-interpretation. In the era of Reformasi, especially in the last decade, Pancasila is used as political jargon by the regime and the supporters to marginalized the opoosition. Then, Pancasila vis a vis Islam, when the regime use for marginalized the oppotion and in line with the project of Islamophobia. In the development of politics of Islamophobia extent into agama phobia and democracy phobia. To re-reading Pancasila as sources of political ethic. Islam as a sources of devine values is very important role in the making of democracy via election. So, the idea to have halal elections in this country are very urgent or Indonesia will have disaster elections, it will bring political unrest continuestly.

Keywords: *Interpretation of Pancasila, Halal Election, Indonesian Election Democracy Politics*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kepolitikan global menarik untuk dipelajari terutama setelah berakhirnya perang dingin Barat (liberal/kapitalis) dengan Timur (komunis) setelah *glasnost dan prestroika* di Uni Soviet di akhir 80an dan awal 90an. Perkembangan demokratisasi di Rusia tidak serta merta mengakhiri perang dingin tersebut, terutam dengan perkembangan terakhir adanya perang Rusia dengan Ukraina pada bulan Februari 2022 ini. Perspektif Ilmu Politik melihat fenomena sosial politik dari kerangka berfikir tentang power/kekuasaan, kewenangan dan keadilan. *The virtue of politics* adalah bagaimana membangun masyarakat, negara dengan kerangka membangun keadilan. Demikian pula konstruksi negara Republik Indonesia, dibangun seperti yang ada dalam pembukaan UUD 145 yaitu dalam kerangka melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat serta ikut dalam ketertiban dunia. Kembali pada perkembangan demokrasi gelombang ketiga seperti yang dikemukakan oleh Huntington, the third wave democratisation, dilanjutkan dengan bukunya *the clash of civilisation*, terjadi perubahan gelombang gerakan baru Islamophobia, war on terror dan deradikalisasi. Kondisi hegemoni politik global itu juga berpengaruh pada kehidupan kepolitikan di Indonesia.

Jatuhnya regime Soeharto dan dimulainya reformasi politik 1998, satu dekade terakhir ini muncul jargon politik identitas, peminggiran pemikiran2 agama dalam politik atau agama phobia, terutama agama Islam. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan cita-cita berbangsa dan bernegara seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, bila dalam diskursus kepolitikannya ingin memisahkan agama dan politik? Bagaimana negara Indonesia, yang sejarah konstruksinya berasal dari kesultanan2 Islam dari Aceh sampai Tidore, direbut dari para penjajah oleh para pahlawan yang juga Ulama', kemudian saat negara berusia 76 tahun, dilarang menggunakan identitas agama Islam dalam kepolitikannya? Bagaimana membaca kembali kepolitikan Indonesia dengan memfokuskan pada masalah issue etika politik, dari mana sumber etika, bagaimana implementasi etika dalam perebutan kekuasaan/pemilu? Tulisan ini mencoba menjelaskan pertanyaan2 tersebut. Memang Indonesia seringkali diklaim bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang warga negaranya harus memiliki agama. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu tulisan ini menoba untuk menjelaskan bagaimana pentingnya merebut tafsir Pancasila dengan perspektif *Islamic teaching*. Merebut tafsir Pancasila dengan merujuk pada akar sejarah bangsa Indonesia, - yang konstruksinya berasal dari kesultanan2 Islam- adalah legitimate dan sah dalam kehidupan politik. Kontestasi values merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi.

2. HASIL DAN PEBAHASAN

2.1. Kepolitikan Islam

Fondasi pemikiran Islam dalam kepolitikan kontemporer dewasa ini, seringkali dimasukkan ke dalam kategori pemikiran yang fundamentalis. Hal itu disebabkan pengaruh dari perspektif barat dalam melihat Islam. Pandangan umum para *scholars* dalam khasanah literatur politik kontemporer melihat Islam hanya dilihat dalam perspektif sebagai "budaya" yang dipisahkan dari kehidupan politik. Walaupun sebagian besar mengakui referensi nilai dan norma ideal dalam kehidupan politik adalah norma agama. Gerakan civil Islam pada 2016 yang dikenal dengan 411 dan 212 - di Monas, Jakarta - memberikan berbagai response di kalangan para *scholars*. Namun, pandangan yang ada tidak beranjak dari pro dan kontra dalam memandang hubungan agama dan negara dalam demokrasi.

Islam biasanya hanya dilihat sebagai sistem budaya dan sistem agama, bukan dilihat sebagai ideologi politik. Dalam *Islamic teaching* sendiri menyebutnya sebagai *dinul Islam* suatu sistem kepercayaan yang sempurna, lengkap dengan petunjuk langsung dari Sang

Maha Pencipta yaitu Allah SWT dan RasulNya. Konsep *dinul* Islam yang diartikan secara sederhana dalam Bahasa Indonesia sebagai sistem kepercayaan agama kadang kurang mewakili makna *din* dalam Islam. Sebab agama Islam tersebut sempurna dalam pengertian sebagai petunjuk kehidupan di dunia dan untuk kehidupan abadi di akherat nantinya. Islam dalam literatur Barat direduksi hanya sebagai *a cultural system.* Dalam praktiknya penggunaan *Islamic cultural symbol* dianggap yang menaikkan ideologi baru dalam politik Islamism. Hal itu memunculkan tantangan bagi kelompok Islam yang menghadapi kontestasi pemikiran dan kepolitikan Islam. Para *scholars* Barat melihat bahwa Politik Islam dianggapnya sebagai gerakan fundamentalisme. Bahkan dianggap sebagai ideologi politik Islam dianggapnya sebagai bentuk fondamentalisme agama. Gerakan Islam ini dianggap menjadi hambatan dari berkembangnya ideologi liberalisme, neoliberalissme dan kapitalisme – yang ketiganya berada dalam satu kelompok pemikiran yang berpusat pada materialisme. Kepolitikan Barat berakar dari pemahaman materialisme tersebut. Seperti gerakan protestanisme yang memisahkan antara negara dan gereja (*state and church*). Dalam *Islamic teaching* tidak dikenal pemisahan antara agama dan negara seperti yang terjadi dalam gerakan protestanism di Eropa Barat.

Kapitalisme yang berkembang dalam revolusi industri di Eropa, menjadikan negara-negara Barat melakukan ekspansi penjajahan ke negara-negara yang saat ini dikenal sebagai negara dunia ketiga. Namun, pada dasarnya wilayah yang kaya sumber daya alam dan rempah2 yang menjadi kebutuhan pokok negara-negara Eropa Barat tersebut adalah negara-negara kesultanan dan kerajaan Islam, baik di Timur Tengah maupun di wilayah Asia Tenggara. Sejarah panjang penjajahan Barat, esploitasi sumber daya alam, tenaga manusia tersebut seringkali digunakan bahasa eufimisme yaitu *civilization.* Perlawanan yang sangat kuat muncul dari Islam. Dunia Barat selalu menganggap bahwa Islam menjadi kepercayaan yang mengancam kejayaan peradaban Barat. Propaganda atas nama *civilization* namun sesungguhnya yang dilakukan barat adalah penjajahan di dunia. Penjajahan menhancurkan bahkan pemerintah colonial mencri sumber daya alam, dan yang lebih dari itu adalah mengontrol penduduk lokal, bisa dilihat dari penjajahan Perancis di Aljazair, Inggris di India dan Belanda di wilayah Indonesia kini (dulu kerajaan2 Islam). Para penjajah tersebut melakukan hal yang sama, yaitu mengambil kekayaan negeri2 Muslim secara paksa; menghancurkan sistem sekolah, Rumah Sakit, dan secara keseluruhan menghancurkan peradaban Muslim. Sebagian penduduk lokal beralih menjadi prajurit2 penjajah yang menghabisi anak bangsanya sendiri untuk kepentingan penjajah. Namun, ada yang lebih parah dibanding penjajahan dalam arti pengambilan aset kekayaan negeri2 muslim tersebut Penjajah Eropa memproduksi *Islamic scholarship*, seperti model Perancis dengan orientalismenya. Pada dasarnya produksi pemikiran orientalis tersebut memporak porandakan aturan, mendiskriditkan Syari'ah Islam, menghancurkan sistem Islam bahkan sampai juga mengubah kepercayaan agamanya (*take your land, reources and change your religion*). Dunia ketiga dikapling2 untuk dikuasai ekonominya, politiknya dan penguasanya untuk kejayaan Barat dengan kapitalismenya.

Islam sebagai sistem kepercayaan yang sempurna karena merupakan petunjuk Tuhan, dalam sejarahnya menjadi dasar yang kuat untuk perubahan sosial dan politik. Pada saat yang sama dunia barat menempatkan Islam sebagai lawan dari peradaban Barat melalui propaganda politik kontemporer 9/11; *war on terror, deradicalisation, fundamentalism.* Kondisi itu tidak akan menghilangkan Islam sebagai sistem budaya, ekonomi, politik, dan juga pertahanan. Pada dasarnya, Islam politik, akan selalu hadir bila ada krisis ketidakadilan dalam kehidupan politik. Ajaran Islam menuntut keadilan sosial, politik, ekonomi. Dengan demikian Islam menjadi ideologi perlawanan bila menghadapi krisis structural.

Dalam membahas seberapa besar pengaruh Islam dalam kepolitikan di Indonesia ada beberapa perspektif yang dapat digunakan sebagai kerangka berfikir. Salah satunya adalah kajian perspektf Ilmu politik. Misalnya ada suatu pandangan yang begitu dipercaya bahwa calon presiden harus orang Jawa untuk dapat memenangkan pertarungan dalam pemilu. Kepercayaan itu begitu kuat, akhirnya mengantarkan model rekrutmen para partai politik untuk berkonsentrasi mencari calon Presiden dari kumpulan orang Jawa. Partai politik kurang aktif dalam mencari sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dan kapabilitas seorang calon Presiden, yang pada gilirannya memimpin negara sebesar Indonesia yang beragam "bangsa". Terminologi bangsa-bangsa dalam konstruksi Indonesia sangatlah tepat. Sebab, negara Indonesia merupakan "union" dari kerajaan-2 dan kesultanan2 Islam dari Aceh sampai Tidore. Seperti juga di Eropa dengan nation statenya, yang kemudian membentuk Uni Eropa yang merupakan kumpulan dari bangsa-2 Eropa. Indonesia sudah membentuk "uni Indonesia" pada tanggal 17 Agustus 1945.

Padahal Indonesia memiliki jumlah penduduk ke empat tersbesar di dunia yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Pada tingkatan yang lebih khusus adalah satu studi yang banyak dipercaya dalam diskursus ilmu politik adalah tulisan Geerzt tentang *the religioun of Java.*[2] Studi tersebut yang banyak dikutip adalah penjelasan tentang kategorisasi masyarakat Jawa yaitu kelompok santri, priyayi dan abangan. Sayangnya belum banyak studi lanjutan untuk melihat fenomena kekinian tentang relevansi kategorisasi tersebut, namun analisis tentang kategorisasi masyarakat Jawa selalu dipaksakan ke dalam tiga kategori tersebut.

Tulisan ini merupakan hasil pemikiran yang panjang dalam memahami kepolitikan di negara Republik Indonesia yang sering menghadapkan antara Islam dan Jawa. Sejauh mana konsep-2 Ilmu Politik Barat mendominasi cara berfikir para *scholars* di Indonesia? Sejauh mana pula konstestasi ideologi nasional versus lokal serta ideologi global? Dalam konteks ini bagaimana melihat pemikiran Islam sebagai sumber dan ruh dari nilai-2 luhur bangsa Indonesia? Sejauh mana pula kontestasi Jawa dengan Luar Jawa dalam bangunan konstruksi negara Indonesia? Sejauh mana pula negara Indonesia dapat dipertahankan persatuannya Jawa dan luar Jawa dalam tantangan politik identitas Islam yang dihubungakan dengan *democracy-phobia* dengan segala *policy* ikutannya seperti terorisme, radikalisme dan Islamophobia. Beberapa pertanyaan tersebut digunakan untuk mengarahkan pada analisis dari tulisan ini. Kesemuanya untuk menjelaskan pentingnya menghadirkan "Pemilu halal" sebagai sumber dari perebutan kekuasaan, agar tidak mengarah pada pemilu bencana.

2.2. Perspektif Kontestasi Pemikiran Ilmu Politik Barat dengan Pemikiran Politik Islam

Dalam khasanah paradigma Ilmu Politik di Indonesia, pendekatan budaya politik berkembang pada dekade 1960an dan 1970an. Pengaruh studi Ilmu Politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Ilmu Politik di Amerika Serikat, terutama pusat studi Asia Tenggara dari Cornell University. Paradigma barat ini bersumber dari sejarah pemikiran Barat lebih banyak merujuk pada sejarah zaman Yunani Kuno sebelum Masehi seperti Socrates, Arestoteles dan Plato. Pada perkembangannya pemikiran politik (Clifford Geerzt, 1976) Barat bersumber pada Katholik Roma dari pemahaman dari *Polis to cosmopolis* yang dilanjutkan dengan Christian cosmopolitan - St. Agustunines's City of God - and Christendom and its Law dari St. Thomas Aquinas (Mac Clelland, 1996). Kemudian pemikiran itu dikembangkan Machiavelli yang dilanjutkan pemikiran-2 Thomas Hobbes, John Lock, Rousseau dan politik kontemporer satu abad terakhir ini perkembangan dari modern state ke pemikiran libertarianisme, sosialisme dan liberalism. Kenapa ini penting untuk memulai dengan mengemukakan pemikiran politik tersebut dalam membahas issue di makalah ini?

Cara pandang atau paradigma Ilmu Politik didominasi oleh pemikiran politik Barat yang pada dasarnya adalah pemikiran2 Yunani Kuno yang kemudian berkembang dengan perkembangan *Romans Catholics*. Pada perkembangan sejarah perspektif pemikiran politik barat, dikembangkan oleh para pemikir yang berkembang seperti St. Augustine 354-430 M dan St. Thomas Aquinas (1224-1274 M) (Mac Clelland, 1996). Para mahasiswa yang mempelajari Ilmu Politik menganggap hal itu sebagai suatu keniscayaan untuk hanya meyakini Ilmu Politik dari perspektif pemikiran barat yang sumbernya Romans Katholik tersebut. Padahal ada gap dalam pembelajaran sejarah. Pemikiran yang dimasukkan dalam kurikulum Ilmu Politik di kampus2 negeri, paling tidak hanya memperhatikan sejarah pemikiran Barat non Islam atau Katholik/Protestan tersebut. Sementara itu era Rasulullah pada abad ke 7 dengan praktik negara Madinah dalam pandangan Ilmu Politik, tidak menjadi bagian penting dalam kurikulum pembelajaran Ilmu Politik di Indonesia. Alhasil pemikiran2 politik Islam dianggap tidak relevan. Apalagi ada pandangan pemisahan antara *state and church* yaitu gerakan protestanisme di Eropa Barat, semakin menjauhkan pemikiran2 politik Islam dalam kehidupan kepolitikan. Kurikulum Ilmu Politik, pemikiran politik Islam biasanya hanya dibahas dalam satu mata kuliah. Padahal, pemikiran2 politik Islam memberikan konstribusi yang tidak bisa dibandingkan dengan pemikiran barat. Sumber dari pemikiran Politik Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Metodologi Ilmu Pengetahuan Islam tidak dapat dikalahkan dengan metode pemikiran politik Barat. Studi tentang ajaran tertentu dalam Hadist memiliki sanad yang terhubung sampai kepada Rasulullah. Tradisi keilmuan dengan cara pandang dan ketaatan kepada firman Allah Sang Maha Pencipta, tentu memiliki dampak yang berbeda dalam tingkah laku politik.

Dalam pemikiran politik Barat dikenal pengaruh yang kuat terutama dalam hubungan Tuhan dan manusia di Gereja. Sebagai contoh, konsep representasi dari model persona menjadi representasi yang memiliki makna luas dalam pemikiran politik Barat sebagai pengaruh agama Kristen. Representasi dimaknai hubungan di antara gereja dan anggota-anggotanya (ummatnya), maka gereja dapat dikatakan merepresentasikan ummatnya. Gagasan tersebut muncul dalam diskusi Triniti yang secara konsep mengartikan Yesus sebagai representasi dari "Bapak" (Tuhan). Dalam Pemikiran Barat, gagasan representasi ini adalah model dari pemikiran Kristen. Dengan demikian agama Kristen Menjadi sumber penting dari bangunan pemikiran politik Barat. Dengan demikian apabila paradigm Barat yang dianggap universal sesungguhnya adalah paradigm yang berkembang dalam pemikiran Kristen dan pengalaman yang bersifat lokal negara-2 Barat.

Dengan pemahaman seperti itu, maka agama adalah variabel penting dalam membahas politik. Pemikiran2 setelah Roman Katholik sekitar abad ke 3 Masehi. Apabila dalam bahasan kontemporer melihat bagaimana hubungan antara negara atau politik dan agama saat ini, maka bahasan tersebut merupakan perkembangan pemikiran atau kontestasi antara pemikiran Kristen dan perkembangan dengan pemikiran Islam. Gagasan Rousseau (Katholik – Barat) tentang kontrak sosial pada abad 17 sudah dibahas oleh pemikir Islam Al Mawardi pada abad ke 11. Demikian pula pemikiran Marx tentang teori ekonomi sudah dibahas 500 tahun sebelumnya oleh pemikir Islam Ibn Khaldun. Apa signifikansinya saat ini? Prinsip2 kehidupan kepolitikan pada dasarnya bersumber pada pemahaman keagamaan. Membahas pemikiran politik Barat/Kristen ataupun pemikiran politik Timur/Islam perlu mendapatkan perhatian untuk kebaikan kehidupan politik di Indonesia. Dekonstruksi konsep Politik sebagian besar dari konsep Roman Katholik/Kristen dan Pemikiran Islam.

Salah satu yang menarik untuk melihat gap tersebut adalah bahasan tentang teori Kontrak Sosial Rousseau yang hidup pada 1700an, ternyata pemikiran kontrak sosial sudah dibahas oleh Al Mawardi yang hidup pada 950 sampai 1100 Masehi. Demikian pula mempelajari

pemikiran Karl Marx (1800an) dengan pemikiran dari Ibn Khaldun yang 500 tahun lebih dahulu tentang pemikiran teori ekonomi nilai lebih. Apa yang penting dalam pemahaman pemikiran Ilmu Politik ini? Apabila kita hanya mempelajari pemikiran politik Barat, maka kita menganggap bahwa setelah zaman Yunani Kuno sebelum Masehi dilanjutkan pemikiran *Roman Catholics* pada 1200an, kemudian pemikiran John Lock, Rousseau dan selanjutnya setelah abad 17. Hal itu sama dengan menghilangkan konstribusi pemikiran politik Islam dan praktik negara-2 Islam sejak zaman Rasulullan pada abad ke 7 dengan dilanjutkan pemikiran2 politik Islam seperti Al Farabi tentang peran negara utama yang terpenting adalah mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagis; pemikiran Al Mawardi, Ibn Thaymiyah, Ibn Khaldun. Sementara praktik negara modern dari era Rasulullah yang dilanjutkan dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan dengan praktik negara-negara Islam sampai dijatuhknanya kerajaan Turkey pada tahun 1924. Pada saat pemikiran John Lock, Rousseau, Marx, Negara-negara Barat sedang melakukan penjajahan. Kapitalisme yang menurut Marx akan hilang diganti sosialisme, ternyata Kapitalisme dapat tetap hidup dengan kolonialisme atau penjajahan.

Setelah Perang Dunia berakhir pada 1945, negara-negara dunia ketiga merebut kemerdekaannya termasuk terbentuknya negara baru Republik Indonesia. Ben Anderson menyebut negara baru Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai *imagine community* (Ben Anderson, 1983), sebagai bangsa bentukan imaginasi, kumpulan dari kesultanan-2 dan kerajaan2 Islam di Nusantara. Dengan demikian pandangan bahwa negara Republik Indonesia dijajah VOC dan Imperalisme Belanda serta Jepang selama 350 tahun. Yang sesungguhnya dijajah adalah kesultanan-2 Islam dari Aceh sampai Tidore. Dengan memperhatikan juga beberapa kerajaan Hindu di Bali. Dengan demikian, sesungguhnya kerajaan-2 Islam dan Kesultanan Islam ini sebagai pemilik saham sah dalam konstruksi dengan Republik Indonesia.

Tulisan ini tidak ditujukan untuk membahas detail tentang perkembangan kontestasi pemikiran Barat (Roman Catholic) dan Islam tersebut. Namun, pemahaman tersebut dapat digunakan untuk memberikan perspektif dari perkembangan kepolitikan kekinian. Dalam khasanah Ilmu Politik Barat perspektif yang digunakan untuk menganalisa kepolitikan di negara-negara Islam selalu menghadirkan konsep Islam hanya dibatasi sebagai agama yang berhubungan dengan bahasan di luar politik. Pada saat Islam menjadi bagian penting dari pemikiran Politik, tingkah laku politik sampai secara teknis menjadi dasar dalam menentukan kepemimpinan dalam pemilu berdasarkan agama langsung mendapatkan konotasi negatif. Pada era penjajahan Belanda, pemisahan antara agama untuk ibadah dipisahkan dengan untuk dasar dalam tingkah laku politik menjadi kebijakan Belanda. Hal itu yang kita kenal dengan kebijakan yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronye. Kebijakan ini terus berlangsung sampai kepolitikan kekinian. Jargon Politik seperti tidak boleh membawa agama dalam politik diyakini sebagai sesuatu keniscayaan. Padahal dalam khasanah pemikiran Politik Islam sangat sempurna antara konsep dan contoh praktiknya sejak era Rasulullah. Dengan perspektif itulah dicoba untuk difikirkan direnungkan untuk terus dipelajari bagaimana pemikiran Islam yang pasti dan tetap memiliki kesinambungan dan signifikansi dalam kehidupan politik sampai pada berakhirnya zaman nanti.

Kemampuan menggunakan pemikiran politik Islam dalam kehidupan kepolitikan tentu membawa tantangan. Karena pemikiran politik Islam memiliki nilai-2 luhur, keberadaban, kejujuran, keadilan dan dapat menjadi dasar sikap revolusioner dalam menghadapi ketidakadilan, kedloliman dan kerakusan para regime penguasa. Perlawanan terhadap penguasa yang dlolim dan lalim mendapat tempat yang tinggi dalam perjuangan melalui konsep jihad. Dalam budaya tradisi melayu dikenal dengan traditional virtue konsep raja

adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Suatu ajaran dalam konteks kewarganegaraan ketaatan hanya kepada raja yang adil. Dasar pemikiran politik inilah yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan ideologi liberalisme yang lebih berbicara tentang akumulasi kapital, penguasaan korporasi, penguasaan negara dengan penguasa bonekanya, dan penguasaan lembaga-2 keuangan internasional untuk memuluskan proyeknya di seluruh dunia.

2.3. Islam dan Budaya dalam Konstruksi Negara Indonesia

Dalam kajian studi budaya politik, studi yang paling banyak dikutip, diyakini bahkan sepertinya sebagai teori yang statis adalah studi Geerzt tentang *the religioun of Java*. Paling tidak klasifikasi masyarakat Jawa terdiri dari Santri, Priyayi dan abangan sebagai suatu yang statis yang diyakini bahkan sebagai agama. Apalagi judulnya adalah *Religioun of Jawa* sepertinya memberikan impressi sebagai agama dalam arti yang khusus. Studi ini Dalam issue kepemimpinan negara selalu sepertinya menjadi tempat bagi mereka yang masuk sebagai Abangan atau Priyayi. Sementara para kelompok santri dianggap sebagai kelompok yang selalu berada di dalam oposisi. Studi tentang struktur kuasa dalam konstruksi negara, pemimpin negara Presiden Indonesia yang sangat kuat menggunakan budaya Jawa adalah Soeharto. Pemahaman Presiden Soeharto sangatlah kuat dalam mengatur dan memhami buaday Jawa. Terutama sejak awal kekuasaannya sampai akhir 1980an dengan perubahan Soeharto lebih dekat dengan kalangan Islam dengan dibentuknya ICMI. Sayangnya, sebelum Soeharto mengimplementasikan koalisi antara kekuasaannya dengan adanya *Islamic resurgence.*

Dalam memahami tradisi budaya jawa dalam politik Indonesia, issue yang dapat dilihat berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan dan keadilan. Kelompok santri the enterprenereural Muslims, baik yang tradisional maupun modern); sementara kelompok priyayi adalah mereka yang berada dalam elit birokrasi terutama yang berhubungan dengan birokrasi di era colonial yang sering dianggap juga muslim nominal atau sering disebut sebagai Muslim KTP. Sementara itu kelompok abangan adalah mereka yang dianggap Muslim KTP. Dalam varian budaya Jawa tentu memiliki struktur hierarkhi. Kelompok yang disebut sebagai kategori Jawa Alus, sebagai symbol kerukunan, harmoni keselarasan, dan keseimbangan. Sebenarnya konsep2 budaya tersebut memiliki makna yang mendalam. Menjadi Jawa tidak hanya dalam arti ethnicity akan tetapi merupakan symbol nilai peradaban. Bahkan dalam ekspresi seringkali menggunakan ekspresi "ora jawa" yang merujuk pada orang jawa ataupun bukan jawa yang tidak mengikuti nilai ke-jawa-an tersebut. Soekarno dan Soeharto pada dasarnya menunjukkan model mundur dari jabatan presiden secara jawa, yaitu Sekarno dengan Surat 11 Maret nya dan Soeharto dengan lengser keprabon.

Dibandingkan dengan Outer island atau luar jawa, budaya dianggap lebih cosmopolitan, *cosmmersialised, homogeneously Islamic*. Dalam tradisi Jawa lebih memperhatikan struktur dan kelembagaan kekuasaan.

Sepertinya kebijakan model Snouck Horgronye di era kolonialisme Belanda masih dijalankan oleh penguasa setelah kemerdekaan. Politik peminggirkan ummat Islam terlihat dalam pemaknaan sejarah Islam dalam bangunan negara Republik Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan global politik dewasa ini setelah jatuhnya negara-negara komunis. Kekuatan politik Islam harus disadari bahwa sejarah Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan kumpulan dari kesultanan-2 Islam dari Aceh sampai Tidore. Dalam sejarah perjuangan pembentukan negara Republik Indonesia, dari konstribusi para Ulama' dalam merebut kemerdekaan juga konstribusi harta kekayaan dari kerajaan-2 tersebut tidak dapat dihitung. Bahkan secara politik menyerahkan kekuasaannya, kedaulatannya baik politik

maupun wilayahnya dalam membangun negara baru Republik Indonesia. Kesultanan-kesultanan Islam di seluruh wilayah Indonesia itulah sesungguhnya "pemilik sah" negara Indonesia (ada beberapa kerajaan Hindu di Bali). Mereka bersetuju menyerahkan kedaulatan politik dan kedaulatan wilayahnya dalam perjanjian baru membangun negara Republik Indonesia.

Perjanjian itu diwujudkan dalam Pembukaan UUD 1945. Proses pembahasan pembentukan negara Republik Indonesia dalam perdebatan-2 di BPUPK, di dalam Jakarta Charter serta PPKI, menuju kemerdekaan politik 17 Agustus 1945. Kemudian dilanjutkan dengan persetujuan UUD 1945 sebagai dokumen penting dalam konstruksi negara Republik Indonesia. Ada yang menarik dalam kajian sejarah hubungan Islam dan Negara Republik Indonesia ini. Dalam Sila pertama Pancasila, ada tujuh kata yang dihilangkan, yaitu kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluknya. Ada pula pasal dalam substansi UUD 1945 tersebut adalah Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dokumen tersebut merupakan *a noble accomplishment, a great promise and a demanding set of goals*, dari konstruksi bangsa dan negara Republik Indonesia (Chusnul Mar'iyah, 2021). Dokumen tersebut merupakan pernyataan tentang filsafah politik dan sosial serta merupakan kesepakatan para elit negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan RI 77 tahun (pada tahun 2022), bagaimana tujuan bernegara *a noble accomplishment, a great promise and a demanding set of goals* tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sejauh mana menjadi rujukan dalam kepolitikan di Indonesia? Untuk mengingatkan kembali Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

> "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
>
> "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."
>
> "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
>
> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pernyataan pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan prinsip dasar bagi bangsa dan warga negara Indonesia. Di samping itu juga harus menjadi prinsip dasar dalam tradisi politik Indonesia, karena dokumen tersebut merupakan perjanjian berbangsa dan bernegara yang merupakan transformasi dari negara yang dijajah kepada *an organized people, the Indonesian people* yang merdeka. Dalam perkembangan politik dewasa ini terlihat bahwa

resonansi tentang perjanjian/pernyataan dalam dokumen pembukaan UUD 1945 sebagai kesadaran prinsip tradisi politik tidak menjadi perhatian penting dalam tingkah laku politik para elit bangsa dan masyarakat warga secara luas. Dengan demikian diperlukan gerakan untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar politik dalam pembukaan tersebut sebagai perjanjian penting.

Pembukaan UUD 1945 adalah perjanjian dari para pendiri bangsa yang membangun orang-orang Indonesia, para kesultanan-kesultanan yang berada di wilayah Indonesia, sebagai bangsa baru bangsa Indonesia yang terorganisir dalam kerangka negara Indonesia yang disatukan dalam visi moral dan kepentingan bersama. Kalau meminjam terminologi yang dikemukakan oleh Dien Sjamsuddin Indonesia merupakan *darul syahadah* atau negara persaksian atau negara perjanjian, bukan darul Islam (Dien Sjamsuddin, 2011). Apa makna utama sebagai *Darul-Syahadah?* Perjanjian atau persaksian merupakamn *morally-informed agreement.* Perjanjian atau pakta tersebut dibangun oleh para pendiri bangsa secara sukarela, walaupun tidak dapat dikatakan memiliki status yang sama namun dapat dikatakan sebagai dasar politik untuk melakukan tindakan, kewajiban untuk mencapai cita- cita berbangsa dan bernegara. Dalam perjanjian tersebut melibatkan *consenting, promising and agreeing* untuk membangun sosial dan politik bangsa dan negara Indonesia.

Namun, pada saat yang sama kompetisi diskursus tentang negara persaksian bisa juga kemudian ditarik ke model negara Madinah. Negara Pancasila pada dasarnya adalah negara Islam ala negara perjanjian Madinah di era kontemporer dewasa ini. Sayangnya ketakutan politik dalam mendiskusikan negara Islam sangatlah besar. Prinsip utama dalam pemikiran Islam adalah tidak memisahkan antara state and Church (negara/politik dan gereja/agama) seperti dalam pemikiran politik Barat. Dalam pemikiran politik Islam politik adalah bagian dari ibadah/agama. Untuk dapat melaksanakan Syari'at agama dibutuhkan negara. Pilihannya dalam bentuk negara Islam atau nilai-nilai Islami yang menjadi rujukan dalam berbangsa dan bernegara.

2.4. Negara dan Agama: Politik Identitas

Pada pertemuan workshop internasional yang membahas issue 411 dan 212, sebagian besar adalah akademisi dan aktivis NGO, baik dari dalam dan luar negeri. Pandangan tentang 411 dan 212 cenderung dengan menggunakan tone prejudis negative terhadap gerakan tersebut, walau tidak ada yang menyaksikan langsung demonstrasi di Monas. Apalagi melihatnya sebagai model dari demokrasi dan Islam terutama dalam kajian civil Islam. Demonstrasi adalah hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Sayangnya dalam perjalanan demokrasi di Indonesia setiap demonstrasi yang berseberangan dengan regime yang berkuasa selalu mendapatkan tuduhan "ada yang menunggangi". Dalam arena politik terbuka seperti adanya demonstrasi sangat biasa bahwa akan muncul berbagai kekuatan politik yang memanfaatkan arena tersebut. Namun, civil Islam 411 dan 212 menjadi issue yang fenomenal dalam kepolitikan di Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan kepolitikan global setelah berakhirnya perang dingin antara former USSR/Timur/Komunis dengan Barat. Kemudian diikuti dengan gelombang ketika demokratisasi yang gerakan tersebut di Indonesia dikenal dengan keterbukaan politik. Global politik tersebut tidak dapat dipisahkan dengan 9/11 yang menghasilkan kebijakan war on terror dari Washington administration policy kemudian diikuti dengan counter violence extremism dengan kebijakan deradikalisasi. Kesemuanya berhubungan dengan kepolitikan Islam, terutama fenomena Islamophobia yang semakin mengkristal dalam kepolitikan global maupun domestic di Indonesia. Tulisan pendek ini akan melihat secara singkat tentang fenomena politik pasca 411 dan 212 di Indonesia. Bagaimana menjelaskan fenomena tersebut? Terutama bagaimana menjelaskan

hubungan antara negara atau politik dan agama dalam kepolitikan Indonesia dewasa ini? Sejauh mana sejarah politik *nation building* atau konstruksi negara Republik Indonesia?

Fenomena tersebut di atas, muncul anggapan tentang radikalisme yang menjadi jargon politik setelah terorisme, atau bahkan sering disandingkan. Oleh karena itu menarik untuk lebih lanjut menjelaskan preferensi identitas politik Islam dalam khasanah pembahasan tentang demokrasi terutama yang berhubungan dengan *civil and political liberties*. Terminologi yang dikenal dalam pembahasan Islam di antaranya adalah Political Islam dan Fundamentalisme Islam. Kedua terminologi dalam khasanah keilmuan memiliki berbagai persoalan konseptual. Kegiatan politik (Political Islam) yang menggunakan identitas agama adalah merupakan preferensi politik. Gerakan-2 sosial politik yang didasarkan agama tidak hanya pada agama Islam, gerakan-2 sosial juga ada yang dilatari oleh revivalist identitas Kristen, Yahudi dan Hindu. Sesungguhnya dalam sejarah pemikiran politik barat gerakan fundamentalisme justru berakar dari pengalaman gerakan Protestanisme. Gerakan protestanisme "*...whose principal theological premise is that the Bible is the true word of God and should be understood literally. In this regard, it makes no sense to speak of fundamentalist Islam because one of the core elements of the creed of all believing Muslims is that Qur'an is litelar (hence absolutely true) word of God as revealed to his Prophet Muhammad trough the intermediacy of the angel Gabriel....the devine origin of the text has never been a topic of legitimate debate"* (Joel Beinin and Joe Stork, 1997). Dalam kepolitikan di Indonesia justru seringkali fundamentalisme dengan konotasi negated disematkan pada hanya kelompok Islam. Dalam perkembangannya segala terminologi yang memiliki konotasi negative bermunculan disematkan kepada kelompok Islam. Di antaranya terminologi "teroris, radikal, mengganti Pancasila, intoleran". Memahami dan menjelaskan dengan perspektif demokrasi dalam pandangan Ilmu Politik menjadi sebuah keharusan.

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Namun, di era ini secara terbuka terjadi Islamophobia yang luar biasa. Bahkan hal tersebut juga melanda para scholars dengan argumentasi yang sepertinya masuk di akal dan sangat rasional, tanpa memahami apa sesungguhnya yang terjadi di balik kondisi tersebut. Kenapa Islam menjadi musuh global setelah glasnot dan perestroika terjadi di USSR. Setelah regime komunis federasi Rusia jatuh, maka Islam menjadi musuh berikutnya. Hal itu diperkuat dengan argumen Huntington dalam bukunya *the Class of Civilisation* (Samuel Huntington, 2002). Pandangan Huntington - sebagai scholars dari Harvard University- tersebut lebih menekankan untuk *to serve United States foreign policy*. Dengan demikian, analisis para scholars di USA pun mendapatkan tempat yang luar biasa untuk kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pada saat yang sama bagaimana media Barat melihat Islam, maka tulisan Edward Said, seorang Palestina Kristen yang secara jujur menulis bagaimana Islam di mata media Barat dalam bukunya *Covering Islam*, pada tahun 1981 (Edward Said, 1997). Dalam hal ini Said melihat bagaimana media Barat melihat realitas di dunia muslim setelah revolusi Iran 1979. Said mempertanyakan obyektivitas dari media dan mendiskusikan hubungan antara pengetahuan, kekuasaan dan media Barat.

Namun, sejauh mana karya-2 tersebut melihat secara obyektif kepada Islam dan ummatnya ataukah menjadi propaganda untuk meminggirkan kekuatan Islam. Setelah 9/11 yang terjadi pada tahun 2001, Washington Administration mempropagandakan *war on terror*. Bagi negara-2 yang tidak melakukan kebijakan yang sama untuk memerangi teror dianggap teroris itu sendiri. Kebijakan tersebut berubah saat pemerintahan Obama dengan pendekatan yang lunak yaitu *counter violence extrimism* dengan operasionalisasi pendekatan dalam program2 seperti deradikalisasi. Sayangnya di Indonesia deradikalisasi hanya ditujukan kepada kelompok Islam saja. Kembali lagi *global politic* mempengaruhi kepolitkan di Indonesia. Bagaimana kita membaca kepolitikan tersebut? Dapatkah kita

merebut tafsir *political Islam* seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pemerintahan dalam model perjanjian Madinah? Sejauh mana kita bisa lebih jujur dalam melihat fenomena Islam dan Politik dewasa ini terutama dalam Pemilu 2014 dan pilkada DKI 2017 serta pemilu serentak 2019 yang baru lalu? Bagaimana membangun demokrasi dengan tidak terjebak pada pandangan politik yang mengarah pada Islamophobia? Di samping itu juga adanya narasi yang salah terhadap diskursus tentang Khilafah?

Dalam konsep Ilmu Politik Khilafah dapat diartikan sebagai kepemimpinan, dapat pula diartikan sebagai tata kelola pemerintahan. Dengan konsep tersebut maka dapat dijelaskan adanya kontestasi tentang Khilafah. Misalnya Khilafah Kristen Protestan (model demokrasi Amerika Serikat dan di Eropa Barat); Khilafah Katholik (model pemerintahan Vatikan); Khilafah Konfusionisme (ala negara China) dan Khilafah Islam (kembali kepada sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah). Apa yang dimaksud dengan pandangan Khilafah Protestan adalah adanya pandangan tentang pemisahan antara negara dan gereja atau dengan kata lain pemisahan antara politik agama. Sementara dalam pandangan Khialafah Katholik berhubungan dengan konsep kewarganegaraan. Menurut (mantan suster katholik) menjelaskan bahwa warga negara katholik memiliki dua kewarganegaraan yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Kewarganegaraan (citizen) adalah unsur utama dalam suatu negara. Berbagai model khilafah tersebut perlu dibahas sebagai pengetahuan dasar agar kita tidak dengan mudah memberikan konotasi negatif atau dengan menggunakan tone pejoratif terhadap diskursus Khilafah Islam akhir-akhir ini. Kontestasi konsep menjadi sangat berguna bagi pengembangan pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Politik perlu dibahas dengan Ilmu untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Hal itu dapat diduga karena adanya ketakutan di kalangan elit politik dengan munculnya kesadaran kelompok Islam – politik ataupun civil Islam- yang secara ekonomi dan politik termarjinalkan. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia namun mayoritas warga muslimnya miskin. Di samping itu negara Indonesia adalah negara yang kaya secara sumber daya alam. Sementara itu regime yang berkuasa masih melanjutkan kebijakan politik model Snouck Hurgronye pada zaman penjajahan Belanda yang memisahkan antara agama dan negara. Kebijakan itu pada dasarnya memberikan ummat Islam membangun masjid namun melarang ummat Islam berpolitik. Kenapa? Karena dengan kesadaran politik yang dimiliki oleh ummat Islam akan mengganggu kepentingan kaum penjajah baru, kaum kapitalis yang telah menikmati keuntungan material melalui kekuasaan. Issue Islamophobia yang lain adalah issue khilafah. Pemahaman khilafah yang sempit dan dianggap memecah belah NKRI menunjukkan ketidakfahaman kita dalam konsep negara dan politik. Politik identitas adalah suatu hal yang biasa yang masuk dalam kategori Sosiologis. Apalagi identitas seseorang yang melekat dalam diri seseorang sebagai HAM. Pilihan berdasarkan prinsip agama, berdasarkan kelompok sosial, umur, gender, wilayah urban/rural adalah preferensi politik yang biasa saja. Dalam demokrasi preferensi politik tersebut dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang di Indonesia.

Issue politik identitas dan pertarungan ide memojokkan identitas Islam menguat pada Pilkada DKI 2012. Namun seringkali para sarjana dan juga pengamat sosial-politik berpendapat bahwa politik identitas –khususnya Islamisme- telah berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Islamisme yang diyakini disini mengambil pandangan Asef Bayat (1996) dan Bassam Tibi (2016). Bayat menjelaskan bahwa Islamisme sebagai sebuah ideologi dan gerakan yang berusaha membentuk semacam 'tatanan Islam', dalam bentuk negara agama, hukum syariah, maupun kode moral. Kemudian dielaborasi ke dalam ideologi Islamisme yang memiliki ciri-2 sebagai berikut. "Pertama, interpretasi atas Islam sebagai *nizam* Islami dalam arti Islam merupakan bagian integral negara. Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Kedua, Yahudi sebagai musuh utama yang akan menghancurkan umat

Islam. Karena umat Yahudi memiliki cita-cita akan menciptakan "tatanan dunia Yahudi," atau sering disebut sebagai tata dunia baru. Keempat, evolusi jihad tradisional menuju jihadisme. Kelima, Syariatisasi negara. Negara seharusnya menjadikan hukum Islam sebagai hukum postitif. Keenam, kelompok Islamis sangat terobsesi untuk mengajukan soal kemurnian sebagai klaim atas autentisitas." Sayangnya pandangan ini tidak dipertemukan dengan pandangan mainstream tentang pemikiran politik Barat alias pandangan non Islam atau kajian2 dari akar sejarah Roman Kristendom, yang mendominasi kepolitikan global.

Pendapat yang monolitik bahwa Islam tidak boleh dibawa ke ranah public negara tersebut menjadi pendapat utama yang dikutip di media-media sosial, opini populer ilmiah dan dituliskan pada jurnal-jurnal-jurnal ilmiah. Hal itu mendapatkan momentum politik saat pilkada DKI pada tahun 2017. Argumentasi tersebut digunakan untuk mendukung gubernur non-Islam. Padahal sebagai petahana media meanstream telah mencitrakan sebagai sosok yang berprestasi dan mampu membenahi Jakarta. Media-2 terssebut dimiliki oleh para oligarkhi ekonomi. Sejak itu sentiment Islamophobia sangat menguat Bahkan di Palembang, dalam diskusi penulis disanggah oleh seorang Mahasiswa dari perguruan Islam pun dengan sangat percaya diri bahwa politik identitas Islam adalah suatu kesalahan (Kompas.com, "Politik Identitas Mengubur Rasionalitas Pemilih", Mei 2017). Telah banyak pendapat yang menyatakan bahwa politik identitas semakin menguat pasca gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka yang berpandangan anti politik identitas Islam menganggap bahwa radikalisme Islamisme berperan. Bahkan pernyataan2 tersebut juga dijustifikasi melalui beberapa hasil survey bahwa kekalahan BTP disebabkan oleh sentimen Islamisme yang menguat dan menganggap bahwa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta adalah politisasi agama. Padahal telah terjadi kartel beberapa lembaga survey menyajikan hasil surveynya dimenangkan oleh BTP. Demikian pula pemberitaan oleh media asing yang menuliskan pandangan senada seperti: theguardian.com yang membuat judul *Muslim candidate beats Christian in divisive Jakarta governor vote (New York times, "Jakarta Election Ahok-Anies Baswedan", April 2017);* nytimes.com mengangkat judul *Jakarta Governor Concedes Defeat in Religiously Tinged Election (The Guardian, "Divisive Campaign for Jakarta Governor Sees Muslim Candidate Elected", April 2017);* usatoday.com memberitakan *Muslim voters oust Jakarta's Christian governor (USA Today, "Election Jakarta Indonesia Governor Anies Baswedan", April 2017)* Konstestasi juga terjadi di media sosial, antar para *netizen*, bahkan kelompok yang dikenal sebagai buzzer, terutama mereka para pendukung pasangan petahana yang merasa kekalahannya disebabkan oleh politisasi agama, kemudian berpendapatkan politik harus dipisahkan dengan agama dalam konteks ini adalah identitas politik Islam. Pendapat- pendapat tersebut didukung oleh mainstream media, yang intinya menganggap bahwa politik identitas berdasarkan ras dan agama "memenangkan" pilkada DKI Jakarta 2017, politik identitas kemudian dianggap menghancurkan demokrasi dalam Pilkada DKI 2017. Apa salahnya politik identitas Islam?

Pandangan Islamophobia meyakini pemilu yang dianggap demokratis kalau hanya berdasarkan pada pemilu yang rasional. Pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihannya sendiri berdasarkan kriteria yang rasional seperti visi, misi, prestasi dan juga rekam jejak yang baik dari seorang kandidat. Pandangan ini memiliki *tone negative* terhadap pemilih yang menentukan pilihannya karena agama Islam. Dalam model pemikiran dan praktik kepolitikan di negara-negara demokratis, pemilih dapat dikategorikan menjadi empat model. Pertama pertama model psikologis yaitu keterikatan pemilih dengan kandidat. Kedua, model sosiologis yang di dalamnya adalah memilih karena gender, etnik, umur, wilayah urban/rural, tingkat sosial ekonomi, dan agama. Model ketiga adalah rational choice memilih karena kebijakan visi dan misi tersebut. Model keempat adalah ideologis. Memilih karena berbagai alasan atau kemungkinan dari alasan2 yang bersinggungan

tersebut adalah sah dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian memilih karena alasan keyakinan agama adalah sah, tidak akan menghancurkan demokrasi, bahkan menjadi kunci bangunan kepolitikan yang berkeadilan dan bermartabat dan penuh dengan barokah Allah. Hal itu dalam kerangka pertanggung jawaban kepada yang menciptakan dan diharapkan mereka yang berpegang pada politik identitas Islam akan takut pada Allah dan dapat jujur dalam berkompetisi.

2.5. Menghadirkan Pemilu Halal Bukan Pemilu Bencana

Demokrasi memiliki akar sejarah negara modern. Setelah merdeka dari kolonialisme dan membentuk negara baru Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, pada dasarnya merupakan fondasi demokrasi negara modern. Konstruksi bangsa Indonesia secara kultural sangatlah beragam baik berdasarkan bahasa, kelompok etnik, kelompok agama. Indonesia memiliki kekuatan dari berbagai pebedaan tersebut dengan sejarah perjuangan penjajahan yang dilakukan oleh para tokoh2 nasionalis, oleh para kerajaan, kesultanan Islam yang sudah ada sejak zaman dulu selalu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Konstruksi bangsa yang plural ini selain menjadi kekuatan bangsa namun juga menyebabkan banyaknya issue yang muncul dalam perkembangan politik kekinian. Ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, padatnya penduduk di Jawa dan kurang padatnya penduduk di luar Jawa menyebabkan konstruksi demokrasi perwakilan berbeda seperti jumlah representasi anggota DPR yang lebih banyak berasal dari provinsi-2 di Pulau Jawa. Hal itu disebabkan karena DPR merupakan wakil yang mewakili orang/penduduk. Lebih jauh lagi keberagaman ini juga dapat menjadi sumber pertentangan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Namun agak berbeda dengan pengalaman di berbagai negara lain, justru dalam konteks ekonomi di Indonesia kelompok minoritas menguasai kekayaan, tanah dan sumber daya alam di Indonesia ini. Kebhinekaan menjadi jargon politik untuk meminggirkan kelompok tertentu dalam kepolitikan kekinian. Sejarah politik post kemerdekaan era Soekarno, era Soeharto pada masa Orde Baru dan era reformasi saat ini membutuhkan warga negara aktif dan sistem politik yang partisipatif.

Civil society dan tradisi demokrasi berkembang sangat lambat. Setelah era Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya dilanjutkan dengan era Soeharto, peran *civil society up and down*. Regime lebih memanfaatkan civil society sebagai kelompok pendukung sebagai kelompok warga yang aktif. Peran ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU misalnya, sering dimanfaatkan untuk cap legitimasi dari regime yang berkuasa. Pada awal perubahan politik awal Soeharto, ada harapan untuk perubahan bagi Islam Politik. Namun, pada pemilu 1971, fusi partai politik yang menjadi bagian dalam bangunan sistem politik Orde Baru menempatkan partai politik Islam dalam satu kotak Partai Persatuan Pembangunan. Baru setelah reformasi, muncul pengelompokan Islam politik melalui Partai Politik, sejak pemilu 1999 sampai pada pemilu 2019 yang baru lalu. Sejauh mana kekuatan politik Islam dalam perjalanan kepolitikan di Indonesia, di satu sisi menjadi kekuatan politik yang tidak dapat dikesampingkan. Kekuatan politik Islam selalu berhadapan dengan kekuatan politik regime yang berkuasa. Sayangnya memang power struggle melalui pemilu setelah pemilu 2004, diwarnai dengan issue *the liberal machiavelian election*. Yang dimaksudkan dengan konsep tersebut adalah adanya pemilu terbuka namun penuh dengan tipu muslihat. Di antaranya, *money politic*, penggunaan apparatus negara untuk pemenangan pemilu bagi kekuatan politik tertentu. Issue pemilu yang jujur, atau konsep pemilu halal menjadi tantangan bagi negara Republik Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas muslim ini.

Dalam perkembangan berikutnya issue politik kontemporer yang lain saat ini adalah fenomena gerakan 411 dan 212. Issue tersebut menjadi menarik untuk pijakan dalam melihat

kepolitikan demokrasi di Indonesia. Wajah kepolitikan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wajah *political Islam.* Bagaimana kita dapat membangun nasionalisme di era globalisasi saat ini? Sejauh mana politik dan ekonomi global mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia? Sejauh mana pertanyaan-2 seperti issue keterwakilan politik, otonomi daerah, relasi kuasa antara eksekutif- legislatif-yudikatif, bangunan kelembagaan yang masuk dalam kategori *state auxceleray instititutions* (seperti banyaknya lembaga-2 negara), eksploitasi kekayaan alam, masalah kurikulum dalam pendidikan, kesehatan, perempuan, masalah kekerasan ekstrim, ketidak adilan. Issue pasca pemilu 2019 yang bersamaan dengan Pandemi Covid-19 dapat menjadi ukuran bagaimana tantangan demokrasi di Indonesia saat ini dan di masa datang. Proses pembuatan UU Covid 19; RUU HIP/BPIP; dan issue UU Omnibus. Ketiga pembahasan proses RUU menunjukkan secara sempurna hubungan antara oligarkhi politik dan oligarkhi ekonomi dalam proses kepolitikan di Indonesia.

Regime penguasa baik eksekutif dan legislatif telah mendemonstrasikan model kepolitikan yang semakin jauh dari harapan kehidupan politik yang demokratis. Suara-2 rakyat yang berseberangan dengan penguasa harus dihadapi dengan penahanan dan pemborgolan yang pertontonkan di ruang publik. Menjadi issue penting yang menjadi tantangan bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Jawaban dari berbagai issue itu tidak mudah.

Kekuatan politik Islam (pos 411 dan 212) menjadi alternatif dalam mempertahankan kedaulatan dan eksistensi bangsa saat ini. Kontestasi baik di tingkatan bangunan narasi politik yang lebih adil, maupun di tingkat gerakan protes menunjukkan wajah kepolitikan yang berbeda dewasa ini.

Sebagai negara yang memiliki warga negara muslim terbesar di Indonesia, kebijakan-kebijakan regime yang berkuasa justru seringkali meminggirkan kelompok Islam ini. Padahal sesungguhnya Islam dapat menjadi faktor kuat untuk membangun integrasi bangsa. Memahami kelompok Islam akan menjadikan bangunan kebangsaan menjadi kuat.

Pada saat yang sama, di era globalisasi ini, Indonesia tantangan Islam dan politik di antaranya adalah kebijakan *war on terror, deradikalisai* dan proses demokratisasi. Dalam posisi global persoalan yang muncul seringkali berhubungan dengan neo-kolonialisme. Penguasaan sumber daya alam yang ada tidak untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia seperti dalam Sila Kelima Pancasila. Sebagai negara dengan warga negara muslim terbesar di dunia, negara yang kaya akan kekayaan alamnya, negara besar wilayahnya dan besar pula jumlah penduduknya. Indonesia menjadi perebutan kekuatan global. Penguasaan kekayaan di kelompok kecil karena kebijakan sejak zaman Belanda dan diteruskan oleh Soekarno dan Suharto berdampak pada politik kekinian. Saat regime Suharto tidak memberikan ruang untuk partisipasi politik pada kelompok Chinese, namun memberi ruang yang luas dalam membangun kekuatan ekonomi dengan bangunan kolusi dan nepotisme. Alhasil saat ini politik sangat terbuka, sayangnya lebih ke arah liberal dengan kekuatan ekonomi. Para oligarkhi ekonomi ini terlibat langsung dalam kontestasi politik, seringkali dianggap sebagai *unholy alliaences.* Pemilu lebih banyak diwarnai dengan *money politic.* Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dengan model transaksi *buying vote* dibandingkan dengan konstestasi secara bebas dan jujur.

Di samping itu juga kekuatan media dikuasai secara bebas (tidak ada cross media ownership policy), sebagai model kampanye yang tidak seimbang. Fungsi media sebagai pencerdasan masyarakat dihadapkan dengan kepentingan pemodal. Di era digital penggunaan media sosial dalam kampanye tidak dapat dibatasi. Friedman menyatakan bahwa kombinasi kekuatan ekonomi dan politik di satu tangan akan menjadikan resep hadirnya tirani dengan mudah. (lihat Milton Friendman). Hegemoni nasional antara oligarkhi politik dan oligarkhi

ekonomi serta oligarkhi sosial menjadi sangat lengkap dalam model pemilu liberal dan mengarah pada bencana. Pengertiannya adalah segelintir elit menguaai ekonomi, politik, sosial.

Bagaimana dengan global power? Data-data penguasaan ekonomi dalam dua ratus tahun terakhir ini menjadikan liberalisme ekonomi dianggap satu-2 nya pilihan ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat. Data-data di Indonesia sendiri 72% penguasaan tanah oleh hanya 1 % penduduk Indonesia (Konsorium Agraria, 2014), kekayaan Indonesia 49 % dikuasai oleh satu persen warga negara (lihat buku Paradox Indonesia). Padahal penjajahan paling tidak kerajaan-2 Islam dari Sabang sampai Tidore telah dijajah selama 350 tahunan, tidak menghasilkan peradaban yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat. Penjajahan adalah pengembangan dari politik kapitalisme.

Dalam konteks membangun kompetisi antar kekuatan politik terutama partai politik harus menjadi perhatian bangsa ini. Partai politik adalah lembaga yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Namun, partai politik sering dibenci, dikoruptorkan, membangun dinasti, tidak mampu bekerja dsb. Persoalannya pertama, masalah demokrasi internal partai, dalam teori oligarkhi organisasi, kekuatan ketua umum masih menentukan, demokrasi suksesi kepengurusan partai masih sangat diwarnai oleh money politics, regime yang berkuasa seringkali anti pada kompetisi dengan strategi *devide et impera* kepengurusan partai politik. Partai politik sendiri masih sangat kuat tergantung pada para "bandar politik" yang membiayai partai politik tersebut, sehingga partai politik terjebak pada *rent-seekers* pencari rente. Fungsi partai politik untuk rekrutmen jabatan2 politik, pendidikan politik, komunikasi politik dan yang sering kurang mendapatkan perhatian adalah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Partai politik akhirnya merekrut mereka yang memiliki kapital. Dengan demikian partai politik menjadi pragmatis untuk dapat berkuasa (*power struggle/power over bukan power to do*). Partai politik hanya dijadikan kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan.

Prinsip pemilu adalah *free and fair*. Model pemilu 2004 harusnya menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Pertama kali dalam sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada saat yang sama juga pemilu dengan sistem terbuka terbatas murni. Pertama kali pula wakil daerah dipilih secara langsung, termasuk juga Pilkada langsung. Setelah 5 kali pemilu di era reformasi ini (1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019) diperlukan evaluasi sistem pemilu yang lebih komprehensif. Baik yang berhubungan dengan politik administrasi penyelenggaraan pemilu maupun terutama yang berhubungan dengan pilkada langsung di tingkat kabupaten/kota. Pada dasarnya penulis meyakini bahwa pilkada di tingkat kabupaten/kota tidak diperlukan, karena konsekwensi bangsa menjadi sangat fragmented di 524 Kabupaten/Kota. Sebaliknya diperlukan penguatan lembaga DPRD untuk memilih kepala daerahnya. Sementara itu untuk pelaksanaan pilkada di tingkat provinsi masih dapat ditolerir dengan pelaksanaan pemilu langsung di 34 provinsi. Pemilu *popular vote* tidak memberikan garansi calon yang memiliki kapabilitas dan kepemimpinan dapat memenangkan kompetisi tersebut. Oleh karena itu peran partai politik harus dioptimalkan dalam bidang rekrutmen calon-2 pejabat politik.

Ada banyak terminologi dalam membaca penyelenggaraan pemilu. Dalam Ilmu Politik dikenal *the liberal Mahiavelian election*, yaitu pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Misalnya maraknya kejahatan politik uang, dengan cara menyuap pemilih, memberi pemilih sembako, kerudung, yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Ada juga model kong-kali-kong antara peserta pemilu dengan penyelenggara di setiap tingkatan melalui model diantaranya suara diperjual belikan, memindah-mindahkan suara, DPT banyak pemilih "hantu", sengketa pemilu yang tidak dielesaikan dengan adil, ketidakjelasan

meninggalnya para pekerja pemilu yang cukup banyak seperti di Pemilu 2019. Selain itu juga bagi petahana yang biasa dilakukan adalah penggunaan fasilitas negara, APBN dan APBD untuk kepentingan pemenangan dirinya sendiri atau kandidat tertentu. Di samping penggunaan apparatus negara secara massif dan terstruktur digunakan untuk kemenangan petahana dan koalisinya. Dalam model kecurangan pemilu dikenal terminologi *fabricated election*, pemilu yang sepertinya demokratis tapi sudah terjadi pelanggaran bahkan kejahatan pemilu yang luar biasa.

Pelanggaran pemilu tersebut biasanya masuk kategori pelanggaran yang mudah dideteksi, namun banyak pula pelanggaran pemilu yang cukup sulit dibuktikan. Ada pula pelanggaran yang sangat sulit dijelaskan dan ditangkap. Pelanggaran TSM yaitu bagaimana politik pemilu sudah diatur oleh para oligarkhi ekonomi atau disebut para bandar. Kong-kali- kong antara oligarkhi politik, yaitu para elit politisi dari partai politik dengan para oligarkhi ekonomi yaitu para bandar (pebisnis) dapat mempengaruhi hasil pemilu secara TSM, terstruktur, sistematik, dan massif. Hal tersebut tidak hanya didukung oleh adanya hegemoni nasional, akan tetapi bisa pula adanya hegemoni global. Kesemuanya itu karena kepentingan politik dari sekelompok kecil orang atau kelompok, serta kepentingan global beberapa negara terhadap Indonesia.

Pada pemilu 2024 yang akan datang tantangan untuk menghilangkan pelaksanaan pemilu transaksional semakin berat, terutama karena tidak adanya aktor politisi yang berkomitmen untuk memperbaikinya. Bila tidak mendapatkan perhatian, dan tidak berkoitmen untuk menghadirkan pemilu halal, maka dapat mengarah pada pemilu bencana. Sebagai contoh regulasi dalam Pilpres dikuasai oleh kekuatan parpol dengan minimum persyaratan pencalonan memiliki kursi 20 persen di DPR atau suara pemilu 25 persen pada pemilu sebelumnya, yang mengakibatkan tuntutan dukungan Capres nol persen. Persyaratan dukungan partai politik 20 persen untuk mengusung calon presiden dikuatkan oleh putusan MK. Sementara itu saat ini sedang dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu KPU dan Bawalu; masalah Data Pemilih yang selalu menjadi sumber konflik pemilu lima tahunan; kampanye pemilu; dan hari H penyelenggaraan pemilu; sampai apabila terjadi sengketa pemilu yang harus ke Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian para pemilih yang faham dengan kondisi tersebut, para aktivis akan berdiam diri, frustasi dan menyerah sebelum pemilu bencana terjadi? Apakah media juga berdiam diri dengan kondisi pelaksanaan pemilu tersebut? Kebebasan berbicara bagi yang bukan pendukung koalisi regime mendapatkan ancaman paling tidak dibully oleh para buzzer. Dengan putusan MK menolak tuntutan untuk calon presiden 0 persen, maka MK telah membuka konflik antara lembaga negara yaitu DPD melawan DPR/Presiden. DPD salah satu lembaga yang membawa UU pilpres tersebut ke MK untuk dukungan nol persen.

2.6. Memahami Demokrasi

Dalam kepolitikan sehari-hari dengan mudah para aktivis, para pejabat mengklaim sebagai seorang yang demokratis. Walaupun antara pernyataan dan kenyataan praktiknya sangat berbeda, terutama bagaimana kebijakan2 yang dikeluarkan oleh negara baik berupa UU, peraturan presiden, peraturan menteri dan seterusnya. Oleh karena itu perlu dibahas untuk secara singkat memahami demokrasi dan perkembangannya. Setelah berakhirnya perang dingin Barat – liberal- vs Timur – komunisme- berakhir dianggap Demokrasi diklaim menjadi pemenang. Demokrasi memiliki daya tarik setelah bergantinya regime otoriter ke regime demokratis melalui pemilu. Kenapa demokrasi memiliki daya tarik? Pertama, karena demokrasi dari model Barat yang mendominasi kepolitikan global, menguasai ekonomi, menguasai lembaga-lembaga keuangan dunia dan politik seperti PBB, IMF, World Bank.

Demokrasi oleh para ilmuan politik Barat dianggap sebagai konsep politik yang baik karena konsep ini berasal dari rakyat itu sendiri.

Ide demokrasi berangkat dari ide yang merepresentasikan adanya nilai-nilai seperti *liberty, equality, justice* – dan merupakan nilai yang dapat mengkaitkan dan menjadi mediator di antara sejumlah kepedulian dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain itu juga Demokrasi dianggap dapat membuka landasan untuk membela dialog publik dan proses pengambilan keputusan tentang berbagai persoalan yang menjadi perhatian bersama dan memberi usulan cara-cara kelembagaan untuk mengembangkannya. Namun, pada praktiknya demokrasi memiliki banyak model. Demokrasi yang negara kita laksanakan lebih mengikuti model liberal. Demokrasinya lebih menguntungkan kelompok yang memiliki banyak modal kapital. Akhirnya muncul berbagai persoalan baru, politisi disandera oleh para oligarkhi ekonomi atau dengan sebutan lain para bandar.

Kalau kemudian diyakini bahwa sistem demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, kenyataannya dalam implementasinya jauh berbeda. Secara konseptual pengertian demokrasi ini memunculkan pertanyaan2 sebagai berikut: 1. siapa yang dimaksud rakyat, karena partisipasi tidak akan dilakukan oleh semua rakyat untuk setiap pengambilan kebijakan. Paling sekali dalam satu periode penyelenggaraan pemilu. Itupun hanya memilih pemimpin, bukan memilih policy. Lebih lanjut pertanyaan yang mengikutinya adalah apa dasar partisipasinya: umur, jender, latar belakang sosial? 2. pertanyaan kedua adalah bagaimana rakyat memerintah, bukan sekedar isu demokrasi langsung atau tidak langsung tapi juga termasuk bentuk representasi dan berbagai model sistem elektoral yang seperti apa yang mendekati kearah berkeadilan? 3. seberapa jauh pemerintahan oleh rakyat dapat diterapkan?

Dengan kondisi kepolitikan saat ini, paling tidak bila kita meyakini demokrasi sebagai sistem politik yang menjadi kesepakatan bersama harus memenuhi tiga hal sebagai berikut: pertama, Suksesi Pemerintahan dengan Kompetisi (*Competition, excluding the use of force).* Kedua, *Full participation* (tidak boleh ada warga negara dewasa yang dipinggirkan dalam proses politik; warga negara perempuan sering kali dipinggrikan dalam proses politik). Ketiga, *Civil and political liberties*; kebebasan civil society, kebebasan pers, kebebasan membentuk organisasi (Lipset Linz dan Larry Diamond, 1996)

Dengan demikian dalam pelaksanaan pemilu, dilarang aparatus negara terlibat dalam pemenangan pemilu. Apalagi bila menggunakan senjata dan menggunakan dana milik rakyat dari APBN dan/atau APBD. Perempuan sebagai warga negara juga memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Sementara itu negara tidak boleh secara paksa untuk membubarkan organisasi2 masyarakat tanpa melalui proses peradilan. Dengan memahami konsep2 secara singkat tersebut di atas, bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024? Apakah akan jadi pemilu bencana atau pemilu halal?

2.7. Membangun pemilu integritas dan pemilu halal

Pentingnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas akan memberikan legitimasi pemerintahan hasil pemilu. Legitimasi politik sangat penting perannya dalam kehidupan kepolitikan. Legitimasi menjadi dasar rakyat dapat tunduk kepada kebijakan regime yang berkuasa. Memenangkan kompetisi pemilu tidak serta merta memberikan legitimasi pemerintahannya selama periode berkuasa. Namun, dalam perjalanan kekuaaannya setiap kebijakan dapat menurunkan atau menguatkan legitimasinya. Para aktor politik baik di eksekutif maupun legislatif harus bekerja untuk melayani rakyat sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Politisi harus berkomitmen melaksanakan tugas konstitusi secara konsisten, taat moral dan etika. Terminologi politik halal dan pemilu halal digunakan dalam kerangka

implementasi Pancasila terutama dalam tafsir Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kajian ini lebih mengedepankan moralitas yang diajarkan dalam agama (Islam) menjadi dasar dari tingkah laku politik dan khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian menjadi jelas apa sikap dan tindakan yang dilarang agama memiliki dampak kehidupan nanti (*life beyond life*). Konsekwensi tersebut tidak hanya di dunia tapi dalam kehidupan akherat nanti. Oleh karena itu nilai2 seperti kejujuran, tidak melakukan kecurangan, tidak menyuap dan menerima suap, mengubah hasil suara dan lainnya yang dikategorikan nilai-2 luhur etika moral agama (akhlak) harus menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemilu. Menghadirkan agama dalam kehidupan politik menjadi suatu keharusan dalam negara yang berdasarkan pada Pancasila. Terminologi politik halal dan pemilu halal menjadi menarik untuk dikemukakan. Batasan dari kedua konsep itu bisa sederhana bisa pula sangat luas. Secara sederhana diartikan politik dan pemilu yang berintegritas, tingkah laku politik berakhlak, menjauhi larangan Tuhan atau larangan agama. Sebagai contoh, pemimpin dalam kampanye suka membuat janji2. Menepati janji adalah tindakan yang mulia. Namun, saat sudah berkuasa janji2 banyak yang tidak ditepati. Penyelenggaraan pemilu harus jujur, tidak boleh menyuap rakyat, tidak boleh memindah2kan suara, memperjual belikan suara rakyat. Kalau saja para politisi yakin dengan takdirnya yang sudah dicatat oleh Sang Maha Pencipta, maka kompetisi dalam perebutan kekuasaan tidak perlu dengan saling melakukan kecurangan. Di situlah pentingnya konsep pemilu halal dengan menghadirkan agama, menghadirkan Tuhan dalam bertindak.

Dalam pelaksanaan beberapa pemilu pasca reformasi terlihat bahwa kecurangan pemilu sepertinya sudah dianggap bagian proses pemilu yang biasa saja. Ada ketakutan tersendiri dari peserta pemilu apabila tidak melakukan suap dengan memberikan hadiah kepada pemilih, maka peserta pemilu tersebut tidak akan terpilih. Beberapa kajian ilmiah baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi memberikan bukti yang cukup bagaimana politik uang menjadi bagian dari pemilu (Mantan Ketua KPU Jawa Tengah menulis disertainya tentang pebotoh dalam pilkada di Jawa Tengah.)

Konsep pemilu berintegritas dan "pemilu halal" menjadi sangat penting untuk disosialisasikan. Pemilih yang mayoritas muslim dapat memahami dengan mudah konsep pemilu halal dan konsekweninya. Pemilu bukan ajang transaksi uang. Peserta pemilu harus berkomitmen melaksanakan pemilu dengan jujur. Ada pandangan bahwa untuk memenangkan pemilu tergantung pada uang atau modal kapital. Dalam Ilmu Politik selain dibutuhkannya modal capital juga modal sosial, seperti jaringan organisasi, peran media, komunikasi langsung dengan konstituen juga menjadi unsur penting untuk memenangkan pemilu. Sementara penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, DKPP dan lembaga MK juga harus berkomitmen untuk jujur menjaga suara rakyat. Demikian pula petahana dan seluruh aparatusnya untuk secara jujur dalam melaksanakan tugas porto-folionya masing-masing dan tidak menggunakan kekuasaan, APBN dan APBD, kekuatan Birokrasi untuk kepentingan kelompok atau golongannya sendiri.

3. PENUTUP

Bisakah pemilu halal itu dilaksanakan? Memang sulit, tapi negara ini berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia ini adalah negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Jangan tinggalkan agama dalam tingkah laku politik. Agama adalah sumber moral tertinggi. Sebagai Muslim misalnya percaya dengan rukun iman, percaya pada qadha dan qadar. Takdir menjadi pejabat politik itu sudah pasti dicatat Tuhan. Oleh karena itu pemilu harus diselenggarakan dengan cara2 halal, agar jabatan politik menjadi barokah. Hal itu menjadi model implementasi negara yang berdasarkan Pancasila.

Pancasila menjadi sumber etika dan moral dalam kepolitikan, agar pemilu halal menjadi kenyataan dan bukan sebuah utopi. Pendulum ekstrim dari "pemilu halal" adalah "pemilu bencana". Para oligarkhi politik, ekonomi dan sosial menguasai - ekonomi dikuasai, politik dikuasai, presiden dikuasai -, maka rakyat menederita dengan kebijakan2nya. Saat ini juga Islam politik menjadi harapan untuk berperan penting dalam kehidupan politik. Peminggiran semua kelompok kekuatan politik Islam dari partisipasi sosial dan politik akan tidak menguntungkan dalam bangunan demokrasi. Kebebasan menyatakan pendapat kelompokperlu mendapatkan saluran dalam bangunan demokrasi di Indonesia. Meminggirkan peran dan partisipasi kekuatan politik Islam akan mengakibatkan ketidakadilan dan mengarah pada *political unrest.*

Islam akan tetap menjadi wajah dari kekuatan politik di Indonesia bahkan akan menjadi solusi sistem sosial politik ekonomi dari berbagai persoalan bangsa dewasa ini. Kegagalan sistem model liberalisme dengan model Barat dan berakhirnya negara-negara komunisme di Eropa Timur menjadi tanda diperlukannya untuk kembali menelaah sistem *political Islam* tersebut. Demokrasi bukan model yang monolitik. Oleh karena itu diperlukan perdebatan politik yang cerdas untuk membangun bangunan demokrasi dengan kekhasan kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, maka wajar menghadirkan nilai2 Islam dalam tafsir Pancasila adalah tindakan mulia. Untuk itu diperlukan komitmen bersama untuk berpegang teguh pada perjanjian suci para pendiri bangsa yang konsepnya tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam membangun negara NKRI. Menghadirkan nilai-nilai kemuliaan untuk menjadi manusia Indonesia yang berdaulat dan bermartabat berdasar Sila-sila dalam Pancasila, terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian merebut tafsir Pancasila dengan cara menggunakan sumber nilai-2 Islam yang pasti bersifat universal menjadi dasar dari tindakan politik halal dan terutama dalam konteks pemilu halal.

DAFTAR PUSTAKA

Adejumobi, Said. 'Elections in Africa: A Fading Shadow of Democracy? in *International Political Science Review* (2000), 21: 1, 59-73.

Al-Barbasy, Ma'Mun Murod. *Politik Perda Syariat.* Jakarta: Suara Muhammadiyah. 2018. Diamond, Larry. *Developing Democracy Toward Consolidation.* Yogyakarta: IRE Press. 2003.

Hadiz, Vedi R. "Kebangkitan Populisme Islam, Menantang atau Diserap Oligarki". Dialog. *Prisma* Vo. 36, No. 3, 2007.

Hanf, thwodore, (ed). *Waching Demokrasi at work*, Arnold Bergstraesser Intitutue, 1999, halaman 119.

Huntington, S. and C.R. Moore. *Authoritarian Politics in Modern Society* (New York: Basic Books, 1970).

Jeffries, Richard. 'The Ghanaian Elections of 1996: Towards the consolidation of democracy?' in *African Affairs* (1998), 97, 189-208.

Lijphart, Arrend, *Pattern of Democracy: Governments Forms and Performance in Thirty Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 1999.

_____, "Constitutional Choices for New Democracies," in Larry Diaond and Plattner, eds., *The Global Resurgence of Democracy*, halaman 146-158. Baltimore: John Hopkins University Press, 1993.

____, *Democracy in Plural Societies*, New Haven: Yale University Press, 1977.

_____, *Electoral Systems and Party System: A Study of Twenty Seven Democracies*, New York: Oxford University Press, 1994.

Linz, Juan dan Afred Stepan. *Problems of Demokratic Transition and Consolidation.* Baltimore and London: The John Hopkins University Press. 1996.

Mac Clelland, J.S., *a History of Western Political Thought*, London: Routledge, 1996, halaman:

Mar'iyah, Chusnul. "Menggugat Politik Dinasti Dalam Pemerintahan Indonesia: Demokrasi untuk apa dan Untuk Siapa?" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 36, 2012. Jakarta: MIPI, Halaman 1-19.

_____, "Politik Institusionalisasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia: Studi Model Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Pasca Reformasi" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 29 Tahun 2009.

_____, "Demokrasi dan The Awakening of Civil Islam: Politik Indonesia Pasca 411 dan 212", dalam buku Abdul Aziz dan Ali Maksum ed. *Republik Salah Kelola: Indonesia dalam Perspektif Politik, Ekonomi dan Humaniora*, Malang: Instrans Publishing, 2021, halaman 258-280.

Painter, Martin, "Election in Australia", dalam Smith, Rodney (ed) *Politics in Australia.* New South Wales: Allen & Unwin, 1993

Powell, G. Bingham, Jr., *Election as Instrument of Democracy: Majoritarian and Proportional Vision*, New Haven: Yale University Press, 2000.

Rose, Richard. *Ed. International Encyclopedia of Elections* (London, Macmillan Ltd: 2000).

 ISSN: 2830-2699

AKTUALISASI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN[1]

Zainal Arifin Hoesein
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: Zainal.arifin@umj.ac.id

1. Diskursus Perdebatan Tentang Dasar Negara

Perdebatan mengenai dasar negara yang terjadi pada tanggal 29, 30 Mei dan 1 Juni 1945 di Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) secara akademis dilakukan oleh kelompok nasionalis (sekuler) dan nasionalis (Islam). Untuk merumuskan ide-ide yang berkembang, tim pengembangan beranggotakan sembilan orang, yang biasa disebut Komite Kesembilan, dibentuk untuk mengembangkan Piagam Jakarta. Teks Piagam Jakarta mencakup aspek politik, hak asasi manusia, pola pikir negara dan pola pikir hukum. Ada lima frase dasar Piagam Jakarta sebagaimana dimuat dalam alinea 4 UUD 1945, dimana rumusan tersebut mendapatkan tanggapan yang cukup keras dari anggota BPUPKI, terutama yang lain terkait dengan rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Respons keras ini telah memicu perdebatan sengit antara nasionalis sekuler dan beberapa nasionalis Islam. Pernyataan ini memiliki implikasi politik dan mengancam untuk memecah belah negara. Setelah beberapa pernyataan panjang dari kaum nasionalis Muslim yang duduk di Panitia 9[2], Piagam Jakarta secara utuh disetujui pada tanggal 14 Juli 1945 sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD).

Kajian terhadap ide bernegara dan dan struktur UUD 1945 (UUD 1945) penting untuk dipertimbangkan dan dibahas secara jelas dari beberapa perspektif. Pertama, perkembangan sosial-sosial, politik nasional, ekonomi, budaya dan hubungan internasional selalu berubah dan bahkan sangat dinamis. Kedua, amandemen konstitusi pasca Reformasi 1945 ditandai dengan integrasi dinamis antara demokrasi dan ketatanegaraan. Ketiga, di satu sisi gagasan tentang negara dan struktur (isi) konstitusi terus dipelajari, dipelajari, ditulis dan dipertanyakan oleh banyak kalangan, bahkan pada masa transisi dan konsolidasi administrasi nasional pasca reformasi. Berkaitan dengan demokrasi, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kembali yang pada pokoknya bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat dan pelaksanaannya mengacu pada UUD. Para penyusun UUD 1945 sepakat menyepakati untuk memilih system demokrasi sebagai jalan negara dan kepentingannya. Indonesia telah menetapkan orang-orang sebagai dasar ontologis dari semua aturan negara dan politik. Demokrasi tentu bukan sistem yang sempurna, tetapi hingga saat ini belum ada system yang dianggap lebih baik dari demokrasi. Ketika sampai pada demokrasi seperti apa yang harus dibangun, kata Mo. Hatta menjelaskan, masa depan demokrasi Indonesia bukan hanya sekedar "disalin" dari ide-ide Barat, tetapi yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai luhur negara, yang sesuai dengan karakter keluarga: demokrasi kekeluargaan yang berdasarkan permusyawaratan.

1 Disampaikan dalam Seminar Nasional "Aktualisasi Pancasila Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Konstitusional Indonesia" yang diselenggarakan atas kerjasama antara MPR-RI dengan Prodi Magister Ilmu Hukum UMS, MAHUTAMA dan HIPIIS di Surakarta, 5 – 6 Juli 2022

2 Panitia 9 merupakan Tim kecil yang terdiri dari: 1. Soekarno selaku Ketua; 2. Moh. Hatta selaku Wakil Ketua; dan A. Wahid Hasyim; Abdul Kahar Muzakkir; Moh. Yamin; Agus Salim; Ahmad Subardjo; Abikusno Tjokrosujoso; dan Alexander Andrines Maramis selaku Anggota, yang merumuskan pokok-pokok dasar bernegara yang kemudian disebut Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*), pada 22 Juni 1945, dan disepakati pada sidang ke-2 sebagai *gentlemen's agreement* yang akan menjadi pembukaan UUD.

Perdebatan kenegaraan di BPUPKI dilakukan untuk merumuskan gagasan- gagasan pembangunan, dibentuklah tim pengembangan beranggotakan sembilan orang, yang biasa disebut Panitia Kesembilan, dan disusun Piagam Jakarta, yang juga merupakan konsensus laki-laki. Teks Piagam Jakarta mencakup politik, hak asasi manusia, pemikiran pemerintahan dan pemikiran hukum. Ada lima proposisi dasar yang merupakan inti dari Piagam Jakarta, sebagaimana diatur dalam alinea 4. Kehendak Indonesia yang hendak diwujudkan tersebut tertuang dalam konstitusi Indonesia dan diabadikan dalam Struktur Kedaulatan Rakyat Indonesia.

Ketuhanan. Masyarakat yang demokratis, berpedoman pada persatuan Indonesia dan kebijaksanaan perwakilannya, berpedoman pada terwujudnya keadilan sosial untuk rakyat Indonesia seutuhnya, sesuai dengan prinsip kemanusiaan dengan dasar keadilan dan keberadaban. Reaksi kekerasan dari anggota BPUPKI, terutama yang lain, terkait dengan pemberlakuan Tuhan atas kewajiban menegakkan syariat Islam bagi pemeluknya. Reaksi kekerasan ini memicu perdebatan yang cukup keras antara kelompok nasionalis sekuler dan beberapa dari kelompok nasionalis Islam. Pernyataan itu memiliki implikasi politik dan mengancam untuk memecah belah negara. Setelah beberapa deklarasi rinci oleh nasionalis Muslim di Komite ke-9, Piagam Jakarta secara aklamasi diadopsi pada tanggal 14 Juli 1945 sebagai pembukaan UUD 1945.

2. Pancasila Sebagai *Gentlement's Agreement dan Staatsfundamental-Norm*

Indonesia dianugerahi sebagai bangsa yang beragam secara etnis atau etnis menjadi bangsa yang paling pluralistik di dunia. Selanjutnya, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang disatukan oleh rasa kesatuan budaya dan identitas. Orang-orang yang tergabung dalam suatu kelompok etnis memiliki kepercayaan dan identitas terhadap budayanya, misalnya dalam penggunaan bahasa daerahnya, dan menyukai seni dan adat istiadat. Adapun suku bangsa yang tersebar di Indonesia yang menjadi warisan sejarah nasional, dan penyebaran suku bangsa dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor geografis, perdagangan maritim, dan kedatangan pendatang ke Indonesia. Pluralitas yang ada tidak hanya terdiri dari keragaman budaya, agama, ras dan keragaman bahasa, tetapi juga keragaman etnis. Meskipun suku bangsa di Indonesia berbeda-beda dalam adat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik, mereka juga memiliki kesamaan seperti hukum, kepemilikan tanah, aliansi, dan kehidupan sosial yang berbeda, selain perbedaan suku. atas dasar keluarga.

Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, konstitusi dalam hal ini UUD 1945 mengandung 3 (tiga) nilai mendasar yaitu, *staatsidee* dan *rechtsidee*, dan *staatsfundamental-norm*. Adapun konstitusi dipahami sebagai hasil dari kontrak sosial yang kemudian dirumuskan dalam teks, dan dengan demikian kajian tersebut merupakan gagasan dasar berdirinya negara. Sementara ideologi hukum adalah ideologi normatif yang ditetapkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara, lembaga negara adalah lembaga kekuasaan yang berdasarkan hukum berdasarkan *value* yang dipercayai oleh masyarakat dan warga negara yang bersangkutan *(legal idea)*. Ide-ide hukum dengan demikian diambil dari nilai-nilai yang ada kemudian dikembangkan dan diterima oleh masyarakat, menjadi *staatsfundamental-norm* negara, dan secara teknis dapat dibentuk. Amalan dalam bentuk berbagai undang-undang tertulis (UUD).

Pilihan konsep indonesia sebagai negara kesatuan dimaknai sebagai sarana pemersatu bangsa dengan beragam nilai dan tradisi, berbeda agama, suku, bahasa dan budaya. Mencapai kesepakatan pada platform bersama seperti itu tidak mudah bagi negara yang besar dan beragam. Hal ini dimungkinkan bukan hanya karena persatuan dan keluasan pikiran para politisi, tetapi juga karena keluasan dan toleransi para pendiri Indonesia. Negara yang besar dan beragam seperti Indonesia tentu rentan terhadap fragmentasi.

Pancasila karenanya dapat dilihat sebagai landasan bersama dan denominator bersama bangsa Indonesia, satunsawa atau "bahasa pemersatu tunggal". Dengan demikian, maka Pancasila bukan hanya 'pernyataan politik' tetapi juga 'pernyataan ideologis'. Pancasila sebagai pernyataan politik menghubungkan kepentingan yang berbeda dengan arus politik yang ada, baik atas dasar agama maupun kebangsaan. Pancasila sebagai 'pernyataan ideologis' mewakili nilai- nilai yang terkandung dalam banyak kelompok agama dan rakyat. Setiap agama satu sama lain memiliki nilai-nilai yang berbeda, terutama dalam dimensi teologis, tetapi tiap-tiap agama dapat bertemu dengan mengajukan dimensi etika, yaitu nilai-nilai etika dan moral universal. Dalam hal ini tidak perlu menyamakan perbedaan, juga tidak perlu membedakan persamaan. Pancasila adalah wadah untuk menampung nilai-nilai etis yang sama dari ragam agama yang diakui di Indonesia untuk kepentingan negara dan kehidupan kita sebagai bangsa.

3. Pancasila dan Konsitusi sebagai Sumber Nilai, Etika dan Moral Dalam Menetapakan Kebijakan Hukum

Pancasila yang diproses dan kemudian dipilih untuk ditetapkan sebagai dasar negara merupakan dialog yang mendamaikan daripada dialektika yang konfrontatif. Padahal, proses ini menunjukkan adanya dialektika pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila dan agama (Islam), terutama antara pemberlakuan Piagam Jakarta dan UUD 1945. Mengubah interaksi dialektis menjadi interaksi dialog. Dengan ditetapkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai cita-cita dan dasar negara baru, wilayah itu menjadi wilayah perjanjian dan Indonesia menjadi negara yang dijanjikan (Abode konsensus atau *Dar al-' Ahd*; bahasa Indonesia: Darul Ahdi). Negara federal atau *Darul Ahdi* adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar kesepakatan atau kesepakatan antara semua warga negara. Kesepakatan ini bersifat politis karena menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, oleh karena dilakukan oleh orang-orang yang beragama, maka perjanjian tersebut bersifat religi. Perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh para pemimpin bangsa atas nama semua golongan dan berlangsung selama bulan suci Ramadhan, adalah perjanjian suci, atau mengandung aspek sakral. Tokoh-tokoh Muslim yang mewakili berbagai kalangan Islam pada konferensi PPKI kala itu tentu tidak berhemat ketika menyepakati negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Mereka adalah pemimpin masyarakat dalam kualitas dan integritas. Kesediaan mereka untuk meniadakan tujuh kata "wajib mentaati syariat Islam bagi pemeluknya" dan untuk mengusulkan perubahan keyakinan hanya kepada Tuhan YME adalah perintah pertama dan Pancasila secara keseluruhan kepada Islam. dan persepsi bahwa itu bukan ajaran agama. Itu bertentangan dengan mereka dan bahkan bersifat Islami.

Dari segi sosiologis, kekuasaan selalu berjalan beriringan dengan organ-organ komunal yang digunakan sebagai mesin aktivitas sosial. Hal ini dapat dilihat baik dari perspektif individu sebagai anggota masyarakat, maupun dari gerakan organisasi komunitas tertentu dengan keahlian dan fokus aktivitas sosial yang melekat. Paradigma sosial harus didekati dalam kerangka realitas dan sistem sosial yang relevan. Fakta sosial dipandang sebagai sistem sosial, sedangkan dari perspektif sistem, sistem sosial dipandang sebagai organisme dengan identitas dan tujuan yang berbeda. Jadi sistem sosial pada dasarnya adalah sistem nyata, dunia yang dihuni oleh anggota yang terstruktur secara simbolis. Struktur sosial dan perilaku sosial merupakan struktur normatif (nilai dan institusi) masyarakat. Peristiwa dan kondisi didasarkan pada ketergantungan pada fungsi integrasi sosial, sedangkan komponen non- normatif dari sistem berfungsi sebagai kendala mereka. Di sisi lain, dari perspektif sistem, penekanannya adalah pada mekanisme kontrol masyarakat dan perluasan daerah

darurat. Dalam pendekatan ini, peristiwa dan kondisi saling bergantung, terutama fitur integrasi sistem, tetapi nilai-nilai objektif bertindak sebagai kenyataan.[3]

Oleh karena itu, dalam setiap sistem sosial selalu ada sistem nilai yang menjadi pedoman bagi transaksi antar anggota masyarakat. Sistem nilai dalam Kehidupan Nyata *(Real Life System)* berupa etika dan moral yang bersifat universal dan mempengaruhi watak dan perilaku, serta merupakan doktrin tentang benar dan salah yang terkandung dalam perilaku dan perilaku manusia. Akhlak dalam perwujudannya dapat berupa sila yang mengandung prinsip-prinsip kebajikan yang terpuji dan mulia. Moralitas dapat berupa kesetiaan dan ketaatan pada nilai dan norma yang mengikat suatu masyarakat, bangsa, dan kehidupan suatu bangsa. Norma adalah kesadaran manusia yang membutuhkan hubungan ideal yang mendorong ditaatinya aturan. Demikian pula norma dipahami sebagai perwujudan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan agama, serta merupakan kesadaran dan sikap luhur yang disyaratkan oleh sistem nilai yang harus diikuti. Norma dapat berupa norma agama, norma filosofis, norma moral, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk diikuti melalui sanksi. Oleh karena itu, nilai-nilai inti juga merupakan nilai-nilai abstrak yang tidak dapat dipahami melalui panca indra manusia tetapi sebenarnya terkait dengan berbagai aspek perilaku dan kehidupan manusia. Semua nilai memiliki nilai inti berupa esensi, esensi, esensi, atau makna yang mendalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai inti bersifat universal karena mengandung semua realitas objektif. Jika nilai inti dikaitkan dengan sifat Tuhan, itu mutlak karena Tuhan adalah penyebab pertama.[4]

Nilai menjadi sumber perumusan moral, meskipun secara abstrak, berupa pola pikir, sikap, tindakan, atau tindakan, dan pada tataran praktis, dirumuskan dalam bentuk norma-norma yang disepakati. Ia memaksakan (menegakkan) gagasan, pola sikap, pola perilaku, dan pola ketaatan yang terwujud dalam kehidupan individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu nilai, moral dan norma merupakan tatanan yang tidak boleh dilanggar dalam merumuskan kebijakan publik, dan kebijakan tersebut harus selalu didasarkan pada kebenaran yang wajar *(orthos logos)* dan keadilan. Oleh karena itu, segala kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan publik dan penyelenggara negara merupakan penegak nilai-nilai etika dan moral yang berpijak pada nilai-nilai etika, yaitu UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi karena itu berfungsi sebagai dasar utama untuk administrasi negara dan merupakan hukum tertinggi negara. Fungsi lainnya adalah dalam rangka memberikan batas kekuasaan negara agar tidak dapat dipaksakan secara sewenang-wenang. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dan bahwa hak dan tanggung jawab seimbang. Memahami konstitusi tidak hanya membutuhkan perspektif tekstual, tetapi juga suasana sosial budaya dan sosial politik dalam proses penyusunan UUD. Rumusan isi UUD memuat prinsip-prinsip normatif dasar, yang berperan sebagai kontrol (alat kontrol sosial dan politik) terhadap penyimpangan dan penyimpangan dinamika zaman, serta pemerintah daerah, sekaligus sebagai instrumen reformasi kota (instrumen teknologi untuk cita-cita kolektif negara, alat rekayasa sosial dan politik). Tentu saja, untuk memahami kedudukan dan fungsi konstitusi dalam suatu negara, perlu memandang konstitusi sebagai aturan hukum tertinggi dan sebagai acuan. Akibatnya, *pertama,* produk hukum berupa pembatasan hukum sesuai hierarkinya tidak boleh bertentangan peraturan yang ada di atasnya dan konstitusi; dan *kedua* konstitusi harus berperingkat lebih tinggi daripada badan kekuasaan yang diciptakan.

Konstitusi selalu didasarkan pada nilai dan moral yang tertanam dalam makna setiap kata dan frasa. Memahami norma berjalan seiring dengan memahami nilai dan moral. Arti nilai pada hakikatnya adalah sifat dan sifat yang melekat pada sesuatu. Artinya nilai merupakan

3 Lihat Jurgen Habermas, *Legitimation Crisis*, Beacon, Press, 1975, p.97

4 Frans Magnis Suseno, *Op.Cit*. p. 14-15.

realitas yang tersembunyi di balik realitas lainnya. Menilai adalah mempertimbangkan aktivitas manusia dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sebelum membuat keputusan. Keputusan adalah suatu nilai yang dapat menunjukkan apakah itu berguna atau tidak berguna, benar atau salah, baik atau buruk, dan sebagainya. Evaluasi berkaitan dengan unsur-unsur panca indera manusia sebagai objek evaluator: fisik, mental, akal, rasa, karsa, dan keyakinan. Nilai sebagai suatu sistem merupakan bentuk budaya yang berdampingan dengan sistem dan karya sosial. Ketika kita mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat, kita dapat melihatnya dalam nilai teoretis, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai agama. Demikian pula, nilai sangat tergantung pada titik awal individu dan masyarakat dan perspektif pada objek. Misalnya, materialis melihat nilai tertinggi sebagai nilai material.

4. Aktualisasi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Hukum

4.1. Perumusan kebijakan Hukum Melalui Pendekatan Prinsip Otoritatif

Pendekatan prinsip otoritatif dapat dipahami sebagai bagian dati pendekatan positivistik, yakni seluruh kebijakan negara dalam bentuk hukum harus dituangkan dalam dokumen tertulis atau dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan. Di samping bersifat umum, maka segala ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan juga bersifat abstrak. Oleh karena itu, kedua sifat tersebut menjadi ciri atau elemen dari peraturan peundang-undangan. Sifat abstrak umum yang diterapkan sebagai ciri hukum dimaksudkan untuk membedakannya dari keputusan tertulis individu dan khusus dari otoritas publik atau otoritas yang berwenang, yaitu '*ketetapan'* atau *'beschikking'*. Produk perundang- undangan menurut ketentuannya ditetapkan oleh DPR bersama Presiden.

Dari sisi asas otoritatif, kebijakan hukum melakukannya dengan menerapkan asas keabsahan, baik keabsahan normatif dengan perangkat hukum lainnya, maupun keabsahan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. perhatian besar diberikan pada dua tagihan validitas ini. Setiap RUU harus memperhatikan tujuan sentral pembentukan nilai sebagai norma yang mengikat, paling tidak dalam pengertian bahwa inti hukum adalah mendamaikan cita-cita hukum *(rechtsidee)* dengan keadilan. Kehendak moral dengan kebenaran, baik kebenaran yang koheren maupun konsisten *(orthos logos)*. Kesediaan masyarakat untuk mendapatkan manfaat. Dan tentunya keinginan pemerintah. Oleh karena itu, nilai efektifitas norma

hukum sebagai kebijakan nasional berkaitan dengan norma lain, terutama norma fundamental (hukum dasar) dan nilai dan norma yang dianggap benar oleh masyarakat, khususnya norma agama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa suatu undang-undang itu sah karena dirumuskan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang yang lain, dan undang- undang yang lain itu merupakan dasar berlakunya undang-undang itu. Norma yang menentukan terbentuknya norma lain adalah norma yang lebih tinggi dan kebalikannya adalah norma yang lebih rendah yang terbentuk. Dalam hubungan ini, hubungan antara norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah merupakan hierarki norma. Akibatnya, standar yang lebih rendah tidak dibenarkan apabila tidak berkesesuaian dengan standar yang lebih tinggi.

Setiap isi norma tersebut bersifat mengikat dan karena bersumber dari Undang-undang Dasar yang spesifik dan mempunyai keabsahan untuk diyakini dan dianggap sebagai norma yang tertinggi *(ultimate)*, mempunyai paksaan. Bersifat statis, karena norma-norma tersebut memiliki arti umum yang dapat digunakan untuk membentuk norma-norma tertentu. Norma dinamis, sebaliknya, merupakan pembentukan norma-norma dasar yang

spesifik, karena tidak terdapat dalam norma-norma yang statis akibat perkembangan sosial dan tidak terikat dengan realitas sosial. Jika pembangunan sosial memiliki kemauan untuk menerapkan norma-norma baru, maka pembentukannya masih didasarkan pada norma-norma dasar. Artinya otoritas pendiri telah memenuhi ketentuan norma dasar. Standar adalah bagian dari sistem dinamis jika muncul dengan cara yang ditentukan oleh norma dasar. Dalam konteks ini, Pancasila dan UUD 1945 merupakan nilai dan norma penting dalam membentuk kebijakan hukum.

Penjelasan lebih detail tentang validasi perumusan kebijakan hukum, dapat diikuti pandangan Hans Kelsen tentang "norma-norma dasar" yang memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang pengujian perumusan kebijakan hukum. Norma-norma dasar menjadi acuan bagi setiap pembentukan norma karena juga merupakan sumber utama dan penghubung antara berbagai norma dalam pembentukan tatanan normatif. Menurut ide ini, jika suatu standar termasuk dalam sistem standar tertentu, validitas standar tersebut dapat diuji dengan norma dasar tersebut.[5] Dengan demikian, hukum merupakan rangkaian perintah penguasa atau perintah penguasa *(sovereignty)* untuk mengatur kehidupan rakyat. Hukum adalah sistem logis yang tertutup atau independen dari moralitas, politik, dan masyarakat. Selain itu, hukum seyogyanya memenuhi unsur ketertiban, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Oleh karena itu bentuk hukumnya adalah hukum, isi hukumnya adalah keputusan penguasa, dan ciri hukumnya adalah sistematisasi sanksi, perintah, kewajiban, kedaulatan, dan norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif adalah penguasa, bentuk hukum adalah hukum, dan hukum ditegakkan dengan memberikan sanksi kepada pelanggarnya.

Perumusan kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, harus dapat menjawab dan memperhatikan fungsi yang melekat pada peraturan perundang-undangan diantaranya adalah:

1) Fungsi Penciptaan Hukum

   Penciptaan hukum (*rechtschepping)* yang memunculkan suatu sistem norma hukum yang berlaku umum *(legal cheating)* terjadi atau terjadi dalam beberapa hal. Artinya, ia muncul melalui putusan-putusan peradilan (yurisprudensi), adat-istiadat yang muncul sebagai praktik

   kehidupan masyarakat atau bangsa, dan peraturan-peraturan hukum seperti dokumen. Keputusan oleh pejabat publik atau kantor otoritas yang berlaku umum. Secara tidak langsung, hukum juga dapat dibentuk melalui doktrin-doktrin yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum. Di Indonesia, legislasi merupakan cara yang paling penting untuk membuat undang-undang. Peraturan perundang- undangan merupakan mata rantai utama dalam sistem hukum suatu negara. Regulasi hukum sebagai poros utama tatanan hukum domestik, karena tatanan hukum Indonesia memiliki tatanan hukum kontinental yang lebih diutamakan daripada tatanan hukum yang berbentuk tertulis, sebagai akibat dari tatanan hukum Hindia Belanda Penggunaan *(schrevenrecht).* Kebijakan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan hukum sebagai instrumen utama di atas yurisprudensi dan hukum adat. Salah satu alasannya adalah bahwa pengembangan legislasi nasional dengan menggunakan regulasi hukum sebagai alat dapat disusun secara terencana (atau dapat direncanakan).

2) Fungsi Pembaharuan Hukum

   Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaruan hukum (*law reform*) yang kuat dibandingkan dengan penerapan *common law* dan yurisprudensi. Karena pembentukan undang-undang dapat dilakukan secara sistematis, ditemukan bahwa

5 ***Ibid,*** p. 111..

revisi undang-undang juga dapat dilakukan secara sistematis. Peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi untuk memperbaharui ketentuan hukum (yang sudah ada). Upaya memperbarui undang-undang dan peraturan nasional (ditetapkan setelah kemerdekaan) tidak lagi mengikuti kebutuhan dan perkembangan baru. Dalam bidang hukum kebiasaan atau hukum adat, diterapkan peraturan hukum sebagai pengganti hukum adat atau hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan baru. Menggunakan undang- undang dan peraturan sebagai alat untuk mereformasi hukum umum atau hukum umum sangat masuk akal, karena dua undang-undang terakhir sangat ketat untuk diubah dalam kasus-kasus tertentu.

3) Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum

Pada saat ini, di Indonesia memberlakukan empat bentuk sistem hukum, yaitu: "Sistem Hukum Kontinental (Barat), Adat, Agama (khususnya Islam), dan Sistem Hukum Nasional". Penataan kembali berbagai sistem hukum tidak dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan antar sistem hukum, terutama sistem hukum yang ada sebagai realitas yang dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Perkembangan sistem hukum domestik membantu mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun dalam tatanan yang serasi satu sama lain. Adapun pluralisme, supremasi hukum tergantung sepenuhnya pada kebutuhan hukum masyarakat. Aturan hukum mungkin berbeda di antara kelompok orang yang berbeda, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang terlibat.

4) Fungsi Kepastian Hukum

Dalam urusan hukum *(rechtshandeling)* dan penegakan hukum *(handhaving, uitvoering),* kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih besar daripada hukum adat, hukum adat, atau hukum adat. Namun perlu diperhatikan bahwa kepastian hukum dalam pengaturan hukum tidak hanya diberikan secara tertulis. Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain persyaratan formal juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Konsistensi Formulasi - baik secara internal maupun eksternal. Konsisten secara internal berarti bahwa hubungan sistematis antara aturan, struktur standar, dan bahasa harus dipertahankan ketika menghubungkan hukum yang sama. Konsistensi eksternal adalah adanya hubungan yang "harmonis" antara berbagai peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan bahasa yang tepat dan dapat dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan harus menjadi bahasa yang umum digunakan dalam masyarakat. Namun demikian, bukan berarti terminologi hukum tidak penting. Istilah hukum, baik dari segi struktur, istilah, atau ejaan tertentu, merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kepastian hukum dan harus digunakan secara konsisten. Melupakan kondisi di atas, hukum dan peraturan bisa lebih tidak pasti daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

4.2. Perumusan kebijakan Hukum Melalui Pendekatan Prinsip Persuasif.

Pendekatan prinsip persuasif adalah pendekatan yang diyakini, dipatuhi, atau dihayati dalam suatu komunitas *(living law)* tetapi tidak atau tidak tertanam dalam hukum yang sebenarnya dan diatur oleh prinsip asosiasi, yaitu pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai yang berbeda yang dimiliki orang. Bahkan tidak bisa dikodifikasikan dalam bentuk hukum. Ini dapat dikembangkan oleh komunitas/lembaga keagamaan sebagai teks khusus

untuk membimbing komunitas yang bersangkutan. Dalam hal ini, sangat dinamis sehingga perubahan dan bahkan reformasi legislatif dapat dilakukan dengan cepat. Untuk menjadi visioner dan bekerja bersama-sama dengan sektor lain, undang-undang harus didekati dari setiap aspek kehidupan. Dengan kata lain, rumusan hukumnya menuntut emansipasi baik dalam pemikiran maupun tindakan hukum, memungkinkan hukum untuk memenuhi peran dan fungsinya dalam melayani manusia dan kemanusiaan. Konsekuensi logisnya adalah bahwa hukum selalu berubah, baik secara evolusioner maupun revolusioner. Hal ini mempengaruhi makna norma hukum tertulis yang selalu berubah dalam kaitannya dengan nilai dan moralitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penegak dan penegak hukum tidak boleh menjadi tawanan hukum. Negara hukum tidak dapat diartikan sebagai negara hukum. Pergeseran paradigma hukum dan penerapannya seharusnya memungkinkan hukum dan lembaga- lembaganya, dalam hal ini peradilan, menjadi mesin perubahan sosial yang didukung oleh sumber daya manusia yang kredibel dengan pemikiran hukum dan integritas yang tinggi. Perhatian terhadap masyarakat hukum semakin meningkat seiring dengan terbukanya suasana masyarakat Indonesia yang telah memasuki masa reformasi. Pertanyaan kunci dan diskusi diadakan, menyentuh isu-isu dasar. Keterbukaan dan debat publik semakin membuka tabir bahwa hukum dan penegakan hukum Indonesia membutuhkan perubahan yang fundamental, tidak hanya pada sisi praktis, tetapi juga pada tataran konstruksi yurisprudensi dan pemaknaan hukum.

Paradigma hukum dan penerapannya harus diubah. Ini berarti munculnya konsep hukum baru yang komprehensif berdasarkan nilai-nilai intrinsik kemanusiaan dan etika, moralitas dan keadilan. Selain peran agama sebagai sumber acuan bagi pembentukan hukum yang dinamis, pendekatan penerjemahan nilai-nilai agama, praktik dan budaya masyarakat ke dalam hukum formal juga penting. Secara konstitusional hal ini dapat dimaknai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam konstelasi politik dan normatif, agama telah diposisikan sebagai bagian dari sumber acuan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya, penetapan Pancasila sebagai norma dasar dengan ketuhanan sebagai perintah pertama merupakan konsensus nasional, yang uraiannya diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Dari perspektif UUD 1945, agama merupakan status yang terhormat karena diatur secara tegas baik dalam pembukaan maupun teks UUD (Pasal 29) yang telah dikedepankan sebagai bagian dari landasan pembentukan sasaran.

5. Penutup

Pancasila dapat dikatakan sebagai falsafah dasar, sikap dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam posisi demikian, Pancasila juga mengandung pemikiran hukumnya sendiri dan menghadirkannya sebagai norma dasar nasional (norma dasar/norma dasar bangsa) sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila dapat berdiri kokoh jika dilaksanakan dengan mengupayakan konsistensi antar sila, kesesuaian dengan produk hukum dan kesesuaian dengan realitas sosial sebagai norma dasar bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara menghadirkan dialog yang fleksibel daripada dialektika yang konfrontatif. Memang, proses ini menunjukkan dialektika di mana Pancasila mempertentangkan agama (Islam), terutama antara rumusan Piagam Jakarta dan UUD 1945. Namun kearifan dan keterampilan politik para Founding Fathers mengubah interaksi dialektis menjadi interaksi dialog. Dengan ditetapkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai cita-cita dan dasar negara baru, wilayahnya menjadi wilayah perjanjian dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang dijanjikan (*Abode of Concensus atau Dar al- 'Ahd*; ucapan Indonesia: *Darul Ahdi*). Negara federal atau Darul Ahdi adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar kesepakatan atau kesepakatan antara semua

warga negara. Kesepakatan ini bersifat politis karena menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama, sehingga pakta tersebut memang bersifat religius. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kesepakatan dan kesepakatan yang dibuat oleh para pemimpin nasional atas nama semua golongan dan berlangsung selama bulan suci Ramadhan adalah kesepakatan suci atau mengandung aspek sakral.

Pancasila dan UUD 1945 karenanya memiliki nilai-nilai filosofis, moral dan etika yang menjadi dasar perumusan politik hukum dengan menempatkan agama dalam Rumusan politik hukum yang terhormat, Pancasila dan UUD 1945 yang mahal harganya secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

A.P. d'Entreves, *Natural Law - An Intoduction to Legal Philosophy,* London:Hutchinson & Co, 1970.

Corwin, Edward S. & Jack W. Peltason, *Understanding the Constitution* (New York, Holt, Rinehart and Wanston, INC, 1966.

Friedman, W., *Legal Theory,* Fifth Edition, London: Stevens & Sons Limited, 1967Austin, John, Edited by Wilfrid E Rumble,

Joseph, Fletcher, *Situation Ethics, The New Morality*, Philadelphia: The Westminster Press, 1966.

Kelsen, Hans, *General Theory of Lawa and State,* New York: Russell & Russell, 1945. Habermas, Jurgen, *The Theory of Communicative Action, Boston*: Beacon Press, 1987 Hatta, Moh., *Demokrasi Kita*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1960.

Hoesein, Zainal Arifin*, Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945. Jakarta:LP2B, 2019*

Corwin, Edward S. & Jack W. Peltason, *Understanding the Constitution* (New York, Holt, Rinehart and Wanston, INC, 1966.

Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario-Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam,*

Jakarta: Bina Aksara, 1985.

----------., *Politik Hukum Baru - Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional,* Cet.Pertama, Bandung : Binacipta, 1987.

QUO VADIS ACEH SEBAGAI DAERAH OTONOMI KHUSUS DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Heikal Daudy
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
e-mail: muhammad.heikal@unmuha.ac.id

Abstrak

Diskursus mengenai re-aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara menjadi hangat kembali dewasa ini, seiring memudarnya penerapan sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia. Pudarnya makna persatuan tersebut dilihat dari eksistensi daerah-daerah yang berstatus khusus atau istimewa seperti halnya Aceh, yang dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir terus mengalami pendegradasian status daerahnya, baik secara terbuka (eksplisit) maupun tertutup (implisit), khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan kewenangan Aceh sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Legalitas dan legitimasi kedudukan Aceh sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan UUPA tersebut, berasal dari Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Hasil Amandemen. Pada awal-awal berjalanannya Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, agenda-agenda hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berjalan cukup kondusif dan dinamis. Aceh kala itu menjadi pusat pengarusutamaan (mainstream) secara nasional. Namun dalam amatan akhir-akhir ini, kondisi demikian tidak lagi berjalan konstruktif bahkan berjalan ke arah destruktif. Keadaan yang sungguh tidak diharapkan. Oleh karena eksistensi UUPA sebagai pilar di masa transisi damai sekaligus blue print pembangunan Aceh pasca gempa-tsunami dan konflik bersenjata berakhir, tidak lagi menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat di Jakarta, dan ini jelas mengancam rasa persatuan dan kesatuan kita.

Kata Kunci: Pancasila, Aceh, Otonomi Khusus, UUPA.

Abstract

The discourse on the re-actualization of Pancasila in the Establishment of the Ethics of the State has become hot again today, as the application of the 3rd principle, namely the Unity of Indonesia, is fading. The fading meaning of unity can be seen from the existence of regions with special autonomy status such as Aceh, which in the last fifteen years has continued to experience degradation of regional status, both openly (explicitly) and closed (implicitly), especially with regard to fulfillment Aceh's authority as a special autonomous region based on Undang-Undang Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA).

The legitimacy of Aceh's position as a special autonomous region based on the UUPA comes from Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution and the Amendment Results. In the early days of the Privileges and Specialties of Aceh, the agendas of relations between the Central Government and Regional Governments were quite conducive and dynamic, Aceh at that time became the center of national mainstreaming. However, in recent observations, this condition is no longer constructive, even in a destructive direction. An unexpected situation. Because the existence of the UUPA as a pillar in the peaceful transition period as well as a blueprint for Aceh's development after the earthquake-tsunami and armed conflict ended, is no longer a special concern for the Central Government in Jakarta, and this clearly threatens our sense of unity and integrity.

***Keywords**: Pancasila, Aceh, Special Autonomy, UUPA.*

1. PENDAHULUAN

Pasang surut perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi menunjukkan perubahan mendasar ke arah demokratisasi. Perubahan ini sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, diantaranya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Gerakan reformasi sendiri merupakan upaya untuk mengadakan penataan kembali berbagai aspek kehidupan masyarakat pada bidang-bidang sebagaimana telah disebutkan. Tujuan utama gerakan reformasi 1998 dalam bidang politik adalah meningkatkan demokratisasi kehidupan politik dan perbaikan hubungan politik.(Effendi, 2017).

Karena itu salah satu agenda utama reformasi adalah mengadakan amademen terhadap UUD 1945 untuk meningkatkan demokratisasi relasi politik antara penyelenggara negara dengan rakyat, dan menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih efektif antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, berikut pula relasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan mekanisme check and balances dalam proses politik. Reformasi pada akhirnya menjelma menjadi momentum menciptakan sistem pemerintahan negara yang lebih dapat menjamin kehidupan politik yang lebih demokratis.

Beragam ketentuan yang pernah berlaku dan berlangsung lama sebagai praktik ketatanegaraan dahulunya menunjukkan adanya kehendak untuk mereduksi sistem yang sangat feodalisitik dan menjajah, ke arah pembentukan ideologi dan identitas nasional yang lebih berakar pada nilai-nilai yang penuh dengan kemashlahatan dan kearifan budi-luhur bangsa Indonesia secara nasional. Dengan semangat anti-feodalisme dan kolonialisme peninggalan penjajah. Indonesia mengalami era transisi (trantition era) yang diamini oleh The Founding Fathers dalam merekonstruksi suasana kebathinan rakyat Indonesia ke dalam ideologi dan konstitusi Indonesia yang manifestasinya terakumulasi pada ideologi Pancasila yang terdiri dari lima sila.

Pada tataran ideologi pun, paradigma mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara awal mula terbentuk melalui agenda dekolonisasi. Pun demikian tujuan demokratisasi turut diarahkan sesuai dengan ideologi Pancasila yang bersifat universal. Implikasinya, makna ideologi yang kental dengan tradisi rekonstruktif tereduksi ke arah totalitas prinsip-prinsip demokrasi yang lebih membumi. (Azhari, 2012).

Universalitas nilai-nilai demokrasi dalam ideologi Pancasila terakomodir pada keberagaman (pluralisme) di berbagai daerah di Negara Republik Indonesia (NRI) yang wujudnya ditunjukkan melalui pelaksanaan kewenangan otonomi daerah. Keleluasaan untuk melaksanakan otonomi tersebut sejalan dengan Pengamalan sila ke tiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, yang mengandung butir-butir berkenaan dengan nilai-nilai, isi, serta penjelasan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Sila ini merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang di dalamnya memuat tujuh butir pengamalan, antara lain sebagai berikut: a) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; b) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan; c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa; d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia; e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; f) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; dan g) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Keberagaman dalam bentuk kewenangan melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Atas dasar-dasar tersebut dibentuklah beberapa daerah otonom yang terbagi ke dalam dua bentuk yakni daerah otonom yang bersifat administratif dan daerah otonom yang memiliki keistimewaan.(Widodo & Riana Susmayanti, SH., MH; Arif Zainudin, SH., 2018) Seperti Aceh dan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai daerah yang memiliki kewenangan otonomi berupa keistimewaan, kemudian daerah yang ditetapkan sebagai daerah istimewa yang berstatus khusus adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Aceh, dan Papua. Daerah-daerah tersebut dengan keistimewaannya diperlakukan berbeda

dengan daerah otonom lainya yang hanya bersifat administratif belaka, namun daerah tersebut tetaplah daerah dan bukan negara bagian yang memiliki konstitusi tersendiri.(Aziz et al., 2019)

Keistimewaan dan Kekhususan Aceh mengalami pasang surut dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dapat disebutkan bahwa Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan dan ulama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999. Sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001) oleh karena itu Aceh terdapat dua sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus propinsi daerah istimewa Aceh.(Mukhlis, 2019)

Daerah-daerah dengan status istimewa dan khusus dimaksudkan untuk memberi peluang yang besar bagi daerah untuk mengelolanya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Maka Aceh sebagai daerah yang berstatus khusus dan istimewa memperoleh kesempatan yang luas dari Pemerintah Pusat guna mengatur wilayahnya.

Otonomi khusus bagi Aceh merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan amanat konstitusi sehingga Aceh tetap menjadi bagian dari wilayah hukum Negara Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Kekhususan dan Keistimewaan Aceh tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005. Satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006, terbitlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Terdapat sejumlah bentuk pengarusutamaan Kekhususan Aceh berdasarkan UU tersebut antara lain penguatan kelembagaan adat melalui Lembaga Wali Nanggroe, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, penetapan syari'at Islam, penentuan lagu daerah dan lambang daerah, adanya kelembagaan peradilan adat, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dapat melakukan kerjasama luar negeri hingga bidang politik daerah dengan adanya partai politik lokal dan calon independen dalam pemilukada.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan regulasi khusus mengenai Aceh dan berkedudukan sakral bagi publik Aceh. Disamping juga menjadi katalisator relasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh pasca damai. Saat ini UUPA telah berjalan selama hampir enam belas tahun. Pada periodeisasi tersebut publik Aceh menilai bahwa Pemerintahan di Pusat maupun lokal di Aceh belum mampu memaksimalkan otonomi khusus yang dimilikinya tersebut untuk senantiasa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Salah satu indikatornya terlihat pada dinamika dan perbandingan Indeks Pembangunan Manusia yang belum terlihat adanya peningkatan secara signifikan dari waktu ke waktu. Aceh bahkan ditabalkan sebagai provinsi miskin di Sumatera.(Sanur, 2020)

Keadaan Aceh demikian disinyalir berhubungan dengan sejumlah kendala dalam implementasinya. Beberapa kendala dimaksud adalah sebagai berikut: pertama, Keterkaitan UUPA dengan undang-undang lain. Kedua, rendahnya komitmen Pemerintah Pusat. Ketiga, Peraturan Pelaksana UUPA belum lengkap. Keempat, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Keempat alasan di atas menjadi faktor dominan penghambat implementasi dan realisasi UUPA sehingga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kenyataannya, Pemerintah Pusat pun tampak tidak secara sungguh-sungguh menjalankan hak-hak keistimewaan Aceh sebagaimana telah dikomitmenkan. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah mengenai kewenangan Aceh, regulasi mengenai minyak dan gas, serta regulasi mengenai Pertanahan. Idealnya seluruh regulasi tersebut semestinya direalisasikan pada tahun 2008 silam sebagai peraturan derivasi

dari UUPA. Hanya dalam durasi dua tahun saja idealnya aturan-aturan tersebut sudah harus rampung dan dapat dilaksanakan.(Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha, 2021)

Kondisi-kondisi sebagaimana telah dijelaskan, disinyalir memberi gambaran bahwa sebenarnya Aceh telah kehilangan keistimewaannya. Oleh karena itu, makalah yang berjudul 'Quo Vadis Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus Dalam Negara Republik Indonesia', disajikan demi memotret Aceh yang masih membutuhkan energi lebih untuk melanjutkan 'perjuangan politik dan diplomasinya' secara konstitusional dengan Pemerintah Indonesia sebagai 'orang tua kandung republik'.

Berkaca dari sekelumit penjelasan di atas, kajian ini dilakukan untuk menelusuri dua rumusan masalah: Pertama, apakah arti penting UUPA bagi publik Aceh khususnya dan, Indonesia pada umumnya secara konstitusional?. Kedua, Seperti apakah idealnya kontinuitas Kekhususan dan Keistimewaan Aceh dalam NRI dapat di formulasikan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka dari itu pengumpulan data dilakukan secara library research melalui bahan-bahan hukum sebagai data sekunder, dengan fokus pada penerapan kaidah atau norma-norma dalam UUPA. Bahan-bahan hukum yang dimaksud berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang undangan; bahan hukum sekunder diantaranya jurnal, buku, dan naskah akademik, serta bahan hukum primer yaitu sumber dokumentatif yang diperoleh dari internet, kamus, ensiklopedi, dan kamus hukum.

Basis analitikal bersifat deskriptif-analisis, melalui uraian-uraian kualitatif mengenai perjalanan implementasi UUPA dalam sejumlah perspektif yuridis. Kemudian dengan menghubungkan variabel penganalisaan lainnya berdasarkan aspek historis, politik, sosial, dan lain-lain. Keseluruhannya ditempuh guna menemukan kausalitas diantara sesamanya, sehingga diperoleh realitas konkrit pelaksanaan otonomi khusus di Aceh saat ini, dan proyeksi perkembangannya di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Arti Penting Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Bagi Aceh dan Indonesia.

Diskursus mengenai Otonomi Khusus Aceh kembali masyhur sebagai topik yang hangat untuk dibicarakan. Topiknya komplit berkenaan dengan status khusus Aceh dalam sistem hukum di Indonesia. Sejumlah tokoh dan elemen sipil di Aceh sekarang ini dalam banyak kesempatan merefleksikan kembali posisi Aceh dan Jakarta dalam berbagai wacana. Pembicaraannya berkenaan dengan eksistensi status istimewa dan khususnya Aceh. Sejalan dengan itu, yang menjadi simpul masalah adalah posisi tawar (bargaining potition) Aceh yang sangat dinamis dan terkesan terus diabaikan.

Dalam perkembangannya pun, wacana sebagaimana telah diurai sebelumnya itu tidak kunjung sampai pada kesimpulan secara komprehensif terhadap upaya optimal diskursus mengenai status Daerah Aceh yang berbeda dengan provinsi lainnya, sebagai pokok bahasan (mainstream) bagi masyarakat lokal dan nasional.(Sanur, 2020) menimang bahwa MoU Helsinki dan UUPA merupakan sebuah kesatuan tonggak-tonggak perdamaian serta peta jalan (road map) pembangunan Aceh pasca gempa-tsunami dan konflik bersenjata usai. Sesungguhnya bahwa peristiwa demi peristiwa yang dialami masyarakat Aceh beberapa waktu silam, tidak pula dirasakan oleh elemen anak bangsa lainnya di Indonesia. Jelaslah bahwa kedudukan Aceh yang berbeda dari provinsi lainnya tersebut, bersumber pada faktor historis, filosofis dan sosiologis menurut sumber-sumber fakta serta data yang tidak terbantahkan.(Daudy, 2021)

Sejarah baru Aceh melalui MoU Helsinki dan UUPA, menjadikannya pencetus (transetter) barometer politik dan hukum bagi Indonesia. Negara ini seakan mendapatkan batu pijakan sejarah untuk menginisiasi gagasan besar bagi kebijakan negara (state policy) atas segala sesuatu yang terkait dengan Aceh serta dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedudukan Aceh sejak awal mulanya sudah berperan sebagai center of excellent bagi negara ini. Penyebutan Aceh sebagai daerah modal merupakan capaian pantas yang layak disematkan selama republik ini berdiri. Menimang bahwa relasi Aceh dan Jakarta merupakan miniatur relasi kuasa negara dengan daerahnya terhadap berbagai masalah kebangsaan yang dihadapi, kemudian berelaborasi menjadi modal integrasi politik bangsa.

Keberadaan MoU Helsinki sendiri, bagi para aktor sejarahnya memiliki kedudukan istimewa yang tidak ternilai sebagai win-win solution bagi terciptanya perdamaian di wilayah-wilayah yang terkena konflik serupa di banyak negara. Momentum emas ini telah pula menempatkan sederet tokoh-tokoh internasional dan nasional sebutsaja Marthi Arthisari, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) bersama figur-figur kepercayannya berikut pula sejumlah lembaga yang dibinanya, dalam peran-peran strategisnya mendorong sejumlah mekanisme penyelesaian konflik antar sesama negara-negara anggota ASEAN dan juga Asia.(Daudy, 2021)

Lain halnya, jejak sejarah tersebut di atas, tidak dikuti oleh para tokoh lokal di Aceh. Meskipun MoU Helsinki adalah capaian bersama para tokoh dari kedua belah pihak yakni Pemerintah RI maupun GAM.

Manifestasi MoU Helsinki di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh diakui tidak optimal memasukkan butir-butir kesepakatan sebagai norma hukum. Sekalipun diakui bahwa aturan ini digadang-gadang menjadi pembuka (starting point) terkait keberadaannya sebagai hukum positif negara, dimana dengan demikian pelaksanaan butir-butir konsensus kedua belah pihak dapat direalisasikan sehingga menjadikannya sebagai "modal perjuangan kekinian" demi langgengnya usia perdamaian serta keberlanjutan pembangunan di Aceh.

Diskursus tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh, memantik pendapat masyarakat yang memandang bahwa bahwa struktur UUPA merupakan terobosan baru di bidang peraturan perundang-undangan yakni bangunan atau kontruksi hukum yang berbeda bahkan diluar kebiasaaan atau tradisi hukum sipil (civil law) yang mengakar di negara ini sebagai pilihan cara berhukum. Terobosan yang dapat ditunjukkan berupa pengaturan norma hukum di dalamnya terdiri dari sejumlah kluster (Bagian Bab) saat ditelisik lebih mendalam akan tampak struktur antar bab yang terdiri dari sejumlah sistem hukum yang terintegrasi serta di dalamnya mengalami proses internalisasi sebagai sebuah undang-undang tersebut (UUPA).

Terintegrasi sebagaimana dimaksudkan, dimulai dengan langkah pengklasifikasian hukum dengan memilah serta menempatkan bobot norma-norma yang eksis didalamnya, kemudian melakukan unifikasi hukum didasarkan kepada bab-bab yang tersusun secara sistematis, sampai kepada tahapan dimana undang-undang tersebut terkodifikasi dalam satu dokumen hukum. Lebih tepatnya UUPA adalah Omnibus law-nya Aceh. Meskipun pada awal-awal pembentukannya UUPA merupakan pengecualian dari tradisi hukum yang berkembang di Indonesia, sesuai pakem corak eropa kontinental/civil law.

Perkembangan yang dapat disaksikan dibanyak tempat, bahwa mayoritas lahirnya produk-produk hukum omni bus tidak dapat dihentikan. Perkembangan dibanyak negara, sistem-sistem hukum disana tidak lagi memandang pada satu sistem hukum saja, melainkan banyak diantara negara-negara tersebut melakukan transplantasi hukum dengan menginternalisasi corak atau karakteristik sistem hukum tertentu antara satu negara dengan

negara lainnya. Maka wajar jika pada akhirnya hukum pun menjadi sangat heterogen dan berwatak responsif bahkan progresif.(Ahmad Redi dan Ibu Sina Candranegara, 2020)

Jika diamati sejarah pembentukannya pun berlangsung sangat natural dan mengarah kepada corak hukum campuran (hybrid system). UUPA bagi Aceh-Indonesia merupakan bukti nyata yang lahir dari persinggungan ide/gagasan mengenai relasi kekuasaan dalam memosisikan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersifat khusus., dan perbandingannya dari sejumlah negara. Peraturan ini berkualifikasi sebagai salah satu karya hukum monumental di seluruh nusantara. Dimana spirit serta eksistensinya menjadi center of excellent bagi kajian akademis tingkat lanjut dan sekaligus pioneer terhadap sejumlah peraturan lainnya dengan kerangka yang tidak jauh berbeda.

Omnibus Law umumnya dikenal sebagai peraturan sapu jagad. Hal ini telah mengilhami para pembentuk UUPA untuk menempatkannya sebagai kerangka acuan peraturan dalam konsep yang serupa. Artinya melalui peraturan yang satu ini, segala sesuatu tentang Aceh bisa merujuk padanya dan mempunyai dasar pijakan yang tergolong lengkap sejauh batas-batas wewenangnya. Simpul ini pula yang oleh Jakarta disepakati pada era pemerintahan Jokowi-JK maupun Jokowi-Ma'aruf Amin mencetuskan terobosan hukum dengan dibentuknya Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Terlepas dari diterima atau tidaknya undang-undang tersebut, agenda yang sama terus berlanjut dengan diinisiasinya pembentukan Omnibus Law di sektor-sektor yang menguntungkan lainnya.

Baru-baru ini didapat informasi, bahwa beberapa figur di balik keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sederet figur-figur kharismatik yang sebelumnya concern dan menjadi bagian penting dalam perundingan MoU Helsinki berikut pula pengaruhnya dalam pembuatan sampai kepada disahkannya UUPA. Kenyataan ini pada akhirnya mempertegas kedudukan Omnibus Law bukan sebagai aturan layaknya bayi yang baru lahir di Indonesia. Melainkan secara sistem peraturan perundang-undangan pun, Pemerintah idealnya wajib memosisikan UUPA secara setara dengan undang-undang lainnya sebagai sesama produk hukum di Indonesia.(Daudy, 2021)

Penting untuk dipahami bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh mempunyai keistimewaan yang sarat dengan aspek politik maupun psikologis. Berbagai sinyalemen mengenai muatan politik lokal terkait keberlangsungan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh berlandaskan UUPA didorong untuk ditempuh kembali secara komprehensif oleh Pemerintah. Dan tidak kalah strategis, menjadikan UUPA sebagai sarana damai untuk berjuang secara konstitusional. Bersamaan dengan agenda-agenda tersebut, peran-peren diplomatik turut pula ditempuh oleh Pemerintahan Aceh bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kondusifitas situasi yang berjalan selama ini menjadi garansi langgengnya perdamaian, serta laksana simpul lekatnya persatuan dan kesatuan bangsa khususnya sila ketiga Pancasila.

3.2. Formulasi Ideal Kontinuitas Kekhususan dan Keistimewaan Aceh Dalam Negara Republik Indonesia

Otonomi khusus sudah terlaksana dan berkembang sejak zaman kolonial Belanda. Kemudian berlanjut kepada penjajahan Jepang. Perkembangan Otonomi khusus sangat dinamis sejalan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, era reformasi hingga sekaramg ini. Dalam riwayatnya, pemberian otonomi khusus tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa kemerdekaan dan dinamika politik era setelahnya, serta dimensi hubungan antara pusat dan daerah. Jika dilihat dalam perspektif waktu, arti periodeisasi berlakunya kebijakan negara tentang otonomi daerah ini bisa diklasifikasi berdasarkan rezim yang

berkuasa dan Undang-Undang tentang Peraturan Daerah.(Widodo & Riana Susmayanti, SH., MH; Arif Zainudin, SH., 2018)

Sejumlah era kekuasaan senantiasa memiliki karakter unik dalam mengawal pemerintahan di daerah. Karakteristik ini secara sederhana dipahami sebagai seni dalam memimpin oleh Presiden yang pernah memerintah (Syamsuddin, 1993) mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Sejarah politik dan hukum mencatat bahwa kebijakan-kebijakan mengenai tolak-tarik pendistibusian kepentingan politik bagi daerah terlihat dari deretan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku dari waktu ke waktu.

Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) atau otonomi khusus merupakan pemberian otonomi yang khas terhadap sebuah daerah dari sejumlah daerah lainnya. Praktek pemerintahan ini umum dikenal dalam berbagai kebijakan politik penyelenggaraan pemerintahan di sejumlah negara. Baik di dalam bentuk negara kesatuan maupun dalam negara federal.

Pada dasarnya, berbagai bentuk penyebaran kekuasaan yang bercorak asimetris merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi dua hal fundamental yang dihadapi suatu negara, yaitu pertama, persoalan bercorak politik, termasuk yang bersumber pada keunikan dan perbedaan budaya; dan kedua, persoalan yang bercorak teknokratis-manejerial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan.(Sanur, 2020)

Berkenaan dengan Otonomi Khusus Aceh jika diamati selama lebih dari tujuh belas tahun terakhir. Dimana eksistensinya tidak lagi sarat dengan makna-makna pembangunan dan Ke-Acehan bagi pihak-pihak yang mampu menangkap suasana tersebut. Pemerintah kembali memosisikan Aceh secara berbeda dan minus kontribusi. Ibarat kata Jakarta tidak ingin berpeluh keringat kembali demi Aceh yang saat ini terancam kembali dalam huru-hara. Berbagai agenda lokal dari soal Pilkada titik mulanya, sampai kepada soal-soal bandara terang saja memberi gambaran mengenai Aceh yang tidak lagi sama. Benarlah bahwa Aceh tidak lagi menjadi buah bibir dan anggun bagi siapapun yang menarik perhatiannya.

Terdapat sedikitnya delapan bentuk Kekhususan Aceh berdasarkan kajian yang pernah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan perbedaan dengan daerah lainnya sesuai UUPA. Berikut hasil inventarisir bentuk-bentuk kekhususan Aceh sebagai berikut:(Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, 2021)

a) Pendistribusian wilayah di Aceh yang dibagi kedalam kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan dan gampong. Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah kecamatan, terdiri dari kumpulan sejumlah gampong. Sedangkan kelurahan dan gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang tingkatannya di bawah mukim.
b) Persetujuan perjanjian internasional yang terkait secara langsung dengan Pemerintahan Aceh, diinisiasi dan dikonsultasikan oleh Pemerintah serta memperoleh pertimbangan DPRA. Pemerintah Aceh dibenarkan untuk melakukan kerjasama dengan organisasi atau korporasi lainnya di luar negeri sepanjang menjadi kewenangannya. Pada dokumen perjanjian tersebut mencantumkan klausul Pemerintah Aceh merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia. Pun Pemerintah Aceh diberikan keleluasaan untuk turut serta secara langsung diberbagai pentas seni, budaya, dan olah raga diluar negeri.
c) Setiap agenda pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkenaan dengan Pemerintahan Aceh dilaksanakan setelah berkonsultasi terlebih dahulu serta memperoleh pertimbangan dari DPRA.

d) Administrative policy yang berkenaan Pemerintahan Aceh akan dilakukan Pemerintah setelah berkonsultasi serta mendapatkan pertimbangan Gubernur.
e) Penduduk di Aceh dibenarkan untuk mendirikan partai politik secara lokal dengan hak-hak yang melekat padanya antara lain; berhak ikut Pemilu dalam rangka memilih anggota DPRA/DPRK; berhak memberi usulan para pasangan calon kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Aceh.
f) Formalisasi dan eksistensi pengadilan Syari'at Islam melalui sebuah Mahkamah Syar'iyah, dimulai dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana Islam, yang berlandaskan kepada syari'at Islam melalui hukum formil yang diatur kemudian dengan Qanun.
g) Segala regulasi serupa peraturan daerah (perda) di Aceh disebut dengan laqab "Qanun". Aturan jenis ini memiliki dua bentuk, yaitu Qanun Aceh yang disahkan berdasarkan persetujuan bersama Gubernur DPRA, dan Qanun Kabupaten/Kota yang disahkan setelah mendapat persetujuan bersama para Bupati/Walikota dan DPRK. Keberadaan Qanun dimaksudkan sebagai kerangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan tugas pembantuan. Materi Qanun terkadang memuat ancaman pidana atau denda lebih dari enam bulan kurungan dan/atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Khusus terhadap Qanun-Qanun jinayah (hukum pidana Islam) muatan norma yang diatur berbentuk jenis serta ancaman pidana yang berbeda dari ancaman pidana pada umumnya sebagaimana dikenal dalam hukum positif negara.
h) Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh, dibenarkan untuk mendirikan lembaga, badan dan/atau komisi setelah memperoleh persetujuan DPRA/DPRK. Daerah ini juga berdiri sejumlah lembaga sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang tidak terdapat di daerah-daerah lainnya, sebutsaja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Lembaga Wali Nanggroe,, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, serta unit-unit khusus Kepolisian Syari'at seperti Wilayatul Hisbah sebagai Polisi Syari'at.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat perlu untuk mengevaluasi kembali kebijakan otonomi khusus di Aceh berdasarkan prinsip-prinsip pendelegasian kewenangan secara khusus. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam Bab V tentang Urusan Pemerintahan UUPA sebagai berikut:

a) penyelenggaraan kewenangan khusus atas otonomi yang seluas-luasnya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*), keadilan, pemerataan, kesejahteraan, serta potensi dan keanekaragaman Aceh.
b) pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya didasarkan pada kewenangan khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.
c) pelaksanaan kewenangan khusus pemerintahan Aceh diletakkan pada satuan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan kabupaten/kota dapat menerima penyerahan sebagian kewenangan khusus dari pemerintahan daerah provinsi.
d) pelaksanaan kewenangan khusus pemerintahan Aceh harus sesuai dengan konstitusi negara dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah.

e) pelaksanaan kewenangan khusus pemerintahan Aceh di bidang politik harus lebih meningkatkan kemampuan pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara demokratis, transparan, akuntabel, professional, efisien, dan efektif.
f) pelaksanaan kewenangan khusus pemerintahan Aceh di bidang ekonomi harus lebih meningkatkan kemampuan pemerintahan Aceh dalam memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam daerah Aceh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Aceh.
g) pelaksanaan kewenangan khusus pemerintahan Aceh di bidang sosial budaya harus lebih meningkatkan kemampuan pemerintahan Aceh dalam memajukan pelaksanaan syariat Islam dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
h) pelaksanaan kewenangan khusus pemerintahan Aceh harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi lembaga legislatif, badan eksekutif, partai-partai politik, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya di Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, sejumlah masalah sebagaimana dipersepsikan telah menjadi faktor penghambat pemenuhan implementasi UUPA. Materi muatan dalam UUPA banyak yang tumpang tindih dengan baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maupun dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masyarakat dan Pemerintah Aceh menilai dukungan dari Pemerintah Pusat yang terkesan masih setengah hati menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya implementasi UUPA.(Husni, 2010)

3.3. Urgensi Kontinuitas Daerah Khusus dan Istimewa Secara Melembaga *(institusional)*

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini melakukan perombakan kabinet dalam masa waktu tersisa rezim ini selama dua tahun kedepan (2022-2024). Kebijakan tersebut dirasa tepat, menimang bahwa konstitusi pun memberi kewenangan penuh kepada Presiden untuk mengangkat/melantik atau bahkan mengganti/memberhentikan para Menteri sebagai wujud pemenuhan hak prerogatif Presiden sebagai kepala pemerintahan. Hak prerogatif ini bersifat mutlak. Dengan begitu, segala sesuatu yang terkait dengan langkah-langkah kebijakan Presiden Jokowi tersebut dinilai layak dan dapat dibenarkan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 disebutkan, bahwa Presiden mempunyai legetimasi untuk melaksanakan langkah-langkah keputusan yang diperlukan tanpa terganggu oleh siapapun dan apapun bentuk gangguannya. Presiden tidak boleh ditekan (pressure) dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Undang-Undang mengenai Kementerian Negara pun turut membenarkan langkah tersebut dapat dilaksanakan. Saban waktu Presiden membutuhkannya, siapa pun yang pantas bekerjasama dengannya, serta dimana pun kebijakan tersebut dapat dilangsungkan, tidak dapat diintervensi. Ibarat Tuhan YME dan yang bersangkutan (Presiden) saja yang mengetahuinya.

Agenda bongkar-pasang kabinet yang lalu mengundang kegaduhan akibat simpang-siurnya sejumlah pandangan seperti: a) kelompok yang menerima karena Presiden telah menempuh cara yang tepat dengan timing yang benar, tatkala keputusannya mengganti pos kementerian di bidang ekonomi (khususnya perdagangan) yang tergolong vital; kemudian b) kelompok yang tidak menerima keputusan tersebut, dimana pandangan kelompok ini didasarkan pada perasaan tidak puas terhadap perombakan yang dilakukan Presiden pada kesempatan ini terkesan prematur atau dengan kata lain keputusan yang tidak terukur dan tidak komprehensif karena menyasar dua pos Menteri saja yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); dan c) kelompok yang menyatakan keberatan dan penyesalan serius akibat perombakan kabinet ini,

karena dilakukan pada pertengahan waktu perjalanan pemerintahan sekarang. Kelompok ini berpandangan idealnya keputusan tersebut diambil pasca evaluasi terhadap keseluruhan kinerja pemerintah sejauh ini dengan berpedoman kepada performance masing-masing Menteri pada sejumlah Kementerian.

Tidak berhenti sampai disitu, pandangan lain yang menyatakan ketidakpuasan muncul pula dari sebagian kalangan yang menitikberatkan perhatiannya pada sosok pilihan Presiden yang dinilai tidak akomodatif dan cenderung sangat pragmatis tatkala meminang para politisi-politisi gaek dari partai politik koalisi, dan para mantan tim sukses yang memang senantiasa menunggu momen-momen seperti ini tiba di hadapannya.

Pembicaraan lain yang senter terdengar dan turut menambah amunisi perbincangan di seluruh pelosok negeri dan tidak kalah menariknya ialah pendapat yang mengilustrasikan bahwa Presiden Jokowi tidak lagi menimbang konfigurasi politik kedaerahan sebagai elemen pendukung untuk sisa waktu pemerintahannya. Situasi yang sangat kontras dan seakan berbalik seratus delapan puluh derajat dari warna pemerintahannya di era 2014-2019 silam dan formasi Kabinet Indonesia Maju di awal-awal susunannya.

Secara terbuka komposisi Menteri yang baru saja dilantik merupakan konfigurasi dari tokoh parpol dengan tokoh militer (tanpa menafikan posisi para Wakil Menteri yang turut dilantik). Bahkan tidak terlihat keterwakilan tokoh-tokoh daerah atau setidak-tidaknya personifikasi dari daerah atau wilayah tertentu secara berimbang. Paling faktual adalah diberhentikannya Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang notabene adalah putra Aceh satu-satunya dalam Kabinet Indonesia Maju.(Daudy, 2022)

Tidak satupun pihak yang mengetahui secara pasti, alasan utama Presiden Jokowi melakukan penggantian kabinetnya dengan tidak mengakomodir keterwakilan daerah sebagaimana keputusan yang telah dimaklumkannya tersebut. Sejatinya keberagaman daerah sebagaimana halnya daerah-daerah yang berstatus khusus dan istimewa, sepantasnya membutuhkan perhatian secara lebih berimbang dibanding daerah-daerah lainnya.

Aceh, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta, serta Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Wilayah Kalimantan Timur. Daerah-daerah tersebut secara struktural merupakan satu kesatuan yang kontinum dalam wilayah NRI, dan kedudukannya pun tidak terlepas dari pemerintah pusat dalam hal pengaturan urusan pemerintahan maupun keuangan.

Terkesan tidak lazim dan bukan sebuah keputusan populer, tatkala kabinet saat ini tanpa keterwakilan putra/putri terbaik dari daerah berstatus Khusus dan Istimewa. Hal ini mutlak menimbang isi dari manifesto politik Jokowi-Jusuf Kalla melalui NAWACITA pada pemerintahan sebelumnya. Dimana modal kuat yang mendasari pembentukan kabinet serta program pemerintahan melalui jargon Indonesia Maju ialah nilai-nilai keberagaman. NAWACITA tersebut sangatlah kental dengan semangat kesetaraan, kebersamaan dan kontributif pada pengabdian pada negara. Gambaran situasi yang tidak terjadi dalam perombakan kabinet terakhir ini.(Daudy, 2022)

Sepatutnya komposisi Menteri Kabinet Indonesia Maju haruslah proporsional dan beragam. Komposisi demikian akan terjadi setelah menimbang sejumlah pandangan yang pantas sebagai bentuk pengejewantahan dan pemahaman secara holistik terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila serta semboyan Bhineka Tunggal Ika yang tidak lazim lagi untuk dinegosiasikan ulang tatkala komitmen bernegara sudah tercapai. Preseden lain yang sudah berjalan baik selama ini, bahwa komposisi keberadaan para tokoh-tokoh daerah dalam kursi kabinet serta keberadaan para politikus dari partai-partai politik sudah laziam dipraktekkan demi konstelasi politik tanah air serta kondusifitas jalannya roda pemerintahan. Secara keseluruhan praktek kenegaraan tersebut telah menjadi konvensi ketatanegaraan

sebagaimana telah diinisiasi dan dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Presiden-Presiden sebelumnya.

Bagi Aceh ketika putra/putri terbaik daerahnya tidak masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju, menjadi sinyal negatif bahwa Aceh tidak lagi menarik perhatian dan memiliki posisi tawar yang relevan bagi istana. Meskipun dalam blantika perpolitikan dikenal sebuah adagium bahwa tidak ada istilah teman yang sejati, melainkan semata-mata kepentingan yang hakiki.

Idealnya Pemerintah Pusat senantiasa berpegang pada prinsip bahwa Aceh merupakan Provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 18A, dan 18B UUD 1945, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh Pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Provinsi Aceh. Pun Pemerintah Pusat perlu secara konsisten mendorong setiap lembaga yang ada di Aceh dapat bekerja secara optimal dalam melaksanakan otonomi khusus di Aceh. Ibarat tubuh, pemerintah pun tidak dapat dipisah satu dengan lainnya. Begitu pula tamsilan pemimpin dengan rakyatnya, seperti dua sisi mata uang.

4. KESIMPULAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sejatinya merupakan regulator dalam menimbang posisi Aceh dan Jakarta sesuai kedudukannya masing-masing antara Nanggroe (negeri/otonomi khusus) dengan Negara dalam bingkai NKRI. Kesan bahwa UUPA terus kehilangan konstruksi norma kekhususannya tidak dapat dipungkiri. Secara perlahan-lahan itu terus terjadi. Konsultasi dengan DPRA pun tidak dilakukan lagi. Jakarta sebagai pusat pemerintahan terkesan memosisikan Gubernur Aceh sebagai bawahan bukan teman. Aceh saat ini kembali dirundung kekecewaan.

Aceh adalah daerah modal, saudara sebangsa yang jiwa Kebhinekaannya tidak pernah pudar. Idealnya Keistimewaan dan Kekhususan Aceh kembali menjadi posisi tawar. Niscaya UUPA yang sudah konstitusional di awal-awal, menjadi perekat perjuangan secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi dan Ibu Sina Candranegara. (2020). RESENSI OMNIBUS LAW DISKURSUS PENGADOBSIANNYA KEDALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL (p. HALAMAN 20-21). Raja Grafindo Persada.

Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 19(4), 489–505. https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1

Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Suryani, D., Aulia, D., & Maulana, Y. (2019). Model Pengelolaan Desentralisasi Asimetris dalam Konteks NKRI. www.politik.lipi.go.id

Daudy, M. H. (2021). Omnibus Aceh. 1–4.

Daudy, M. H. (2022). Reshuffle Kabinet Minus Aceh : Pertanda Apa ? 1–5.

Effendi, S. (2017). Mencari Sistem Pemerintahan negara. Orasi Ilmiah Universitas Pancasila, 1–18. https://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Mencari-Sistem-Pemerintahan-Negara.pdf

Husni, J. (2010). Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 51. https://doi.org/10.24815/kanun.v12i2.6295

Mukhlis. (2019). KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH DALAM PERSPEKTIF NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Ilmu Hukum, VOLUME 3 N(1), 140. https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024

Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha, N. F. F. (2021). TIM PENGAWAL UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH: DUALISME KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN YANG SUMIR Mutiara. 6.

Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh. (2021). Brief Executive Summary Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA): Diskursus Kekinian Dalam Perspektif HAM. In -.

Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 11(1), 65–83. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580

Syamsuddin, M. D. (1993). Political stability and leadership succession in Indonesia. Contemporary Southeast Asia, 15(1), 12–23. https://doi.org/10.1355/CS15-1B

Widodo, M. F. S., & Riana Susmayanti, SH., MH; Arif Zainudin, SH., M. (2018). RATIO LEGIS PEMBENTUKAN DAERAH KHUSUS DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 84, 573–580. http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF

PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BERNEGARA: PENDEKATAN TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM BERKEADILAN SOSIAL

Fatkhul Muin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: fatkhulmuin@untirta.ac.id

Abstrak

Paradigma dasar Pancasila bersumber pada pemahaman terhadap nilai-nilai dasar yang salah satunya adalah berkaitan dengan keadilan social. Rumusan dasar dalam pemahaman keadilan social berkaitan dengan instrument yang dimiliki oleh negara, dimana negara sebagai alat/ *tool* memiliki kewenangan dalam kebijakan hukum, sehingga dengan kebijakan hukum yang baik akan mendorong keadilan bagi masyarakat. Pemikiran berkaitan dengan keadilan dalam Pancasila diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana secara hirarkhis tentu paradigma tersebut diatur secara konstitusional mengatur tentang hal-hal berkaitan dengan pembangunan negara dengan paradigma kesejahteraan social bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, memiliki relasi yang bersifat konkrit dengan hakikat kehidupan nusantara sebelum kemerdekaan dan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan dasar dari perembule/pembukaan dalam UUD 1945, dimana tujuan dasar bangsa Indonesia terbentuk untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Keadilan Sosial dan Kebijakan Hukum

Abstract

The basic paradigm of Pancasila is based on an understanding of basic values, one of which is related to social justice. The basic formulation in understanding social justice relates to instruments owned by the state, where the state as a tool has the authority in legal policy, so that good legal policies will encourage justice for the community. Thoughts related to justice in Pancasila are embodied in the life of the nation and state, where hierarchically, of course, the paradigm is constitutionally regulated on matters relating to state development with the paradigm of social welfare for the people of Indonesia. Pancasila as the source of all sources of law, has a concrete relationship with the nature of the life of the archipelago before independence and the ideals of the Indonesian nation which is the basis of the preamble in the 1945 Constitution, where the basic goal of the Indonesian nation is formed to create prosperity for the people of Indonesia.

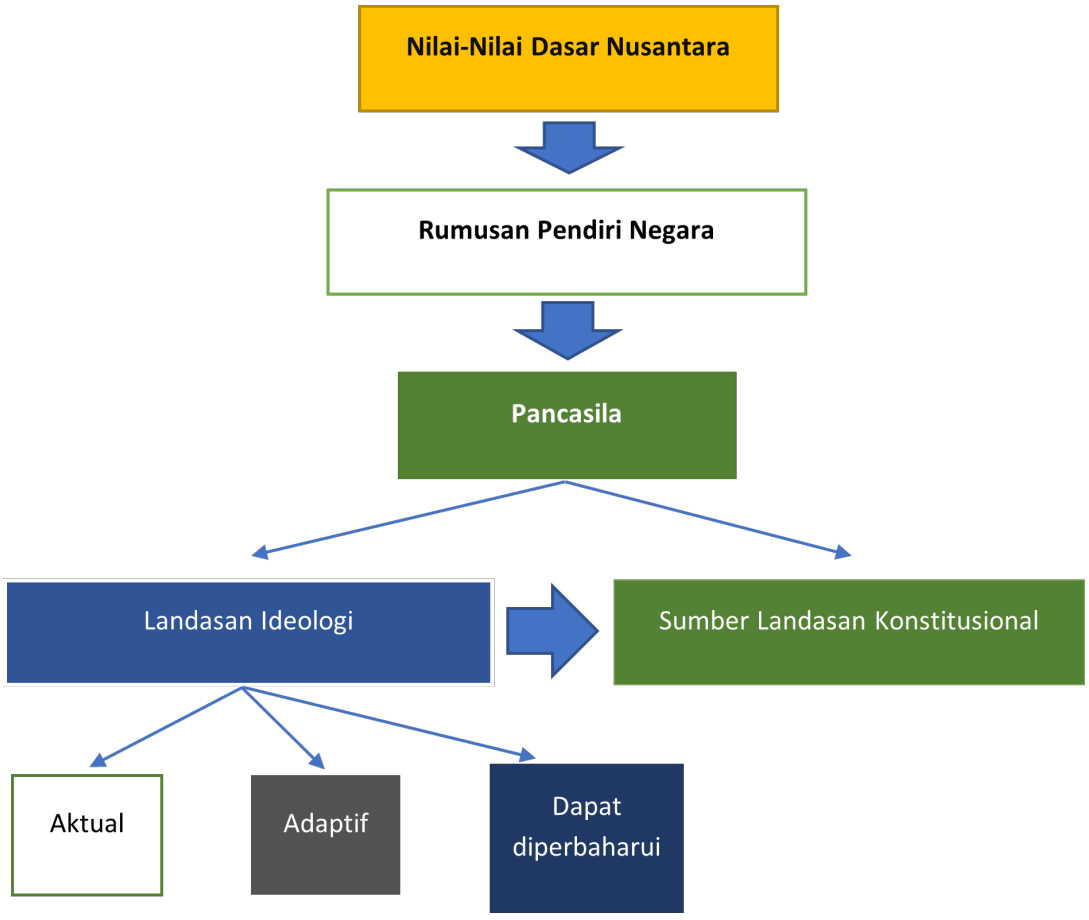
1. PENDAHULUAN

Logika berbangsa dan bernegara selalu berkorelasi dengan prinsip-prinsip dasar dalam bernegara, terutama berkaitan dengan atas dasar apa suatu negara itu merdeka, hal tersebut tidak terlepas dari perjalanan Panjang negara yang akan merdeka. Falsafah atau ideologi negara selalu menjadi instrument dasar dalam negara, seperti Indonesia yang diawal pergerakan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, selalu mengungkapkan nilai-nilai Pancasila yang kemudian tertransformasikan dalam dimensi Pancasila sebagai dasar. Dalam pemakanaan yang sederhana, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai nilai pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila juga dapat di artikan sebagai ideologi dari negara Indonesia atau

sering di sebut rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara.[1] Sebagai rumusan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan modal dasar bangsa Indonesia.

Dalam persepektif lainnya, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan dasar bagi warga negara Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada lima sila dalam Pancasila yang masing-masing memiliki nilai tersendiri. Nilai-nilai tersebut juga menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila yang dikembangkan merupakan nilai dasar dan puncak budaya bangsa, yang dibentuk dan ditentukan oleh ideologi para penguasa negara sebagai landasan bernegara dan pandangan hidup. Pancasila adalah dasar negara artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada Pancasila. Semua peraturan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang dinamis dan terbuka, artinya nilai-nilai yang dikandungnya harus dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, Pancasila dalam operasionalnya bersifat kekinian, adaptif dan dapat diperbaharui maknanya. Pancasila berperan sebagai way of life dan juga merupakan dasar negara Indonesia, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[2] Secara sederhana dapat dirumuskan falsafah negara Indonesia sebagai falsafah dasar sebagai berikut:

Bagan 1 Falsafah Dasar Negara



Sepanjang sejarahnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik pemahaman maupun pengamalannya. Pasca runtuhnya Orde Baru, Pancasila

1 Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi, *Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No.1 Juni 2021, hlm. 6.

2 Deby Sabina, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya*, Jurnal Pendidikan Tambusa, Volume 5 Nomor 3Tahun 2021, hlm. 9104

seolah tenggelam dalam pusaran sejarah yang sudah tidak layak lagi untuk dimasukkan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Bahkan, banyak yang percaya bahwa sebagian orang Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang pada hakikatnya adalah Pancasila. Pancasila tampaknya semakin terselip di sela-sela kehidupan berbangsa Indonesia yang diwarnai oleh hiruk-pikuk suasana demokrasi dan kebebasan politik. Pancasila sebagai dasar negara kini hampir kehilangan fungsi praktisnya, seolah-olah hanya tinggal posisi resminya saja.[3] Hal ini yang kemudian menjadi problem dasar dari eksistensi Pancasila.

Rumusan dasar Pancasila, keadilan sosial merupakan salah satu problem utama dalam impelemntasi Pancasila sebagai kekuatan utama. Problematika rumusan Pancasila yang secara tegas dan konkrit menyatakan posisi falsafah Pancasila lahir menempatkan kedudukan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam bernegara, hal ini tentu berkaitan erat dengan posisi Lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kewajiban tersebut.

2. PEMBAHASAN

Pancasila: Instrumen Falsafah Bangsa dalam Memenuhi Keadilan Sosial

Paradigma filsafati dalam Pancasila sebagai pemahaman yang holistic nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, merupakan ejawantah dari aktualisasi dan refleksi Pancasila sebagai standar tinggi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.Suatu negara dan bangsa dapat membangun diri memulai dari penguatan pondasi berikut pilar-pilarnya, maka berdirilah negara dan bangsa itu. Pondasi dan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara esensinya adalah nilai dasar kehidupan yang membentuk sistem nilai kehidupan yang dapat diyakini kebenarannya, menggambarkan realitas objektif, memberi karakter, dijadikan pedoman, prinsip, postulat, evidensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut BJ Habibie dalam sambutannya "penyegaran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara" di Gedung MPR pada 1 Juni 2011, ia mengatakan ada dua alasan direlokasinya Pancasila dari kehidupan kita, untuk mengetahui satu sisi situasi dan kehidupan bangsa telah berubah baik di tingkat nasional, regional maupun global. , dan euforia reformasi dimulai setelah trauma masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu atas nama Pancasila. Kedua hal tersebut telah menimbulkan "amnesia nasional" akan pentingnya Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm), payung kehidupan nasional yang mencakup semua warga negara yang berbeda kebangsaan, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan partai politik. Sesungguhnya Pancasila bukanlah milik suatu zaman atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada suatu zaman tertentu, tetapi Pancasila adalah dasar negara yang menopang apa yang disebut sebagai bangunan arsitektur negara Indonesia.[4] Pola penyangga bangunan arsitektur Indonesia, dapat dilakukan telaah lebih mendalam melalui paradigma dasar daya ikat Pancasila dalam pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Falsafah dan ideologi negara Pancasila tentu menjadi satu kesatuan pemikiran pengejawantaha nilai-nilai Pancasila, sebagai filsafat merupakan kedalaman nilai dan sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka. Pemahaman terhadap Ideologi terbuka memiliki tiga unsur yang harus selalu dikembangkan dan dihidupkan agar ideologi menjadi berkembang dan tahan uji. Ketiga unsur tersebut adalah: [5]

3 Riyanto Widisuseno, *Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, HUMANIKA Vol. 20 No. 2 (2014), hlm. 62.

4 Riyanto Widisuseno, Ibid., hlm. 62-63.

5 Dwi Sulisworo, et.al, Pancasila, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, Universitas Ahmad Dahlan, 2012, hlm. 7.

Tabel 1 Unsur Ideologi

UNSUR	PENJELASAN
Nilai dasar dimensi idealitas	Nilai dasar berupa kelima nilai pokok dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan bersifat tetap.
Nilai instrumental dimensi normative/fleksibilitas	Nilai instrumental merupakan alat/ media bagi terwujudnya nilai dasar. Nilai instrumental berupa norma-norma dan kebijakan-kebijakan, misalnya norma hukum, norma moral,norma agama, norma sosial, GBHN, dan kebijakan lain.
Nilai Praksis dimensi realita	Nilai praksis adalah realisasi cita-cita (nilai dasar) dalam kehidupan setelah diproses dengan norma atau kebijakan yang dibuat. Nilai praksis ini bersifat nyata, dan selalu memiliki kesenjangan dengan nilai dasar. Jika terjadi kesenjangan antara nilai dasar dan nilai praksis, maka yang seharusnya berperan adalah dimensi normatif

Sejak 17 Agustus 1945, setelah memproklamasikan kemerdekaan, para pendiri negara telah membangun Indonesia di bawah negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dalam UUD 1945 sebelum perubahan, khususnya dalam penjelasan umum yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan (machtsstaat). Setelah Perubahan UUD 1945, Pasal 1 (3) juga menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum inilah yang kemudian menjadi landasan bangunan kesejahteraan bagi masyarakat.

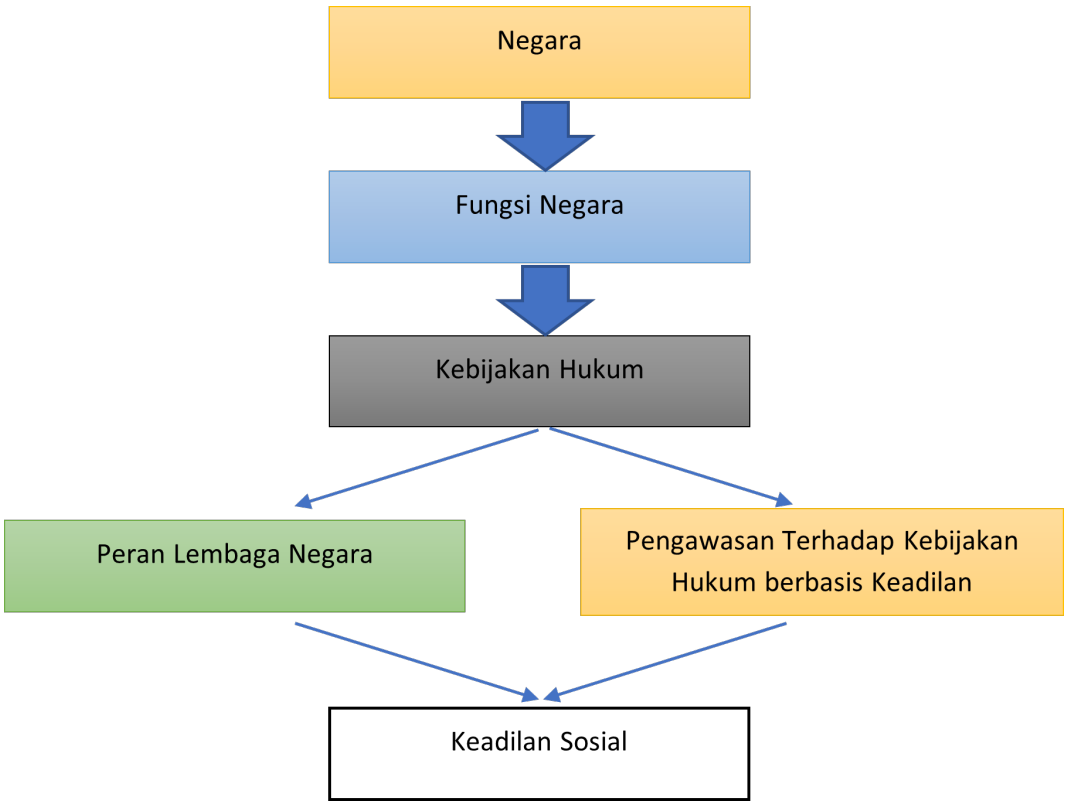
Berdasarkan hal tersebut diatas, Soepomo mengatakan bahwa negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berarti bahwa negara memberi perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik . Hal ini senada dengan pendapat Plato bahwa, penyelenggara negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.

Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (*law truth*). Artinya, pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain. Lahirnya konsep negara hukum antara satu negara dengan negara lain tentunya memiliki perbendaan. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi, sosial, budaya antara satu negara dengan negara lain yang mempunyai perbedaan. Konsep negara hukum barat, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan negara hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan absolutisme sebagaimana yang terjadi di negara *rechtsstaat* maupun *rule of law*.

Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam Batang Tubuh

UUD NRI Tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah pada esensinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, sehingga perangkat peraturan perundang- undangan tersebut dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental harus merupakan penjelasan dari nilai dasar; dengan kata lain, semua perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Paradigma dasar dalam keadilan sosial, tentu dapat dirumuskan secara sederhana dengan sudut pandang kewajiban negara, sebagai berikut:

Bagan 2 Kewajiban Negara



Disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia merupakan persoalan yang sudah di teropong sejak awal, sejak formasi negara Indonesia diperbincangkan di antara para pendiri negara. Meskipun sekarang persoalan ini lebih dibaca sebagai doktrin ideologis, namun dalam sejarahnya formasi negara kesatuan atau negara integralistik yang berkontestasi dengan negara federal amat terkait dengan visi kesejahteraan antar wilayah.[6] Konsepsi kesejhateraan kepada masyarakat tentu tidak hanya terbatas kepada satu aspek semata, tetapi pada seluruh aspek sebagai instrument sehingga dimensi keadilan sosial dapat tercapai.

Meskipun dalam wacana utama maupun sejarah Indonesia disebutkan bahwa negara federal hanya merupakan desain dari Pemerintah Belanda. Namun ide ini berkompetisi dengan negara kesatuan. Cita-cita untuk melakukan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah masih merupakan 'pekerjaan rumah' bersama. Upaya desentralisasi melalui otonomi daerah, maupun beberapa format Daerah Istimewa *(special region)* merupakan langkah politis untuk menghadirkan jalan tengah. Upaya untuk memotong kesenjangan wilayah juga dilakukan dengan desentralisasi meskipun dampaknya belum lagi terlihat. [7]

6 Sujarwoto, et.al, Indeks Keadilan Sosial Indonesia, Jakarta: Terbitkan Oleh The Indonesia Social Justice Network (ISJN) , 2020, hlm. 52

7 Sujarwoto, et.al, Ibid., hlm. 52.

Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dalam kerangka itu, Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Prinsip Keadilan Sosial tersebut dituangkan dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut :[8]

Tabel 2 Prinsip Keadilan Sosial

PRINSIP KEADILAN SOSIAL	1. Negara menjamin dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945. 2. Negara menjamin hak setiap penduduk untuk secara mandiri menganut agamanya dan beribadat menurut agama atau kepercayaannya. 3. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam urusan publik . 4. Pertahanan dan keamanan negara. 5. Bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan bahwa pemerintah wajib membiayainya. 6. Hendaklah pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan kinerja pendidikan nasional. 8. Bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 9. Bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan rakyat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 10. Negara menghormati dan melestarikan bahasa daerah sebagai khazanah budaya nasional. 11. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan bahwa produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 12. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

8 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK RI, Modul Pancasila Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstituional Warga Negara, Mahkamah KOnstitusi 2015, hlm. 23-25.

	13. Dalam hal ini, perekonomian nasional harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, menurut prinsip-prinsip solidaritas, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kedalaman lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 14. Anak miskin terlantar diasuh oleh Negara. 15. Bahwa Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi semua dan memperkuat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 16. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan publik yang memadai.

Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, asas persatuan Indonesia, dan asas demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Konsepsi keadilan Rawls menunjukkan dukungan dan pengakuan yang kuat terhadap hak dan kewajiban manusia, baik secara politik maupun ekonomi. Secara khusus, konsep keadilan membutuhkan partisipasi yang sama dari semua warga negara dalam semua proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan seluruh struktur sosial yang mendasarinya memang mampu mengamankan kepentingan semua pihak.[9]

Dari sudut pandang politik, konsepsi Rawls tentang keadilan dibentuk pada tiga poin utama: (1) hak atas partisipasi politik yang setara; (2) hak warga negara untuk tidak taat; dan (3) hak warga negara untuk menolak sesuai dengan hati nuraninya. Ketiganya menjadi ekspresi institusional dari prinsip keadilan pertama dalam teori keadilan Rawls. Konsep keadilan ini menjadi dasar dalam upaya untuk menciptakan hakikat dari keadilan itu sendiri.

Asumsi dasar dalam konstruksi bangunan keadilan sosial dalam dimensi kebijakan hukum bersumber dari resposinfnya hukum dalam kerangkan kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara, sehingga hal ini mendorong dala kebijakan hukum akan membangun paradigma terbuka, bahwa hukum dibangun untuk kepentingan rakyat dan sejalan dengan nilai-nilai utama yang dikonstruksikan dalam pola relasi Pancasila dengan nilai-nilai asli nusantara sebagai dasar dari terbentuknya Indonesia saat ini.

3. KESIMPULAN

Paradigma Pancasila dalam persepektif filsafati menggambarkan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai system tertinggi dalam tatanan nilai kehidupan bangsa Indonesia, sehingga kebijakan-kebijakan hukum yang dikelurakan oleh negara tentu harus didasarkan kepada Pancasila. Dalam prinsip-prinsip keadilan sosial, Pancasila sebagai sumber nilai yang menjadi dasar dalam konstruksi dalam pembangunan kebijakan hukum yang berkeadilan sosial. Kebijakan hukum yang berkeadilan sosial, merupakan instrument yang dibangun dari makna hakiki dari keadilan sosial yang dirumuskan oleh pendiri negara dengan dasar keadilan sosial.

9 Iqbal Hasanuddin, keadilan Sosial:Telaah atas Filsafat Politik John Rawls, REFLEKSI, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Sulisworo, et.al, *Pancasila, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional,* Universitas Ahmad Dahlan, 2012.

Deby Sabina, *Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya*, Jurnal Pendidikan Tambusa, Volume 5nomor 3tahun 2021.

Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila,* http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2015/08/buku-modul-kuliah-pancasila.pdf dikases pada tanggal 9 juni 2022.

Iqbal Hasanuddin, *Keadilan Sosial:Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls,* Refleksi, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018.

Puji Ayu Handayani dan Dinie Anggraeni Dewi, *Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara* Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No.1 Juni 202.

Riyanto Widisuseno, *Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara,* Humanika Vol. 20 No. 2 2014.

Widiatama, Et. Al, *Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia,* Jurnal Usm Law Review, Vol. 3 No. 2, 2020,.

Sujarwoto, et.al, *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*, Jakarta: Terbitkan Oleh The Indonesia Social Justice Network (ISJN), 2020.

Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi MK RI, *Modul Pancasila Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstituional Warga Negara,* Mahkamah Konstitusi 2015.

DEMOKRASI DESA MENURUT MOHAMMAD HATTA: GAGASAN PEMILU KERAKYATAN DI INDONESIA

Saepul Rochman[1], Hery Dwi Utomo[2], Ucuk Agiyanto[3], Iwan Mariono[4]

[1] Universitas Darussalam Gontor, [2], [3]Universitas Muhammadiyah Ponorogo, [4]

e-mail: [1]rochmanson@gmail.com, [2]herisolo007@gmail.com, [3]ucukagiyantots@gmail.com, [4]iwanmariono@gmail.com

Abstrak

Mohammad Hatta adalah salah satu proklamator Negara Republik Indonesia (NRI) dan tokoh yang memperkenalkan konsep demokrasi desa atau kerakyatan yang cenderung mengafirmasi negara federal. Dalam makalah ini akan dituliskan mengenai penerapan gagasan demokrasi desa dalam konteks pemilihan umum, khususnya pemilihan eksekutif dan legislatif yang disebut demokrasi kerakyatan. Metode penulisan menggunakan metode doktrinal (normatif) dengan pendekatan konseptual yaitu mengimplementasikan konsep demokrasi desa dalam pemilu eksekutif dan legislatif. Data diperoleh melalui dokumentasi dan inventarisasi yang dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan hasil penelitian. Hasil kajian terhadap Demokrasi Desa menunjukan bahwa pemilu eksekutif dan legislatif berbasiskan permusyawaratan yang dilaksanakan secara bertingkat (plebisit). Pemilu Kerakyatan dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan yang bermula dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintahan Pusat. Demikian juga pemilihan legislatif dilaksanakan mulai dari Dewan Perwakilan Desa (DPR-Des), Dewan Perwakilan Kecamatan (DPR-K), Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD-Prov) hingga Dewan Perwakilan Rakrat Republik Indonesia (DPR-RI). Hanyasaja kekurangan Pemilu Kerakyatan tidak lagi memposisikan Partai sebagai lembaga yang sepenuhnya mewakili kedaulatan rakyat

Kata Kunci: Pemilu, Kerakyatan, deliberatif, Non-Partai.

Abstract

Mohammad Hatta is one of the proclaimers to the Nations of Republic Indonesia (NRI) and a main actor who explained the concept of village democratic system, which is tended to federal state system. This article discussed about the implementation of village democratic system in the general election in the case of Indonesia, especially on executive and legislation general election is called populist election (pemilu kerakyatan). The method uses a doctrinal (normative) with a conceptual approach, to implementing the concept of village democracy in executive and legislative elections. Data obtained through documentation analyzed descriptively with the aim of describing the results of the study. The result of this study showed that Hatta's populist election explains that the executive and legislation election based on the deliberative democracy. Democratic election is taken by the small forum from the villages to districts and cities, provinces and then central government (plebisit). Furthermore, the practice legislation election is start from Village Legislation Council (DPR-Des), District Legislation Council (DPR-K), City Legislation Council (DPRD), Provinces Legislation Council (DPRD-Propinsi), and The House of Representative of Republic Indonesia (DPR-RI). However, shortage of the populist General Election system will repeal the party election system which is at this time totally grasps the sovereignty of the peoples.

***Keywords**: general election, Populist democracy, deliberative, Non-Party*

1. PENDAHULUAN

Mohammad Hatta adalah salah satu proklamator kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NRI). Menjelang tahun 1945 keterlibatannya sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersama-sama dengan tokoh-tokoh ulama dan pejuang revolusi lainnya memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia menghasilkan

kesepakatan bersama tentang dasar NRI yang baru dilahirkan. Hatta juga terlibat dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sekaligus sebagai pembaca naskah proklamasi mendampingi Soekarno.

Pada masa orde lama, Hatta menjabat sebagai wakil presiden hingga ia mengundurkan diri pada tahun 1956. Penyebab perpecahan dwi tunggal Soekarno Hatta (Rahmat: 1992), adalah akibat dari perbedaan pandangan politik yang menajam, bagi Hatta alasan pengunduran dirinya karena Soekarno cenderung memonopoli kekuasaan, oleh karena itu jabatan wakil presiden pada periode 1950-1956 (Ramdhan: 2015) hanya berfungsi sebagai wakil kepala negara, sehingga hanya terbatas pada kekuasaan nominal saja. Alasan lainnya adalah karena DPR tidak menetapkan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden dengan peranan yang seharusnya dalam sistem presidensial (Noer: 2015).

Pasca pengunduran diri Hatta dari jabatan Wakil Presiden (Humaidi: 2020), Soekarno lebih leluasa untuk menguburkan sistem partai dan mengganti sistem parlementer dengan demokrasi terpimpin. Kekecewaan juga terlihat dari beberapa panglima daerah yang menuduh Soekarno melakukan sentralisasi yang berlebihan, mengabaikan pembangunan di luar jawa dan terlalu lemah terhadap komunisme. Pecahnya Dwi tunggal Soekarno Hatta (Hakiem: 2008) yang dianggap sebagai representasi Jawa dan Luar Jawa mengancam keutuhan bangsa yang terindikasi dari berbagai usaha-usaha pemberontakan di daerah seperti PRRI-Permesta.

Sejak Orde Lama Hatta tidak berafiliasi ke partai apapun, tetapi sebagai wakil presiden ia yang menandatangani Maklumat Presiden 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik, tetapi Hatta tidak pernah menjadi bagian dari anggota partai mana pun. Inilah perbedaan antara Soekarno dan Hatta. Menurut Deliar Noer perbedaan antara Soekarno dengan Mohammad Hatta adalah "Soekarno lebih suka menghadapi massa, Hatta lebih suka mendidiknya" (Noer: 2012). Hatta membangun institusi pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), sebaliknya Soekarno membangun Partai Nasional Indonesia (PNI). Bagi Hatta sistem pengerahan massa dan agitasi tidak pada tempatnya dijadikan suatu sistem dalam kepartaian (Swantoro: 2017). Lagi pula menurut Hatta, sistem partai sangat tergantung pada pemimpinnya, "Jika pemimpin partai mati, maka matilah partai itu".

Artikel ini akan menguraikan sistem pengambilan keputusan yang demokratis menurut Hatta yang selanjutnya konsep itu akan diterapkan untuk mendesain pemilihan umum di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa selama Indonesia merdeka, sistem suksesi nasional mengalami dinamika yang berubah-ubah. Pada masa orde lama (Santoso dam Budhiati: 2019) pada tanggal 18 Agustus 1946 Soekarno berkuasa selama 27 tahun, ia dipilih secara aklamasi sebagai Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI), kemudian dilaksanakan Pemilu Pertama pada tahun 1955 dengan jumlah partai sebanyak 29 Partai Politik, dimana PNI sebagai pemenang, berurutan di bawahnya Partai Masyumi, Partai Nahdatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Kuntowijoyo keberadaan partai-partai pada masa Orde Lama disebabkan politik aliran (Kuntowijoyo: 2018). Di dalam tubuh partai semua orang diterima, PKI misalnya meskipun menganut sistem kelas, tetapi menerima ambtenaar yang dari kalangan *priyayi,* yang merupakan kebalikan dari *wong cilik.* Puncak dari konflik pada tahun 1965 itu justru karena janji-janji menarik PKI tentang distribusi tanah kepada petani hingga memunculkan konflik antara tuan tanah yang menggunakan fanatisme agama melawan kepentingan petani yang diwakili oleh komunisme.

Selanjutnya Soekarno dikukuhkan (Akili dan Moonti: 2022) melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS tahun 1963 tentang pengangkatan Dr. Ir. Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup, hingga awal Orde Baru menyusul terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) pada 11 Maret 1966 yang diartikan oleh Soeharto sebagai pengambilalihan kekuasaan sebagai

akibat dari kegagalan Soekarno dalam mempertanggungjawabkan G 30-S/PKI (Adiwidjaja: 2020).

Pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto yang berlatarbelakang militer terjadi karena pada masa demokrasi terpimpin, tokoh-tokoh yang berbasis kekuatan sipil dipenjarakan oleh Soekarno, tahanan-tahanan politik seperti Mochtar Lubis, Isa Anshary, Gozali, Hamka, Sjafrudin Prawiranegara, Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan lain-lain, menunjukan kekuasaan Soekarno yang mutlak karena memiliki *exorbitante rechten* (hak luar biasa) yang pada masa kolonial ditentangnya (Hatta dan Gde Agung: 1987). Istilah kontra-revolusi (Handoko: 2017) pada dasarnya mengingatkan pada Undang-Undang No 1920 zaman kolonial yang disebut *Anti Revolutie Wet* (Undang- Undang Anti Revolusi) sebagai akibat revolusi Rusia yang membunuh Kaisar/Tzar Nicolaas II dan seluruh keluarganya. Selain itu sejak masa revolusi (1945-1949) tentara selalu menjadi rebutan partai-partai politik agar ditundukkan atau mendukung usaha-usaha para politisi (Said: 2018).

Pada masa Orde Baru, (partai-partai Islam digabungkan menjadi satu partai persatuan pembangunan (PPP), Partai Nasional Indonesia dan lainnya digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tetapi Partai Golongan Karya (Golkar) yang didirikan oleh Soeharto dan Suhardiman selalu memenangi pemilu dari tahun 1971-1997, karena itu Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun (Nadlirun: 2012). Sistem demokrasi pada masa Orde Baru dilaksanakan dengan sistem pemilihan umum tidak langsung oleh partai. Orde baru (Hisyam: 2012) menempatkan posisi eksekutif sebagai yang sentral, sementara pembagian kekuasaan antara badan-badan legislative dan yudikatif ditiadakan. Negara pada masa ini dipahami sebagai negara pejabat, rakyat dan massa tidak boleh tampil dalam panggung politik.

Barulah pada masa reformasi sistem pemilihan umum dilaksanakan secara langsung melalui sistem *one man one vote* hingga saat ini. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/ PUU-XI/2013 tanggal 24 Januari 2014, yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada Pemilu 2019, maka landasan pemilu 2019 diatur lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Akan tetapi pemilihan langsung ini tidak berjalan dengan aman dan tertib, terbukti dengan adanya evaluasi dari pusat penelitian keahlian DPR-RI (Prayudi: 2019) yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2019 diwarnai gugatan dan konflik penanganan sengketa pemilu yang lebih luas dibandingkan pemilu 2014, masih terjadinya persoalan klasik menyangkut daftar pemilih tetap (DPT) dan jatuhnya korban jiwa dengan jumlah yang siginifikan, tercatat sebanyak 894 petugas yang meninggal.

Selain itu dari penelusuran yang dilakukan oleh Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, (Oktaryal dan Hastuti: 2021) sepanjang tahun 2004 hingga 2019 terdapat 1152 kasus yang melibatkan pejabat publik dan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 397 orang di antaranya menduduki jabatan politik, rinciannya 257 orang anggota DPR/ DPRD, 21 orang gubernur, dan 119 orang adalah bupati/walikota dan wakil yang notabene hampir keseluruhan berlatar belakang dari parpol. Data korupsi tersebut mempengaruhi persepsi pemilih untuk pemilu mendatang terutama untuk memilih abstain (golput).

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dilakukan secara doktrinal (*normative legal research*) dengan langkah-langkah studi kepustakaan, data diperoleh melalui dokumentasi dan inventarisasi berupa bahan-bahan hukum sekunder, teknik analisis data dilaksanakan secara deskriptif–analitis dengan tujuan untuk menggambarkan hasil penelitian secara naratif disertai analisis kausalitas atas penjelasan-penjelasan hubungan berbagai faktor dengan pendekatan konseptual.

3. PEMILIHAN UMUM KERAKYATAN

3.1. Hatta dan Demokrasi Desa

Dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi Kita,* Hatta menuliskan bahwa demokrasi di Indonesia berbeda dengan Rousseau yang individualistis yang melayani kapitalisme Penolakan Hatta terhadap Kapitalisme pada dasarnya wajar mengingat pengalamannya sebagai pribumi dan bangsa Indonesia pada umumnya yang pernah berada di bawah kolonialisme Belanda. Lebih dari itu Hatta (Hatta: 2017) nampaknya setuju dengan Syahrir yang menyatakan bahwa kapitalisme memperbanyak jumlah manusia yang tak punya harta dan terpaksa hidup sebagai buruh saja *(nur-arbeiter)*dan menambah penderitaan rakyat (*verlendung*), karena itu bertolak belakang dengan semangat kemerdekaan.

Sebaliknya demokrasi (Hatta: 1966) harus berakar dalam pergaulan sendiri yang bercorak kolektivisme. Makna kolektivisme ini berlainan dengan sosialisme barat yang hanya bertumpu pada perikemanusiaan, tetapi juga harus mengakomodasi kebenaran, keadilan ilahi dan persaudaraan antar manusia sebagai sama-sama makhluk tuhan. Selain itu juga harus berdasarkan praktik demokrasi pada masa raja-raja nusantara dimana menurutnya di dalam desa-desa sistem demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat. Demokrasi Indonesia memiliki lima unsur yaitu: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Demokrasi desa yang begitu kuat hidupnya juga menjadi dasar bagi pemerintahan otonomi yang luas di daerah-daerah sebagai cerminan dari "pemerintahan yang diperintah", suatu konsep negara federal.

Apa yang dimaksudkan Hatta bahwa demokrasi harus berakar pada tradisi asli Indonesia adalah berkaitan dengan konsep *Adat Bajanjang Naik Batanggo Turun* merupakan suatu pedoman bagi orang Minangkabau dalam mengambil sebuah keputusan harus dilakukan secara bertahap dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Mohammad Hatta mengkritik demokrasi terpimpin yang sentralisitik dan feodal karena bersifat seumur hidup, dilatarbelakangi oleh kecenderungan ia pada negara federal dan dipengaruhi prinsip-prinsip adat Minangkabau. Dari sini terjadi perbenturan tafsir antara Hatta dan Soekarno tentang demokrasi asli bangsa Indonesia. Dimana Soekarno menyatakannya dalam bentuk manifesto politik (Azhari: 2017). Sementara Hatta menyampaikannya dalam buku demokrasi kita.

Secara filosofis konsep adat Minangkabau diwujudkan dalam alur: "*Kamanakan barajo ka mamak/Mamak barajo ka pengulu/Pangulu barajo ka mufakat/Mufakat barajo ka nan bana/Bana badiri sandirinyo/Bana manuruik alua jo patuik/Manuruik patuik jo mungkin.* (kemenakan mengikuti paman/paman mengikuti penghulu/penghulu mengikuti mufakat/ mufakat mengikuti yang benar/yang benar berdiri dengan sendirinya/benar menurut yang patut/menurut yang patut dan mungkin). Hatta menjelaskan praktik mufakat demokrasi Minangkabau yang berasal dari bawah selanjutnya mewakilkan ke penghulu yang berorientasi pada kebenaran atau hikmah sebab itu kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan organisasi-organisasi keagamaan turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menjadi bagian sentral dari demokrasi di Indonesia sama seperti kedudukan cerdik pandai dan ulama (Hatta: 1976).

Relasi dialektis yang bersifat naturalistik dalam demokrasi desa, menurut Eugen Ehrlich menjelaskan kenyataan yang anormatif menjadi normatif (Wardiono dan Rochman: 2019). Dalam demokrasi desa ditemukan beberapa konsep yang relatif sesuai dengan Ehrlich antara lain kebiasaan, kekuasaan efektif; milik efektif dan pernyataan kehendak pribadi. Kesemuanya itu dihubungkan dengan relasi hukum dan ekonomi, sebab itu pada

saat awal-awal kemerdekaan. Hatta secara objektif menyadari bahwa Indonesia belum mampu menjalankan rencana kemakmuran sosial sebagaimana semboyan Lord Beveridge, "Jaminan dari buaian sampai ke liang kubur", karena orang-orang terbaik di Indonesia telah mempergunakan hidup mereka untuk berjuang melawan kolonialisme yang telah merampas demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Akan tetapi di Indonesia didapati tradisi yang amat kuat di desa-desa untuk memberikan bantuan kerjasama kepada yang kekurangan. Tradisi ini diperkuat oleh perintah-perintah agama, Islam memerintahkan agar memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kewajiban ini menjadi bagian dari tradisi demokrasi di Asia pada umumnya (Hatta:2001).

Hatta yang menerangkan bahwa sekalipun agama dan ilmu terpisah namun keduanya memiliki hubungan yang saling mengisi satu sama lain. Ilmu dan agama harus memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dan perdamaian. Menurutnya Islam tidak mengatur ihwal ibadah dan amal, tetapi mengatur juga sikap hidup manusia di dalam pergaulan, menentukan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara serta menentukan dasar-dasar pemerintahan demokrasi melalui *musyawarah.* Cara melaksanakan pemerintahan demokrasi itu diserahkan kepada manusia yang berakal, dengan keinsafan akal itu merupakan anugerah dari Tuhan (Hatta: 2020). Oleh sebab itulah maka praktik musyawarah ini melibatkan *niniak mamak* (saudara laki-laki ibu), *alim ulamo* (alim ulama), *cadiak pandai* (orang yang cerdik dan berpengetahuan luas). Tiga orang ini disebut juga dengan istilah *tigo tungku sajarangan* (tiga tungku sejerangan).

Dengan demikian, demokrasi desa menurut Hatta terilhami dari adat Minangkabau yang karena itu pada saat ia menafsikan sila ke-IV Pancasila yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" berarti rakyat yang mampu memikul tanggung jawab seharusnya dipimpin oleh kebenaran agama, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh ulama dan cerdik pandai. Selanjutnya, *"…. dalam permusyawaratan atau perwakilan"*, hendaknya ditafsirkan sebagai proses pengambilan keputusan dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga pemerintah pusat. Hatta menyebutkan konsep ini dengan Demokrasi Desa. Khususnya sebagai sistem pemilu dapat disebut dengan nama sistem pemilu kerakyatan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat yang dicirikan dengan permusyawaratan dan perwakilan.

Pola pemilu kerakyatan seperti ini pernah terjadi pasca disetujuinya perjanjian Renville menyusul diusulkannya Mosi Integral Natsir dalam rangka menyatukan kembali wilayah-wilayah Indonesia yang terpecah-belah untuk bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasca perjanjian Renville, (Hatta: 2018) Indonesia terbagi ke dalam tujuh negara yang sebagiannya dikuasai Belanda. Hatta menuliskan alasan persetujuan perjanjian Renville itu karena adanya *plebisit* yang mirip dengan *referendum*, yang dilaksanakan dengan cara pemungutan suara untuk bergabung dengan republik atau sebagai negara persemakmuran Belanda.

Lagi pula praktik *plebisit* juga pernah dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono IX (Kahin: 2013) untuk memilih perangkat desa yang melibatkan masyarakat sipil yang berusia di atas 18 tahun. Perubahan pemilihan pejabat pedesaan ini dinilai paling penting sebab semakin ditiru dihampir seluruh wilayah jawa dan di tempat lain dengan berbagai variasi dan adaptasi menyesuaikan dengan keadan setempat. Selain itu perubahan *plebisit* ini lebih demokratis dibandingkan dengan rezim kolonial mengizinkan agar kepala desa dipilih oleh rakyat; dia kemudian menunjuk pejabat-pejabatnya. Hak suara dibatasi pada pemilik tanah saja.

Dengan sistem Hamengkubuwono IX, majelis desa dipilih oleh perwakilan kelompok yang masing-masing terdiri atas empat atau lima keluarga. Majelis desa ini (berjumlah

400 anggota) kemudian memilih dewan perwakilan rakyat yang memiliki 30 anggota. Rasionalisasi pemerintahan secara umum tercapai dengan penggabungan desa- desa kecil sehingga terjadi pemusatan sumber daya desa; pendidikan, irigasi, peminjaman dan koperasi dapat dimanfaatkan lebih efektif, hingga mampu mensubsidi desa-desa lainnya dengan pengembalian modal untuk memperkuat industri desa.

3.2. Pemilihan Umum Eksekutif dan Legislatif

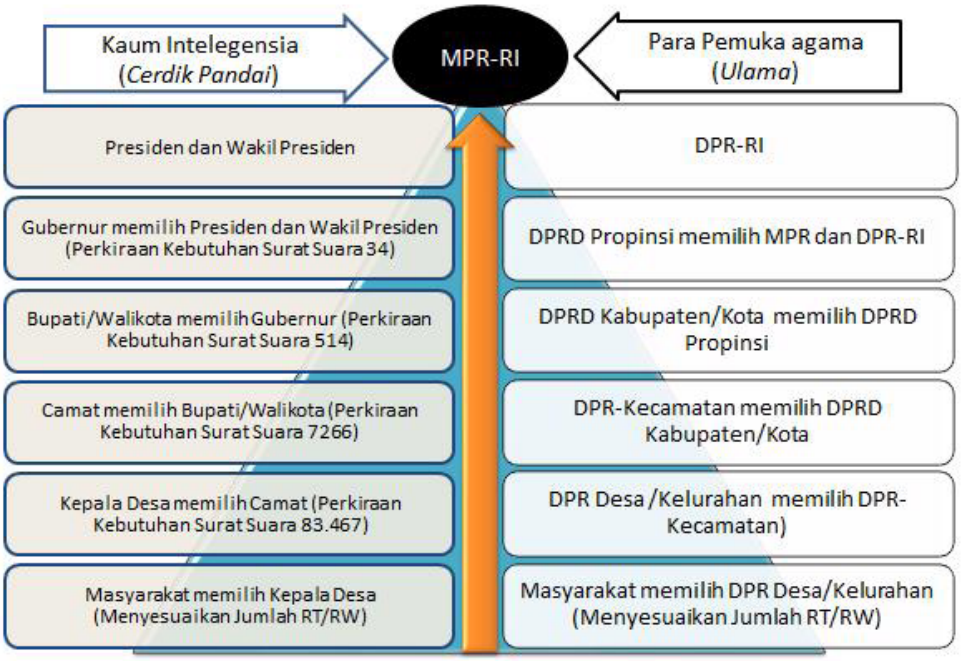
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari wilayah administratif yang bertingkat-tingkat mulai dari rukun tetangga, rukun warga, desa, kecamatan, kabupaten/ kotamadya, propinsi dan pemerintah pusat. Lembaga-lembaga administratif itu memiliki sejarahnya sendiri dalam hubungannya dengan masa-masa kolonial Belanda dan Jepang. Khususnya isitilah rukun tetangga (*toniragami*) digunakan oleh Jepang untuk memobilisasi *romusha,* dan dalam rangka menjaga kestabilan pikiran rakyat dan perangkat propaganda politik serta mobilisasi massa agar mudah dipekerjakan atau membela kepentingan Jepang. Menurut Aiko Kurusawa,(Kurosawa: 2015) selama tiga tahun berkuasa pemerintahan Jepang telah mengubah konstruksi sosial pedesaan dengan lahirnya sistem administrasi pemerintah unit terkecil masyarakat, yang disebut rukun tetangga telah mempengaruhi cara pandangan hidup pribumi tentang fungsi negara dalam bidang hukum perburuhan, pertanian, pengajaran agama Islam, pendaftaran ulama pemerintah dan pelatihan alim ulama dalam tujuannya sebagai proksi bagi kepentingan Jepang.

Pasca kemerdekaan RT difungsikan untuk pengawasan dan keamanan.Sistem ini menurut Denys Lombard memungkinkan adanya pengawasan politik yang ketat dan efisien. Setelah tahun 1965, sistem ini menjadi mata-mata yang mengontrol identitas (Lombard: 1996). Model pengawasan RTRW tetap berlaku sampai sekarang sebagai birokrasi yang dianggap mengurusi persoalan perizinan yang kurang dianggap penting oleh penduduk. Akan tetapi sistem pengawasan RTRW tetap dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap radikalisme, terorisme dan ekstrimisme (Firdaus dan Almubaraq: 2022).

Keberadaan RTRW ini dilegalisasi oleh berbagai aturan seperti pada masa orde baru ditemukan permendagri No. 7 tahun 1983, Menetara pasca reformasi diberlakukan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi. Keberadaan RT/RW dapat dijadikan dasar pendelegasian kekuasaan bagi pemerintahan desa dan permusywaratan/perwakilan desa, sehingga besarnya kuantitas personil yang menjabat sebagai dewan permusyawaratan desa bergantung pada kuantitas RT/RW yang ada. Sebaliknya dalam kaitan dengan perangkat desa perlu atau mengacu kepada peraturan yang telah ada.

Saat ini Berdasarkan Kepmendagri No. 050-145/2022, secara proporsional saat ini Indonesia memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7266 Kecamatan, 8506 Kelurahan, dan 74961 Desa. Hal ini secara otomatis menentukan kebutuhan surat suara, jumlah kursi dan menentukan daerah pemilihan (Dapil). Selain itu perlu pendataan desa adat yang ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota, keberadaan kepala desa adat bergantung pada hukum adat. Menurut pemilu kerakyatan, diperlukan perubahan sistem daerah pemilihan (Dapil) yang ditentukan secara proporisional berdasarkan jumlah propinsi, Kabupaten/Kota. Jika setiap kelurahan memilih satu kepala desa dan satu orang dewan permusyawaratan desa maka surat suara yang diperlukan adalah dua kali lipat dari jumlah daerah pemilihan.

Berbeda dengan pemilihan eksekutif, proses pemilihan legislatif disesuaikan dengan kuantitas rukun warga/rukun tetangga akan terjadi penyesuaian juga. Artinya Pemilu kerakyatan juga akan menyusutkan jumlah anggota DPR-RI sesuai dengan jumlah propinsi yang diwakili kecuali ditentukan bahwa perwakilan propinsi lebih dari satu orang. Dengan cara ini proporsionalitas kewilayahan akan terwujudkan karena seseorang dipilih berdasarkan *personal piety* yang dikenal secara langsung oleh pemilih di setiap tingkatan wilayah.



Gambar. 1. Pemilu Berbasis Kerakyatan Menurut Hatta

Berdasarkan konsep Hatta tentang pemilu kerakyatan maka pemilihan eksekutif dan legislatif dapat mempertimbangkan untuk menggunakan sistem pemilihan bertingkat yang dimulai dari memilih kepala desa, kepala-kepala desa itu memilih camat, para camat memilih bupati/walikota, para bupati/walikota memilih gubernur, dan para gubernur itulah yang memilih presiden dan wakil presiden. Demikian juga pemilihan legislatif dimulai dari pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi dan pemerintah Pusat. Kondisi saat ini menunjukan bahwa eksistensi partai politiklah (Mubiina: 2020) yang menentukan terselenggara atau tidaknya sistem demokrasi di Indonesia. Sebab dalam partai politik terdapat bentuk pelembagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat yang demokratis. Sebab itulah maka perlu *rebooting* atas fungsi kedaulatan parlemen agar sepenuhnya memperjuangkan rakyat yang memilihnya.

Permasalahan yang berkaitan dengan pemilu seperti kriteria kandidat, komitmen, lahirnya pemimpin yang agresif-manipulatif, dan pemilu sebagai arena taruhan (Parera dan Tanya: 2018) melalui pemilu kerakyatan dapat diselesaikan karena pada lapisan bawah kandidat benar-benar dikenal oleh masyarakat desa, tetapi pada tingkatan yang lebih luas akan menjadi penting untuk menegaskan kriteria kandidat seperti pada pemilu 2019 yang lalu juga adalah tentang syarat-syarat presiden dan wakil presiden yang lebih rendah kualifikasinya dari persyaratan rekrutmen di perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti syarat pendidikan dan kemahiran berbahasa Inggris. Padahal ia akan menentukan kebijakan bagi perusahaan-perusahan swasta dan memimpin perusahan-

perusahaan BUMN serta mewakili di dunia internasional. Setidaknya berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam hal diperlukan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu selain Bahasa Indonesia pada forum internasional. (2) Bahasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahasa resmi Perserikatan BangsaBangsa yang terdiri atas bahasa Inggris, Prancis, Cina, Rusia, Spanyol, dan Arab, serta bahasa lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional.

Kelahiran pemimpin yang memanfaatkan kelemaham rakyat pun bisa dicegah atau diatasi karena rakyat bisa dengan mudah mencabut mandat melalui lembaga-lembaga eksekutif atau legislatif, Selama ini menurut (Hoessien: 2021) keberadaan wakil rakyat dipandang cenderung lebih mementingkan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat, padahal DPR (Pusat Data dan Analisa Tempo: 2019), bisa menggunakan Hak Interpelasi untuk membela kepentingan rakyat, namun disebabkan karena wakil rakyat disediakan oleh partai untuk dipilih oleh rakyat dan pemenang pilpres umumnya dari partai yang berkuasa maka ketergantungan pada partai pada akhirnya melemahkan ketergantungannya pada masyarakat.

Pemilu sebagai arena taruhan juga dapat diatasi karena kandidat tidak perlu memberikan mahar kepada ketua partai politik, tetapi cukup dengan menghasilkan banyak karya dalam bidang sosial maka ia akan dikenal dan pada saat mencalonkan diri bisa terpilih. Dalam pilkada 2019, karena menganggap pilkada sebagai arena taruhan, politik uang di daerah masih marak terjadi (Darma: 2022), Bawaslu mencatat lebih 929 kasus pelanggaran. Selain itu yang harus diantisipasi adalah konflik sosial dan kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban pun harus diperhatikan seperti pemberontakan yang mengerikan seperti 1948, oleh PKI pimpinan Musso di Madiun yang mencapai 1920 orang, meskipun tidak membuatnya menjadi partai pemenang tetapi PKI bisa masuk di lima besar, dan cukup untuk memukul basis massa partai Islam. Pemilu kerakyatan yang berbasis pada desa akan sangat bergantung pada keamanan desa itu sendiri. Melalui pemilu kerakyatan para pejabat eksekutif maupun legislatif akan sangat berhati-hati karena bisa diganti dalam waktu singkat oleh rakyat apabila tidak mampu merealisasikan janji-janji politiknya.

3.3. Kelebihan dan Kekurangan

Menurut Polybios kekuasaan pada dasarnya hilang berganti dalam suatu siklus (Haboddin: 2015). Dalam konteks pemilu Indonesia telah mengalami perubahan yang terekskalasi dengan cepat. Pada awalnya rakyat yang berkedaulatan dengan adanya fatwa jihad dari KH. Hasyim Asy'ari dan pengusiran terhadap penjajahan. Jika diperhatikan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan diatur pada Pasal 1 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi setelah perubahan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan tersebut (Kusnadi dan Saragih: 1994) apabila ditafsirkan secara dialektis mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, namun harus konsitusional atau terjadi perubahan paradigma dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan hukum *(rechts-souvereinteit*) kecuali dilakukan perubahan dalam sistem hukum itu sendiri.

Kenyataannya melalui pemilu rakyat memang menjadi sumber kedaulatan konstitusional, namun setelah rakyat memberikan suara kepada partai maka terjadilah pergeseran dari kedaulatan rakyat ke arah kedaulatan partai untuk memilih presiden dan

parlemen. Partai dalam hal ini berfungsi untuk menyediakan calon presiden dan menciptakan kedaulatan parlemen dan berpengaruh dalam pembentukan hukum dan membatalkannya (Azis dan Izlindawati: 2018). Dari sini Pemilu kerakyatan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

Keuntungan lainnya adalah pendidikan politik masyarakat desa akan lebih hidup, karena kedaulatan rakyat pada tingkat desa akan lebih menentukan bagi kekuasaan di atasnya, juga akan berimplikasi pada perubahan perpolitikan nasional yang semula terkonsentrasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau DPR-RI, akan terdesentralisasi di desa-desa sekaligus dimungkinkan menekan anggaran biaya negara untuk pelaksanaan pemilu yang diperkirakan pada pemilu 2024 sebesar Rp. 110 triliyun dan terukurnya jumlah pemilih akan mempermudah bagi pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraanya maupun pengawasannya.

Adanya kemudahan untuk melakukan pemakzulan (*impeachment),* sebagai bentuk protes seperti disebutkan oleh Hatta sebebagai "hak protes bersama dan menyingkir dari kekuasaan raja", adalah jika presiden dinilai tidak mampu merealisasikan janji-janjinya dan mudah juga mengangkat presiden/wakil presiden yang baru karena dipilih oleh gubernur-gubernur di setiap propinsi. Ekspresi-ekspresi pemakzulan sudah muncul sejak 1952 hanya dalam bentuk yang kurang elegan dan lalim, berupa percobaan pembunuhan presiden. Pemakzulan yang paling nyata adalah pada kasus Bruneigate, dimana Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya. Ekspresi pemakzulan juga muncul dalam opini pencabutan mandat pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Pasca Gusdur, pemakzulan presiden mustahil dilakukan jika tidak disebabkan presiden melakukan tindak pidana, juga disebabkan MPR-RI tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, karena didegradasi oleh Amien Rais menjadi sejajar dengan DPR, BPK dan Presiden (Asshiddiqie: 2018). Jika ada sengketa antar lembaga maka penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Konsitusi.

Menurut Hamdan Zoelva faktor kekuatan politik sangat menentukan bisa atau tidaknya dilakukan impeachment terhadap seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden (Hadi: 2016). kenyataan tersebut berbeda dengan peristiwa *The Arab Spring*, yang terjadi karena protes bakar diri yang dilakukan oleh Mohammed Bouazizi, melakukan protes terhadap kekejaman pemerintahan lokal di bawah rezim otoriter Ben Ali. Bouazizi melakukan aksi bakar diri yang menarik perhatian seluruh negeri, bahkan dunia (Sahide: 2015). Di Indonesia tragedi bakar diri pernah dilakukan oleh Sondang Hutagalung pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, namun tidak berbuah pemakzulan, karena perbedaan budaya politik. Pemahaman dunia arab terhadap pemimpin yang gagal memenuhi janji politiknya dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan dan kemunafikan, serta dianggap sebagai alasan kuat untuk melakukan pemakzulan. Melalui pemilu kerakyatan pemakzulan dapat dilakukan jika terjadi konsolidasi kehendak rakyat yang mendorong dari *grassroot,* kepada lembaga-lembaga yang mewakilinya.

Demikian juga kelebihan sistem ini akan membuat DPR yang dipilih oleh wakil rakyat di bawahnya akan memiliki keberpihakan pada daerah pemilihannya tanpa harus mengolahnya di rapat-rapat dan mendapatkan persetujuan dari fraksi. Ketergantungan pada struktur di bawahnya akan menjadi faktor dominan dan kemudahan untuk menggantikan wakil rakyat dengan orang yang dinilai lebih kompeten oleh lembaga- lembaga perwakilan yang sebelumnya mendukungnya untuk mendapatkan kursi wakil rakyat.

Kendatipun demikian, kekurangan sistem pemilu kerakyatan adalah menghapus sistem kepartaian yang telah berkontribusi sangat besar bagi bangsa dan negara. Selain itu dengan jumlah pemilih yang mudah dikenali juga menimbulkan risiko yang tinggi karena akan mudah dikuasai jika lembaga-lembaga yang ada di setiap desa, hingga propinsi

tidak lagi berintegritas atau tergoda bujukan materi. Sebab itu pengawasan dan kehendak rakyat harus diperhatikan dengan serius karena jika rakyat dimobilisasi untuk kepentingan pemodal akan mampu mengubah struktur di atasnya, bahkan mengubah dan membatalkan peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Pemilu kerakyatan adalah sistem yang ditawarkan oleh Hatta dan telah dipraktikan pada masa-masa perlawanan terhadap kolonialisme oleh Sultan Hamengkubuwono IX melalui *plebisit* Yogyakarta. Pemilu kerakyatan juga merupakan penafsiran Hatta atas konsep *Musyawarah* yang tercantum pada Sila ke-IV Pancasila dengan mendasarkannya pada tradisi pengambilan keputusan adat Minangkabau. Pemilu Kerakyatan meletakan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan yang merangkak naik secara berjenjang dari desa hingga pemerintahan pusat dan memfungsikan kembali MPR- RI yang merepresentasikan kaum cendikiawan dan agama sebagai struktur tertinggi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adiwidjaja, Ignatius. (2020). *Sistem Politik Indonesia: Sebuah Dinamika Negara Demokrasi dan Ruang Lingkupnya Dalam Bingkai Hubungan Pusat-Daerah di Era Otonomi Daerah (Konsep Teori),* Yogyakarta: Zahir Publishing

Akili, R.H dan Moonti, R.M. (2022) *Hukum Tata Negara,* Gorontalo: Universitas Gorontalo Press

Asshiddiqie, Jimly. (2018), *Perkembangan Baru Tentang Konsititusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik,* Yogyakarta: Gentha Publishing.

Azhari, A. F. (2017), *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia,* Yogyakarta: Gentha Publishing.

Azis, Asmaeny dan Izlindawati, (2018), *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum,* Jakarta: Kencana

Darma, Z.A.R. (2022), *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haboddin, Muhtar. (2015). *Pengantar Hukum Pemerintahan*, Surabaya: Universitas Brawijaya Press

Hakiem, Lukman. (2008), *100 Tahun Mohammad Natsir Berdamai dengan Sejarah,* Jakarta: Republika

Handoko, Duwi. (2017). Asas-*Asas Hukum Pidanan dan Hukum Penitensier di Indonesia,* Pekanbaru: Hawa dan Ahwa

Hatta, Mohammad. (1966), *Demokrasi Kita,* Jakarta: PT. Pustaka Antara

Hatta, Mohammad. (1976). Kumpulan *Karangan Jilid I,* Jakarta: Bulan Bintang

Hatta, Mohammad dan Gde Agung I.A.A, (1987), *Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung:*

Menjunjung Tinggi Keagungan Demokrasi dan Mengutuk Kelaliman Diktator, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Hatta, Mohammad. (2001). *Karya Lengkap Bung Hatta Buku ke-3: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial,* Terj. Sugiarti Sriwibawa, Sori Siregar, Iskandar Ali, Jakarta: LP3ES.

Hatta, Mohammad. (2017). *Karya Lengkap Bung Hatta Buku 5: Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat,* peny. Endang Basri Ananda dan Sori Siregar, Jakarta: LP3ES

Hatta, Mohammad (2018). *Tantangan Dalam Revolusi,* Bandung: Sega Arsy

Hatta, Mohammad. (2020) *Karya Lengkap Bung Hatta Buku ke-7: Filsafat, Ilmu dan Pengetahuan,* peny. Endang Basri Ananda, Sori Siregar, Depok: LP3ES

Hisyam, Muhammad. (2003). *Krisis Masa Kini dan Orde baru,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Humaidi, (2020) *Dari Halim Ke Nirbaya: Pasang Surut AURI Dalam Politik 1962-1966,* Jakarta: UNJ Press

Kahin, G. McTurnan (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia,* Depok: Komunitas Bambu

Kuntowijoyo. (2018), *Petani, Priyayi dan Mitos Politik,* Yogyakarta: Basabasi.

Kurosawa, Aiko. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945,* Cetakan Pertama, Depok: Komunitas Bambu

Kusnadi, Moh dan Saragih, B. R. (1994), *Ilmu Negara,* Jakarta: Gaya Media Pertama Lombard, Denys (1996), *Nusa Jawa: Silang Budaya 2 Jaringan Asia*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama.

Nadlirun (2012). *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia,* Jakarta: PT. Balai Pustaka Noer, Gina S. (2015). *Rudy: Kisah Masa Muda Sang Visioner,* Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.

Noer, Deliar. (2012). *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa,* Jakarta: Kompas

Parera, T.Y dan Bernard. L.T, (2018), *Panorama Hukum dan Ilmu Hukum,* Yogyakarta: Gentha Publishing.

Pusat Data dan Analisa Tempo, (2019), *Sejarah Interpelasi dan Cara Penanganan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo,* Jakarta: Tempo Publishing.

Rachmat, Redi. (1992). *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Persatuan Bangsa: Kasus PRRI,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ramdhan, M.I. (2015). *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika

Said, Salim Haji. (2018). *Bukan Kudeta: Reformasi Militer Indonesia, Mesir, Thailand dan Korea Selatan,* Bandung: PT. Mizan Pustaka

Santoso, Topo dan Ida Budhiati, (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan,* Jakarta: PT. Sinar Grafika

Swantoro, P (2017). *Dari Buku Ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu,* Jakarta: KPG.

Wardiono, Kelik dan Saepul Rochman, (2019). *Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Modernis,* (Surakarta: Muhammadiyah University Press)

Journal article

Agil, Oktaryal dan Hastuti, Proborini. (2021). *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia,* Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7 (1), e-ISSN/p-ISSN: 2615- 7977/2477-118X, DOI: 10.32697/integritas. v7i1.729

Firdaus M. F dan Almubaraq, H.Z. (2022). Optimizing The Empowerment of Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW) to Strengthen Community Participation in Early Detection Radicalism, Extremism, and Terrorism, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* Vol. 05 No. 02, http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v3i2.25342

Hadi, Syofyan. (2016), Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina), *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Februari Vol. 12, No. 23 https://doi.org/10.30996/dih.v12i23

Hoesein, Z.A, Cahyawati, D.P dan Widadi. Eka. (2021). Implikasi keberadaan fraksi partai politik dalam kelembagaan DPR, *Al-Qisth Law Review* Vol 5 No. 1 (2021). https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.44-69

Mubiina, F.A, (2020) Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, DOI: https://doi.org/10.31078/jk17210

Sahide, Ahmad. (2015), The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 4 No. 2/Oktober. http://dx.doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129

Government publication

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI (2019), *Evaluasi Pemilu Serentak 2019,* Jakarta, Indonesia, Prayudi.

AKTUALISASI PANCASILA DALAM ETIKA BERBANSA DAN BERNEGARA

Prof. Dr. Warsono, MS
Universitas Negeri Surabaya
Ketua HIPIIS Wilayah Jawa Timur
Email: warsono@unesa.ac.id

Abstrak

Kertika proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Para pendiri negara berkeyakinan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia mampu mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, Keyakinan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang telah dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga berdasar pada kodrat manusia dan merupakan bagian dari ajaran agama. Namun keyakinan tersebut belum bisa terwujud karena Pancasila belum diamalkan secara baik oleh para elit dan penyelenggara negara, Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para elit politik menunjukan bahwa Pancasila belum tertanam secara kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Perilaku korup bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menjadi penghambat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup seharusnya Pancasila menjadi etika sosial dan etika pribadi yang menjadi pemandu dalam setiap pembuatan undang-udang dan kebijakan pembangunan. Pengamalan Pancasila menjadi keharusan moral (imperative kategoris) setiap warga negara, khususnya para elit bangsa. Pancasila sudah tidak perlu lagi diwacanakan karena sudah menjadi konsensus nasional, yang dibutuhkan adalah pengamalannya. Dalam pengamalan Pancasila, keteladanan para elit bangsa sangat dibutuhkan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pendiri negara, seperti Hatta, Bung Karno, dan Agus Salim.

Kata Kunci: Pancasila, Etika dan bernegara

Abstract

When the proclamation of independence on August 17, 1945, Pancasila was established as the basis of the state and the way of life. The founders of the state believed that with Pancasila the Indonesian was able to create a prosperous, just and prosperous society. This belief was based on the fact that Pancasila was extracted from the culture of the Indonesian nation itself which has been practiced in everyday life. Pancasila is also based on human nature and is part of religious teachings. However, this belief has not been realized because Pancasila has not properly practiced by the elites and state administrators. The amount of corruption carried out by polition shows that Pancasila has not been firmly embedded in the soul of the Indonesian nation. Corrupt behavior is not only contrary to the values of Pancasila, but also becomes an obstacle to the realization of a just, prosperous and prosperous society. As the basis of the state and way of life, Pancasila should be a social ethic and personal ethic that guides every law-making and development policy. The practice of Pancasila is a moral imperative (imperative category) for every citizen, especially the nation's elite. Pancasila no longer needs to be discussed because it has become a national consensus only but what was needed is a practice. In the practice of Pancasila, the role of the nation's elite is very much needed, as exemplified by the founding fathers, such as Hatta, Bung Karno, and Agus Salim.

***Keywords**: Pancasila, Ethics and the state*

1. PENDAHULUAN

Ketika para Pendiri negara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ada tiga hal yang ingin dibangun yaitu negara, bangsa, dan karakter. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan *Nation-Staate* dan *Nation and character building*. Bahkan ketiga hal

tersebut secara tegas didasarkan kepada Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi, pandangan hidup serta karakter bangsa.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pedoman dalam penyelenggaraan negara yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan keterban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang didalamnya mengatur tentang struktur negara, lembaga negara, hak dan kewenangan masing-masing lembaga, serta perlindungan terhadap hak rakyat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekwensi dan implikasi sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, karena negara harus diselenggarakan dengan suatu peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai ideologi memberi gambaran tentang suatu masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana yang dirumuskan pada sila kelima. Kesejahteraan merupakan tujuan bagi setiap negara. Salah satu tujuan utama berdirinya negara adalah kesejahteraan (Surbakti, 1994). Bagi Indonesia, yang akan dicapai bukan hanya kesejateraan, tetapi juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini juga membawa konsekwensi bahwa Pancasila merupakan paradigma pembangunan, dalam arti setiap pembangunan harus diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Di samping itu, setiap pembangunan juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang atau golongan, dan mengeksploitasi suatu kelompok atau golongan lain. Pembangunan juga tidak boleh meninmbulkan kesenjangan sosial, yang bisa berdampak kepada retaknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan menjadi pedoman sikap dan perilaku setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup ini sejalan dengan fungsi sebagai karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari setiap warga negara. Sikap dari perilaku (karakter) bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Dengan demikiran Pancasila menjadi jiwa dan kepribadian bangsa, yang sekaligus menjadi identitas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain.

Pilihan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi juga melalui proses pemikiran yang ilmiah dan philosofis. Secara ilmiah Pancasila merupakan hasil pemikiran secara deduktif dan induktif yang bisa dibuktikan kebenarannya. Secara deduktif Pancasila merupakan hasil sintesis dari ideologi-ideologi dunia, dengan mengambil dari sisi-sisi baiknya. Sedangkan secara induktif nilai-nilai Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikiran, nilai-nilai Panncasila telah ada dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Para pendiri negara menyadari bahwa wilayah Indonesia sangat luas dan secara politik meliputi banyak kerajaan yang berdaulat. Sejarah politik tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, karena masing-masing wilayah ada kerajaan yang berdaulat dan didukung oleh rakyatnya. Oleh karena itu, bentuk negara yang dipilih adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para pendiri negara juga menyadari bahwa Indonesia memiliki berbagai etnis dengan budayanya sendiri. Setiap kebudayaan memiliki nilai dan norma yang menjadi acuan dalam sikap dan perilaku (*pattern of* dan *pattern for*). Nilai-nilai tersebut tentu tidak mudah dihapus dari kehidupan masyarakatnya, karena telah merasuk kedalam jiwa setiap warga masyarakat. Keanekaragaman etnis dan budaya tersebut harus tetap dijaga dalam bingkai NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Empat hal tersebut yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsensus nasional yang harus dipertahankan dan dipelihara, serta diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat hal tersebut juga harus terus ditanamkan kepada setiap warga negara, khususnya generasi muda agar mereka mengetahui, memahami, meyakini, menyadari, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai penyelenggara negara, maupun sebagai warga negara.

Para pendiri negara meyakini bahwa dengan berdasarkan kepada Pancasila, Indonesia bisa mencapai suatu kehidupan yang aman, damai, adil dan makmur, sebagaimana yang diungkapkan oleh para pujangga negara yang *gemah ripah lohjinawi tata tentrem kertaraharjo*, Namun, keyakinan yang kuat saja tidak cukup, Pancasila harus diamalkan dalam praktik kehidupan bernegara. Keyakinan tanpa diamalkan hanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Pengimplementasian keyakinan terhadap Pancasila ke dalam praktik bernegara dan berbangsa inilah yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Sejak awal kemerdekaan, setiap rejim selalu menyatakan akan mengamalkan Pancasila dalam praktik bernegara. Namun faktanya mereka juga melakukan penyimpangan terhadap Pancasila. Rejim Orde Lama melakukan penyimpangan dengan pengangkatan presiden seumur hidup. Begitu juga rejim Orde Baru melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dalam bentuk ketidakkonsistenan dalam kebijakan (Kunto Wijoyo). Di era reformasi juga banyak praktik penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam bentuk korupsi juga masih banyak dilakukan oleh penyelenggaraan negara.

Selain korupsi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diantaranya adalah jual beli jabatan. Korupsi merupakan wujud dari keserakahan yang bertentangan dengan sila kemanusian dan keadilan sosial. Tindakan korupsi merupakan bentuk perampokan terhadap uang rakyat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Akibatnya pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik dan hasilnya menjadi kurang optimal.

Tindakan korupsi hampir selalu berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan. Jabatan dipandang sebagai kekuasaan yang bisa digunakan secara sewenang-wenang termasuk diperjualbelikan. Jabatan tidak lagi dimaknai sebagai amanah, yang harus dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan. Sumpah jabatan hanyalah sebagai *lips service* dan formalitas., karena tidak bisa menjadi pengendali diri agar tidak melakukan korupsi. Korupsi juga merupakan pelanggaran hukum, norma moral dan sosial serta agama. Korupsi merupakan tindakan yang bersumber dari keserakahan dan sikap egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri.

Menurut Mahfud MD, korupsi di Indoensia semakin merajalela, Korupsi sudah dianggap wajar dan budaya, Semua itu hanya masalah kesempatan, sehingga mereka yang melakukan korupsi juga tidak ada rasa malu. Berdasarkan rilis Transfaransi Internasional Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami kenaikan terutama terjadi pada tahun 2019 yang mencapai angka 40, namun angka tersebut kembali mengalami penurunan ke angka 37 pada tahun 2010 dan naik kembali menjadi 38 pada tahun 2021. Meskipun demikian angka tersebut masih jauh dari skor rata-rata global yaitu 43 (mediaindonesia.com, 30 Januari 2022)

Maraknya perilaku korupsi yang dilakukan oleh para elit politik dan penyelenyenggara negara membuktikan bahwa Pancasila belum menjadi jiwa, karakter dan etika yang seharusnya menjadi bintang pemandu (*Light Star*, meminjam istilah Dardji Darmodihardjo) dalam kehidupan sehari-hari dan pengendali perilaku agar tidak menyimpang dari norma moral. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup masih sebatas pengetahuan dan keyakinan, belum menjadi kesadaran yang terwujud dalam sikap dan perilaku.

Atas dasar kondisi dalam kehidupan bernegara saat ini, muncul suatu pertanyaan yang perlu kita cari solusinya, yaitu Apakah Pancasila begitu rumit dan sulit untuk dilaksanakan?

Atau Pancasila hanyalah uthopia yang tidak bisa dipraktikan? Atau kita yang kurang serius dan sepenuh hati untuk mengamalkannya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian reflektif (Alvesson). Penelitian reflektif memliki dua karakteristik yaitu interpretasi dan reflektif. Yang pertama menyiratkan bahwa semua referensi merupakan hasil interpretasi. Dan yang kedua adalah reflaksi yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang peneliti. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber atau realita yang sudah menjadi pengetahuan masyarakat. Data tersebut kemudian diinterpretasikan dengan mengacu kepada kaidah berpikir yang logis, koheren dan konsisten serta teori sosial. Refleksi yang dilakukan oleh peneliti mengacu kepada pemikiran yang mendasar dan mendalam (secara filosofis).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Pancasila dalam Bernegara

Sebagai dasar negara, Pancasila diimplementasikan dalam UUD 1945 beserta turunannya. Setiap peraturan perundang-undangan harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima Pancasila.

Implementasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh moralitas dan paradigma berpikir para anggota DPR dan pemerintah, karena mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Apakah dalam merumuskan undang-undang sebagai produk politik, mereka dasari dengan kepekaan moral dan sosial serta jiwa kenegarawanan atau justru dillandasi oleh motivasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Wacana jual beli pasal dalam proses penyusunan undang-undang masih terasa di masyarakat bawah. Berbagai undang-undang, seperti minerba, cipta kerja masih dianggap kurang berpihak kepada rakyat kecil, sehingga mendapat reaksi keras dari mereka yang merasa dirugikan. Bahkan undang-undang tentang KPK sendiri, yang dimaksudkan untuk memperkuat pemberatnsan korupsi, juga mendapat protes dari berbagai kalangan, karena justru dianggap memperlemah posisi KPK.

Memang harus diakui perbedaan pandangan dalam penyusunan undang-undang pasti selalu ada, tetapi apakah moralitas yang mengedepankan kepentingan bangsa dan untuk memajuhkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan selalu membimbing pemikiran para elit politik?. Jika setiap pembuatan undang-undang dilandasi dengan moral dan kejujuran, serta semangat untuk mewujudkan tujuan bernegara, maka perbedaan pandangan akan mudah disatukan dengan penjelasan yang rasional.

Selain dalam bentuk undang-undang, implementasi Pancasila yang lain adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kebijakan pembangunan seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pembangunan tidak boleh hanya untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang atau daerah, tetapi harus dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun seringkali, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia,

terutama rakyat bawah dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Disparitas antar daerah harus dikurangi, sehingga seluruh warga negara merasa diayomi dan diperhatikan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Ada korelasi yang signifikan antara pembangunan dengan korupsi. Jika dalam suatu daerah tidak ada pembangunan, maka bisa diduga ada korupsi yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara. Setiap pemerintah tentu memiliki anggaran pembangunan. Anggaran yang diambil dari rakyat berupa pajak tersebut, salah satunya penggunaannya adalah untuk pembangunan. Salah satu manfaat dari pembangunan adalah untuk membuka lapangan kerja yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, adanya pembangunan juga tidak menjamin bahwa korupsi tidak terjadi. Sebagian korupsi dilakukan melalui kebijakan pembangunan dengan cara mem-mark-up anggaran.

Di sisi lain, pedewaan terhadap kekuasaan menjadi faktor terjadinya korupsi. Kekuasaan yang tidak dilandasi oleh moralitas sangat rawan terjadinya penyalahgunaan. Begitu juga kekuasaan yang terlalu lama, bisa menyebabkan munculnya sikap otoritarian. Hal ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Sikap mengejar jabatan untuk meningkatkan pasar ekonomi (memperkaya diri) masih banyak terjadi di negeri ini.

Selain dalam pembuatan undang-undang dan kebijkanan pembangunan, implementasi Pancasila yang paling utama adalah terletak pada integritas dan moralitas para elit politik dan penyelenggara negara. Dalam masyarakat yang paternalistik, para elit menjadi role model bagi rakyat. Sikap dan perilaku mereka akan menjadi rujukan dan standar perilaku masyarakat. Oleh karena itu, moralitas dan integritas para elit menjadi indikator utama dari aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di era digital yang serba trasparan, seakan pera elit tidak bisa menyembunyikan gaya hidupnya. Hampir semua yang mereka lakukan akan dengan mudah diketahui oleh rakyat. Tampilan hidup sehari-hari, termasuk kebijkan yang mereka buat akan diamati dan dinilai oleh rakyat. Oleh karena itu, seoran pemimpin tidak hanya memiliki kekuatan secara politik tetapi juga harus memiliki moralitas dan integritas, karena kedua hal tersebut yang akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil.

3.2. Aktualisasi Pancasila sebagai Etika Sosial.

Setiap masyarakat pasti memiliki suatu nilai yang dijunjung tinggi dan norma yang dipatuhi secara bersama. Nilai dan norma tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari seluruh anggotanya. Bagi bangsa Indonesia, nilai dasar dalam kehidupan bernagara yang disepakati adalah Pancasila. Sedangkan sebagai nilai instrumentalnya (norma dasarnya) adalah UUD 1945. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya bukan hanya dijunjung tinggi tetapi juga dijadikan pedoman dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar negara, Pancasila bukanlah sesuatu yang utopis atau diambil dari bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila berasal dari budaya bangsa sendiri sebagai kausa materialnya (Notonagoro). Hal ini telah ditegaskan oleh Soekarno bahwa Pancasila digali dari adat dan budaya masyarakat yang hidup di bumi nusantara. Nenek moyang kita telah mengamalkan dan mempraktikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun berbeda agama, berbeda suku, dan budaya mereka bisa hidup rukun secara damai.

Kerukunan dalam kehidupan beragama bisa kita saksikan dalam praktik kehidupan mereka. Mereka tidak mempersoalkan agama dan kepercayaan orang lain, karena itu merupakan pilihan hidup masing-masing. Bahkan bisa terjadi bahwa dalam satu keluarga anggotanya menganut agama yang berbeda. Mereka saling menghormati dan menghargai

satu sama lain. Kehidupan bermasyarakat diatur dengan norma yang disepakati bersama, tanpa harus menghilangkan hak azasi setiap orang, untuk memeluk suatu agama.

Sikap menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan setiap orang juga bisa kita lihat dalam sejarah masuknya agama-agama ke Indonesia. Hampir tidak ada konflik ketika ada agama-agama baru (Islam, Kristen) yang masuk ke nusantara. Mayarakat yang semula menganut agama Hindu dan Budha bisa menerima kehadiran agama baru secara damai, karena agama merupakan pilihan yang bersifat pribadi dan menjadi hak azasi setiap orang.

Di berbagai daerah masih banyak kita jumpai suatu kehdupan masyarakat yang memiliki toleransi dalam kehidupan beragama. Meskipun berbeda agama mereka tidak saling "mengkafirkan". Mereka sadar bahwa agama adalah wilayah privat (merupakan keyakinan), Sedangkan hidup bermasyarakat didasarkan kepada norma yang disepakati bersama.

Sayangnya, apa yang telah dipraktikan oleh nenek moyang kita sekarang semakin terkikis. Agama yang seharusnya menjadi pembimbing aklaq mulia berigeser menjadi alat untuk memecah belah persatuan. Sikap saling "mengkafirkan" dengan mudah muncul dalam kehiudpan sehari-hari. Agama menjadi lebih bersifat disfusional untuk menyalahkan mereka yang berbeda (warsono). Padahal kebenaran yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan tafsir, yang memiliki potensi salah. Akibatnya perbedaan agama menjadi sumber potensi konflik sosial maupun politik.

Nilai kemanusiaan juga telah mereka praktekan dalama kehidupan sehari-hari. Kemauan merasakan penderitaan orang lain (*if I were you*) tumbuh dalam masyarakat kita. Hal ini bisa kita buktikan dengan tindakan mereka menyediakan kendi-kendi (tempat minum) di depan rumah. Penyediaan kendi ini dimaksudkan untuk memberi minum jika ada orang lain yang sedang kehausan dalam perjalanan. Selain memberi minum tradisi berbagai makanan dengan tetangga di daerah pedesaan memrupakan bentuk nyata dari nilai kemanusiaan. Ketika mereka merasa ada kelebihan rejeki dan bisa memasak suatu yang dianggap istimewa, mereka tidak melupkan untuk berbagai kepada tetangga, agar juga bisa merasakan kenikmatan makanan seperti yang mereka rasakan. Ini lah yang oleh Syafii Ma'arif dikatakan bahwa kemanusiaan itu hanya satu, tidak membedakan-bedakan.

Sayangnya moralitas seperti ini sekarang semakin tergerus dan hilang dalam kehidupan sosial kita. Masyarakat semakin terjebak kepada sikap egois dan individualisme yang jelas berasal dari budaya Barat, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai kemanusian dikalahkan oleh ego pencitraan diri, sehingga melupakan bahwa dirinya juga membutuhkan orang lain.

Di sisi lain, masyarakat juga semakin tidak peduli terhadap lingkungannya. Sikap untuk saling berbagi dengan tetangga sudah semakin sulit ditemukan di daerah pedesaan seaklipun. Sikap individualisme juga semakin mengguat dan mengalahkan solidaritas sosial. Sikap narsis dengan pamer kekayaan menjadi gaya hidup baru di kalangan anak-anak muda sekarang. Di sisi lain, keterikatan diri dengan nilai dan norma moral semakin lemah. Orang menjadi kurang lagi peduli terhadap perilaku orang lain. Akibatnya orang juga semakin kehilangan rasa malu dalam melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma sosial, dan agama.

Sebagai konsekwensi dijunjungnya nilai kemanusia, adalah rasa persatuan dalam bentuk kehidupan yang rukun dan damai. Mereka menyadari bahwa sebagai makhkuk sosial tidak bisa hidup sendirian, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Persaudaraan mereka bukan hanya didasarkan atas hubungan perkawinan atau darah, tetapi didasarkan oleh sikap yang saling membantu dan menerima sebagai bagian dari dirinya. Dalam

masyarakat Jawa hal ini dikenal dengan istilah *sedulur sinorowedi*. Dia bukan saudara kandung, bukan adik, bukan kakak atau bukan anggota keluarga besar, tetapi dia adalah orang lain yang sudah satu rasa dengan dirinya, sehingga mereka akan saling membantu dengan ikhlas dan sepenuh jiwa tanpa harus diminta.

Dalam kehidupan bersama yang didasarkan oleh perasaan untuk saling mengikatkan diri (persatuan) tersebut mereka tetap mengakui adanya hak-hak individu dalam kepentingan bersama. Namun hak individu tersebut bukanlah penghalang dalam mewujudkan kepentingan bersama, karena mereka menyadari bahwa kebersamaan menjadi lebih penting daripada kepentingan individu. Dalam memutuskan apa yang menjadi kepentingan bersama mereka lakukan dengan musyawarah, sebagai bentuk pengakuan terhadap hak setiap orang. Namun dalam musyawarah tersebut mereka juga menghargai keunggulan pengetahuan (intelektual) orang lain, tanpa merasa rendah. Dalam bermusyawarah tersebut ada perbedaan pendapat dan cara pandang, tetapi tidak bersifat diagonalitik (kontrakdiksi) yang saling menyalahkan. Perbedaan hanyalah bersifat alternatif untuk mencari kebaikan bersama. Di sisi lain yang pandai juga tidak menggunakan kepandaiannya untuk kepentingan dirinya sendiri yang dalam masyarakat jawa dikenal dengan istilah *pintere ora dinggo minteri*, tetapi digunakan untuk kemaslahakan dan keadilan bersama.

Mereka secara ikhlas dan suka rela menyumbangkan apa yang dimiliki (bergotong royong) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Mereka yang memiliki pikiran, menyumbangkan pemikirannya (eguh: jawa), yang memiliki harta menyumbangkan hartanya dan mereka yang tidak harta dan kepandaian menyumbangkan tenaganya. Itulah nilai-nilai yang telah menjadi budaya bangsa. Nilai-nilai tersebut yang kemudian digali dan diformulasikan dalam Pancasila.

Sayangnya nilai-nilai tersebut saat ini telah luntur dan terkikis oleh nilai-nilai dari Barat yang justru tidak sesuai dengan budaya kita. Liberalisme, individualisme dan materealisme telah mendominasi sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari sebagain besar masyarakat terutama para generasi muda. Keunggulan budaya kita (Timur) yang penuh dengan kebijaksanaan (*wisdom*), telah digeser oleh sikap hidup yang hanya memetingkan diri sendiri dan orientasi keduniawian. Rasa kebersamaan yang dilandasi oleh nilai kemanusian untuk kepentingan bersama telah terkikis oleh persaingan yang dilandasi oleh keserakahan (materialisme) dan citri diri (*egoism*). Keserakahan dan egoism ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Paradigma berpikir masyarakat dan para elit juga sudah bergeser dari dialektika kearah diagonalistik. Perbedaan pemikiran dan cara pandang tidak dipandang sebagai thesa dan antithesa yang kemudian melahirkan sinthesa (Hegel), tetapi dipandang sebagai hal yang kontradiksiti (diagonalistik) yang saling menyalahkan. Dalam paradigma diagonalistik, kalau tidak menyalahkan yang berbeda dianggap pandangannya sendiri tidak benar (salah). Kondisi seperti ini sering dipertontonkan oleh para penyelenggara negara maupun elit politik melalui TV yang menampilkan acara dialog. Mereka saling menyerang dan menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda. Cara berpikir seperti ini menghasilkan budaya kambing hitam, yang selalu mencari kesalahan orang lain. Akibatnya budaya demokrasi yang seharusnya memberi ruang adanya perbedaan dan kritik tidak tumbuh dengan baik. Yang terjadi justri sikap saling menyerang dan saling menyalahkan bukan sikap saling menghormati dan menghargai.

Cara berpikir yang diagonalistik juga terjadi pada perbedaan orientasi politik, agama, suku, dan budaya. Dalam bidang politik untuk meraih kekuasaan dilakukan dengan cara mencari cari kesalahan lawan dan kadang dengan sengaja menyebarkan hoaks untuk

membunuh karakter lawan (*character assassination*). Cara berpikir diagonalistik ini juga dipertontonkan dalam bidang agama, seperti "mengkafirkan" mereka yang beda agama. Mereka salalu mengganggap bahwa tafsirnya yang paling benar dan menyalahkan yang lain. Dalam bidang sosio kultural, juga muncul cara pandang yang diskriminatif, dengan menganggap suku dan budayanya yang paling unggul. Cara berpikir seperti ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (musyawarah), yang menghargai perbedaan dan kemudian mencari titik temunya.

Dengan meminjam terminilogi Yudi Latif, bahwa Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu dan titik tuju, maka Pancasila sebagai hasil pemikiran telah menjadi titik temu, dari beragai ideologi besar dunia yang baik-baik dengan realitas budaya nusantara yang telah dipraktekan oleh penndukungnya (masyarakat). Pancasila sebagai sebagai dasar negara dan pandangan hidup telah menjadi titik tumpu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi etika sosial yang mengikat seluruh warga negara yang harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Sedangkan sebagai ideologi. Pancasila menjadi titik tuju dalam pembanguan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Dalam masyarakat harus dibangun paradigma berpikir dialektika yang memberi ruang perbedaan bahkan kostradiksi antara thesa dan anti thesa, tetapi dilanjutkan ke titik temu dan titik tuju sebagai sintesanya. Dengan titik tumpu yang sama, yaitu Pancasila, maka perbedaan pandangan dan pemikiran bahkan kepantingan kemudian dicari titik temu dan titik tujunya dengan cara yaitu musyawarah. Dalam musyawarah masing-masing harus menyadari bahwa pikiran atau pendapatnya bukan satu-satunya kebenaran, tetapi masih ada kebenaran dari sisi yang lain yang diungkapkan oleh orang lain. Dalam musyawarah harus dilandasi oleh kesadaran bahwa pendapatnya perlu difalsifikasi, sehingga terbuka untuk dikritisi oleh orang lain. Oleh karena itu setiap kita berpendapat, asumsinya bukan ini kebenaran yang harus diterima apalagi dipaksanakan, tetapi justru suatu sikap kerendahan: "tolong pendapat saya dikkritisan mungkin ada yang saah". Hal ini sejalan dengan kaidah ilmiah yang menjadi etika akademik yaitu: *logico-hypothetico-empirico*, bahwa semua teori, atau pendapat itu bersifat hypothesis yang terbuka untuk dibuktikan kesalahannya.

Titik tuju dalam bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalam memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksudkan bukan hanya untuk orang perorang atau suatu kelompok tetapi juga untuk bersama. Oleh karena itu, perlu ada keadilan sosial, agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara yang kaya dengan yang miskin.

Kepedualian terhadap sesama warga negara harus terus dipupuk dalam setiap pribadi, dengan menghilangkan keserakahan dan egoism. Kekayaan yang dimiliki setiap individu memiliki fungsi-fungsi sosial sebagaimana yang dijarakan oleh agama dalam bentuk zakat. Hampir semua agama mengajarkan, bahkan mewajibkan kepada setiap orang untuk berzakat, apalagi mereka yang memiliki kekayaan yang besar.

Bahkan dalam penggunaan hak milik sendiripun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain terutama kepentingan umum. Penupukan kekkayaan atau suatu barang yang menyebabkan terganggunya pemenuhan kebutuhan orang lain (monopoli) tidak sesuai dengan nilai sila kelima. Harta kekayaan yang kita miliki juga bisa digunakan untuk beramal dengan cara membantu orang lain yang membutuhkan.

Sebagai masyarakat yang relgius, keinginan untuk masuk surga tentu menjadi impian setiap orang. Salah cara untuk memiliki "kunci" masuk surga adalah dengan beramal

membantu orang lain. Jika budaya beramal ini telah menjadi kebutuhan setiap orang, khususnya mereka yang kaya, maka kemiskinan bisa dikurangi.

Di sisi lain, setiap individu juga harus berusaha untuk bekerja keras agar bisa memenuhi kebutahhna sendiri. Sikap malas dan mengantungkan diri kepada orang lain harus dihidari. Secara ekonomi setiap individu meprupakan produsen dan konsumen. Dalam arti setiap inividu pasti memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi setiap individu juga dapat melalukan kegiatan ekonomi (bekerja) untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini berarti tidak boleh ada sikap yang semata-mata mengantungkan hidupnya kepada orang lain. Sikap malas harus dihindari, tetapi terus berusaha merupakan salah satu perwujudan dari sila ke lima.

3.3. Pancasila sebagai Etika Pribadi

Setiap orang pasti diakruniai Allah berupa hati nurani sebagai sumber moralitas dan sekaligus menjadi indikator nilai kemanusiaannya. Hati nurani merupakan sumber kejujuran. Sementara lawan dari kejujuran adalah kebohongan, artinya kebohongan merupakan bentuk ketidakjujuran. Seseorang bisa saja berbohong kepada orang lain, tetapi tidak akan bisa berbohong kepada diri sendiri maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, hanya dirinya sendiri dan Allah yang bisa tahu pasti bahwa seseorang itu jujur atau berbohong. Di sisi lain orang yang terbiasa berbohong, bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Kebiasaan berbohong ini merupakan salah satu ciri dari orang munafik. Oleh karena dalam Islam ditegaskan bahwa jika segumpal darah (hati nurani) itu rusak, maka rusaklah kehidupan seseorang tersebut.

Dalam hati nurani juga terdapat suatu proses peradilan yang akan "menghakimi" setiap perbuatan yang kita lakukan. Jika kita melakukan hal-hal yang baik dan benar, maka kita akan merasa senang. Tetapi sebaliknya jika kita melakukan hal yang buruk (missal: berbohong) maka kita juga akan "divonis" dengan perasaan cemas, ketakutan, atau kegelisanan. Inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki keharusan moral (*imperative kategoris*) untuk jujur. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika semua orang tidak jujur, pasti tidak akan ada kepastian, karena tidak ada yang bisa dipercaya.

Menurut Putnan, kejujuran merupakan modal sosial. Orang yang jujur tentu akan lebih mudah dipercaya orang lain. Bahkan bukan hanya dipercaya, tetapi juga disenangi dan dibutuhkan banyak orang, sehingga memiliki jejaring sosial yang luas. Jejaring itulah yang menjadi modal seseorang untuk sukses dalam hidup.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi moral atau etika pribadi yang tertanam kuat dalam jiwa setiap warga negara. Pancasila memberi pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari kebutuhan kodrat manusia dan ajaran agama jelas memberi arah menuju kebaikan dan keberadaban. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila menjadi indikator dari "kemanusian" seseorang. Semakin sesuai sikap dan perilaku manusia dengan nilai-nilai Pancasila, maka semakin tinggi keberadabannya. Begitu juga sebaliknya, semakin menyimpang perilaku seseorang dari nilai-nilai Pancasila, maka semakin rendah nilainya sebagai manusia.

Sila pertama Pancasila mengharuskan setiap orang percaya (iman) kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa serta hari akhir. Keimanan ini seharusnya melahirkan kesadaran bahwa Tuhan itu MahaTahu atas semua yang kita lakukan, termasuk isi hti (niat) kita. Keimanan juga mengajarkan kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kemamtian (akhirat). Dan semua agama selalu mengajarkan bahwa kehidupan akhirat lebih penting dan lebih

baik daripada kehidupan dunia. Semua yang kita lakukan di dunia akan diawasi dan dicatat oleh Tuhan, sebagai "modal' untuk menuju kehidupan di akhirat. Jika kita semakin banyak berbuat yang melanggar ajaran agama, maka modal kita untuk hidup yang baik (masuk surga) di akhirat akan semakin kecil.

Namun dalam kenyataannya, meskipun kita ini sebagai bangsa yang relegius, yang bercaya kepada Tuhan, namun Tuhan tidak selalu dihadirkan dalam setiap langka dan perbuatan sehari-hari. Tuhan oleh sebagian orang hanya dihadirkan pada saat berada di tempat-tempat ibadah, tetapi tidak disetiap saat dan situasi. Kondisi ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Karl Mark bahwa bukan kesadaran yang menentukan material, tetapi materialnya yang menentukan kesadaran. Kesadaran kita akan Tuhan lebih ditentukan oleh ruang dan waktu dimana kita berada, bukannya Tuhan yang selalu kita hadirkan. Jika kita sedang berada di tempat ibadah, maka Tuhan dihadirkan untuk dimintai sesuatu (berdoa). Tetapi ketika seseorang berada di ruang-ruang public atau privat, Tuhan hampir tidak pernah dihadirkan.

Ketiakhadiran Tuhan dalam setiap ruang dan waktu, menyebabkan seseorang mudah melakukan perbuatan buruk, termasuk korupsi. Hal ini analog dengan yang dikatakan oleh Einsten bahwa kegelanapan itu sebenarnya tidak ada, yang ada adalah cahaya. Namun kegelanan itu disebabkan karena ketidakhadiran cahaya. Kejahatan itu sebenarnya tidak ada, karena manusia diciptakan sebagai makhluk mulia, Namun perbuatan jahat yang dilakukan seseorang, karena orang tersebut tidak menghadirkan Tuhan.

Religiusitas sebagai perwujudan dari sila pertama, telah diprakteknan oleh nenek moyang kita dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak ada orang yang tahu, mereka tidak melakukan perbuatan yang terlarang, karena percaya bahwa Tuhan mengetahui dan mengawasinya. Mereka memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh moral dan agama (misal mencuri, atau korupsi). Kesadaran relegiusitas menjadi bintang pemandu, dalam setiap langkahnya meskipun tidak ada orang lain yang mengetahui. Sikap jujur dan "nrimo" atas hasil yang telah mereka usahakan merupakan bentuk nyata dari pengamalan atas apa yang mereka yakini, bahwa Allah Maha Adil, Maha Tahu, dan Maha Bijaksana.

Rasa malu dan kasih sayang terhadap sesama sebagai manifestasi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi bagian dari "harga diri" yang terus dijaga dan dipelihara. Rasa malu merupakan ciri keberadaban seseorang, sehingga dalam budaya masyarakat Jawa ada pameo lebih baik kehilangan *jenang* daripada *jeneng* (lebih baik kehilangan harta, daripada harga diri). Di Madura juga ada pepatah lebih baik putih tulang daripada putih mata. Dengan rasa malu tersebut, mereka mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang tercela (melanggar norma norma moral, sosial dan agama).

Kegotongroyongan sebagai esensi sila ketiga telah menjadi budaya masyarakat. Kesadaran sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain lebih dikedepankan daripada superioritas egonya (ke-aku-annya). Kebiasaan suka menolong lebih dihormati dan dihargai disbanding kebiasaan meminta (mental kere). Dalam masyarakat Jawa ada suati philosofi lebih baik pagar mengkok dari pada pagar tembok. (lebih baik memberi daripada menutup diri dari orang lain yang meminta bantuan. Dalam masyarakat jawa konsep kaya adalah mereka yang suka memberi (mental kaya), bukan orang yang suka meminta (mental kere). Meskipun seseorang telah memiliki harta yang melimpah, tetapi jika pelit dan masih suka mengambil milik orang lain, maka sebenarnya orang tersebut masih miskin. Sikap suka menolong tersebut yang kemudian terkrital dalam bentuk gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling memberi sesuai dengan kemampuan dan apa yang dimiliki, bukan saling meminta.

Musyarawah sebagai esensi sila ke empat juga telah dipraktikan dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya lembaga musyawarah di setiap masyarakat. Begitu juga nilai keadilan sosial menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dengan dilandasi oleh religiusitas, dan kemanusiaan masyarakat memandang bahwa dalam harta benda yang mereka miliki ada milik orang lain. Oleh karena itu, budaya berbagi atas apa yang mereka miliki kepada orang lain merupakan sikap yang melekat dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari.

Indonesia memiliki sumber etika mulai dari agama, adat dan budaya, dan Pancasila, sebagai modal untuk menjadi negara maju. Pancasila telah menjadi jiwa dan kepribadian bangsa, sehingga Pancasila menjadi etika pribadi dari setiap warga negara Indonesia. Selain itu secara kodrati setiap orang juga telah diberi telah diberi hatinurani yang membimbing kita kepada kejujuran. Jika setiap warga negara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia dapat mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bersama.

Namun aktualisasi Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara Bangsa membutuhkan keteladanan para elit (warsono). Dalam masyarakat yang paternalistic, peran para elit sebagai role model sangat dibutuhkan. Jika para elit bangsa (pemimpin) melakukan perbuatan yang tidak bermoral, tentu akan diikuti oleh rakyatnya. Oleh karena itu, pilihannnya adalah apakah para elit akan mengamalkan Pancasila atau mengkiatani Pancasila (Yudi Latif). Moralitas dan komitmen para pemimpin dan elit bangsa akan menentukan kemajuan bangsa. Rakyat akan mengikuti dan patuh terhadap para pemimpin yang bermoral dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengabdikan dirinya demi kemajuan negara.

Praktik pengamalan Pancasila sebaga etika pribadi telah dicontohkan oleh para tokoh bangsa, mulai dari Hatta, Agus salim, Soekrano, Natsir dan telah diuraikan secara gambling oleh Yudi latif dalam tulisannya Mata air Keteladanan. Persoalannya adalah terletak kepada kemauan kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila atau tidak (warsono). Ini sekali lagi membuktikan bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipraktikan (utopis), karena sudah dipraktikan oleh nenek moyang kita dan sebagian para pemimpin bangsa.

3.4. Lembaga Pengawas dan Pembina Moral Pancasila

Untuk memperkuat etika pribadi perlu dibuat suatu lembaga yang membina dan mengawasi sikap dan perilaku setiap warga negara, terutama pada elit politik. Lembaga ini bertugas mengawasi dan membina warga negara yang perilakunya menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada era orde baru pernah ada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang bertugas mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Badan tersebut melakukan penataran kepada para pejabat dan calon pejabat, calaon pegawai negeri sipil, bahkan para mahasiswa bagaimana pangamalan Pancasila. Lamanya penataran disesuaikan dengan posisi mereka yang ditatar, mulai dari 45 jam, 100 jam sampai 120 jam. Bagi mereka yang sudah mengikuti penataran memperoleh sertifikat bahwa mereka telah mengikuti penataran P-4. Sertifikat tersebut menjadi syarat untuk menduduki suatu jabatan, sebagai pegawai negeri.

Sayangnya sertifikat yang mereka miliki, justru lebih bersifat disfungsional yang itu menjadi semacam "legitimasi" bahwa yang bersangkutan memiliki moral yang baik, karena telah ditatar P-4. Semakin sering mengikuti atau ditatar P-4, seakan-akan menjadi "orang suci" yang tidak boleh disentuh oleh hokum. Sertifikat penataran P-4 bernasib sama dengan

sumpah jabatan tidak mampu menjadi mengendali perbuatan yang menyimpang dari Pancasila.

Paradigmanya harus dibalik, bahwa mereka yang ditatar adalah orang-orang yang perilakuknya menyimpang atau bertentangan dengan Pancasila. Penataran dimaksudkan untuk pembinaan bagi mereka yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, agar menjadi baik. Dengan demikian semakin banyak ditatar, menunjukan bahwa orang tersebut telah banyak melakukan pelanggaran terhadap Pancasila.

Saat ini tugas pengawasan dan pembinaan terhadap warga negara yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini sejalan dengan misi BPIP yaitu mewujudkan misi Presiden dan wakil presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan misi tersebut, seharusnya BPIP bisa melakukan pembinaan terhadap para pejabat yang melakukan korupsi, karena jelas koorupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Siapapun yang telah melakukan korupsi seharusnya dibina (ditatar) oleh BPIP, agar kembali sadar dan berbuat yang baik, paling tidak, tidak mengulangi perbuatannnya. Sayangnya peran BPIP dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila belum dirasakan oleh masyarakat.

Untuk menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap praktik Pancasila, khususnya para elit politik dan penyelenggaran BPIP bisa dikembangkan keberadaannya sampai ke daerah minimal di tingkat propinsi. Namun demikian, BPIP juga harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan tidak tercela, sehingga BPIP bisa menjadi panutan dan disegani oleh masyarakat.

4. KESIMPULAN

Aktualisasi Pancasila dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat tergantung dati moralitas kita sebagai manusia, khususnya para elit politik dan tokoh bangsa. Pancasila secara philosofis bersumber dari kodrat dan sekaligus merupakan kebutuhan kodrat manusia, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah ada dan tertanam dalam jiwa setiap bangsa Indonesia. Manusia secara kodratti telah diberi akal sebagai alah untuk mencari kebenaran dan hati nurani yang sebagai sumber kejujuran. Di sisi lain nilai-nilai Pancasila juga merupakan bagian dari ajaran agama, sehingga tidak lagi ada keraguan akan kebenarannya, dan merupakan kewajiban moral (imperative kategoris) bagi bangsa Indonesia untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila dalah suatu relaitas yang sudah ada dan pernah dipraktikan oleh masyarakat nusantara. Praktik kehidupan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila tersebut telah mewujudkan suatu tata kehidupan yang aman, damai, dan sejahetra. Pengamalan Pancasila bukanlah hal yang sulit, karena para tokoh pendiri negara juga telah memberi contoh bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Oleh karena itu, keteladanan dari para tokoh bangsa dan elit politik sangat dibutuhkan dalam mengaktualisasikan Pancasila sebagai etika berbansga dan bernegara.

Pancasila tidak perlu lagi diwacanakan, tetapi yang dibutuhkan adalah pengamalannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila sebagai etika bisa diwujudkan dalam bentuk sikap diantaranya adalah jujur (tidak munafik), perilaku yang bertanggung jawab atas jabatan yang diemban baik kepada masyarakat mapun terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa

malu untuk berbuat yang melanggar norma hukum dan agama. Semuanya tergantung kepada kemauan kita, khususnya para eliti, apakah akan mengamalkan atau meninggalkan Pancasila.

Untuk menegakan etika sosial dan pribadi perlu ada suatu lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga negara yang melakukan penyimpangan atau perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. BPIP bisa mengambil peran sebagai lembaga pembinaan bagaimana aktualisasi Pancasila dalam bergenara. Untuk itu BPIP perlu ditingkatkan dan diperluas sampai ke daerah.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis haturkan kepada MPR RI yang telah membeayai akomodasi penulis selama mengikuti seminar. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Umum HIPIIS yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyapaikan gagasan atau pemikiran dalam seminar yang diselenggarakan oleh HIPIIS bekerjasama dengan MPR RI dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara lasung atau tidak memberi kontribusi dalam penulisan ini, termasuk kepada semua penulis yang secara langsung atau tidak gagasannya kami masukan kedalam tulisan ini. Penulis juga mohon maaf kepada sesama penulis jika secara tidak sengaja ada kesamaan pemikiran yang tidak saya sebutkan dengan kutipan dalam tulisan ini saya tidak bermaksud untuk tidak menghargai ide atau gagasan Bapak Ibu. Terakhir ucapan terima kasih disampaikan kepada panitia seminar.

DAFTAR PUSTAKA

Alvesson, Mats amd Skoldberg. Kaj. 2000. Reflexive Methodology. Kondon: SAGE Publication

Darmodiharjo, D. 1971. *Pengantar Studi Pancasila.* Malang: Labolatorium Pancasila IKIP Malang.

Johnson, P. Doyle. 2008. Contemporary Sociological Theory An Integrated Multi-Level Approach. New York: Springer.

Redaksi. 2021. Dr. Kuntowijoyo: Radikalisasi Pancasila. Eramuslim. Media Islam Rujuan, edisi 1 Juni 2021.

Latif, Yudi. 2014. Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan. Jakarta: Mizan

Latif, Yudi. 2020. Wawasan Pancasila. Jakarta: Mizan.

Lubis, Muctar. 2001. Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Maarif, A. Syafii. 2015. Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. Bandung: Mizan Media Utama.

Mahfud MD. 2012. Pidato Ilmiah dalam rangka Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Angkatan 2012/2013.

Surbakti, Ramlan. 1994. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

Suryadinata, Leo. 2018. Pancasila and The Challanged of Political Islam: Past and Present. Singapure: ISEAS Publishing.

Warsono. 2016. Pancasila-Isme dalam Dinamikan Pendidikan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya press.

Warsono. 2019. Jual Beli Suara dan Disfungsional Demokrasi. Kompas.com, edisi 15 April 2019.

Warsono. 2020. Mengikuti atau Mengkhiatani Pancasila. Kompas.com, edisi 17 Agustus 2020

Warsono. 2021. Pancasila antara Ide dan Praktek. Kompas.com, edisi 3 Juni 2021

Warsono. 2022. Pancasila membutuhkan Keteladanan. Kompas.com, edisi 1 Juni 2022.

Warsono. 2022. Religion: fungtional dan dysfungtional, from Daily Life to Become Media Coverage. The Journal of Society and Media, April 2022, Vol. 6(1) 257-271.

Indeks Persepti Korupsi diIndoesia tahun 2021 masih berada di bawah rata-rata Global. http:// mediaindonesia.com / politik dan hukum. Edisi 30 Januari 2022

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945 MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Ferdinand Kerebungu[1], Siti Fathimah[2]
[1,2] Universitas Negeri Manado
e-mail: [1]ferdinankerebungu@unima.ac.id, [2]sitifathimah@unima.ac.id

Abstrak

Multikulturalisme merupakan sebuah paham yang menekankan pada kesetaraan dan kesederajatan ditengah perbedaan tanpa mengabaikan hak-hak eksistensi budaya yang lain. Kondisi ini penting untuk kita pahami dan ketahui bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang multicultur seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak diterapkan, kemungkinan besar akan terjadi perselisihan secara berkepanjangan dan berakhir menjadi konflik diantara masyarakat kita, akibat ketidakpahaman dan ketidakmengertian dalam menghadapi realitas multikultur. Untuk itu adapun salah satu cara dalam mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat akan wawasan multikultur adalah melalui pendidikan. Dengan cara membangkitkan kembali wawasan nusantara dan membangun kesadaran nasional melalui pendidikan multikultural. Kondisi ini diharapkan mampu untuk meminimalisir akan terjadinya perpecahanan, meskipun pertikain dan konflik merupakan salah satu gejala sosial yang tidak dapat dielakkan. Namun jikalau terjadi api-api pertikaian, maka konflik yang terjadi tidak berlangsung secara berkepanjangan. Dengan demikian, melalui pendidikan multikultural ini diharapkan mampu menumbuhkan dalam setiap diri anak bangsa rasa/ sikap nasionalisme. Nasionalisme merupakan salah satu paham yang menciptakan serta mempertahankan kedaulatan sebuah Negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Bagi bangsa Indonesia identitas bersama yang dimiliki yaitu Pancasila. Pancasila yang lahir dari budaya bangsa ini, sudah mencerminkan suatu pola persatuan dan kerukunan antar sesama anak bangsa, untuk itu tulisan ini berusaha untuk mengkonsepkan penerapan aktualisasi nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 melalui pendidikan multikultural.

Kata Kunci: aktualisasi, pancasila dan UUD 1945, dan pendidikan multikultural.

Abstract

Multiculturalism is an understanding that emphasizes equality and equality amid differences without ignoring the rights of other cultures. This condition is important for us to understand and know together in the life of a multicultural society like Indonesia. If not, there will likely be divisions in our society, due to misunderstanding and misunderstanding in the face of multicultural realities. For this reason, one way to overcome the public's low understanding of multicultural insight is through education. By reviving the archipelago insight and building national awareness through multicultural education. This condition is expected to be able to minimize the occurrence of divisions, even though disputes and conflicts are one of the social phenomena that cannot be avoided. However, if there are fires of conflict, then the conflict will not last for a long time. Thus, through multicultural education, it is expected to be able to grow in every child of the nation a sense of nationalism. Nationalism is one of the notions that creates and maintains the sovereignty of a country by realizing a common identity concept for a group of people. For the Indonesian people, their shared identity is Pancasila. Pancasila which was born from the culture of this nation, already reflects a pattern of unity and harmony among the nation's children, for this reason, this paper seeks to conceptualize the actualization of Pancasila values and the 1945 Constitution through multicultural education.

***Keywords**: actualization , Pancasila and the 1945 Constitution, multicultural education.*

1. PENDAHULUAN

Syarat terwujudnya sebuah bangsa yang kuat apabila memiliki rasa atau kehendak untuk bersatu. Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan mengingatkan bahwa prasyarat pendirian

bangsa dan negara adalah didasarkan kepada keinginan yang kuat dari setiap elemen masyarakat untuk bersatu. Dalam konteks kelangsungan hidup suatu negara, pencapaian apa yang disebut "mitos integrasi total", yaitu keadaan harmoni tanpa konflik atau konflik, di mana individu bergabung ke dalam komunitas yang lebih besar, sangat penting. tidak ada konfrontasi dan konfrontasi, dan sulit diwujudkan tanpa desain integrasi nasional (Said, 2013).

Hal inilah yang dicoba oleh para pahlawan bangsa di awal dekade kemerdekaan bangsa Indonesia. Dimana sejak awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah bersepakat untuk menjujung tinggi kebersamaan dalam perbedaan. Kebersamaan dalam perbedaan tersebut dapat di lihat dalam simbol Negara kita yaitu Burung Garuda yang mencekeram pita yang bertuliskan "Bhineka Tunggal Ika". Pemilihan kata Bhineka Tunggal Ika tidak hanya dipikirkan sesaat oleh para pendiri bangsa ini, tetapi sudah melalui sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diawali dari berdinya perkumpulan kaum intelektual muda yang membentuk organisasi Budi Utomo, kemudian prakarsa kaum muda dari seluruh kepulauan Indonesia yang secara bersama-sama mengikrarkan "Sumpah Pemuda" bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yaitu Indonesia, sampai pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, dan puncaknya pada saat penetapan Dasar Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Jika kita perhatikan sejarah perjalanan panjang bangsa ini, kita menemukan bahwa multikultural tidak menjadi persoalan oleh para perintis kemerdekaan dan bahkan dengan segala kearifan mereka menyadari bahwa multicultural yang kita miliki merupakan suatu asset atau kekayaan bangsa ini yang dapat dijadikan modal social dalam membangun bangsa ini. Mengapa multicultural dapat dijadikan modal social untuk membangun bangsa? Secara sosiologis dan antropologis, masyarakat dan budaya Indonesia merupakan yang terbesar di Dunia, kenyataan ni dapat di lihat dari kondisi sosio-kultural yang terdiri dari berbagai etnis, bahasa, dan agama dan system kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Walaupun demikian, kekayaan tersebut tidak memiliki resiko yang besar, kondisi masyarakat yang demikian sangat rentan dengan berbagai kasus seperti KKN, konflik, dan berbagai gerakan separatism. Persoalan ini mungkin terjadi karena disebabkan oleh kondisi social-budaya masyarakat Indonesia yang begitu besar jaraknya, misalnya antara masyarakat biasa dengan pejabat, kesenjangan antar pejabat, antar daerah, persoalan lain yang sering kita saksikan di negeri ini adalah tidak ditegakkannya supremasi hukum, hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak asasi orang lain, dan berbagai persoalan lain yang dapat memicu masalah disintegrasi bangsa, sebagai resiko yang dihadapi oleh suatu masyarakat yang mutikultur. Nadilla Rahmanul Hakim dalam tulisannya juga mengemukakakn demikian, bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang beragam memang sangatlah tepat. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang sangat luas, dan kekayaan budaya dan bahasa yang sangat beragam, Indonesia memiliki potensi yang besar dan juga masalah yang besar. Artinya, selain potensi positif yang besar di Indonesia, juga terdapat potensi atau masalah negatif yang besar. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan sangat beragam baik dari segi agama, ras, suku, adat istiadat, seni dan budaya. Berdasarkan kenyataan ini, di Indonesia sangat rentan terjadinya konflik antar sesama warga negara yang mendasari perbedaan tersebut (Hakim, 2020).

Banyak kasus konflik yang pernah terjadi di tanah air ini, diantaranya adalah tragedi Sampit pada tahun 2001 (Hakim, 2020). Tahun 2001 merupakan salah satu sejarah tergelap di Indonesia, khususnya di wilayah Sampit. Tragedi Sampit adalah pemberontakan mengerikan yang melibatkan dua suku, Dayak dan Madura. 500 orang tewas, 100 di antaranya dipenggal. Konflik bernuansa agama di Ambon Pada tahun 1999, konflik tersebut awalnya dianggap sebagai konflik biasa. Namun, ada kecurigaan bahwa ada pihak yang secara sadar berencana

memanfaatkan permasalahan yang ada. Selain itu, ABRI juga gagal merespons secara memadai, bahkan disinyalir telah bertindak sengaja untuk melanggengkan konflik dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting lainnya. Kasus kerusuhan ini mengakibatkan hubungan sosial antar pemeluk agama di Indonesia menjadi memanas berkepanjangan.

Begitu juga dengan tragedy konflik tahun 1998, konflik tersebut dipicu oleh krisis mata uang yang melumpuhkan sendi-sendi negara dan meningkat menjadi konflik antara masyarakat adat dan Tionghoa perantauan. Akibat konflik tersebut, banyak harta benda orang Tionghoa dijarah dan dibakar. Ada juga banyak laporan tentang pelecehan seksual yang terjadi dan pembunuhan yang tidak dapat dihindari. Konflik antar etnis ini benar-benar mengubah Indonesia menjadi lautan darah. Tidak hanya itu, konflik antar golongan dan pemerintah (GAM, RMS dan OPM) juga turut andil dalam menyemarakkan kondisi masalah sosial pada saat itu. Konflik antar kelompok sering terjadi di Indonesia, namun yang paling serius adalah penentangan GAM terhadap pemerintah, yang akhirnya merembet ke masyarakat internasional. Konflik ini muncul dari keinginan untuk merdeka dari negara Indonesia. Sayangnya, pemerintah tidak memprioritaskan dialog, dan operasi militer dilakukan pada pemerintah selama bertahun-tahun, yang mengakibatkan banyak korban. Perselisihan tersebut akhirnya terselesaikan setelah tercapai kesepakatan untuk menjadikan Aceh sebagai wilayah pemerintahan sendiri yang khusus.

Demikian pula, dalam kasus Syiah Sunni Sampan Madura, bukan karena faktor agama atau ideologi tertentu, tetapi karena berbagai penyebab yang saling terkait. Agama biasanya dibawa sebagai faktor pembenar atau untuk menutupi konflik yang sebenarnya. Pertama, krisis di berbagai sektor yang terjadi beberapa tahun yang lalu akhirnya membuat sebagian masyarakat menentang pejabat pemerintah yang selama bertahun-tahun bersikap dingin kepada sebagian masyarakat. antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kedua, globalisasi informasi juga telah mengembangkan pemahaman keagamaan, yang semakin menciptakan eksklusivitas dan kepekaan terhadap kepentingan kelompok. Ketiga, perbedaan sosial, ekonomi dan politik (Azzuhri, 2012). Konflik tidak hanya terjadi oleh perbedaan agama dan kultur belaka, melainkan dengan adanya ketimpangan distribusi kekuasaan, konflik antarinstitusi, perilaku ormas, hubungan masyarakat dengan aparatur negara, hubungan pusat dan daerah, hingga mulculnya separatism. Hal ini diuraikan dalam penelitian Ferdinand Kerebungu, yang memetakan potensi konflik dan integrasi bangsa (Kerebungu, 2019). Kasus berkepanjangan di Palu dan beberapa wilayah di Sulawesi Utara juga turut andil dalam mewarnai kisah pertarungan antar golongan di wilayah ini (Kerebungu et al., 2020; Kerebungu & Fathimah, 2020).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya mempraktekkan pemahaman multikultural tidak muncul sebagai konsep atau pemikiran yang kosong, tetapi ada kepentingan politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorongnya. Akar kata multikulturalisme adalah budaya. Secara etimologis, multikulturalisme terbentuk dari kata *multi* (banyak), *culture* (budaya) dan *ism* (aliran/paham). Pada dasarnya, istilah tersebut berarti mengakui harkat dan martabat manusia yang hidup dalam masyarakat dengan budayanya sendiri. Konsep multikulturalisme tidak boleh disamakan dengan konsep keragaman etnis atau budaya yang menjadi ciri masyarakat pluralistik, karena multikulturalisme menekankan keragaman budaya dalam kesetaraan atau kesetaraan budaya (Mahfud, 2016), Atau menurut Kymlicka, sebuah gerakan politik tentang hak-hak minoritas yang ditegakkan secara tidak adil oleh sistem liberal. Kymlicka berpendapat bahwa sistem liberal yang mengutamakan hak asasi manusia terkait dengan keberadaan kelompok minoritas, karena minoritas dipaksa untuk mengasimilasi, menerima bahasa, agama, dan adat istiadat mereka dari kelompok mayoritas, dan menjalani metode pembersihan etnis yang radikal. Hal tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah (genosida) juga dilakukan, seperti yang terjadi di Amerika dan Jerman. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa multikulturalisme merupakan gerakan untuk mewujudkan persamaan perbedaan budaya (Kymlicka, 2015).

Kymlicka, penyebab multikulturalisme dalam kerangka politik multikultural, berpendapat bahwa munculnya multikulturalisme memiliki dua sisi. Artinya, migrasi ke daerah dan kebanggaan sebagai minoritas. Aspek pertama adalah studi kasus yang diselidiki di Amerika Serikat, Kanada dan Australia, yang dialami oleh negara-negara tujuan imigrasi. Aspek kedua lebih mementingkan unsur identitas seseorang, yang dirasakan lebih kuat dari rasa kebangsaannya (Kymlicka, 2015). Beragam factor penyebab terjadinya perpecahan turut andil dalam menyeruakkan terjadinya konflik tersebut. Beberapa kasus di atas merupakan sebagian kecil konflik yang pernah terjadi di tanah air ini, banyak peristiwa memilukan lainnya yang berakibat pada pertumpahan darah, kerusakan lingkungan hingga terjadinya disintegrasi bangsa.

Menghadapi persoalan tersebut kita tidak boleh pesimis dengan kondisi masyarakat yang multikutur ini, banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengelolah asset bangsa ini, yang saya katakana sebagai modal social. Negara kita memiliki budaya Paternalistik, artinya para pemimpin bangsa, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dapat menjadi panutan bagi masyarakat luas bagaimana hidup dalam masyarakat multikutur, dapat memotivasi dan memberi contoh bagi masyarakat, selain itu, dalam system pendidikan nasional perlu dirumuskan system pendidikan multicultural bagi setiap jenjang pendidikan yang ada. Banyak tulisan yang membahas bagaimana pentingnya penerapan nilai-nilai pancasila, mulai dari strategi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan TSM (terstruktur, sistemik dan massif) secara konkrit (Nainggolan & Sasongko, 2020) dan lain sebagainya. Sememntara itu dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana pendidikan multicultural di terapkan dalam pembelajaran di lingkungan perkuliahan, mulai dari unsur-unsur nilai Pancasila yang diterapkan hingga arti dan makna multicultural itu sendiri dalam menyikapi masyarakat yang multikultur.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan studi literatur. Survei kepustakaan ini merupakan rangkaian kegiatan tentang cara mengumpulkan bahan pustaka, cara membaca dan mencatat, serta cara mengelola bahan penelitian (Zed, 2008). Tujuan dari penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menemukan dasar untuk memperoleh suatu pemikiran, menemukan kerangka berpikir, untuk mensurvei apa yang diketahui dan tidak diketahui tentang suatu fenomena tertentu, dan untuk mempresentasikan hasilnya. penelitian sebelumnya (Afiyanti, 2014). Data literatur yang penulis gunakan adalah literatur dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, media elektronik atau media cetak dan sumber lainya. Berikut langkah-langkah penelitian studi literatur menurut (Nazir, 2005) adalah yang pertama Pengumpulan data Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam studi kasus ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari literatur, serta dari buku-buku, karya tulis ilmiah, dan kajian tentang pendidikan multikultural, nilai-nilai Pancasila, persatuan bangsa NKRI. Indonesia, dan wawasan kebangsaan serta referensi dari sumber lain yang berkaitan dengan topic tulisan ini. Kedua adalah melalui pengolahan dan analisa data; setelah mendapatkan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Pengolahan data dimaksudkan untuk memudahkan analisis data. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah mengembangkan metodologi untuk melakukan pekerjaan, menuliskan hasil pencarian literatur, dan menarik kesimpulan dari temuan yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Unsur-Unsur Nilai Pancasila dan UUD 1945

Pancasila sebagai dasar bangsa dan falsafah hidup yang melandasi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, Pancasila terbukti mampu mengayomi dan melindungi seluruh warga negara yang berbeda suku, agama dan ras. Lima sila Pancasila merupakan pedoman yang sangat ideal untuk mengatur perilaku seluruh warga negara Indonesia ketika berhadapan dengan warga negara yang berbeda suku bangsa, ras, agama, bahkan antar golongan lainnya, sehingga mampu menjaga keutuhan NKRI. Sistem nilai dalam pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa", Secara hierarkis, nilai ini dapat disebut nilai tertinggi karena merupakan nilai mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini (nilai ketuhanan). Perbuatan yang tidak melanggar nilai, aturan, dan hukum Tuhan dianggap baik. Pandangan seperti itu dapat dibuktikan secara empiris bahwa perbuatan yang melanggar nilai, aturan, dan hukum Tuhan, baik dalam hubungan cinta kasih antar sesama maupun tidak, menimbulkan konflik dan permusuhan. Dari nilai ketuhanan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi (Surip et al., 2015). Sila pertama mengatur bahwa orang Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya dan mengekspresikan keyakinan agamanya dalam sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara orang-orang antar umat beragama.

Sila kedua, Suatu tindakan dianggap baik jika sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip utama nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan kesopanan. Keadilan membutuhkan keseimbangan antara tubuh dan pikiran, individu dan masyarakat, makhluk dan makhluk yang bebas dan mandiri yang terikat oleh hukum-hukum Tuhan. Peradaban menunjukkan keunggulan manusia atas makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan dan benda mati. Oleh karena itu, suatu tindakan dikatakan baik jika selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan konsep keadilan dan kesusilaan. Misalnya, nilai kemanusiaan menghasilkan nilai moral seperti tolong-menolong, rasa syukur, saling menghormati, dan kerja sama (Surip et al., 2015). Sila ini mengatur bahwa dalam kehidupan sosial kita harus saling menghormati dan mencintai, toleran, tidak sewenang-wenang, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa diskriminasi.

Sila ketiga, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan berdasarkan Bhineka Tunggal Ika dan menempatkan kepentingan dan keamanan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok (Damayanti, 2017). Maksud dari nilai persatuan ini adalah tindakan yang disebut baik jika mampu mempererat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri adalah perilaku yang buruk, begitu pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang tampak bertindak atas nama agama (sila pertama), tetapi jika tindakan dapat merusak persatuan dan kesatuan, maka dari sudut pandang etika Pancasila: itu bukan perilaku yang baik. Dari persatuan muncul nilai-nilai seperti cinta tanah air, pengorbanan, dll. (Surip et al., 2015).

Sila keempat, menjamin persamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. sila ini juga mengajarkan bahwa keputusan dibuat atas dasar akal sehat dan itikad baik dalam kebaikan bersama, mengutamakan musyawarah dan melaksanakan konsekuensi dari keputusan musyawarah. Sila kelima ini menekankan pentingnya koeksistensi keluarga dan kerja sama timbal balik. Kebersamaan ini juga harus tercermin dalam berbagi kemajuan dan kemakmuran yang adil dan berkeadilan sosial. Kohlberg mengatakan keadilan adalah kebajikan yang paling penting bagi setiap individu dan masyarakat. Keadilan mengandaikan satu sama lain sebagai mitra yang bebas dan setara (Kohlberg, 1995). Perbuatan mulia berkembang dari nilai ini, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.

Semua poin yang terkandung dalam lima sila Pancasila sebenarnya merupakan landasan ideal bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsanya.

Sayangnya, situasi tersebut telah terganggu oleh serangan teroris dan munculnya radikalisme yang menyebabkan intoleransi di negeri ini. Kelompok intoleran di Indonesia mulai beraksi pada akhir 1990-an dengan perubahan signifikan dalam pemerintahan Indonesia. Di era reformasi pasca lengsernya Presiden Suharto, B.J. Habibi terdorong untuk menyerukan agar perubahan sistem politik menjadi lebih demokratis dan transparan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik Indonesia. Hal ini akan menjadikan politik sebagai arena publik bagi semua orang untuk berpartisipasi, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia (WNI) untuk menyampaikan pendapat, membentuk perkumpulan, dan mendirikan partai politik (Effendy, 2003; Singh, 2001).

Pada prinsipnya, Pancasila bukan hanya dasar nasional bangsa Indonesia, tetapi juga berlaku universal bagi semua masyarakat internasional. Lima Perintah Pancasila memberikan arah bagi semua perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. (Rismawati, 2011). Pancasila dapat dengan mudah diimplementasikan oleh negara manapun sebagai warga dunia tanpa membedakan ras, warna kulit atau agama. Jika demikian, cita-cita dunia untuk mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera tidak lagi diperlukan tetapi menjadi kenyataan. Cita-cita Pancasila sejalan dengan aspirasi dan cita-cita dunia internasional. Di masa reformasi seperti saat ini, begitu banyak tantangan yang sudah, sedang dan akan dihadapi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam hal ini aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat diterapkan dalam beragam aspek kehidupan. Diantaranya adalah Aspek politik & hukum, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, & aspek pendidikan. Namun dalam tulisan ini khusus akan dijelaskan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 melalui aspek pendidikan yaitu lebih spesifiknya dalam pendidikan multicultural di dalam lingkungan pembelajaran di kelas.

3.2. Aktualisasi Pendidikan Multikultural sebagai Solusi dalam Mengahadapi Masyarakat Multikultur

Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Aktualisasi Pancasila dan UUD 1945, berarti penjabaran nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam hal ini, penjabaran nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 melalui pendidikan multicultural di sekolah. Melalui pendidikan multicultural diharapkan unsur-unsur dan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 dapat meningkatkan rasa nasionalitas dalam berbangsa dan bertanah air Indonesia dan mewujudkan NKRI yang utuh tanpa terpecah-pecah.

Multikulturalisme mengakui dan menghormati keberadaan semua kelompok heterogen dalam suatu organisasi atau masyarakat, mengakui perbedaan sosial budaya yang beragam, dan menghormati kelanjutannya dalam konteks budaya inklusif yang memberdayakan setiap organisasi atau masyarakat. memungkinkan kontribusi yang berarti. Istilah multikulturalisme digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut (Mudzhar, 2004). Pendidikan multicultural juga merupakan suatu proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural (Kerebungu et al., 2019).

Paham multikulturlisme ini lahir dikarenakan adanya masyarakat majemuk. Adapun beberapa negara yang sangat seris dalam mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme serta pendidikan multikulturalisme ini adalah Amerika, Kanada, dan Australia. Ini karena mereka adalah komunitas imigran dan kesempatan bagi imigran lain untuk bergabung dan berpartisipasi tidak dapat disangkal. Namun, negara-negara tersebut adalah contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultural, di mana identitas nasional dapat dibangun tanpa kehilangan atau kehilangan identitas budaya sebelumnya atau budaya nenek moyang mereka.

Multikulturalisme merupakan konsep penting dalam membangun kekuatan suatu bangsa yang terdiri dari beragam latar belakang etnis, agama, ras, budaya dan bahasa dengan menghormati dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif ini dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan bangsa. Karena mereka bangga dengan kebesaran negaranya. Munculnya multikulturalisme di Indonesia merupakan hasil dari kondisi sosial budaya dan geografis yang beragam dan luas. Secara geografis Indonesia memiliki banyak pulau dan setiap pulau dihuni oleh sekelompok orang yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat inilah terbentuk suatu budaya tentang masyarakat itu sendiri. Tentu saja ini mempengaruhi keberadaan begitu banyak budaya yang berbeda (Azzuhri, 2012).

Di Indonesia sendiri, dalam praktek multikulturalisme, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Salah satu cara terbaik agar multikulturalisme dapat berjalan dengan baik di Indonesia adalah dengan menetapkan sekolah-sekolah hingga tingkat universitas sebagai pusat sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai yang dicita-citakan tersebut, atau pendidikan multikultural. Inti dari pemahaman ini adalah toleransi untuk melayani kepentingan bersama, menghormati kepercayaan dan berurusan dengan semua anggota masyarakat. Menumbuhkan rasa saling menghormati tanpa membedakan kelompok seperti gender, suku, ras, budaya, kelas sosial atau agama. Lebih lanjut, pembelajaran multikultural mengacu pada kebijakan dalam praktik pendidikan yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia mengenai gender, ras, dan kelas. (Sleeter & Grant, 2003). Pendidikan multikultural dalam kurikulum Indonesia merupakan upaya menjaga integrasi bangsa melalui pendidikan. Kurikulum pendidikan pada dasarnya merupakan perwujudan cita-cita masyarakat tentang arah pendidikan (Lionar & Mulyana, 2019).

Skeel dalam tulisannya menyebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu sikap untuk mempertimbangkan keunikan manusia tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, jenis kelamin, kondisi fisik, status ekonomi, dll. (Skeel, 1995). Pendidikan multikultural (*multicultural education*) adalah Strategi pendidikan yang menggunakan keragaman latar belakang budaya siswa sebagai salah satu kekuatannya dan menumbuhkan sikap multikultural. Strategi ini dapat sangat membantu, setidaknya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan, untuk mengembangkan pemahaman bersama yang lebih luas tentang budaya, perbedaan budaya, kesetaraan, dan konsep demokrasi (Alo, 2005). Pendidikan multikultural juga Ini didefinisikan sebagai kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan budaya dan saling menghormati antara semua kelompok budaya dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan nasional untuk memungkinkan masyarakat multikultural berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal di negaranya (A. Bank, 1993).

Beragam pendekatan pendidikan yang dapat dikombinasikan dalam pembelajaran pendidikan multicultural. Diantaranya adalah dengan mengintegrasikan budaya dan kelompok yang berbeda untuk menjelaskan konsep dasar, generalisasi, dan teori subjek/

bidang, Seperti seorang guru yang memasukkan fakta tentang kepahlawanan berbagai kelompok ke dalam kurikulum dengan membatasi mereka. RPP dan unit belajar juga tidak berubah. Beberapa pendekatan memungkinkan guru untuk menambahkan beberapa unit atau tema khusus untuk materi multikultural. Bisa juga dilakukan dengan melibatkan siswa/mahasiswa dalam memahami makna budaya mata pelajaran (disiplin). Misalnya, guru membantu siswa memahami perspektif yang berbeda dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu.

Dalam rangka meningkatkan prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial, tentunya sebagai pendidik harus mempersiapkan dan menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa. Misalnya, ketika anak-anak datang ke sekolah dengan perilaku negatif dan kesalahpahaman tentang berbagai ras, etnis, dan kelompok etnis lainnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan kondisi yang stabil dan pasti, membantu Anda mengambil tindakan yang lebih positif. Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Misalnya, merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan kerjasama (cooperative learning) daripada metode kompetitif (*competitive learning*). Aspek ini bertujuan untuk membentuk lingkungan sekolah menjadi banyak jenis kelompok, termasuk suku, perempuan dan siswa berkebutuhan khusus, memberikan pengalaman pendidikan dengan hak yang sama dan kesempatan belajar yang sama, juga terkait dengan pendidikan.

Pembelajaran multikultural didasarkan pada konsep filosofis kebebasan, keadilan, kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Sifat pendidikan multikultural mempersiapkan semua siswa untuk secara aktif bekerja menuju struktur umum dalam organisasi dan institusi sekolah. Pendidikan multikultural bukanlah kebijakan yang mengarah pada pendidikan inklusif dan pelembagaan pendidikan melalui propaganda pluralisme dengan kurikulum yang berkontribusi pada persaingan budaya individu. Tujuan pembelajaran multikultural adalah membekali siswa dengan kemampuan untuk mengembangkan rasa hormat terhadap orang-orang yang berbeda budaya dan memberi mereka kesempatan untuk bekerja secara langsung dengan orang atau kelompok orang yang berbeda suku dan ras. Pendidikan multikultural juga membantu siswa memahami relevansi perspektif budaya yang berbeda, membantu siswa bangga dengan warisan budayanya, dan membantu memastikan bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan mendasari konflik antar kelompok masyarakat (Savage & Armstrong, 1996). Pendidikan multikultural dipraktekkan untuk membantu siswa melihat kehidupan dari perspektif budaya yang berbeda dari mereka sendiri dan untuk mengembangkan keterampilan untuk memiliki sikap positif terhadap perbedaan budaya, ras dan etnis. (Farris & Cooper, 1994).

Adapun tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural menurut Banks (Skeel, 1995) dapat diidentifikasi berdasarkan hal-hal berikut ini.

a) Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam;
b) Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok keagamaan;
c) Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya;
d) Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok

Di samping itu, pembelajaran berbasis multikultural dibangun atas dasar konsep pendidikan untuk kebebasan (Dickinson, 2011); yang bertujuan untuk: Membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk

berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan masyarakat; Memajukan kebebasan, kecakapan, keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain. Alasan kami berpikir rasional tentang pentingnya pendidikan multikultural adalah karena strategi pendidikan ini dipandang sebagai suatu kebajikan. Secara khusus, ia unggul dalam aspek-aspek berikut: Bertabrakan tanpa kekerasan. Penerapan pendekatan dan strategi pembelajaran potensial yang memfasilitasi proses interaksi sosial dan memiliki muatan emosional yang kuat. Model pembelajaran multikultural membantu guru membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Secara khusus, ini membantu guru membuat proses pembelajaran lebih efisien dan efektif dengan membekali siswa dengan kemampuan untuk membangun bersama dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pluralistik yang bernilai tinggi. Dengan meningkatkan empati dan mengurangi prasangka, kita akan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan dan mengelola konflik bernuansa SARA yang muncul di masyarakat.

Keragaman sosial dan budaya secara positif menunjukkan potensi yang kaya dari masyarakat pluralistik, tetapi secara negatif, orang merasa tidak aman tentang ketidaktahuan mereka tentang budaya satu sama lain. Semua etnis atau ras rentan terhadap etnosentrisme dan ideologi yang mengklaim kelompoknya lebih unggul dari kelompok etnis atau ras lainnya. (Alo, 2005). Ketika ketidaktahuan tentang identitas budaya orang lain terjadi, prasangka terhadap orang lain dapat diperkuat dalam bentuk generalisasi palsu, yang diekspresikan sebagai perasaan dan dengan demikian antipati. Prasangka juga ditujukan terhadap kelompok secara keseluruhan atau terhadap individu hanya karena mereka adalah anggota kelompok tertentu. Secara demikian, prasangka memiliki potensi dalam mengkambing hitamkan orang lain melalui stereotipe, diskriminasi dan penciptaan jarak sosial (Bennet dan Janet, 1996).

Melalui pembelajaran multikultural, subyek belajar dapat mencapai kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi (A. Bank, 1993). James A. Banks lebih lanjut (Banks, n.d.), Identifikasi lima aspek pendidikan multikultural yang diharapkan dapat mendukung guru dalam mengimplementasikan berbagai program yang dapat mengatasi perbedaan siswa.

a) Dimensi integrasi isi/materi (*content integration*). Dimensi ini digunakan guru untuk memberikan informasi tentang "poin-poin kunci" pembelajaran dengan melihat kembali berbagai materi. Secara khusus, guru mengintegrasikan isi materi pembelajaran ke dalam kurikulum dari perspektif yang berbeda. Pendekatan yang umum adalah mengakui kontribusi mereka. Artinya, guru mendekati kurikulum dengan membatasi fakta tentang kepahlawanan dari berbagai kelompok. RPP dan unit belajar juga tidak berubah. Beberapa pendekatan memungkinkan guru untuk menambahkan beberapa unit atau tema khusus untuk materi multikultural.
b) Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*). Sebuah dimensi di mana guru membantu siswa memahami perspektif yang berbeda dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang mereka miliki. Dimensi ini juga berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap perubahan pengetahuannya sendiri;
c) Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice ruduction*). Guru berusaha keras untuk memastikan bahwa siswa memiliki sikap positif terhadap perbedaan kelompok. Misalnya, ketika anak-anak datang ke sekolah dengan perilaku negatif dan kesalahpahaman tentang berbagai ras, etnis, dan kelompok etnis lainnya, pendidikan dapat membantu siswa belajar lebih positif dengan menciptakan kondisi yang stabil dan pasti. Membantu mengembangkan perilaku antarkelompok yang baik.

Dua kondisi yang menjadi perhatian adalah bahan ajar yang memiliki citra positif tentang perbedaan kelompok dan penggunaan bahan ajar tersebut secara konsisten dan berkesinambungan. Studi menunjukkan bahwa siswa yang datang ke sekolah dengan banyak stereotip cenderung berperilaku negatif dan sering salah paham terhadap kelompok etnis dan ras di luar kelompoknya. Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan buku teks multikultural dan materi lainnya serta menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif dapat membantu siswa mengembangkan sikap dan kesadaran rasial yang lebih positif. Strategi dan jenis sumber daya memungkinkan siswa memilih untuk bersikap baik kepada kelompok ras, etnis, dan budaya lainnya.

d) Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*). Aspek ini berfokus pada bagaimana pengaturan pembelajaran dapat dimodifikasi untuk memfasilitasi pencapaian hasil belajar untuk kelompok siswa yang berbeda. Strategi dan kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam memperjuangkan keadilan pendidikan antara lain kooperatif (cooperative learning) dan non-competitive (competitive learning). Aspek ini bertujuan untuk membentuk lingkungan sekolah menjadi banyak jenis kelompok, termasuk suku, perempuan dan siswa berkebutuhan khusus, memberikan pengalaman pendidikan dengan hak yang sama dan kesempatan belajar yang sama, juga terkait dengan pendidikan.

e) Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Aspek ini penting untuk memperkuat budaya siswa bersekolah dari kelompok yang berbeda. Selain itu, membangun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beragam sebagai ciri dari struktur sekolah lokal, seperti latihan kelompok, iklim sosial, latihan, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, penghargaan untuk staf, dll bisa digunakan dalam menanggapi perbedaan ketika mereka terlibat dalam hal yang berbeda.

Dengan menerapkan dimensi pendidikan multikultural di atas, guru diharapkan mampu memfasilitasi siswa dan menghadapi siswa dalam keberagaman. Begitu juga dengahn bahan pelajaran, Materi dan kegiatan pembelajaran dengan aspek emosional yang kuat dari simbiosis antarbudaya terbukti efektif dalam menumbuhkan perspektif yang fleksibel (Byrnes, 1988). Seorang siswa yang sangat berempati memungkinkan dia untuk menghormati sudut pandang yang berbeda. Tentu saja, dalam hal ini juga dapat meruntuhkan prasangka terhadap kelompok lain (Walker-Dalhouse, 1992).

4. KESIMPULAN

Multikulturalisme pada dasarnya merupakan sebuah paham yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kesederajatan dalam keberagaman. Titik penting dari multikulturalisme adalah adanya upaya saling keterbukaan dan saling menerima perbedaan. Pendidikan multikultural di Indonesia diimplementasikan untuk menemukan bentuk ideal dari praktek pendidikan yang mengedepankan keberagaman suku bangsa. Pendidikan multicultural dapat diimplementasikan melalui pendidikan formal dan dapat juga diimplementasikan lewat pendidikan nonformal. Dalam pendidikan formal, pendidikan multicultural tidak perlu dirancang khusus dalam mata pelajaran tersendiri, tetapi cukup diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada melalaui bahan ajar atau model pembelajaran. Di perguruan tinggi pendidikan multicultural diintegrasikan kedalam mata kuliah umum (MKU), seperti pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, Agama dan Bahasa. Pada tingkat SD hingga SMA/Sederajat, pendidikan multicultural dapat diintegrasikan dalam bahan ajar Agama, PKn, Sosiologi, dan Antropologi, serta kegiatan ekstra kurikuler seperti kepramukaan. Dalam pendidikan nonformal, pendidikan multicultural dapat disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan dengan model pembelajaran yang responsif multicultural dengan

mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan, baik ras, suku maupun agama antar aggota masyarakat. Jika pendidikan multikultural ini dapat dilaksanakan, maka kesadaran nasional dan sikap nasionalisme di tanah air ini dapat dibangkitkan kembali sebagaimana awal perjuangan para perintis bangsa ini mulai dari Budi Utomo hingga perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Kita generasi sekarang ini dalam mengisi kemerdekaan hanya dituntut sikap salaing toleran dan saling menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita dan belajar dengan giat untuk membangun bangsa kea rah yang lebih baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bank, J. (1993). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Allyn and Bacon Press.

Afiyanti, Y. (2014). Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, *9*(1), 2003–2006. https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.157

Alo, L. (2005). *Komunikasi Antarpribadi*. Citra Aditya Bakti.

Azzuhri, M. (2012). Konsep multikulturalisme dan pluralisme dalam pendidikan agama. *Forum Tarbihyah*, *10*(1), 13–29.

Banks, J. A. (n.d.). *Multiculturalism's Five Dimensions*.

Damayanti, A. (2017). *Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI dari Aksi Intoleransi di Indonesia*. 1–13.

Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle. *The Accounting Review*, *86*(6).

Effendy, B. (2003). *Islam and the State in Indonesia*. ISEAS.

Farris, P. ., & Cooper, S. . (1994). *Elementary Social Studies: a Whole language Approach*. Brown & Benchmark Publishers.

Hakim, N. R. (2020). *Tantangan Negara Multikultur dan Solusinya*. BINUS: Universitas Bina Nusantara. https://binus.ac.id/character-building/2020/05/tantangan-negara-multikultur-dan-solusinya/

Kerebungu, F. (2019). *Pengkajian Informasi Potensi Konflik dan Integrasi Bangsa*. Wineka Media. https://scholar.google.com/scholar?cluster=11724524374458868650&hl=en&oi=scholarr

Kerebungu, F., & Fathimah, S. (2020). Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, *2*(1), 19–25.

Kerebungu, F., Fathimah, S., & Pangalila, T. (2020). Social Conflict in Community (Study On Agrarian Conflict in Lolak District, Bolaang District, Mongondow, North Sulawesi). *Atlantis Press*, *473*(Icss), 211–214.

Kerebungu, F., Pangalila, T., & Umar, M. (2019). *The Importance Of Multicultural Education As An Effort Towards Indonesian National Awareness*. *383*(Icss), 797–800. https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.120

Kohlberg, L. (1995). *Tahap-Tahap Perkembangan Moral, diterjemahkan oleh Drs. John de Santo dan Drs. Agus Cremers SVD* (1st ed.). Kanisius.

Kymlicka, W. (2015). *Kewargaan Multikultural* (Terjemahan). LP3ES.

Lionar, U., & Mulyana, A. (2019). Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah: Identifikasi pada Silabus. *IJSSE : Indonesian Journal of Social Science Education*, *1*(1), 11–25. http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijsse/article/view/11-25

Mahfud, C. (2016). *Pendidikan Mutikultural*. Pustaka Pelajar.

Mudzhar, M. A. (2004). *Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antar Umat Beragama" dalam "Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*. Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI.

Nainggolan, E., & Sasongko, D. (2020). *Pancasila: Nilai Luhur Bangsa dan Pondasi Bangunan NKRI*. Kementerian Keuangan Repubik Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/13234/Pancasila-Nilai-Luhur-Bangsa-dan-Pondasi-Bangunan-NKRI.html

Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian* (Cetakan Pe). Ghalia Indones.

Rismawati. (2011). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi. *SEMINAR NASIONAL : Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Reformasi*, 46–55.

Said, M. M. (2013). Kajian Model Internalisasi Ideologi Kebangsaan di Daerah Perbatasan. *Jurnal Kebijakan Publik*, *1*(1), 17–25.

Savage, & Armstrong. (1996). *Effective Teaching in Elementary Social Studies*. Prentice-Hall, Inc.

Singh, B. (2001). *Habibie and The Democratisation of Indonesia*. Book House.

Skeel, D. J. (1995). *Elementary Social Studies: Challenges for Tomorrow's World*. Harcourt Brace & Company.

Sleeter, C. E., & Grant, C. A. (2003). *Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches To Race, Class, and Gender*. John Wiley & Sons, Inc.

Surip, N., Syarbaini, S., Rahman HI, A., & C, A. A. (2015). *Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi*. Andi.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Osbor Indonesia.

MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA PANCASILA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Surya Oktarina, S.H., M.Hum.
Universitas Pamulang
Email: surya30rina@gmail.com

Abstrak

Jauh sebelum kapal belanda datang ke Indonesia, Indonesia itu bukan dalam kekosongan hukum banyak beraneka macam hukum yang sudah ada seperti hukum adat dan hukum adat ini adalah hukum asli indonesia yang nilai-nilai terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai asli dari rakyat indonesia. Hampir satu abad KUHP telah berlaku di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WvS diberlakukan dengan beberapa penyesuaian dan berlaku secara nasional melalui UU No. 73 Tahun 1958. WvS pada perkembangannya dipengaruhi oleh Code Penal Prancis (CP) karena negara terakhir menduduki Belanda kurang lebih tiga tahun. Meskipun demikian resepsi hukum kolonial juga terjadi di negeri kincir angin tersebut. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di indonesia dan seharusnya pembinaan sistem hukum nasional khususnya sistem hukum pidana indonesia sudah semestinya menggunakan nilai-nilai hukum yang berdasar dari Pancasila. Karena nilai nilai pancasila inilah yang harus diserap kedalam pembentukan hukum pidana pancasila. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Sejarah Hukum Indonesia KUHP, dan Nilai-nilai pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia. Hukum pidana harus bersumber dari pancasla karena pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan pancasila merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai pancasila haruslah dijadikan sumber hukum pidana di Indonesia karena nilai-nilai yang ada dalam setiap sila pancasila adalah cerminan rakyat indonesia itu sendiri.

Kata Kunci: Hukum, Pidana, Pancasila

Abstract

Long before the Dutch ships came to Indonesia, Indonesia was not in a legal vacuum, there were many kinds of laws that already existed, such as customary law and customary law. This is the original Indonesian law whose values are the original values of the Indonesian people. For almost a century the Criminal Code has been in force in Indonesia, through Law no. 1 of 1946 WVS was enforced with several adjustments and applied nationally through Law no. 73 of 1958. WvS in its development was influenced by the French Penal Code (CP) because the last country occupied the Netherlands for approximately three years. However, the reception of colonial law also took place in the land of the windmills. Pancasila is the source of all sources of law that exist in Indonesia and the development of a national legal system, especially the Indonesian criminal law system, should use legal values based on Pancasila. Because these values of Pancasila must be absorbed into the formation of Pancasila criminal law. The approach method used is a normative juridical approach, a normative juridical approach is used with the aim of analyzing the Indonesian Criminal Law System and the Indonesian Legal History of the Criminal Code, and Pancasila values as the basis of Indonesian philosophy. Criminal law must be sourced from Pancasila because Pancasila is the source of all sources of law in Indonesia and Pancasila are values that live in society. Pancasila values must be used as a source of criminal law in Indonesia because the values contained in each Pancasila are a reflection of the Indonesian people themselves.

***Keywords**: law, criminal, Pancasila*

1. PENDAHULUAN

Jauh sebelum kapal belanda datang ke Indonesia, Indonesia itu bukan dalam kekosongan hukum banyak aneka hukum yang sudah ada seperti hukum adat yang merupakan hukum asli

indonesia dimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai asli dari rakyat Indonesia.

Hampir satu abad KUHP telah berlaku di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WvS yang diberlakukan dengan beberapa penyesuaian dan berlaku secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. WvS pada perkembangannya dipengaruhi oleh Code Penal Prancis (CP) karena negara terakhir men duduki Belanda kurang lebih tiga tahun.

Selama masa kependudukan Belanda di Indonesia, hukum adat diberlakukan bagi penduduk asli Indonesia dan golongan timur asing, di lain sisi hukum yang berlaku di negeri Belanda diberlakukan bagi golongan Eropa (Pasal 163 IS).

Hukum adat berlasung sejalan dengan perkembangan tradisi dan masyrakat yang ada. Hal tersebut dikarenakan hukum adat lahir sebagai kebenaran yang diakui oleh masyarakat dari endapan kesusilaan masyarakat tersebut. Dewasa ini, praktik hukum adat pada masyarakat adat kerap mendatangkan pertanyaan seperti apakah aturan hukum tersebut masih relevan digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan msalah yang timbul dari interaksi dalam lingkungan masyarakat hukum adat tersebut.

Perkembangan hukum pidana Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia pada masa kerajaan, penjajahan Belanda dan setelah kemerdekaan. Hukum pidana Indonesia mulai dimodernisasi ketika bangsa Belanda masuk ke Indonesia, dengan keadaan demikian terhadap hukum yang berlaku dan dipergunakan pada masa sebelum atau setelahnya yang berkembang di masyarakat tanpa legitimasi dari pemeritah Belanda dikenal dengan hukum adat.

Nilai-nilai etika dan moral yang dimiliki semua masyarakat dan bangsa didefinisikan sebagai "suatu kebenaran" yang didasarkan pada muatan nilai-nilai apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, patut atau tidak patut, layak atau tidak layak dan yang dianggap adil dan tidak adil. Nilai-nilai tersebut harus dijadikan jiwa, pandangan hidup dan cita-cita untuk dijadikan dasar dalam melakukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan "suatu kebenaran" ini harus dipegang teguh, diwujuskan dan dilaksanakan tanpa paksaan atau dengan kata lain harus berdasarkan kesadaran.

Berangkat dari hal tersebut, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang diterima masyarakat sebagai kebenaran yang hidup. Apabila hukum dibentuk dari hal-hal tersebut maka hukum akan dilaksanakan tanpa adanya paksaan atau dilakukan dengan penuh kesadaran.

Setelah mengkaji kembali konsep negara hukum Indonesia, didapati bahwa ide dasar pembentukan negara hukum Indonesia telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai akar negara. Pancasila merupakan jiwa bangsa indonesia, sumber hukum tertinggi dan pandangan bangsa Indonesia. Pancasila dimaknai sebagai jiwa bangsa karena Pancasila merupakan falsafah rakyat indonesia, falsafah itu sendiri mengandung makna pemikiran "*de zin van wereld en leven*" (makna dari dunia dan kehidupan). Filsafat Pancasila telah diterima dan diakui sebagai falsafah bangsa Indonesia yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, segala tindakan dan upaya membangun bangsa dan negara Indonesia harus bersumber dari Pancacila, baik dalam bidang hukum, pendidikan, ekonomi, seni, maupun kenegaraan.

Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila memberikan pandangan tentang bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan mengenai tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.

Konsep negara hukum *rechsstaat* yang berlaku bagi negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* dan konsep *rule of law* yang dianut oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* tidak sejalan dengan kondisi dan semangat masyarakat Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bangsa Indonesia menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah hidup kebangsaannya, dan konsep negara hukum yang dapat dikatakan sebagai konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia adalah Konsep Negara Hukum Pancasila. Hal tersebut karena negara hukum Pancasila lahir bukan karena pertentangan atas absolutisme penguasa atau raja yang ada sebagaimana latar belakang *rechtsstaat* dan *rule of law*, tetapi karena rakyat Indonesia yang menginginkan pembebasan dari imperialism dan kolonialisme Belanda saat itu.

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang di Indonesia dan semestinya pembangunan sistem hukum nasional utamnya sistem hukum pidana indonesia menggunakan nilai-nilai hukum berdasar Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila inilah yang harus diserap kedalam pembentukan hukum pidana pancasila.

Rumusan masalah yang diangkat dalam latar belakang diatas ialah: 1. Mengapa hukum pidana indonesia harus bersumber dari nilai nilai pancasila? 2. Sejauh manakah nilai nilai pancasila dapat dijadikan sumber hukum pidana indonedia dalam setiap sila pancasila?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metorde pwndekatan yuridis normatif dengan legis positivis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang terdiri dari peraturan-peraturan tertulis dan dikatakan identik. Agar dapat mengumpulkan data guna menyusun penulisan hukum ini, digunakan spesifikasi penelitian preskripsiyang mampu menjelaskan kondisi objek penelitian melalui sudut pandang hukum yang oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami evolusi sistem hukum Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang dalam bidang hukum. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang berkembang berdasaarkan relevansinya dengan objek yang ditinjau sebagai studi yang utuh. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data primer yang diperoleh akan dihubungkan data sekunder yang didapat serta dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Setelah diperoleh data yang dibutuhkan, data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data dianalisis dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori ilmu hukum *(Theoritical Interpretation)* yang ada. Berdasarkan hasil pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1) Legal History (Jiwa Kebangsaan)
2) Teori Hans kelsen
3) Teri Pamcasila/Hukum Progresif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

Hukum pidana adat Indonesia yang tersebar di berbagai kesatuan hukum adat merupakan cerminan dari peradaban asli bangsa Indonesia yang sempat menjalankan

hukum adatnya. Dalam alam pikiran yang bersifat komunalisme dan religio-magis, manusia menempati posisi yang sentral. Kedudukannya dalam alam kosmos selalu seimbang, terjaga dan apabila dihadapkan pada gangguan, maka segera dipulihkan. Hukum adat memiliki peraturan yang dinamis, dimana setiap peraturannya timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap, hal tersebut karena perubahan peraturan itu berbanding lurus dengan perubahan zaman dan perubahan hukum yang dipengaruhi oleh perubahan rasa keadilan lahir dan batin masyarakatnya.

Teori jiwa bangsa didasarkan pada sebuah pertimbangan bahwa jowa bangsa mempengaruhi filsafat suatu negara sehingga setiap bangsa memiliki jiwa bangsa dan filsafat khas yang berbeda dengan filsafat bangsa lamnya. belahiran teori hukum sebagai jiwa bangsa mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Teori jiwa bangsa timbul sebagai respon atas konsep Hegel tenting "ide semesta" (jiwa universal) oleh Gustav Hugo yang menyatakan bahwa "jiwa universal" im tidak ada, tetapi yang ada adalah "jiwa bangsa"

Hukum dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga semua produk hukum yang dilahirkan harus diarahkan sesuai dengan kepribadian dan jiwa suatu bangsa. Hukum yang akan dibuat atau dicitacitakan (*izs eonstituendzzm*) di Indonesia harus mengacu pada kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia rang mengandung filsafat Pancasila yang masing-masing sila saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Teori ini dipilih karena ada perbedaan jiwa bangsa Indonesia dengan jiwa bangsa lain sehingga dapat dilihat perbandingan antara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana yang merupakan warisan dari bangsa asing.

Oleh sebab itu, hukum pidana harus bersumber dari pancasila karena pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan di dalamnya terkandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berikut beberapa alasan mengapa hukum Indonesia harus bersumber dari pacasila:

a) Karena pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
b) Hukum adat berasal dari hukum asli dari nenek moyang
c) Pancasila merupakan nilai-nilai dari rakyat/masyarakat itu sendiri
d) Yang *faunding father* Bungkarno katakan bahwa nilai-nilai asli pancasila itu ditemukan di masyarakat
e) Penemuan soekarno terkait nilai-nilai dasar masyarakat indoensia adalah yan disebutkan pancasila yang merupakan 5 mutiara dari perut bumi nusantara yang merupakan juga karakter bangsa Indonesia artinya pancasila lahir dari jiwa bangsa Indonesia sendiri.

3.2. Nilai – Nilai Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Pancasila adalah warisan jenius Nusantara yang lahir dari kondisi lingkungan alamnya, yakni negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (*archipelago*). Sebagai sebuah warisan jenius Nusantara yang juga merefleksikan sifat lautan yang membersihkan dan menyerap tanpa mengotori lingkungannya, selain itu dalam keluasannya, ia mampu mewadahi segala keragaman jenis dan ukuran.

Wakil presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta, menggambarkan pandangan hidup masyarakat Indonesia berdasarkan sifat kelautan yang pada intinya karakter bangsa dibentuk oleh laut yang mengelilinginya dan semangat bangsa dipengaruhi oleh deraian ombak yang terpecah di tepian pantainya. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di tepian pantai sehari-hari akan mengalami pengaruh alam yang tidak terhingga. Berlabuhnya bangsa-bangsa asing di Indonesiaa untuk melakukan perdagangan telah mengajarkan nenek

moyang bangsa Indonesia banyak hal serta memberi petunjuk mengenai apa-apa saja yang termasuk barang berharga dan bagaimana perdagangan itu berjalan. Interaksi yang intens dengan bangsa-bangsa asing seperti orang Hindi, orang Arab, orang Tionghoa dan banyak lainnya, mengasah budi pekerti nenek moyang bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa kami jadi tuan rumah yang ramah. Sebagai bangsa dengan jiwa pelaut, semangat pantang menyerah dan tanpa rasa takut menaklukan lautan selalu membakar jiwa (Yudi Latif, 2011).

Menurut Soekarno yang Ia sampaikan dalam pidatonya, pada malam sebelum 1 Juni setelah Ia merenungi dan membuka kembali lintasan sejarah bangsa ini, Ia menemukan semangat yang bergelora dalam jiwa rakyat dan kemudian berdoa memohon petunjuk kepada Allah SWT agar diberikan jawaban atas pertanyaan tentang dasar negara yang hendak digunakan sebagai pondasi Negara Indonesia Merdeka (Yudi Latif, 2011).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, nilai-nilai Pancasila harus tertanam dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dana bernegara dan tidak diperkenankan pertentangan terhadapnya. Berikut merupakan uraian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara:

a. Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

   Tuhan Yang Maha Esa harus menjadi dasar Tindakan manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk memleuk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Di sisi lain, ateisme dan Komunisme dilarang keras di Indoneisa. Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, orang Indonesia memiliki pegangan dalam merumuskan nilai tentang hal-hal yang benar dan yang salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, layak dan tidak layak, bermoral dan tidak bermoral berdasarkan pemikiran manusia terhadap Tuhannya.

   Dalam membangun sistem hukum pidana di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nila pancasila termasuk nilai pancasila yang terdapat dalam sila pertama. Dalam pembentukan hukumnya harus saling menghargai kehidupan bermasyarakat meskipun memiliki beberapa perbedaan.

b. Sila Kedua Pancasila, Kemanusian yang Adil dan Beradab.

   Sebagai kerangka normatif sila kedua ini mengandung kewajiban imperatif atau keharusan asasi normatif untuk hidup atau bertindak adil dan beradab. Adab menunjukkan sikap spiritual sebagai makhluk Tuhan yang mulia, sedangkan adil menunjukkan perilaku yang mencerminkan manusia yang beradab.

   Untuk menciptakan hukum pidana yang adil seperti yang tercermin dalam sila kedua pancasila dibawah bimbingan nilai-nilai ketuhanan yang memimpin cita-cita negara harus memandang semua manusia setara dan harus menghormati kemanusiaan. Pembaharuan hukum harus mencerminkan nilai-nilai pancasila mengenai peluang dan ancaman kemanusiaan dalam realitas globalisasi. Pancasila harus dijadikan sebgai prinsip pemberadaban manusia dan bangsa Indonesia.

c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia.

   Sila ini menguraikan batas-batas bagi kepentingan pribadi dan setiap warga negara Indonesia harus mampu mengendalikan dirinya agar tidak sekedar mengejar kepentingan pribadi saja ketika kepentingan negara dan bangsa menuntutnya. Dalam penegakan hukum misalnya, hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya sekadar memerhatikan aspek hukum, tetapi juga filosofis dan sosiologis serta akibat yang mungkin timbul dari putusannya, sehingga putusannya jangan sampai memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Karena Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi kejayaan peradaban nusantara. Maka dalam membangun bangsa yang sesuai dengan jati dirinya yang sepadan dengan kuantitas pendudukanya yang beragam maka harus mencerminkan nilai nilai pancasila didalamnya termasuk dalam sila ketiga pancasila mengenai persatuan Indonesia. Setiap kelompok di tuntut untuk memiliki komitmen kebangsaaan dengan menjujung tinggi konsesus nasional seperti yang tercermin dalam pancasila yang memiliki unsur-unsur pemersatu bangsa.

d. Sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

   Sila ini menunjukkan garis yang tidak boleh dilanggar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh rakyat Indonesia harus menahan diri, menaati hukum, menjaga kedisiplinan, menghormati dan mentaati segala keputusan rakyat yang diambil berdasarkan konstitusi dan demokrasi.

   Negara Multikultur seperti Indonesia bisa menjadi jauh lebih kokoh jika berdiri diatas landangan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan, bukan hanya menuntut pada pemenuhan hak-hak individu dan masyrakat melainkan mewajibkan gotong royong untuk mengembangkan solidaritas sosial untuk membangun hukum yang lebih maju seperti yang tercermin pada sila ke empat pancasila.

e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

   Sila ini memberikan arah bagi tumbuhnya kesadaran setiap individu sebagai makhluk sosial dan menjunjung tinggi keadilan dengan sesama sebagai sesama warga negara. Sila ini memberikan pengertian bahwa keadilan bukan sebataas keadilan individu semata (liberal) melainkan keadilan yang juga memerhatikan rasa keadilan sosial dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Sila keempat (Kerakyatan) dan sila kelima (Keadilan dari pancasila tidak bisa dipisahkan. Keterkaitan sila tersebut sebagai rangkaian prinsip "sosio-demokrasi" masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita bangsa Indonesia, penegakan hukum pidana harus berdasar dari nilai pancasila seperti yang tercermin dalam sila kelima hukum pidana harus memberikan sifat keadilan bagi masyarakat, sila kelima ini merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip pancasila. Oleh sebab itu jika kita ingin membangun perwujudan bangsa yang sejahtera dalam masyarakat kita harus menerapkan nilai-nilai pancasila tersebut kedalam pembaharuan hukum pidana.

Haluan serta pokok-pokok moralitas dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hakikat pemikiran Pancasila, nilai-nilai sakral (keagamaan) ditegaskan sebagai dasar etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) sebagai dasar etika hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Indonesia bukanlah negara sekuler ekstrem yang berusaha memisahkan "agama" dan "negara" serta membatasi peran agama di ranah privat/komunitas. Untuk memainkan peran publik yang relevan dengan penguatan etika sosial maka Negara diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama sejalan dengan alam Pancasila. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia juga bukan negara agama yang hanya mewakili satu unsur agama dan memungkinkan agama tersebut untuk mengatur negara. Sebagai negara yang dinaungi multiagama dan penduduk yang multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan diharapkan mampu membatasi diri secara merata dari semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan dan harus mampu mengembangkan politik secara mandiri dan independent dari dikte-dikte agama.

Rasionalitas dari alam pemikiran Pancasila telah mendapatkan pembenaran secara

teoritis dan komparatif. Berdasarkan teori kontemporer tentang "*public religion*" yang menolak tesis "separation" dan "*privatization* dan mendukung tesis "*differentiation*" Dalam teori ini tidak diperlukan pemisahan antara peran negara dan agama, melainkan perlu dibuat pembedaan. Dengan ketentuan yang disebut "*twin tolerations*" dimana kedua belah pihak yakni agama dan negara harus saling mengerti batas-batas dan otoritas masing-masing.

Kedua, menurut fitrah pemikiran Pancasila, nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan kodrat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai landasan etika politik dalam kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas menuju persaudaraan dunia dikembangkan melalui eksternalisasi dan internalisasi. Secara eksetrnal, bangsa Indonesia menggunakan segala kemampuan dan kekayaanya untuk secara bebas dan aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara internal, bangsa Indonesia mengakui dan menghormati hak-hak dasar warga negara dan penduduk negegara asing. Dasar etis sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab". Komitmen bangsa Indonesia untuk mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan sangat visioner dan mendahului "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia" yang baru dideklarasikan pada 1948. Secara teoretis-komparatif, cara eksternalisasi dan internalisasi dalam mengembangkan kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan visi Indonesia dalam campuran antara perspektif "idealisme politik" dan "realisme politik" yang berfokus pada kepentingan nasional dalam hubung an internasional.

Ketiga, sesuai dengan alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nila etika kemanusiaan harus terlebih dahulu mengakar kuat dalam lingkaran sosial masyarakat Indonesia sebelum merambah pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam menginternalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara kesatuan yang melampaui pemahaman kelompok dan individu. Persatuan kebhinekaan bangsa Indonesia dikelola berdasarkan konsep kebangsaan yang menekankan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan yang dalam slogan negara Inonesia dinyatakan dengan ungkapan "bhineka tunggal ika". Di satu sisi, ada perpektif kosmopolitanisme yang berusaha menemukan titik temu bagi semua kemajemukan yang mengkristal dalam dasar negara (Pancasila), UUD, dan segala turunan legeslatifnya, negara kesatuan, bahasa persatuan, dan simbol nasional lainnya. Di sisi lain, ada perspektif pluralisme yang menerima dan memberikan ruang hidup bagi berbagai perbedaan, seperti berbagai agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi nasional yang kuat, yang tidak hanya dapat mempersatukan kemajemukan masyarakat dalam pembaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberikan peluang agar kebhinekaan masyarakat tidak tercerabut dari akar tradisi dan sejarahnya. Dalam literasi tentang teori kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai cara pandang "etnosimbolis" (e*thnosymbolist*), yang memadukan antara perspektif "modernis" (*modernist*) yang menonjolkan unsur kebaruan dalam nasionalisme, dengan perspektif "primordialis" (*primordialis*t) dan "perenialis" (*perennialist*) yang melihat kesinambungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.

Keempat, sesuai dengan alam pemikiran Pancasila, pengejawantahan nilai dan cita-cita ketuhanan, kemanusiaan dan kebangsaan harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang berpedoman pada kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi deliberatif, demokrasi menemukan esensinya dalam memperkuat kedaulatan rakyat ketika kebebasan politik dijalin dengan pemerataan ekonomi dan memupuk persaudaraan dalam kerangka "musyawarah-mufakat". Dalam prinsip musyawarah dan

mufakat, keputusan tidak dibuat oleh kelompok mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi), tetapi dengan memuliakan daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap masyarakat tanpa pandang bulu yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan.

Gagasan demokrasi deliberative atau kerap disebut permusyawaratan ala Indonesia yang menekankan pada konsensus dan rekonsiliasi dalam demokrasi politik dan ekonomi itu sangat berpandangan jauh ke depan. Konsep demokrasi ini mendahului apa yang disebut model "demokrasi deliberatif" (*deliberative democracy*), yang diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980, dan juga memiliki kesejajaran dengan konsep "sosial-demokrasi" (social democration).

Kelima, menurut hakikat pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan cita-cita bangsa, serta demokrasi permusyawaratan memiliki makna penuh sepenajang keadilan social itu tercapai. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, kredibilitas pengamalan Pancasila dapat diukur dengan terwujudnya keadilan social dalam kehidupan berbangsa. Visi keadilan sosial Pancasila adalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan peran manusia sebagai makhluk individu (melembaga di pasar) dan sebagai makhluk sosial (melembaga di negara) meningkat, selain itu Pancasila juga memiliki visi untuk menyeimbangkan pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial ekonomi yang ditandai dengan berbagai ketimpangan social, persaingan ekonomi diletakkan pada persaingan yang kooperatif (coopetition) berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasa oleh negara. Oleh negara, bumi dan air serta kekayaan alam yang dikandunganya dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap entitas ekonomi memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan keadilan sosial yang menumbuhkan semangat kekeluargaan secara menyeluruh. Sementara peran individu (pasar) diberdayakan, negara berada dalam posisi strategis untuk menyediakan kerangka hukum dan peraturan, fasilitas, rekayasa sosial serta menyediakan jaminan sosial.

Oleh seab itu Nilai-nilai pancasila haruslah dijadikan sumber hukum pidana di Indonesia karena nilai-nilai yang ada dalam setiap sila pancasila adalah cerminan rakyat indonesia itu sendiri.

Nilai-nilai pancasila dapat dijadikan sumber hukum pidana Indnesia dalam setiap pancasila:

a. Dalam setiap sila dalam pancasila adalah cerminan rakyat Indonesia itu sendiri.
b. Sila pertama ketuhanan yang maha esa artinya dalam setiap pasal dalam UU maupun KUHP mestinya harus berorientasi kedalam sila ketuhanan sebagai baramater pembuatan produk UU/KUHP dalam hukum piadana Indonesia.
c. Sila kedua kemanusiaan yang beradab dalam setiap pasal UU atay KUHP harus mengacu kedalam sila kedua dari pancasila.
d. Sila ketiga Persatuan Indonesia adalah nilai yang harus di jadikan barometer dalam setiap pasal dan UU atau KUHP Indonesia yang berkonsep Huku Pidana Pancasila.
e. Sila ke empat kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan dan perwakilan harus bisa dijadikan UU atau KUHP sebagai sistem hukum pidana pancasila .
f. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus dijadikan juga sebagai dasar dalam pembuatan UU atau KUHP yang harus tercermin dalam setiapperaturan-peraturan hukum pidana Indoensia.

g. Bahwa karena pancasila ini adalah nilai-nilai dasar dari rakyat Indonesia sendiri sehingga sangatlah wajar bila UU atau peraturan lain seharusnya mengacu sebagai seuber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah pancasila.

4. KESIMPULAN

Hukum pidana harus bersumber dari pancasila karena pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan pancasila merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa kaidah hukum atau norma hukum yang akan dibentuk harus mencerminkan falsafah hidup masyarakat atau bangsa yang bersangkutan.

Nilai nilai pancasila dapat dijadikan sumber hukum pidana indonesia dalam setiap sila pancasila karena dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak diperkenankan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh sebab itu Nilai-nilai pancasila haruslah dijadikan sumber hukum pidana di Indonesia karena nilai-nilai yang ada dalam setiap sila pancasila adalah cerminan rakyat indonesia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. M. Ali Zaidan, S. M. (2015). *Menuju Pembaharuan HUKUM PIDANA.* Jakarta: Sinar Grafika.

Dr. Yopi Gunawan, S. M. (2015). *PERKEMBANGAN KONSEP NEGARA HUKUM & NEGARA HUKUM PANCASILA.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Drs. Slamet Sutrisno, M. S. (2006). *FILSAFAT DAN IDEOLOGI PANCASILA.* Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Hamzah, P. D. (2012). *PERBANDINGAN HUKUM PIDANA BEBERAPA NEGARA* . Jakarta: Sinar Grafika.

Ilham Bisri, S. M. (2004). *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo.

KUSUMA-ATMADJA, M. (2011). *MOCHTAR KUSUMA ATMADJA DAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN EKSISTENSI DAN IMPLIKASI.* Shidarta.

LATIF, Y. (2011). *NEGARA PARIPURNA Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: PT. Gramedia.

Leonard, T. (t.thn.). *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Prof. Dr. Achmad Ali, S. M. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence).* Jakarta: Kencana .

Prof. DR. H. MUCHSIN, S. (2005). *IKHTISAR HUKUM INDONESIA.* Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.

PROF. DR. H. ROMLI ATMASASMITA, S. L. (2020). *Moral Pancasila Hukum dan Kekuasaan.* Bandung: PT. Refika Aditama .

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. (2011). *TEORI HUKUM.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S. M. (2014). *FILSAFAT, TEORI, & ILMU HUKUM Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat.* Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Selznick, P. N. (2011). *HUKUM RESPONSIF.* Nusamedia.

 ISSN: 2830-2699

Yudi Latif, "NEGARA PARIPURNA Historisitas, Rasionalitas, dan Akualitas Pancasila" PT Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 2011)

KORELASI PANCASILA TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Alfan Dzikria Nurrachman
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: alfandzikria@gmail.com

Abstrak

Pancasila merupakan ideologi dasar. Pancasila termasuk sumber dari segala sumber hukum yang memperoleh legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966. Kedudukan Pancasila dikukuhkan dengan UU No 13 Tahun 2022. Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara serta ideologi nasional yang membawa dampak atau konsekuensi logis dimana nilai-nilainya menjadi landasan pokok fundamental dalam perjalanan negara Indonesia. Pada era globalisasi kedudukan Pancasila tergerus sistem hukum nasional, sebab ada pluralisme hukum yang mengakibatkan disharmonisasi hukum serta status pancasila yang kini dianggap hanya sebagai simbol dalam hukum. Pancasila seharusnya diposisikan dalam wilayah sumber hukum materiil sebagaimana mestinya dari pembentukan perundang-undangan serta perkembangan sistem hukum. Pancasila harus digali rinci dari sisi filosofis ataupun sosiologis. Metode penelitian dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis normatif, yang tujuannya ialah mengetahui bagaimana pancasila membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan sistem hukum dan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pancasila, Perkembangan Hukum, Perundang-Undangan, Sistem Hukum.

Abstract

Pancasila is the ideology. Pancasila is the source of all legal sources that have juridical legitimacy through TAP MPR XX/MPRS/1966. The position of Pancasila was confirmed by Law No. 13 of 2022. Pancasila is affirmed as the basis of the state as well as a national ideology that has a logical impact where its values become the fundamental basis for the journey of the Indonesian. In globalization, Pancasila has been eroded by national legal system, because there is legal pluralism which results in legal disharmony and status of Pancasila which is now considered only as a symbol in law. Pancasila should be positioned in the area of material legal sources as it should be from the formation of legislation and the development of the legal system. Pancasila must be explored in detail from a philosophical or sociological angle. The research method is a normative juridical approach, the aim of which is to find out how Pancasila brings logical consequences to the development of the legal system and legislation.

***Keywords**: Pancasila, Legal Development, Legislation, Legal System.*

1. PENDAHULUAN

Pancasila di Indonesia merupakan suatu ideologi yang diharapkan mampu mengarahkan usaha transformasi sosial pada berbagai dimensi. Terdapat tiga dimensi ideologis yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut (Fendi Setyawan, 2021):

a. Dimensi keyakinan

   Pada dimensi ini dipahami ideology sebagai seperangkat keyakinan berisi tuntutan-tuntutan norma preskriptif yang menjadi tuntutan hidup serta tatanan bernegara

b. Dimensi pengetahuan;

   Pada dimensi ini, ideology memuat paradigm pengetahuan berisi prinsip, yang menyediakan interpretasi guna memahami realita

c. Dimensi tindakan;
Ideology memuat dimensi tindakan yang termasuk level operasional dari keyakinan serta pengetahuan;

Dimensi ideology tersebut apabila dikaitkan dengan pembentukan serta evaluasi UU mempunyai relevansi kuat. Dari dimensi keyakinan, pancasila memuat nilai yang diakui keabsahannya serta sekaligus menjadi pedoman nilai dalam pembentukan perundang-undangan. Hal tersebut dikuatkan pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 2 yang menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya dari dimensi pengetahuan, pancasila mempunyai sudut pandang pengetahuan yang memuat prinsip, yang mampu menjadi acuan penyusunan argumentasi tentang perundang-undangan yang dibuat. Selain itu dapat dijadikan interpretasi guna memahami realita serta ketatanegaraan.

Pada dimensi tindakan, pancasila mampu menjadi instrument nilai guna menilai apakah perundang-undangan yang sudah disahkan berlaku efektif serta selaras dengan Pancasila. Selain itu, pada dimensi tindakan, pancasila dapat menjadi acuan bertingkah laku serta berkewarganegaraan. Dari hal itu dapat diketahui pentingnya peran institusionalisasi pancasila pada pembentukan dan evaluasi UU dilakukan, dalam rangka menjaga bahwa UU yang dibuat sesuai Pancasila (Fendi Setyawan, 2021).

Pancasila sebagai suatu dasar atau ideology sudah hadir pada hubungan antar agama dan Negara serta senantiasa berupaya menciptakan kenyamanan terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara yang dapat dipahami di sila 1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa karena hubungan agama dan Negara juga sudah dijelaskan pada UUD NRI 1945. Konstitusi berupaya tak memisahkan agama dan Negara sebagaimana pada sila 1 Pancasila dan Bab XI UUD 1945, sebab kedua hubungan tersebut cukup kompleks dan setiap nilai pancasila berpengaruh pada kehidupan bangsa (Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, 2019).

Nilai dasar pancasila perlu dioperasionalkan dengan langkah menjadikan pancasila sebagai dasar guna penyusunan norma. Indonesia mempunyai hukum nasional yang merupakan kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia berlandaskan pada pancasila. Pancasila kedudukannya sebagai *grundnorm* atau *staatfundamentalnorm* pada hierarki norma hukum. Nilai pancasila kemudian dijabarkan pada berbagai peraturan yang ada. Perundang-undangan, serta peraturan lain hakikatnya termasuk nilai instrumental sebagai penjabaran nilai Pancasila (Fransiska Novita Eleanora, 2000).

Kedudukan pancasila sebagai dasar pembukaan UUD NRI 1945 sifatnya yuridis-konstitusional, yang maknanya nilai pancasila sebagai norma dasar sifatnya imperative dimana artinya mengikat sekaligus memaksa semua pihak yang berada di area kekuasaan hukum Republik Indonesia guna setia melaksanakan, sekaligus melestarikan. Pancasila sebagai dasar filosofis terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945 sebagai kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak ada perubahan pembukaan UUD 1945, maka tak berubah pancasila sebagai dasar filosofis bangunan Indonesia, yang berubah sebatas sistem serta institusi guna mewujudkan cita-cita berlandaskan pancasila.

Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup Republik Indonesia dimana nilai pada setiap sila merupakan arahan kehidupan. Selain itu fungsi Pancasila ialah jati diri. Makna kehidupan Indonesia dilihat dari budaya serta peradaban. Pancasila dikatakan sebagai pembeda serta jati diri Indonesia dan hal itu membedakan Indonesia dengan Negara lain. Fungsi Pancasila sebagai ideology bangsa yakni terdapat ide, keyakinan, gagasan yang termuat pada sila pancasila, hal tersebut meliputi politik, sosial, budaya, serta keagamaan. Pancasila termasuk ideology terbuka yang kedudukannya tetap serta dinamis.

Rincian dari kedudukan Pancasila apabila dijabarkan sebagai berikut (Alvira Oktavia Safitri, 2021):

1) Pancasila termasuk sumber dari segala sumber hukum;
2) Pancasila ialah asas tertib hukum pada Pembukaan UUD NRI 1945 dan hal tersebut dijabarkan pada empat pikiran;
3) Cita-cita hukum, hukum tertulis atau hukum tidak tertulis;
4) Pancasila memiliki norma yang mewajibkan pemerintah dan golongan memegang teguh cita-cita;
5) Sebagai sumber penyelenggara negara.

Pada UUD NRI 1945 alenia keempat telah mengandung ketentuan dari masing-masing sila Pancasila yang kemudian diturunkan pada pasal-psal didalam batang tubuh. Pasal yang termuat pada batang tubuh tentu membawa substansi yang terkandung pada pembukaan UUD NRI 1945. Rumusan dasar filosofis Negara yang termuat di Pembukaan UUD NRI 1945 ialah Pancasila, dimana pancasila ialah rumusan dari cita hukum *(rechtsidee)*. Sebagai cita Negara, tentu perlu dirumuskan berlandaskan cita yang hidup di masyarakat. Cita hukum memiliki fungsi konstitutif yang menentukan dasar tata hukum, dimana jika hal tersebut tidak ada maka tata hukum kehilangan maknannya sebagai hukum. Cita hukum turut serta memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum itu adil (Oksep Adhayanto, 2015).

Rechtsidee pada hakikatnya memandang hukum sebagai aturan berakar pada gagasan, karsa masyarakat sendiri, yang diwujudkan pada tiga unsure yaitu keadilan, kehasilgunaan, serta kepastian hukum. Apabila dihbungkan dengan upaya pembentukan hukum nasional maka Pancasila sebagai *rechtsidee* mempunyai fungsi (Ach Faisol Triwijaya, dkk, 2002):

a. Acuan regulative serta konstruktif;
b. Motivator serta pedoman penyelenggaraan hukum*;*
c. Penjelasan yang relevan guna ditelaah sebagai pembentukan hukum;
d. Sebagai kaidah evaluasi penegakan hukum, menjadi *'margin of appreciation'* bangsa;
e. Sebagai bintang pemandu cita-cita;

Dari hal di atas, nilai-nilai dalam Pancasila memiliki fungsi konstitutif yang menentukan tata hukum tersebut benar, serta selain itu memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif termasuk adil. Hal-hal yang telah dijelaskan tadi relevan dengan teori *hierarchy of norms* yang menyatakan jika setiap norma hukum disebut sah sebab ia disusun berdasarkan cara yang ditentukan norma lain. Jadi hubungan hierarkis norma itu menampakkan jika norma yang tinggi menjadi landasan keabsahan norma yang dibentuk. Hubungan antar norma yang mengatur pembentukan norma lain dipersepsikan sebagai hubungan super serta subordinasi. Norma yang jadi acuan pembentukan ialah norma *superior*, sedangkan norma tercipta menurut hubungan tersebut ialah norma *inferior*.

Sebagai Negara hukum *(rechtstaat)* yang modern berlandaskan ketentuan UUD NRI 1945, Indonesia berusaha serta berupaya menggapai tujuannya. Maka dari itu perlu modifikasi pada kehidupan serta penghidupan masyarakat. Pengubahan sosial tersebut dilaksanakam dengan penyelenggaraan pembangunan, rencana-rencana, hukum yang melandasi, regulasi yang menunjang pelaksanaannya.

Pancasila berkedudukan penting pada sistem hukum nasional yang diatur pada berbagai UU, seperti Pasal 2 UU No 10 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU No 12 Tahun 2011 menjelaskan jika pancasila sumber dari segala sumber hukum. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ialah selaras dengan UUD NRI 1945 yang memposisikan pancasila sebagai dasar serta ideology dan sekaligus dasar filosofis bangsa sehingga masing-masing muatan UU tidak boleh bertabrakan dengan nilai muatan pada Pancasila. Nilai-nilai pancasila wajib menjadi landasan politik hukum (Derita Prapti Rahayu, 2015).

Selain itu supaya dapat mengimplementasikan pancasila pada politik hukum nasional, maka sila pancasila dipandang sebagai sistem nilai, sehingga hakikat pancasila menjadi satu kesatuan. Adapun nilai termuat pada setiap sila sebagai berikut (Derita Prapi Rahayu, 2015):

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memuat nilai jika segala hal terkait pelaksanaan Negara dan moral Negara, dijiwai ketuhanan yang esa;

Sila Kemanusiaan Adil dan Beradab ialah perwujudan nilai kemanusiaan, moral serta beragama, dan adil pada hubungan sesama;

Sila Persatuan dan Kesatuan memuat nilai jika Indonesia termasuk persekutuan diantara kebergaman yang dilukiskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Nilai nasionalisme bercermin pada aspek penyelenggaraan Negara;

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan memuat nilai jika Negara ialah dari, oleh, untuk rakyat. Nilai demokrasi harus diterapkan;

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memuat nilai yang merupakan tujuan Negara. Nilai keadilan perlu terwujud.

Pada dasarnya, kedudukan pancasila sebagai sumber tertib hukum telah tegas tercantum pada Ketetapan MPR No XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR No V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR No IX/MPR/1978. Berlandaskan hal tersebut, pancasila ialah sumber utama pada tatanan hukum, sehingga selayaknya sumber hukum lain tersebut tunduk pancasila. Tetapi, pelaksanaannya pada praktek masih cenderung ditentukan rezim berkuasa. Pancasila termasuk *volkgeist living law*, serta sumber segala sumber hukum. Kedudukan pancasila sebagai falsafah kenegaraan berfungsi sebagai *filosofische grondslag* serta *common platforms* antar masyarakat didalam lingkup kehidupan bernegara (Nur Hidayat dkk, 2021).

Pancasila telah dijelaskan sebagai sumber hukum pada perundang-undangan, dimana sumber hukum hakikatnya ialah tempat menemukan serta menggali hukum. Sumber hukum menurut Zevenbergen terbagi menjadi sumber materiil serta formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat asal hukum tersebut diambil contohnya hubungan sosial, situasi sosial ekonomis, hubungan kekuatan politik, tradisi, perkembangan internasional dan geografis. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber dari mana aturan mendapatkan kekuatan. Hal tersebut berkaitan dengan wujud yang menyebabkan aturan formal berlaku (Fais Yonas Bo'a, 2018).

Jika dikaitkan sumber hukum, Pancasila termasuk sumber hukum materiil, sedangkan yang sifatnya formil ialah UU. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan muatan didalamnya. Pada pancasila terdapat kualitas materi diantaranya sebagai berikut (Fais Yonas Bo'a, 2018):

Muatan pancasila merupakan muatan filosofis;

Muatan pancasila sebagai identitas hukum nasional;

Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, serta sanksi melainkan hanya asas-asas fundamental.

Ketiga kualitas materi tersebut menentukan pancasila sebagai sumber hukum materiil yang dijelaskan Sudikno Mertokusumo. Dengan adanya sumber hukum guna menemukan hukum di masyarakat, menyebabkan hukum mempunyai tatanan tersendiri. Khasanah hukum modern kini ataupun kontemporer dipengaruhi teori Hans Kelsen tentang *grundnorm* dan *stufenbautheorie*. Kelsen menyatakan norma yang validitasnya tak diperoleh dari norma yang tinggi disebut norma dasar. Seluruh norma yang validitasnya bisa ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk sistem norma. Norma dasar yang menjadi dasar utama merupakan pengikat norma yang berbeda.

Di Indonesia perlu pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang bukan sekedar mengikuti perkembangan, namun pembangunan hukum nasional perlu dilakukan bangsa sebab hukum yang berlaku saat ini dari kolonial. Sebagai Negara, pembangunan hukum yang sesuai dasar Negara ialah hal wajib. Keharusan tertuang di UUD NRI 1945 selaku konstitusi Negara Indonesia. Maka dari itu pembangunan hukum yang termasuk rangkaian proses *rule breaking* kemudian *rule making* memuat suatu definisi jika yang dilakukan pada pembangunan hukum tak hanya merubah teks dari pasal pada regulasi saja, namun lebih dari itu merubah jiwa dari hukum itu sendiri supaya sesuai ideology bangsa (Any Ismayawati, 2017).

Pancasila wajib menjadi paradigm, pada pembangunan hukum. Pancasila sebagai dasar Negara berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan perundang-undangan yang hierarkis dan bersumber darinya, selain itu Pancasila juga dikonotasikan program sosial politik tempat hukum menjadi alat serta karenannya harus bersumber darinya (Putu Eka Pitriyantini, Suardana dan Antara, 2018).

Pada dasarnya hukum ialah alat mencapai tujuan, maka dari itu dibentuk hukum yang mewujudkan tujuan. Adapun tujuan tertuang pada pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia.

Sesudah amandemen UUD NRI 1945, ditegaskan jika prinsip baru pada konstitusi ialah ditegaskannya nilai agama, budaya, serta kemanusiaan sebagai bagian integrative nilai fundamental Pancasila. Dalam kenyataan tampak terjadi konflik norma antar sistem hukum mengakibatkan gesekan kekacauan pada masyarakat. Norma hukum positif yang dibentuk berlandaskan politik hukum dari kekuasaan mengalami kontradiktif dengan religius serta adat pada tataran bawah. Pancasila dahulu menjadi komponen dissimulasi serta pengekangan bagi yang bertolak belakang. Kenyataan timbul dari penegakan kehendak politik berkuasa di era Orde Lama 1959 – 1965 serta Orde Baru 1970 – 1998. Pemberlakuan demokrasi pancasila pada jiwa Negara pancasila belum mampu mengubah pola berpikir bangsa sebagaimana konsep penalaran Pancasila (Nur Hidayat dkk, 2021).

Sebelumnya telah ada kajian mengenai sistem hukum Pancasila yang pernah dilakukan Mahfud MD serta Kaelan, tetapi tidak ada diantara keduanya melakukan kajian normative mengenai penilaian metode penalaran "Indonesia sebagai Negara Hukum" menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai legalitas konstitusional sistem hukum pancasila, dengan metode penalaran pancasila**.** Setiap produk serta penyelenggara Negara perlu mencerminkan pancasila serta tujuan negara. Dengan begitu, setiap hukum serta konstitusi dimaknai dengan benar berdasarkan dasar moral ideology yang melandasinya. Pancasila tak hanya rasionalitas ide, namun memuat muatan prinsip moral sekaligus etika kebangsaan. Maka dari itu penulisan ini akan mengkaji permasalahan krusial yaitu bagaimana korelasi pancasila terhadap perkembangan sistem hukum serta bagaimana korelasi pancasila terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan?

2. METODE PENELITIAN

Dalam rangka menjawab problematika yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, penulisan ini dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan cara pendalaman kritis terhadap bahan pustaka dan dokumen hukum yang relevan dengan Korelasi Pancasila terhadap Sistem Hukum dan Undang-undang. Penulis menelaah permasalahan yang terjadi dengan menggunakan dua pendekatan. Kesatu yaitu melalui pendekatan konseptual, dan kedua pendekatan melalui perundang-undangan. Pendekatan konseptual dengan menganalisis kedudukan pancasila di Indonesia melalui literatur yang ada. Pendekatan ini digunakan untuk memudahkan penulis dalam memahami konteks permasalahan yang terjadi. Konsep penunjang pemahaman terkait dengan kedudukan Pancasila. Selanjutnya pendekatan terhadap

sistem hukum dan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan melalui analisis, evaluasi terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Korelasi Pancasila dengan Sistem Hukum Indonesia

Hakikat Pancasila di Indonesia ialah sebagai suatu dasar dari politik hukum nasional, dimana falsafah pancasila menyampaikan pedoman hidup yang sempurna untuk seluruh bangsa. Pancasila merupakan kontrak sosial, yaitu norma yang disepakati bersama sebagai kehidupan sosial. Pancasila pada kaitannya dengan hukum mempunyai kecenderungan jika pancasila bagian tertinggi dari piramida hukum. Pancasila sebagai paradigma yaitu kumpulan yang membentuk tatanan berpikir, sekaligus arah serta tujuan dari perkembangan, dalam bidang tertentu termasuk pembangunan. Pancasila merupakan dasar Negara yang memuat nilai kearifan lokal yang ditafsirkan ke lima sila (Derita Prapti Rahayu, 2015).

Oleh sebab itu, masing-masing sila pancasila memuat nilai serta tujuan yang hendak dicapai suatu bangsa kedepannya. Indonesia lahir dengan pancasila yang ditetapkan sebagai ideology yang lahir lebih awal saat sidang dari BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila ialah sistem filsafat yang berwujud rumusan dalam bangun dasar keindonesiaan. Komponen bangsa semestinya mengembangkan implementasi pancasila pada berbagai bidang. Dalam realitanya, Pancasila yang sering diagungkan sebagai falsafah bangsa, pedoman hidup, lebih cenderung dilihat sebagai simbol.

Pancasila mempunyai nilai dasar yang sifatnya universal serta tetap. Nilai-nilai tersebut tersusun hierarki serta pyramidal, memuat kualitas tertentu yang perlu dicapai bangsa yang selanjutnya diwujudkan menjadi kenyataan konkret pada kehidupan masyarakat.

Padahal Pancasila merupakan nilai fundamental, dimana berkedudukan sebagai cita hukum. Dari cita hukum tersebut, belum konkrit guna digunakan langsung sebagai sumber formal sebab berada dalam tataran nilai. Untuk itu, perlu konkritisasi pada norma positif. Konkritisasi pancasila telah tercantum pada UUD 1945 yang dituangkan pada pembukaan serta aturan lain yang rendah. Seluruh peraturan pada sistem hukum wajib tidak bertolak belakang dengan Pancasila serta UUD 1945. Jika terdapat pertentangan maka suatu peraturan menjadi tidak sah (Yuli Asmara Triputra, 2017).

Fungsi Pancasila menurut Roeslan Saleh mengandung arti jika Pancasila berkedudukan (Fatimah Rahma Wijayanthi, 2021):

1) Ideologi hukum Indonesia;
2) Kumpulan nilai di belakang keseluruhan hukum;
3) Asas-asas yang diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum;
4) Sebagai pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa, juga dalam hukumnya;

Kedudukan Pancasila kemudian kembali ditegaskan pada TAP MPR No.III/MPR/2000 dimana Pasal 1 TAP MPR memuat sebagai berikut (Fatimah Rahma Wijayanthi, 2021):

1) Sumber hukum ialah sumber yang dijadikan bahan UU;
2) Sumber hukum terdiri dari sumber tertulis dan tidak tertulis;
3) Sumber hukum dasar nasional ialah Pancasila sebagaimana pada pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia turut serta membawa implikasi yaitu pancasila menjadi dasar nilai sekaligus norma yang mengatur pemerintah. Maka dari

itu seluruh penyelenggaraan Negara khususnya perundang-undangan ditafsirkan serta diverifikasi dahulu dari nilai pancasila. Pancasila disamping sebagai falsafah bangsa, merupakan pandangan hidup bangsa, yaitu penunjuk arah seluruh tindakan dan kehidupan pada berbagai bidang. Hal tersebut berarti jika semua tindakan setiap masyarakat Indonesia perlu dijiwai serta merupakan cerminan seluruh sila Pancasila, sebab *weltanschauung* merupakan kesatuan yang tak bisa dilepaskan satu sama lain, keseluruhan sila di pancasila merupakan kesatuan (Any Ismayawati, 2017).

Di Indonesia tentu terdapat sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang meliputi seluruh unsur hukum yang antar satu dengan lainnya berkaitan dengan sumber dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Sistem hukum hadir supaya tidak terjadi bentrokan antar sistem sendiri, sistem hukum tersebut berlaku baik jika didukung asas hukum yang baik. Sistem hukum mengatur berbagai aktivitas kehidupan manusia serta mengatur orang yang berada pada kandungan dengan syarat lahir hidup. Pada saat kemerdekaan Indonesia tampak bahwa sistem hukum atau sistem peradilan di Indonesia sebelum mencapai kemerdekaan sangat diskriminatif terhadap bangsa Indonesia sendiri sehingga sesudah pembacaan proklamasi kemerdekaan sistem tersebut dianggap perlu disederhanakan menjadi sistem yang sama untuk seluruh warga Negara dengan melakukan unifikasi hukum (Oksep Adhayanto, 2014).

Perkembangan hukum erat kaitannya dengan pembuatan hukum sebagaimana Indonesia memakai *common law* yaitu hukum tertulis, guna mengembangkan hukum tertulis seharusnya memasukan nilai hukum yang hidup guna sedemikian rupa serta diberlakukan menjadi norma, kemudian proses implementasi serta penegakan yang memungkinkan hukum ditegakan serta dikembangkan menjadi pembangunan. Setelah bekerjanya hukum baik pada pembinaan serta pengembangan kesadaran hukum masyarakat meungkinkan sistem hukum yang dibangun mendapat dukungan pada arti luas. Dengan kata lain perkembangan membahas berikut (Aristo Evandy Barlian dkk, 2000):

a. Hukum dan prosedur material;
b. Kelembagaan termasuk pejabat didalamnya, mekanisme lembaga hukum, serta prasarana pendukung;
c. Kesadaran hukum;

Kualitas produk dari hukum baru bisa diketahui sesudah diterapkan. Hukum yang buruk menimbulkan dampak buruk serta hukum baik menghasilkan dampak baik. Hukum termasuk ilmu normative serta ilmu realitas jika isi norma hukum tak sesuai kenyataan maka bukan keadilan. Aturan hidup terkadang bertentangan dengan hukum nasional sehingga terjadi kesenjangan antara keadilan dengan aturan pemerintah. Pada laporannya kongres PBB VI/1980 dinyatakan hukum semakin menjauh dari nilai kehidupan, maka semakin tinggi ketidakpercayaan. Reformasi hukum harus melihat jelas nilai yang hidup seperti adat istiadat, sebab hukum yang tak memandang budaya akan jauh dari cita-cita.

Namun pada kenyataannya dengan tingginya mafia, korupsi, dan kriminalitas didalam negeri yang ada saat ini membuktikan jika sistem hukum Indonesia belum efektif mencegah berbagai tindakan yang merugikan masyarakat, hukum cenderung membela yang kuat, serta hukum digunakan oleh kepentingan segelintir orang. Terdapat pemanfaatan, perusakan berbagai elemen Negara seperti ekonomi, serta lain-lain yang disebabkan lemahnya hukum. Oleh sebab itu perlu pengembangan sistem hukum yang presisi, serta berkelanjutnya selaras dengan ciri bangsa yaitu Pancasila (Aristo Evandy Barlian dkk, 2000).

3.2. Korelasi Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan

Nilai dasar bangsa Indonesia yang telah menjadi pandangan hidup bangsa saat ini terimplementasi pada nilai dalam Pancasila, maka dari itu Pancasila seharusnya ditempatkan sebagai filter pembangunan hukum guna menghadapi kehidupan yang dimanis, salah satunya dampak akibat pengembangan IPTEK. Pada kehidupan bernegara, perkembangan IPTEK tidak dapat dihindari akan tetapi bukan berarti dapat mengabaikan akar nilai asli bangsa Indonesia. Dalam kondisi ini kedudukan Pancasila penting sebab mengatasi permasalahan yang berpotensi timbul dari perkembangan IPTEK (Any Ismayawati, 2017).

Keberadaan Pancasila berusaha nampak tegas pada Pembukaan UUD NRI 1945 alenia IV dimana dijelaskan jika Republik Indonesia dibentuk berlandaskan sila-sila pancasila. Pada sila-sila pancasila merupakan sarana mencapai tujuan nasional. Kalimat pada alenia IV UUD NRI 1945 memiliki makna sangat dalam serta luas bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Jika dikaji dalam pada alenia IV pembukaan UUD NRI 1945 mengandung arti jika bangsa Indonesia dalam penyelengaraan kehidupan bernegara tidak boleh bertabrakan dengan sila pancasila.

Tetapi jika dicermati Pancasila sebagai ideology serta sumber dari segala sumber hukum masih limitatif. Perundang-udangan yang menyebutkan Pancasila baru dapat dijumpai pada tempat lain seperti Instruksi Presiden No 12 Tahun 1968 mengenai tata cara pengucapan Pancasila sesuai tata urutan dan rumusan. Selebihnya penegasan mengenai kedudukan secara detail sulit dijumpai. Penegasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum masih cenderung lemah dalam kenyataannya. [1]

Akan tetapi pada UU No 12 Tahun 2011 secara eksplisit dijelaskan Pancasila ialah sumber segala sumber hukum. Bunyi pasal 2 UU tersebut memiliki makna jika pembentukan aturan apapun tak boleh bertentangan dengan pancasila**.**

Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum mengharuskan pembentuk UU sesuai Pancasila. Tetapi, ketentuan UU No 12 Tahun 2011 masih mempunyai kekurangan dalam penjabaran lebih lanjut. Pembentukan UU belum memberi ruang Pancasila mentransformasikan dirinya dalam UU yang dibentuk menurut Becky Krisnayuda. Ketentuan UU No 12 Tahun 2011 masih sebatas terhenti pada titik tersebut, serta tidak memiliki pengaturan lengkap tentang peran Pancasila pada pembentukan UU.[2]

Apabila meninjau UU No 12 Tahun 2011 maka ruang aktualisasi pancasila terbatas. Pada pembentukan UU, ruang aktualisasi pancasila baru ada di perencanaaan serta penyusunan pada Naskah Akademik, Landasan konsideran menimbang, serta kegiatan harminosiasi seperti pada pasal 43-51. Dari tahapan diatas, pembahasan, pengesahan, serta pengundangan relative belum memberi ruang guna mengaktualisasi pancasila.

UU No 12 Tahun 2011 sebagai pedoman formal serta material berusaha menjabarkan nilai Pancasila pada asas yang perlu dipenuhi pada setiap perundang-undangan. Pada TAP MPR No. III/MPR/2000 telah mengatur maksud dari istilah sumber hukum pada sistem hukum jika yang menjadi sumber hukum ialah terbagi menjadi tertulis serta tidak tertulis. Pancasila ialah rujukan dari pembuatan seluruh macam UU. Akan tetapi pada realitanya terjadi pergeseran serta tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut sebenarnya tidak menggoyahkan kedudukan pancasila sebagai norma dasar yang menginduki berbagai norma, akan tetapi dapat memudarkan

1 Nurahmani, Aditya dan Muhammad Robi Rismansyah. (2018). *Problematika dalam Mewujudkan Pancasila sebagai Ideologi yang Bernilai Substantif.* Padjadjaran Law Review, Vol. 6, 67-68

2 Arfai dkk. (2020). *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-undang,* Undang Jurnal Hukum, Vol. 3 (2), 382-383.

supremasi serta daya ikat Pancasila. Dikatakan demikian sebab nilai-nilai pancasila seperti cita-cita moral tidak lagi memperoleh legitimasi yuridis. Terutama hukum modern banyak dipengaruhi aliran pikiran positivisme hukum yang mengakui aturan tertulis.[3]

Maka dari itu ialah kekeliruan jika tidak menerangkan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tetapi supremasi Pancasila pada sistem hukum sebenarnya ada pada UU No 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti pada UU No 12 Tahun 2011. Dengan demikian keberadaan pancasila kembali menjadi *supreme norm* pada sistem hukum Negara sehingga pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita terlegitimasi secara yuridis.

Di Indonesia suatu undang-undang dibentuk legislatif bersama eksekutif serta melibatkan DPD apabila berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat serta daerah. Sedangkan Perda dibahas DPRD serta Pemda. Tingkat pembahasan UU serta Perda dilakukan dengan dua pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I (agenda pengantar musyawarah), serta pembicaraan II (pengambilan keputusan di rapat paripurna). Pengesahan UU dilakukan Presiden terhadap RUU yang disetujui legislatif dan eksekutif. Proses pengundangannya dilakukan Menteri pada bidang hukum. Guna menyebarluaskan UU yang dilakukan DPR, DPD, serta Pemerintah mulai proses perencanaan hingga pengundangan, untuk Perda dilaksanakan DPRD dan Pemda.[4]

Berdasarkan pembentukan UU diatas, tahap perencanaan, penyusunan, serta pembahasan memperhatikan nilai Pancasila dahulu. Hal tersebut sebagai proses memastikan perencanaan, betul-betul memperhatikan serta menginternalisasikan pancasila. Pada saat perundang-undangan telah disahkan, sangat mungkin jika peraturan perundang-undangan belum mewujudkan rasa keadilan, serta menjawab kebutuhan hukum. Untuk itu dimungkinkan pelaksanaan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya uji materi *(judicial review)*, *legislative review*, atau *administrative review.*

Tetapi instrument serta materi evaluasi diatas, cenderung didorong oleh UU yang biasanya dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan saja, bukan karena UU tersebut bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, seharusnya evaluasi UU selain berlandaskan aspek sosiologi serta yuridis, harus berlandaskan aspek filosofis. Pancasila sebagai pancaran jiwa bangsa memuat nilai inti moral publik yang perlu dipandang sebagai meta-legal yang membentuk norma hukum tertinggi, yang menurut Hans Kelsen dipandang sebagai *grundnorm* serta Hans Nawiasky sebagai *staatsfundamentalnorm.* Sebagai pancaran jiwa bangsa, norma dasar tidak terbentuk dari norma yang tinggi, namun sifatnya "ditetapkan terlebih dahulu" serta selanjutnya menjadi tempat bersinggahnya norma hukum di bawahnya.

Nilai-nilai yang terkandung di Pancasila perlu ditransformasikan pada proses pembentukan aturan sebagai upaya memperbarui hukum nasional. Pembentukan perundang-undangan merupakan langkah membangun hukum nasional, disamping penerapan hukum serta penegakan hukum. Pembangunan hukum baru bisa terlaksana komperhensif jika telah mencakup substansi hukum, dan dibarengi dengan penegakan hukum secara konsisten dengan menunjung HAM, dengan begitu fungsi hukum guna pembaruan dan pembangunan nasional mampu berjalan selaras dengan cita hukum dan tujuan Negara. Pancasila sebagai norma fundamental Negara dan cita hukum merupakan sumber untuk pembentukan UU yang berada dibawahnya sehingga pancasila memiliki dua dimensi yaitu pertama norma

3 Bo'a, Fais Yonas. (2018), *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional,* Jurnal Konstitusi, Vol. 15 (1), 32-35

4 Setyawan, Fendi. (2021). *Institusionalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan,* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 (2), 250-252

kritik bagi norma-norma dibawahnya, serta kedua sebagai bintang pemandu yang menjadi acuan dalam pembentukan hukum dibawahnya.[5]

Pada UU No 12 Tahun 2011, telah dijelaskan jika pembentuk undang-undang sepakat memposisikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara sehingga sudah seharusnya kebijakan dari penguasa dalam bentuk formal seperti UU tunduk pada Pancasila serta Tujuan Bernegara.

Substansi muatan UU dituntut guna memberi perlindungan terhadap masyarakat, menjamin pelayanan umum, memberi jaminan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan, serta materi muatan berisi keadilan, sehingga Indonesia dapat mencapai suatu tujuan puncak yaitu Negara kesejahteraan.

Pancasila termasuk bintang pemandu dimana artinya cita-cita pancasila harus dikonkritkan pada setiap aturan dibawah Pancasila, atau dengan kata lain terdapat aturan main jika cita-cita Pancasila harus menjiwai aturan positif. Pembangunan hukum seharusnya beracu pada nilai-nilai Pancasila. Hukum sebagaimana demikian akan menciptakan hukum yang aspiratif sekaligus akomodatif dan berpengaruh terhadap keberlakuannya di masyarakat. Oleh sebab itu fungsi Pancasila sebagai pemandu sama halnya sebagai asas yang melandasi hukum.[6]

Amandemen UUD NRI 1945 yang pernah terjadi sebenarnya tidak berniat mengubah kedudukan Pancasila sebagai *grundnorm*, sehingga kedudukannya penting pada kaitannya dengan teori *stufenbau theory*. Selain *grundnorm*, Pancasila sebagai dasar filsafat sehingga berimplikasi pada setiap aspek kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu Pancasila sebagai norma dasar diartikan sebagai norma dasar yang detailnya ditafsirkan pada UUD NRI 1945 serta hukum positif lainnya. Sebagai *staatfundamentalnorm*, Pancasila diartikan sebagai kaidah Negara yang fundamental yang mempunyai substansi sekaligus arti universal.

Pancasila pada dasarnya juga mengawal UU dari potensi penyimpangan atau pengingakaran cita-cita bangsa yang terkandung didalamnya. Selain itu bersemayamnya nilai Pancasila pada peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari perintah UU No 12 Tahun 2011 serta TAP MPRS No XX/MPRS/1966 yang menyatakan pembangunan berlandaskan Pancasila. Jika memperhatikan kedudukan pancasila yang berperan penting, seharusnya Pancasila tidak dilupakan pada kebijakan hukum. Apabila terdapat pengingkaran melalui peraturan yang tidak dijiwai Pancasila, maka Negara Pancasila hanya angan-angan. Hukum yang tercipta tak boleh menyebabkan kerugian sehingga menciptakan hukum yang adil. Maka dari itu tidak dibenarkan jika hukum bertabrakan dengan Pancasila sebab merugikan masyarakat luas.

Peraturan yang ada baru bisa diakui memiliki kekuatan jika secara filosofis, sosiologis, dan yuridis apabila aturan tersebut berlandaskan Pancasila yang kedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm*. Oleh sebab itu, seluruh proses penyusunan peraturan dari perancangan hingga pengesahan perlu dijamin baik prosedur atau substansinya bersesuaian sekaligus tidak bertabrakan dengan Pancasila. Apabila terdapat pelanggaran, maka masyarakat berhak menggugat aturan yang tak sesuai dengan filosofi bangsa tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui mekanisme yang berlaku seperti *judicial review.*[7]

5 Dahoklory, Madaskolay Viktoris. (2020). *Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang*, Jurnal SASI, Vol. 26 (3), 299-301

6 Triwijaya, Ach Faisol, dkk. (2020). *Quo Vadis: Pancasila sebagai Jiwa Hukum Indonesia,* Vol. 1 (2), 120-122

7 Ghafur, Jamaludin. (2017). *Memasyarakatkan Ide Pancasila sebagai Batu Uji dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi,* Semnas Sipendikum FH UNIKAMA, 215-216.

4. KESIMPULAN

Dinamika kehidupan suatu negara bergerak cepat dan dominan. Hal itu sebagai akibat keterlibatannya yang mengintari berbagai sendi kehidupan negara. Esensi dari negara hukum yang bercitakan Pancasila ialah suatu sistem hukum sekaligus peraturan perundang-perundangan yang merupakan produk hukum mewakili cita-cita masyarakat luas. Kekuatan moral Pancasila dalam bernegara menjadi kunci utama Pancasila dalam menjawab tantangan zaman yang ada. Cita negara hukum Pancasila merupakan harapan bagi bangsa Indonesia untuk dapat terselenggaranya hukum yang berkeadilan dengan ditunjang sistem hukum serta produk hukum yaitu perundang-undangan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ketika Pancasila tidak dipertimbangkan atau dimuat pada sistem hukum sekaligus peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tidaktepat sebab akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat serta menciderai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi UUD NRI 1945 merupakan jembatan hubung yang berfungsi sebagai jembatan aspirasi daripada nilai luhur yang ada pada Pancasila. Maka dari itu implementasi Pancasila perlu penerapan menyeluruh pada sistem hukum serta perundang-undangan yang orientasinya kepentingan bangsa dan negara, bukan berorientasi pada sekelompok penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

Adhayanto, Oksep. (2015). *Implemetasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 (2), 4-6.

Adhayanto, Oksep. (2014). *Perkembangan Sistem Hukum Nasional,* JurnalIlmu Hukum, Vol. 4 (2), 215-216

Arfai dkk. (2020). *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-undang,* Undang Jurnal Hukum, Vol. 3 (2), 382-383.

Barlian, Aristo Evandy A, dkk. (2000). *Pembangunan Sistem Hukum Indonesia berdasarkan Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa (Development of Indonesian Legal System Based on Pancasila Value as a Nation Political Ideology),* Vol. 9 (1), 549-550.

Bo'a, Fais Yonas. (2018), *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional,* Jurnal Konstitusi, Vol. 15 (1), 32-35

Dahoklory, Madaskolay Viktoris. (2020). *Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang,* Jurnal SASI, Vol. 26 (3), 299-301

Eleanora, Fransiska Novita. (2000). *Pancasila sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia,* Jurnal Hukum Adil, Vol. 3 (1), 142.

Ghafur, Jamaludin. (2017). *Memasyarakatkan Ide Pancasila sebagai Batu Uji dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi,* Semnas Sipendikum FH UNIKAMA, 215-216.

Hidayat, Nur dkk. (2021). *Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila,* Jurnal Negara Hukum, Vol. 12 (1), 145-146.

Ismayawati, Any. (2017). *Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia,* Yudisia, Vol. 8 (1), 58-61

Nurahmani, Aditya dan Muhammad Robi Rismansyah. (2018). *Problematika dalam Mewujudkan Pancasila sebagai Ideologi yang Bernilai Substantif.* Padjadjaran Law Review, Vol. 6, 67-68

Pitriyantini, Putu Eka, Suardana, I.W, Antara, I.W. (2018). *Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum di Indonesia,* Majalah Ilmiah Untab, Vol. 15 (1), 40

Prabandani. (2022). *Menelusuri Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia),* Iblam Law Review, Vol. 2 (1), 171-172

Rahayu, Derita Prapti. (2015). *Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia,* Yustisia, Vol. 4 (1), 195-197.

Safitri, Alvira Oktavia. (2021). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implemetasinya dalam berbagai Bidang,* EduPsyCouns Journal, Vol. 3 (1), 91

Setyawan, Fendi. (2021). *Institusionalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan,* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 (2), 250-252

Shaleh, Ali Ismail dan Fifiana Wisnaeni. (2019). *Hubungan Agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia, Vol. 1 (2), 238

Triputra, Yuli Asmara. (2017). *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 (2), 287-288.

Triwijaya, Ach Faisol, dkk. (2020). *Quo Vadis: Pancasila sebagai Jiwa Hukum Indonesia,* Vol. 1 (2), 120-122

Wijayanthi, Fatimah Rahma. (2021). *Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum,* Vol. V (1), 141.

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA SECARA MULTI SIGNIFIKANSI DALAM PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Muhamad Sadi Is
FSH UIN Raden Fatah Palembang
Email: jelsaeka@gmail.com

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi tentu berfungsi sebagai pemandu bangsa dan negara Indonesia ke depan dan sekaligus sebagai jembatan yang menuju masa depan bangsa. Untuk mencapai masa depan bangsa tentu harus didukung dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Maka yang menjadi permasalahan sekarang ini apakah produk perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan belum menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan hal ini terbukti sudah empat kali dilakukan revisi yang mana revisi terakhir hanya untuk mengatur dan memberikan landasan hukum metode omnibus law.

Kata kunci; Nilai Pancasila, Multi Signifikansi, Perundang-Undangan.

Abstract

Pancasila as an ideology certainly functions as a guide for Indonesian nation and state in the future and at the same time as a bridge leading to the nation's future. To achieve the future of the nation, of course, it must be supported by values of Pancasila and UUD NRI 1945. So the problem now is whether the products of legislation in Indonesia especially the Law on the Making of Legislation has implemented the values of Pancasila in a multi-significant manner. While this research method uses normative research by analyzing several related laws and regulations. The results of the study confirm that the Law concerning the Making of Legislation has not implemented the values of Pancasila in a multi-significant manner, this is proven to have been revised four times, revisions were made in which the last revision was only to regulate and provide a legal basis for the omnibus law method.

Keywords: *Pancasila Values, Multi Significance, Legislation.*

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemological, bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kritalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang kesemuanya bergerak vertikal dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk mensinkronkan dasar filosofis-ideologi menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologikal bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan dan melaksanakan Pancasila, (Semadi, 2019).

Pancasila merupakan pedoman dari segala pedoman di dalam penyelenggaran hukum, demokrasi dan pemerintahan di Indonesia menuju negara yang berdaulat di bukan hanya di tingkat nasional akan tetapi berdaulat di tingkat internasional. Dengan demikian maka semua masyarakat Indonesia harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dibuktikan dalam sistem pendidikan di Indonesia dapat kita lihat di dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, dan UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menjelaskan dan menegaskan bahwa pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran yang diwajibkan baik oleh siswa maupun mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Indonesia.

Selanjutnya di dalam UU RI No 10 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan UU RI No 12 Tahun 2011 kemudian direvisi lagi dengan UU RI No 15 Tahun 2019 sebagaimana direvisi lagi dengan UU RI No 13 Tahun 2022 tentang PPP dalam Pasal 2 menjelaskan dan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa di dalam pembuatan peraturan perundang-undang baik pada tingkat Undang-Undang sampai pada perda tingkat kabupaten/kota harus mengandung nilai-nilai Pancasila yang di dalam implementasinya. Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran UU RI No 15 Tahun 2019 tentang PPP menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Berdasarkan penjalasan di atas menegaskan bahwa kedudukan Pancasila menjadi rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun berhukum. Pada tatanan hukum kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. (Kunantiyorini, 2018).

Hendra Wahanu Prabandani menjelaskan bahwa Pancasila sebagai *common platform* dan *common denominator* bagi bangsa Indonesia. Sedangkan Din Syamsudin yang meminjam istilah Al-Qur'an menyampaikan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai *kalimatun sawa'* atau "kata tunggal pemersatu" bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam hal ini Pancasila tidak hanya sekedar "pernyataan politik" (*political statement*), akan tapi sebagai "pernyataan ideologis" (*ideological statement*). Sebagai pernyataan politik Pancasila memang mempersatukan berbagai kepentingan dan aliran politik yang ada, sedangkan pernyataan ideologis Pancasila sebagai pondasi dalam penyelenggaraan negara. (Wahanu Prabandani, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut sehingga yang menjadi fokus penelitian ini ialah mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan di dalam peraturan perUU di Indonesia supaya bisa memberikan dan menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah menggunakan penelitian normatif yang bahan primernya yaitu Pancasila, UUDNRI 1945 dan Peraturan PerUU yang berhubungan dengan penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis dan perundang-undangan. Dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Nilai Filosofis Pancasila

Pancasila sebagai sebuah ideologi negara Indonesia, tentu harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai sebagaimana mestinya. Karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang merujuk pada kelima sila Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara (Wartoyo, 2020). Sehingga Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap pancasila sebagai dasar negara/ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam pancasila sangat berguna dan bermanfaat. (Dewi, 2021). Karena Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian maka Pancasila bukan imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia (Charda, 2018). Oleh karena itu, untuk tetap menjaga sila-sila Pancasila ini maka diperlukan implementasi sila-sila Pancasila secara multi signifikansi di Indonesia khususnya di dalam peraturan perundang-undangan. Karena ideologi Pancasila memiliki lima nilai fundamental yang harus diidealisasikan. Kelima nilai dasar itu adalah sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Persatuan Indonesia.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.



Gambar 1 Burung garuda dan parisainya.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan dalam kelima nilai dasar tersebut di atas yang menjadi kesadaran konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti dari sila kedua adalah prinsip *equality,* persamaan, kesetaraan antar sesama umat manusia yang bersifat universal. Inti dari sila ketiga adalah solidaritas kebangsaan "*unity in diversity*" bhineka tunggal ika bukan kesatuan atau keseragaman, tetapi persatuan dalam keanekaragaman. Inti dari sila

keempat adalah demokrasi dan kebebasan yang teratur "*liberty*", "*democracy and the rule of law"* sebagai hasil dari sistem permusyawaratan/perwakilan. Inti dari sila kelima adalah "*prosperity and equity",* kemakmuran yang berkeadilan atau keadilan yang berkemakmuran menjadikan Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keempatnya adalah dalam rangka perwujudan keimanan warga bangsa Indonesia terhadap sila pertama. (Jimly Assshiddiqie, 2020). Sila pertama ini merupakan sila yang utama dalam Pancasila yang menjiwai prinsip kemanusiaan dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie, 2018). Sila pertama merupakan "roh" sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Sila pertama bermakna bahwa Bangsa Indonesia adalah Negara yang monotheisme percaya terhadap Tuhan yang satu bukan sebaliknya (Octavian, 2018). Kelima sila tersebut harus diimplementasikan secara multi siknifikan sebagaimana yang diamanatkan dalam aline keempat UUDNRI 1945. (Asshiddiqie, 2015).

Secara filosofis Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena memiliki:

a. Nilai regligiositas yang merupakan nilai yang utama, dan sebagai sila yang menegaskan bahwa manusia Indonesia tidak diperbolehkan menjadi seorang atheis.
b. Nilai kekeluargaan dan kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan sila kedua.
c. Nilai keselerasan dan persatuan merupakan nilai pemersatu bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam sila ketiga.
d. Nilai kerakyatan, dan demokrasi nilai yang memiliki sifat dan komitmen sebagaimana yang diamanatkan di dalam sila keempat.
e. Nilai keadilan sosial dan kesejahteraan, sebagaimana yang diamanatkan dalam sila kelima (Ubaedillah, 2015).

Dengan demikian maka Pancasila bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila Pancasila. Oleh karena itu, hakekat Pancasila ada dua yaitu hakekat Pancasila yang umum universal yang merupakan subtansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yaitu bersifat umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian maka hakikat nilai-nilai Pancasila adalah merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman negara adalah merupakan norma, adapun aktualisasinya merupakan realisasi konkrit Pancasila. (Kaelan, 2013).

Pancasila sebagai ideologi dipandang oleh Soekarno lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada *declaration of Independence*-nya Amerika Serikat karena tidak mengandung keadilan sosial, dan *manifesto komunis* yang tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa. (Latif, 2017).

Fransiska Novita Eleanora dalam tulisannya menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib hukum yang dijabarkan dalam sistem dan struktur fungsi Pancasila sebagai berikut:

1) Pancasila sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUDNRI 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran.
2) Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia.
3) Pancasila sebagai norma dasar yang mengharuskan UUDNRI 1945 yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
4) Pancasila sebagi sumber semangat kebangsaan bagi UUDNRI 1945, dan PerUU. (Novita Eleanora, 2019).

Pancasila serta turunan visinya ialah untuk kemaslahatan-kebahagian semua masyarakat Indonesia (*common good*). Yang melindungi integritas kodrat kemanusiaan di dalam perwujudan kebijakan publiknya, pada dasarnya bisa dikerucutkan ke dalam lima prinsip, yang satu sama lain saling kait-mengait, saling menyempurnakan, yang harus dikembangkan secara positif, serasi dan seimbang. (Latif, 2020). Sehingga Pancasila sebagai landasan pembuatan undang-undang dalam negara hukum Pancasila yang mampu mencerminkan sistem nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka undang yang dibuat dapat berlaku secara filosofis, secara yuridis, dan secara sosiologis. Dengan demikian maka dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan dapat menjadi tolok ukur terhadap undang-undang yang dibuat merupakan undang-undang yang berkualitas yang menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua lapisan masyarakat.

3.2. Undang-Undang yang Belum Multisignifikan

Dalam tulisan ini penulis menegaskan bahwa istilah multi signifikansi diambil dari pernyataan Soerkarno; "bahwa Pancasila tidak hanya memiliki signifikansi nasional. Pancasila juga memiliki signifikansi universal, dan bisa diterapkan secara internasional". Dengan demikian maka makna dari multi signifikansi nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan pada semua level yang menjadi pandangan dunia yang diterapkan pada setiap tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikansi dapat menjadikan Pancasila sebagai *weltanschauung* yang dikemukakan oleh Soekarno bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari sambang sampai Marauke hanya dapat bersatupadu di atas dasar Pancasila. (Latif, 2019).

Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki tiga dimensi yaitu dimensi keyakinan, dimensi pengetahuan, dan dimensi tindakan. *Pertama*, dalam dimensi keyakinan, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup dan tatanan bernegara. *Kedua*, dalam dimensi pengetahuan, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. *Ketiga*, dalam dimensi tindakan, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret. Ketiga dimensi Pancasila inilah yang dijadikan pedoman di dalam pembentuk dan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap perundang-undangan di Indonesia, karena dimensi tersebut memiliki relevansi yang kuat seperti halnya dimensi keyakinan Pancasila mengandung seperangkat nilai yang diakui kebenarannya dan sekaligus menjadi sumber nilai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimensi pengetahuan yang menjadikan Pancasila memiliki paradigma pengetahuan yang berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori, yang dapat dijadikan pisau analisis dalam penyusunan argumentasi akademis mengapa suatu peraturan perundang-undangan tersebut dibuat. Sedangkan dimensi tindakan yang menjadikan Pancasila sebagai instrumen nilai untuk mengukur/menilai apakah peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan berlaku secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Setyawan, 2021).

Dalam penyelenggaraannya di Indonesia yang tunduk terhadap undang-undang yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikansi sebagaimana dibuktikan semenjak berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagaimana adanya UU RI No 24 Tahun 2003 sebagaimana direvisi dengan UU RI No 7 Tahun 2020 tentang MK RI sudah banyak Undang-Undang yang diujikan ke MK RI sebagaimana data dari Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai tahun 2022 yang diregistrasi berjumlah 1569 dengan jumlah putusan sebaganyak 1534.

Padahal penerapan nilai-nilai Pancasila secara multisignifikansi sudah menjadi kewajiban penyelenggara negara dalam hal pihak legislasi dalam membuat undang-undang di Indonesia sebagai yang dijelaskan oleh Soediman Kartohadiprodjo bahwa Pancasila sebagai ideologi yang unsur-unsurnya sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai suatu pandangan hidup, yang oleh Notonagoro disebut kausa materialis yaitu Pancasila direalisasikan dalam undang-undang dengan esensi yang mewajibkan semua pelaksanaan dan penyelenggaraan negara berbasis pada nilai-nilai Pancasila. (Kaelan, 2013).

Berikut daftar UU yang dibatalkan secara keseluruh oleh MK RI dari semenjak berdirinya sampai tahun 2022. Sebanyak 29% Undang-Undang dibatalkan ini menegaskan bahwa masih banyak undang-undang yang tidak berkualitas dan sekaligus menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan yang masuk kesemua lini undang-undang yang mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat bukan untuk kepentingan elit tertentu terutama elit yang membuat undang-undang itu sendiri. Berikut ini daftar UU yang dibatalkan oleh MK RI.

Tabel I: UU yang Dibatalkan MK RI

Undang-Undang	Nomor Putusan
UU RI No 7 Tahun 2004 tentang SDA.	Nomor 85/PUU-XII/2013
UU RI No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.	Nomor 11, 14, 21, 126 dan 136 / PUU-VII / 2009
UU RI No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.	Nomor 28 / PUU-XI / 2013
UU RI No 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan.	Nomor 6-13-20/ PUU - VIII / 2010
UU RI No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	Nomor 111 / PUU-XIII / 2015

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tabel II: UU yang paling banyak diuji ke MK RI

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilu	84
2	UU RI No 8 tahun 1981 tentang KUHAP	74
3	UU RI No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	40
4	UU RI No 8 tahun 2015 tentang Perubahan UU RI No 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	39
5	UU RI No 32 tahun 2004 tentang Pemda	38
6	UU RI No 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.	36
7	UU RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	34
8	UU RI No 42 tahun 2008 tentang Pemilu	33
9	UU RI No 18 tahun 2003 tentang Advokat	26
10	UU RI No 30 tahun 2002 tentang KPK	26

Sumber: https://www.mkri.id/, diakses tanggal 25 Juni 2022

Melihat beberapa undang-undang di atas yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikansi atau dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebenarnya bukan suatu yang baru bahkan sejak kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Baik itu, masa Orde Lama kurun waktu Tahun 1945-1965, Orde Baru Tahun 1966 -1998, dan era reformasi pada Tahun 1999 hingga sekarang masih banyak produk-produk hukum dalam arti Undang-Undang yang belum mencerminkan roh, jiwa, maupun moral dari Bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila itu senidri. Antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Sumber Daya Air, dan lain sebagainya (Dahoklory & Wardhani, 2020).

Penyebab masih banyaknya UU di Indonesia yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikansi disebabkan masih banyaknya kekurangan di dalam undang-undang yang menjadi pedoman pembuatan undang-undang itu sendiri yaitu UU RI No 15 Tahun 2019 jo UU RI No 13 Tahun 2022 tentang PPP yang dalam konsiderannya menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan ralryat dan menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945. Dari penjelasan konsideran ini tidak menegaskan bahwa pembuatan undang-undang tidak berdasarkan Pancasila padahal undang-undang ini undang-undang yang sangat urgen karena undang-undang pedoman dalam pembuatan undang-undang yang lain.

Padahal kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum ini mengharuskan pembentukan undang-undang untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, ketentuan ini masih memiliki kelemahan dalam penjabaran lebih lanjut. Sebagaimana dikatakan Backy Krisnayuda, pembentukan undang-undang belum memberi ruang bagi Pancasila untuk mentrasformasikan dirinya dalam undang-undang yang dibentuk. Ketentuan Pasal 2 tersebut juga terhenti di situ, dan tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang peran Pancasila dalam pembentukan undang-undang (Krisnayuda, 2016). Kemudian di dalam Pasal 2 tidak menegaskan bahwa di dalam pembuatan undang-undang di Indonesia mewajibkan memasukan nilai-nilai Pancasila sebagai syarat mutlak. Sehingga perlu ada penambahan kalimat seperti "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara yang berkeadilan". Ini menegaskan bahwa undang-undang itu dibuat dapat menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam sila kelima.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa rumusan substansi nilai-nilai Pancasila yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tahapan pembentukan undang-undang ternyata diketahui bahwa rumusan yang mengatur perihal Pancasila sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang pada kegiatan di setiap tahapan pembentukan undang-undang meletakkan nilai-nilai Pancasila pada sila-sila Pancasila itu sendiri. Pada konteks ini, belum ada rumusan pasal yang menegaskan terkait dengan indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan tolok ukur dalam mengaktualkan nilai-nilai Pancasila ke dalam undang-undang yang diatur dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang (Arfa'i et al., 2020).

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) sebagai jantungnya dalam pembuatan UU di Indonesia yang mengatur mengenai asas-asas hukumnya'. Peneliti menilai pasal ini memiliki kelemahan karena belum menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama tidak mencantumkan sila ke empat di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan memasukan asas demokrasi. Dengan demikian, maka undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus menegaskan bahwa dalam pembuatan perUU di Indonesia dilakukan secara multisignifikan sehingga dapat diterapkan dan diterima di semua masyarakat Indonesia

yang berpedoman dengan ideologi Pancasila. Yang merupakan jabaran dan turunan dari Pasal 2 di atas sehingga dapat memuat beberapa pasal yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber utama dalam pembentukan undang-undangan. Jika perlu ada pejelasan secara tegas bahwa apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila maka secara otomatis UU tersebut batal demi hukum. Maka, setiap undang-undang yang akan dibuat harus berlandaskan Pancasila secara multi signifikan.

Kemudian kelemahan di dalam penjelasan umum UU RI No 15 Tahun 2019 jo UU RI No 13 Tahun 2022 tentang PPP menegaskan bahwa pembentukannya didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Seharusnya ditambah kalimat "berlandaskan Pancasila dan UUDNRI 1945", yang menempatkan Pancasila sebagai "batu uji" dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat menghasilkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, yang menghasilkan peraturan perundang-undangan: a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; b) menjalankan amanah UUDNRI 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan; c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas; serta d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional. Meskipun UU RI No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah direvisi lagi dengan UU RI No 13 Tahun 2022.

Bahwa UU RI No 12 Tahun 2011 tentang PPP sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU RI No 12 Tahun 2011 tentang PPP masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah menjadi UU RI No 13 Tahun 2022. Berdasarkan pengamatan peneliti UU ini sudah 4 kali dilakukan revisi akan tetapi belum memasukan nilai-nilai Pancasila di dalam undang-undang ini secara multi signifikansi sehingga peneliti masih belum bisa optimis mengenai produk perundang-undangan di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat memasukan dan menerapakan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikan. Justru hadirnya UU ini sebagai landasan hukum terhadap keberlakuan konsep omnibus law hal ini dapat dilihat bagian ketujuh yang menegaskan bahwa Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus. Dalam Pasal 42A UU RI No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan landasan hukum metode omnibus di Indonesia baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dengan demikian, diharapkan akan tercipta regulasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib, maka diperlukan reformasi regulasi yang merupakan serangkaian tindakan terhadap regulasi yang ada (*existing regulation*) dan regulasi yang akan dibentuk (*future regulation*). Reformasi regulasi yang diinginkan dalam hal ini adalah perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, dapat mendukung terselenggaranya dinamika sosial secara tertib, serta terlaksananya penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif dan efisien (Silalahi, 2020).

4. KESIMPULAN

Masih banyak peraturan UU di Indonesia belum menerapakan nilai-nilai Pancasila secara multi signifikansi sehingga banyak UU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan hampir semua undang-undang setelah berdirinya Mahkamah Konstitusi diuji ke Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa undang-undang di Indonesia masih banyak mengutamakan kepentingan politik pembuat undang-undang itu sendiri sehingga undang-undangnya dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai produk undang-undang yang tidak berkualitas, maka diperlukan reformulasi regulasi terhadap undang-undang yang menjadi pedoman dalam pembuatan UU yaitu UU RI No 13/2022/PPP.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh panitia seminar nasional / call for paper "Aktualisasi Pancasila Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Konstitusional Indonesia" yang dilakukan oleh badan pengkajian MPR RI bekerjasama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya ucapkan terima kasih semoga dapat memberikan berkah dan manfaat bagi pembangunan hukum tata negara di Indonesia pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Arfa'i, A., Nasution, B. J., & Febrian, F. (2020). Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, *3*(2), 377–407. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.377-407

Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.

Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Charda, U. (2018). *Pendidikan Pancasila Untuk Pendidikan Tinggi*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Dahoklory, M. V., & Wardhani, L. T. A. L. (2020). Rekonstruksi Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang. *Sasi*, *26*(3), 297. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.271

Dewi, D. A., & Indonesia, U. P. (2021). Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Kewarganegaraan, Jurnal*, *5*(1), 222–231.

Jimly Assshiddiqie. (2020). *Pancasila Indentitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.

Krisnayuda, B. (2016). *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Kunantiyorini, A. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System. *Jurnal Konstitusi*, *15*(1), 27–49.

Latif, Y. (2017). *Revolusi Pancasila Kembali Ke Rel Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Mizan.

Latif, Y. (2019). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif*. Jakarta: Mizan.

Novita Eleanora, F. (2019). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *3*(1), 141. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838

Octavian, W. A. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa. *Bhinneka Tunggal Ika*, *5*(2), 123–128.

Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, *2*(2), 82–89.

Setyawan, F. (n.d.). Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. *Legislasi Indonesia*, *Vol 18 No*, 249–258.

Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, *8*(1), 56–66. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66

Ubaedillah, A. (2015). *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Wahanu Prabandani, H. (2022). Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia). *Iblam Law Review*, *2*(1), 158–180. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63

Wartoyo. (2020). *Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian dan Isu Komtemporer*. Surakarta: Unisri Press.

MODEL PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN POLARISASI POLITIK PEMILU 2024 DI INDONESIA

Zico Junius Fernando[1], Wiwit Pratiwi[2], Putra Perdana Ahmad Saifulloh[3]

[1]Mahasiswa Doktoral Hukum Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

[2]Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

[3]Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

e-mail: [1]zjfernando@unib.ac.id, [2]wpratiwi170993@gmail.com, [3]putrappas@unib.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 diramalkan masih akan kental dengan polarisasi politik yang tidak kunjung usai sejak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu antara masyarakat pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melawan Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Tren polarisasi itu berlanjut pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yakni kelompok yang pro-Joko Widodo dan pro-Basuki Cahaya Purnama dengan kelompok yang anti-Joko Widodo dan anti-Basuki Cahaya Purnama serta berlanjut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang pada saat itu polarisasi politik memuncak dan membelah masyarakat namun mereda sejak kontestan yang berlaga masuk dalam satu Pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju, tapi memang masih menyisakan polarisasi politik yang dikhawatirkan dapat meledak kembali pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Teknik dalam pengumpulan bahan yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini bahwa polarisasi politik menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 berpeluang besar terjadi dan efeknya sangat tidak baik bagi iklim demokrasi di Indonesia. Menggunakan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila adalah salah satu solusi yang bisa digunakan sebagai penyelesaian masalah polarisasi politik di Indonesia.

Kata Kunci: Polarisasi; Politik; Demokrasi; Pancasila; Indonesia

ABSTRACT

It is predicted that the 2024 General Election (PEMILU) will still be thick with political polarization that has not ended since the 2014 Presidential and Vice Presidential Election between the supporters of Joko Widodo (Jokowi) promoted by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) against Prabowo Subianto who was promoted by Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). This polarizing trend continued in the 2017 Jakarta gubernatorial election, namely the pro-Joko Widodo and pro-Basuki Cahaya Purnama groups with the anti-Joko Widodo and anti-Basuki Cahaya Purnama groups and continued in the 2019 Presidential and Vice-Presidential Elections, which were held in 2019. At that time, political polarization peaked and divided society. However, it subsided since the contestants who competed were included in one Government in Indonesia Maju Cabinet. However, political polarization was still feared to erupt again in the 2024 General Election (PEMILU). The research method used was the normative legal method, namely in the form of library research carried out by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting materials used in this research is a literature study. The collected materials were analyzed qualitatively, and the authors used content analysis to classify legal materials. The result of this study is that political polarization ahead of the 2024 General Election (PEMILU) has a high chance of happening, and the effect is not very good for the democratic climate in Indonesia. Using and instilling the values of Pancasila is one solution that can be used as a solution to the problem of political polarization in Indonesia.

Keywords: Polarization; Political; Democracy; Pancasila; Indonesia

1. PENDAHULUAN

Polarisasi sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks dan dinamis bersifat historis dalam sistem politik saat ini. Itu berlaku tidak hanya untuk keluarga sistem politik demokratis, meskipun perdebatan terbaru tentang masalah ini berfokus pada demokrasi. Terutama di Indonesia meningkatnya polarisasi politik dalam beberapa tahun terakhir maju ke objek yang (tidak hanya) dibahas secara intensif dalam ilmu politik. Alam Demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan yang tidak ringan. Melihat sejarah yang ada di Indonesia polarisasi politik sudah lama terjadi sejak dulu antara Partai berbasis Islam, Partai berbasis Nasionalis, dan Partai berbasis Komunis. Setelah lama redam, namun Kembali membuncah ketika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang menanam embrio polarisasi politik akibat kontestasi politik yang antagonistik. Polarisasi politik, seperti halnya konflik dalam masyarakat, adalah sesuatu yang melekat dalam proses demokrasi.(Nurhasim, 2021)

Dengan pencalonan presiden yang kontroversial dan Kemenangan pemilihan Joko Widodo telah membentuk perdebatan dan efek polarisasi politik ini mendapat dorongan tambahan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, preferensi politik setiap pemilih ditangkap di sepanjang ruang satu dimensi, dan setiap pemilih memilih kandidat yang paling dekat dengan mereka dalam ruang ideologis satu dimensi tertentu.(Jones et al., 2022) Lebih jauh, banyak ahli telah menemukan bahwa polarisasi politik misalnya merujuk kepada kandidat politik dan elit lainnya mengarah pada polarisasi pemilih, baik dalam hal pandangan ideologis mereka dan persepsi afektif mereka terhadap partai lain dan elit politik yang berlawanan.

Dikotomi yang berkembang dalam proses polarisasi yang dinamis dapat merujuk pada hal-hal yang berbeda. Di tingkat masyarakat, ini termasuk di antara banyak lainnya, tingkat etnis polarisasi, polarisasi dengan etnis untuk menerjemahkan heterogenitas dan fraksionalisasi. (Septiani, 2019)

Namun, rentetan peristiwa jelang Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 menunjukkan makin meningkatnya peran kebencian misalnya terhadap agama dan etnik dalam opini publik, maraknya klaim politik identitas dan misinformasi. Pertanyaannya, apakah polarisasi ini akan tetap mewarnai politik di Indonesia di tahun 2024?.(Buhanuddin Muhtadi, 2021) Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 kita harus sepakat untuk menghentikan polarisasi politik yang muncul seiring kontestasi yang terjadi serta menimbulkan gesekan dan efek negatif serta bahkan menimbulkan kejahatan yang memakan korban. Idealnya ini dijadikan sebuah kesadaran yang digagas Partai Politik (PARPOL), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu Umum (BAWASLU) dan Pemerintah. Di sini juga diharapak peran masyarakat sebagai pendorong proses kesadaran, bukan terus menerus menjadi korban dari polarisasi politik.(Noviardi Ferzi, Helmi, 2022) Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 memang terancam menjadi politik pasca-kebenaran hoaks, disinformation, berita bohong, dan misinformasi, politik identitas, pemanfaatan isu, sara, politik permusuhan, unjaran kebencian (*hate speech*), kampanye hitam (*black campaign*), politik uang, dan politik intimidasi.(Noviardi Ferzi, Helmi, 2022) Yang semua itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena efek yang ditimbulkan oleh polarisasi politik yang demikian dapat memecah belah Negara yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Dengan semua latar belakang diatas tulisan ini merumuskan masalah bagaimana ancaman polarisasi politik menjelang Pemilu 2024 dan efeknya dalam iklim demokrasi di Indonesia dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai model pencegahan dan penyelesaian masalah polarisasi politik di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencari kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan, dimana penelitian itu lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah.(Fernando, Utami, et al., 2021) Tulisan "Pancasila Sebagai Ideologi Pencegahan

Polarisasi Politik Dalam Pemilu 2024 Di Indonesia" dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier.(Fernando, Pratiwi, et al., 2021) Di dalam tulisan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan sebuah kajian dan sebuah analisis yang menggunakan pendekatan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analitycal approach*), pendekatan sejarah (*hystorical approach*).(Fernando, 2020a) Sifat dari tulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif–preskriptif. Keseluruhan bahan yang sudah terkumpul, penulis mengolah dan membuat analisis terhadap bahan yang sudah terkumpul tersebut.Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.40. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak pada bahan yang bersifat umum yang diperoleh kemudian untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan pendekatan induktif yaitu menggunakan pola pikir yang berangkat dari kenyataan yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan kepada asas hukum yang telah terkumpul, penulis melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Pengelolaan bahan dan analisis bahan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan melakukan pengelolaan bahan terlebih dahulu penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*).(Pujiyono, Nur Rochaeti, 2022)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ancaman Polarisasi Politik Menjelang Pemilu 2024 dan Efeknya dalam Iklim Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemilik kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.(Pujirahayu, 2021) Sebagai salah satu Negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia selalu berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Sila keempat Pancasila yang berbunyi *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"* adalah wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjalankan sistem demokrasi. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yaitu *"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Kedua dasar inilah yang kemudian menunjukan bahwa Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi demokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat kita lihat dengan diberikannya kebebasan kepada setiap warga Negara untuk menyatakan pendapat dan mengawasi jalannya Pemerintahan.(Pujirahayu, 2020)

Salah satu ciri demokrasi adalah dengan diselenggarakanya pemilihan umum (PEMILU). Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.(Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2014) T. May Rudy menyebutkan, Pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting didalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah sebagai pengaplikasian dari sistem demokrasi dan melalui pemilihan umum tersebut rakyat dapat memilih wakil rakyat duduk didalam parlemen ataupun pemerintahan, peserta pemilu adalah partai-partai politik, yaitu partai politik yang menyalurkan berbagai aspirasi rakyat melalui pemilihan umum.(Rudy. T. May, 2003)

Demokrasi didasarkan pada semua orang yang memiliki hak yang sama dan Negara diperintah oleh rakyat. Karena itu, pemilu menjadi penting. Selama pemilihan, orang memiliki kesempatan untuk memilih siapa yang ingin mereka wakili. Para pemimpin yang dipilih kemudian memiliki kesempatan untuk memilih dan menetapkan aturan yang

mewakili apa yang akan dipilih oleh rakyat. Tanpa pemilihan umum, demokrasi tidak didasarkan pada keinginan dan kebutuhan rakyat. Itu berubah menjadi jenis pemerintahan lain di mana keputusan dibuat oleh satu orang atau sekelompok orang berdasarkan faktor motivasi mereka sendiri.(Afan Gaffar, 2000) Menurut Robert A. Dahl, demokrasi memiliki 7 ciri:

a. Pejabat yang dipilih;
b. Pemilihan yang bebas dan fair;
c. Hak pilih yang mencakup semua;
d. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan;
e. Kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tertulis;
f. Informasi alternatif;
g. Kebebasan membentuk asosiasi.(Suseno, 1997)

Proses menuju demokrasi tidak akan mulus tetapi akan ada pasang surut. Pendidikan itu perlu tapi tidak cukup. Mayarakat sekarang tahu dari ide kejahatan kerah putih bahwa orang yang berpendidikan bisa menjadi penjahat dan dapat merusak proses politik menuju demokrasi misalnya lewat polarisasi politik. Jadi, masyarakat juga butuh etos. Masyarakat membutuhkan kebajikan. Tidak semua orang mampu mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi semua orang dapat diatur sendiri oleh norma-norma moralitas, etos dan kebajikan yang diterima secara sosial.(Papanikos, 2022)

Lebih dari satu dekade yang lalu, Benjamin Reilly (2007) menulis bahwa model demokrasi elektoral sedang muncul yang terdiri dari sistem pemilihan-lisan mayoritas anggota campuran dan sistem kepartaian. Hal ini dikatakan dimotivasi oleh tujuan untuk meningkatkan stabilitas pemerintah, mengurangi fragmentasi partai dan meminimalkan potensi pendatang baru. Reilly mendasarkan kesimpulannya pada analisis reformasi demokrasi di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Indonesia dan Thailand. Secara khusus, Filipina dan Indonesia telah bergerak ke arah yang berlawanan dengan kasus-kasus lain, dengan memperkenalkan proporsionalitas ke dalam sistem pemilihan mereka dan mengalami peningkatan fragmentasi partai.(Breen, 2021)

Sekmentasi pemilih dalam pemilihan umum (PEMILU) dapat terlihat dari:

a. Geografi: Sekumpulan masyarakat bisa di kelompokan atau disegmentasikan sesuai dengan kondisi geografis mereka;
b. Demografi: Konsumen politik dapat dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan kelas sosial;
c. Psikografi: Psikografi memberikan tambahan metode segmentasi berdasarkan geografi dalam metode ini, segmentasi dilakukan berdasarkan kebiasaan, lifestyle, dan perilaku yang mungkin terkait dalam isu-isu politik;
d. Prilaku: Masyarakat dapat dikelompokkan dan dibedakan berdasarkan proses pengambilan keputusan, intensitas ketertarikan dan keterlibatan dengan isu politik, loyalitas, dan perhatian terhadap permasalahan politik;
e. Sosial-budaya: Pengelompokkan masyarakat dapat dilakukan melalui karakteristik social dan budaya. Klasifikasi seperti budaya, suku, etnik, dan ritual spesifik seringkali membedakan intensitas, kepentingan dan perilaku terhadap isu-isu politik;
f. Sebab-Akibat: Dilakukan sesuai dengan isu-isu yang ada, pengelompokan dibentuk dengan kondisi masyarakat dengan pemahaman mereka tentang isu yang sedang ada. (Firmanzah, 2012)

Jeane Kirkpatrick, cendekiawan dan mantan duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa pemilihan demokratis tidak hanya

simbolis, mereka adalah pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif di mana para pembuat keputusan utama dalam pemerintahan berada dipilih oleh warga Negara yang menikmati kebebasan yang luas untuk mengkritik pemerintah, untuk mempublikasikan kritik mereka dan untuk menyajikan alternatif. Apa yang dimaksud dengan kriteria Jeane Kirkpatrick? Bahwa pemilihan umum yang demokratis itu kompetitif. Partai dan kandidat harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul, dan bergerak yang diperlukan untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah secara terbuka dan untuk membawa kebijakan dan kandidat alternatif kepada para pemilih.



Gambar 1: Sekmentasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Tapi permasalahan yang terjadi di Indonesia adanya polarisasi politik yang membelah masyarakat, padahal masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat. (Satjipto Rahardjo, 2021) Slater dan Arugay sebagaimana dikutip oleh Abdul Gaffar Karim, menekankan bahwa politik polarisasi dapat terjadi karena persepsi atas pengelolaan kekuasaan. Menurut Slater dan Arugay:

*"Today's democracies often polarize over the perceived abuse of power by popularly elected chief executives."*Demokrasi saat ini sering terpolarisasi atas penyalahgunaan kekuasaan yang dirasakan oleh pimpinan eksekutif yang dipilih secara popular".

Lebih jauh Slater dan Arugay menyatakan:

"When chief executives simply play by the rules, they make polarization less likely. And when they do abuse their powers, their opponents can also keep polarization from turning pernicious by playing by the rules in the process of removing him." "Ketika pimpinan eksekutif hanya bermain sesuai aturan, mereka membuat polarisasi lebih kecil kemungkinannya. Dan ketika mereka menyalahgunakan kekuatan mereka, lawan mereka juga dapat menjaga polarisasi agar tidak berubah menjadi merusak dengan bermain sesuai aturan dalam proses menyingkirkannya".(Purba & Widodo, 2020)

Polarisasi politik di tengah masyarakat Indonesia membuat masyarakat terbelah ke dalam dua kutub yang berseberangan atas sebuah isu, kebijakan, atau ideologi, telah membentuk wajah politik Indonesia belakangan ini. Kecenderungan itu merupakan efek dari kampanye ketat dan brutal selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu antara Joko Widodo (Jokowi) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDI-P) melawan Prabowo Subianto, mantan Jenderal pada rezim Presiden Soeharto yang mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Tren polarisasi itu berlanjut pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yakni kelompok yang pro-Joko Widodo dan pro-Ahok (Basuki Cahaya Purnama) dengan kelompok yang anti-Joko Widodo dan anti-Ahok (Basuki Cahaya Purnama). Peta yang semula cenderung membaik di tahun 2014 kembali menemukan momentumnya di tahun 2017 dan tidak berhenti sampai disitu polarisasi politik berlanjut dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, walaupun pertarungan politik antara Joko Widodo (Jokowi) Vs Prabowo Subianto berakhir dengan kemenangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto beserta Sandiaga Salahuddin Uno telah masuk kedalam kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun polarisasi masih belum dapat diredam dan dipadamkan. Ketika kandidat terpolarisasi, ada pemilih yang menganggap kebijakan terbaik terletak di antara platform kandidat. Dengan bergerak terhadap lawannya, seorang kandidat dapat memenangkan pemilih umum dan meningkatkan perolehan suaranya. (McMurray, 2022)

Mungkin tidak bisa menjadi contoh yang bisa mengeneral tapi kejadian baru-baru ini terkait dengan pemukulan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Ade Armando yang dianggap sebagian masyarakat mengembangkan narasi-narasi kebencian, ditandai sebagai orang yang pro terhadap kelompok politik tertentu, pendukung pemerintah dan lain sebagainya, terlepas dari kontroversinya seorang Ade Armando, tapi kejadian tersebut kemungkinan terjadi karena masih kuatnya polarisasi politik di masyarakat yang bahkan membuat gesekan antar kelompok yang berbeda arah pandangan politik. Contoh lainnya masih hidupnya istilah cebong dan kampret yang masih muncul di platform-platform tertentu ketika ada perdebatan yang kaitanya dengan kebijakan pemerintah. Sangat disayangkan ketika saat ini segala hal interaksi sosial politik selalu digiring dalam situasi pertentangan antarkelompok yang diistilahkan cebong bagi pendukung Joko Widodo dan pemerintahannya. Lalu istilah kampret atau kadrun bagi pihak yang mengkritisi pemerintah.(Media Indonesia, 2022) Melihat fenomena-fenomena yang terjadi diatas bukan hal yang mustahil bahwa polarisasi akan menguat dan juga berdampak buruk pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Ada kekhawatiran besar bahwa menguatnya polarisasi politik akan merusak kepercayaan (*trust*) di masyarakat, padahal sikap saling percaya merupakan elemen dasar dari modal sosial bagi demokrasi.(Testriono, 2018)

Demokrasi berkembang dengan keterbukaan dan akuntabilitas. Untuk memberikan suara yang bebas dan meminimalkan peluang intimidasi, pemilih dalam demokrasi harus diizinkan untuk memberikan suara mereka secara rahasia. Pada saat yang sama, perlindungan kotak suara dan penghitungan jumlah suara harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat yakin bahwa hasilnya akurat. Polarisasi politik tidak akan terjadi apabila tidak harus menyukai, tetapi masyarakat harus saling bertoleransi dan mengakui bahwa masing-masing memiliki peran yang sah dan penting untuk dimainkan. Ketika pemilihan umum selesai, yang kalah menerima penilaian pemilih. Jika pihak *incumbent* kalah, maka akan menyerahkan kekuasaan secara damai. Tidak peduli siapa yang menang, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah bangsa dan Negara. Sebaliknya, oposisi, entah itu terdiri dari satu partai atau banyak, dapat terus berpartisipasi dalam kehidupan publik dengan pengetahuan bahwa perannya sangat penting dalam demokrasi apa pun yang layak disebut. Mereka setia bukan pada kebijakan khusus pemerintah, tetapi pada legitimasi fundamental Negara dan pada proses demokrasi itu sendiri. Saat pemilihan berikutnya datang, partai-partai oposisi akan kembali memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Polarisasi politik dapat merujuk pada divergensi sikap politik ke ekstrem ideologis. Hampir semua pembahasan polarisasi dalam ilmu politik

mempertimbangkan polarisasi dalam konteks partai politik dan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam kebanyakan sistem dua partai, polarisasi politik mewujudkan ketegangan ideologi politik dan identitas partisannya.(ECPS, 2021) Bukan hanya hubungan keluarga dan persahabatan yang terkikis oleh meningkatnya polarisasi di Indonesia. Karena sebagian masyarakat begitu berhasil mempolarisasi Negara dan meyakinkan pendukung mereka bahwa "pihak" lain itu jahat, mereka tidak dapat bersatu untuk memberikan kepemimpinan kritis dan akal sehat di tengah pandemi.(Patricia Hughes, 2021)

3.2. Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Model Pencegahan Dan Penyelesaian Masalah Polarisasi Politik di Indonesia

Polarisasi politik, menurut sebuah artikel oleh Emilia Palonen, adalah alat politik diartikulasikan untuk membatasi batas antara "kita" dan "mereka" dan untuk mengintai komunitas yang dianggap sebagai tatanan moral. Palonen menulis bahwa "polarisasi adalah situasi di mana dua kelompok saling menciptakan melalui demarkasi perbatasan di antara mereka. Perbatasan politik yang dominan menciptakan titik identifikasi dan konfrontasi dalam sistem politik, di mana konsensus hanya ditemukan di dalam kubu politik itu sendiri". (ECPS, 2021)

Inti dari polarisasi politik adalah sejauh mana masyarakat memiliki sikap yang kuat dan bermoral tentang isu-isu politik dan sosial. Secara umum, sikap yang kuat cenderung relatif tahan terhadap pengaruh sosial, stabil dari waktu ke waktu, dan berpengaruh pada kognisi dan perilaku. Dengan demikian, keyakinan politik yang didukung orang dengan keyakinan moral yang kuat relatif sulit diubah, mendorong perilaku dengan cara yang signifikan, dan membentuk dasar intoleransi terhadap pandangan yang bersaing. Definisi kerja polarisasi politik, oleh karena itu, adalah sejauh mana warga Negara menjadi ideologis mengakar dalam nilai-nilai dan keyakinan politik mereka sendiri, sehingga meningkatkan kesenjangan dengan warga Negara yang memegang nilai-nilai dan keyakinan politik yang berbeda. Polarisasi politik dengan demikian memicu persepsi masyarakat sebagai perjuangan antara "kita versus mereka," dan dapat menghasilkan konflik timbal balik tingkat tinggi antara kelompok-kelompok yang bertentangan secara ideologis (misalnya, liberal versus konservatif di Amerika Serikat).(ebrary, 2021)

Polarisasi politik dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Salah satu contohnya adalah melalui ekstremisme politik, yang mengacu pada sejauh mana orang terpolarisasi ke dalam, dan sangat mengidentifikasi dengan, pandangan ideologis sayap kiri atau kanan umum tentang masyarakat.(ebrary, 2021)

Kondisi demokrasi kita saat ini makin dipertanyakan. Alih-alih demokrasi makin menguat, dalam beberapa tahun belakangan kualitas nuansa oligarki dan elitisme tampak justru semakin terlihat.(Firman Noor, 2020) Pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 sangat rawan akan polarisasi politik, namu Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 tetap memiliki aspek ideal dalam proses berdemokrasi, berawal dari aspek politis yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dan penyelenggaraan pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi, kemudian, aspek sosial budaya yakni sebagai ajang pendidikan politik, aspek Hankam yakni terciptanya situasi kondisi yang aman, tentram, dan tertib, serta aspek Hukum yakini pemilu merupakan landasan yuridis bagi jalannya roda pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat secara legitimate.(Noviardi Ferzi, Helmi, 2022)

Untuk meredam dan mencegah polarisasi politik ditengah masyarakat, sebenanya Indonesia punya Pancasila yang dimana apabila nilai-nilainya diterapkan maka apapun termasuk polarisasi politik tidak akan menimbulkan efek negatif dan mengarah keperbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pancasila dikenal sebagai filosofi Negara Indonesia. Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila adalah landasan filosofis yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan tidak mungkin untuk menarik kaitan antara fenomena polarisasi politik dengan keberadaan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila merupakan sebuah sumber kepribadian, moralitas, jati diri dan keselamatan bangsa. Pancasila juga memiliki landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis yang kuat sebagai landasan moralitas dan arah Negara atau suatu bangsa, dengan masing-masing sila memiliki justifikasi sejarah, rasional, dan aktual yang dipahami, dihayati, diyakini, dan dipraktikkan dikehidupan berbangsa dan bernegara.(Fernando, 2020b)

Pancasila dijabarkan sebagai monodualisme dalam penegakan hukum, yaitu untuk menerapkan *religious justice*, *humanity justice*, dan *social justice* sebagai satu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan satu kesatuan nilai tersebut menjadi dasar atau landasan untuk meredam polarisasi politik di Indonesia.

Berikut ini merupakan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat mencegah dan meredam polarisasi politik yang dapat terjadi dalam pemilihan umum 2024:



Gambar 2: Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Terjadinya Polarisasi Politik

a. Nilai Ketuhanan

Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengakui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki prinsip mengatur rakyatnya melalui aturan, dan bahwa individu harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dimulai dari setiap individu. Nilai Ketuhanan mengandung pengertian bahwa segala aktivitas manusia, harus selalu berlandaskan pada norma agama, ajaran, dan moral serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada. Keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan diikuti dengan ketakwaan kepada-Nya, yaitu melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-Nya. Polarisasi politik yang dalam praktiknya banyak melanggar norma atau aturan yang berlaku di Indonesia adalah suatu hal yang bertentangan dengan Nilai Ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila. Karena dapat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.

b. Nilai Kemanusian

Nilai-nilai kemanusiaan seperti penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia (HAM) harus diinternalisasikan dalam hal terjadinya polarisasi politik di Indonesia. Artinya, setiap tindakan dalam masyarakat, harus secara eksplisit tidak bertentangan dengan masalah kemanusiaan. Pandangan Ketuhanan sebelumnya di atas memiliki konsekuensi terhadap makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat Ketuhanan mendorong kesadaran masyarakat untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab. Bersikap adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Manusia dan badan hukum akan menjadi subjek hukum yang beradab karena sifatnya yang demikian. Sehingga polarisasi politik yang berujung kepada perpecahan sudah pasti bertentangan dengan nilai kemanusian ini.

c. Nilai Persatuan dan Kesatuan Indonesia

Pancasila sebagai ideologi nasional Negara Indonesia, adalah seperangkat nilai-nilai fundamental yang disepakati bersama oleh kelompok-kelompok masyarakat di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang berarti bahwa meskipun ada perbedaan, mereka tetap satu. Dengan semboyan ini, diharapkan perbedaan suku, adat, bahasa, dan agama di Indonesia akan membawa manfaat bukan kerugian. Jika polarisasi politik bangsa Indonesia saat ini menyebabkan perpecahan, apalagi sampai berbuat kriminal (kejahatan) atau melakukan tindak pidana, maka tujuan bersama sebagai warga masyarakat yang menjunjung rasa persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus digalakkan adalah dengan mencegah dan meredam polarisasi politik tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat.

d. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Menurut Pancasila, asas kepemimpinan tidak mengharuskan suatu keputusan yang penting untuk kepentingan rakyat didikte oleh mayoritas atau elit politik, pengusaha, atau orang lain, atau sebaliknya oleh minoritas yang kuat. Apalagi jika didikte oleh kekuatan asing, baik Negara maupun korporasi. Hukum dalam kehidupan bangsa kita saat ini telah digadaikan dengan supremasi uang dalam berbagai manifestasinya, yang menjamur seperti sesuatu yang sangat sulit untuk diatasi, meskipun ajaran Pancasila dalam falsafah hidup bangsa bahwa rakyat adalah institusi tertinggi di Negara ini. Hal ini dapat diartikan bahwa orientasi dan keputusan harus diambil untuk kepentingan terbaik rakyat. Menghindari polarisasi politik yang memecah belah bangsa adalah salah satu cara pemihakan terhadap kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat yang dipandu dengan hikmat kebijaksanaan melalui media musyawarah mufakat. Hal ini dapat diartikan sebagai pemahaman bahwa orientasi etis suatu kebijakan atau pengambilan keputusan harus dibangun dari perspektif jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampak yang akan timbul. Demikian pula kebijakan atau keputusan yang diambil secara kolektif harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama manusia sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh polarisasi politik didalam masyarakat dapat secara baik dicegah dan dihambat perkembanganya.

e. Nilai Keadilan Sosial

Bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai keadilan sosial mengandung makna sebagai landasan dan tujuan, yaitu tercapainya lahir dan batin masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menurut Pancasila, untuk mencapai keadilan sosial diperlukan perwujudan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi rakyat. Dalam hal ini, Negara melindungi orang atau masyarakat

dengan cara apa pun yang dimungkinkan dari pelanggaran dan kejahatan dalam bentuk apa pun, termasuk polarisasi politik yang dapat menimbulkan efek negatif.

Dengan demikian, penanaman nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk mencegah polarisasi politik yang tidak baik di Negara Indonesia sebagai upaya menegakkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, mencegah dan memberantas pelanggaran dan kejahatan, yang tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Nilai-nilai dasar Pancasila ditransformasikan menjadi cita-cita dan prinsip hukum, dirumuskan dalam rangka mencapai keadilan, melindungi bangsa Indonesia, dan tumpah darah seluruh Indonesia. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
b. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah mufakat;
c. Badan peradilan merdeka;
d. Terdapat partai politik (PARPOL) dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat;
e. Sebagai pelaksanan dalam Pemilihan Umum (PEMILU);
f. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945);
g. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban;
h. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggun jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan Negara ataupun orang lain;
i. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional;
j. Pemerintah yang mematuhi hukum.

Selain penanaman nilai-nilai Pancasila, untuk mencegah dan meredam polariasi politik di Indonesia menurut analisis penulis bisa dikendalikan dengan beberapa cara:

a. Ketokohan para tokoh elite politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama

   Peran dari tokoh politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting demi meredanya polarisasi politik yang membelah saat ini, karena terlihat Ketika Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno masuk ke dalam cabinet Joko Widodo, polarisasi politik menjadi turun dan dapat diredam, ini memperlihatkan bahwa ketokohan penting sekali dalam menyelesaikan polarisasi politik.

b. Sosialisasi Pemerintah dan dibantu Masyarakat

   Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan dibantu oleh masyarakat misalnya lewat sosial media dengan mengandeng influencer-influencer dalam mengampanyekan anti terhadap polarisasi politik yang berujung negatif akan memberikan dampak yang signifikan, karena di era revolusi industry 4.0 seperti sekarang ini akses informasi ke masyarakat sangat mudah lewat sosial media.

c. Penguatan terhadap aturan hukum dan penegakan hukum

   Penguatan aturan hukum dan penegakan hukum juga mesti ditingkatkan karena polarisasi politik yang akhirnya menyebakan korban karena disebabkan oleh tindakan-tindakan yang merugikan orang lain harus diminta pertanggungjawabanya secara hukum dan ditegakan secara adil oleh aparat penegak hukum (APH).



Gambar 3: Cara Meredam Polarisasi Politik di Indonesia

Ketiga cara diatas juga memegang peranan penting dalam mencegah dan meredam polarisasi politik yang dapat mengancam perpecahan dan keutuhan bangsa dan Negara. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilakukan individu seperti halnya:

a. Fokus pada masalah

   Putuskan kebijakan apa yang ingin Anda lewati, alih-alih fokus hanya di partai politik mana Anda ingin memenangkan pemilihan.

b. Keluar dari lingkaran media mainstream

   Cobalah untuk mengikuti berbagai sumber berita yang mengkaji isu-isu dari sudut politik yang berbeda. Anda dapat menggunakan platform apapun untuk mencari informasi apapun untuk mengetahui lebih lanjut tentang kecenderungan politik dari outlet berita yang berbeda.

c. Lebih banyak belajar mendengarkan

   Cobalah untuk memahami perspektif orang-orang di sisi lain politik spektrum dan mendengarkan sudut pandang lain sebelum menilai. Diskusi produktif dengan orang-orang yang memiliki perspektif atau pengalaman yang berbeda.

4. KESIMPULAN

1) Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemilik kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun terjadinya polarisasi politik yang tidak kunjung usai sejak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu antara masyarakat pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melawan Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Tren polarisasi itu berlanjut pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yakni kelompok yang pro-Joko Widodo dan pro-Basuki Cahaya Purnama dengan kelompok yang anti-Joko Widodo dan anti-Basuki Cahaya Purnama serta berlanjut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 polarisasi politik di tengah masyarakat Indonesia dimungkinkan bisa terjadi lagi, ini terlihat dari kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kasus Ade Armando misalnya, atau masih adanya istilah "cebong" dan "kampret", dan masalah-masalah yang kaitanya dengan isu SARA dan ideologi;

2) Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusia, Nilai Persatuan dan Kesatuan, Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Nilai Keadilan Sosial) yang merupakan satu kesatuan nilai yang dapat menjadi dasar atau landasan untuk meredam polarisasi politik di Indonesia. Dengan penanaman nilai-nilai yang hidup dan berkembang dimasyarakat ini akan dapat membuat polarisasi politik ditengah masyarakat dapat berkurang dan dapat diredam, sehingga Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 yang sebentar lagi akan digelar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain penanaman nilai-nilai Pancasila, untuk meredam polariasi politik di Indonesia menurut analisis penulis bisa dikendalikan dengan beberapa cara yakni dengan 1.) Ketokohan para tokoh elite politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama; 2.) Sosialisasi Pemerintah dan dibantu Masyarakat; 3.) Penguatan terhadap aturan hukum dan penegakan hukum. Ketiga cara diatas juga memegang peranan penting dalam mencegah dan meredam polarisasi politik yang dapat mengancam perpecahan dan keutuhan bangsa dan Negara. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilakukan individu seperti halnya 1.) Fokus pada masalah; 2.) Keluar dari lingkaran media mainstream; 3.) Lebih banyak belajar mendengarkan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tulisan ini dapat diselesaikan, baik dukungan secara langsung maupun dukungan lewat karya dan pemikiran yang banyak mempengaruhi penulis dalam perpektif paradigma berpikir. Penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga diharapkan semua pihak yang membanca agar dapat memberikan kritik serta saran untuk penyempurnaan tulisan ini selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Nashr Muhammad Al-Iman. (2014). *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Prisma Media.

Afan Gaffar. (2000). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.

Bambang Waluyo. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Breen, M. G. (2021). *Federal and Political Party Reforms in Asia: Is There a New Model of Federal Democracy Emerging in Ethnically Diverse Countries in Asia?* 1–22. https://doi.org/10.1017/gov.2020.26

Buhanuddin Muhtadi. (2021). *Resentment, Polarisasi, dan Pilihan Politik*. Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/430551/resentment-polarisasi-dan-pilihan-politik

ebrary. (2021). *What is political polarization?The Psychology of Political Polarization*. Ebrary.Net. https://ebrary.net/162605/psychology/what_political_polarization

ECPS. (2021). *Political Polarization*. Populismstudies.Org. https://www.populismstudies.org/Vocabulary/political-polarization/

Fernando, Z. J. (2020a). Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia. *Supremasi Hukum*, *29*(2), 80. https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.78-90

Fernando, Z. J. (2020b). Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, *8*(3), 277.

Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Putra, Y. S. (2021). Omnibus Law Sebuah Problematika dan Paradigma Hukum di Indonesia. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, *6*(1), 92–93. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i1.4122

Fernando, Z. J., Utami, R. A., & Putra, D. A. (2021). Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence). *University Of Bengkulu Law Journal*, *6*(1), 84. https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.82-98

Firman Noor. (2020). *Demokrasi dan Pemilu*. Republika.Id. https://www.republika.id/posts/9212/demokrasi-dan-pemilu

Firmanzah. (2012). *Marketing Politik (Antara Pemahaman Dan Realitas)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jones, M. I., Sirianni, A. D., & Fu, F. (2022). Polarization, abstention, and the median voter theorem. *Humanities and Social Sciences Communications*, *9*(1), 2. https://doi.org/10.1057/S41599-022-01056-0

McMurray, J. (2022). Polarization and Pandering in Common-Interest Elections. *Games and Economic Behavior*, *133*, 151. https://doi.org/10.1016/j.geb.2022.01.028

Media Indonesia. (2022). *Prabowo Dinilai Solusi Redam Polarisasi Pemilu 2024*. Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/486615/prabowo-dinilai-solusi-redam-polarisasi-pemilu-2024

Noviardi Ferzi, Helmi, D. K. (2022). *Polarisasi Politik, Beban Demokrasi Indonesia 2024*. Beritajambi.Co. https://beritajambi.co/read/2022/01/23/14404/polarisasi-politik-beban-demokrasi-indonesia-2024/

Nurhasim, M. (2021). *Demokrasi dan Polarisasi Politik*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/26/demokrasi-dan-polarisasi-politik

Papanikos, G. T. (2022). The Bright Future of Democracy is in Education. *Athens Journal of Education*, *9*(2), 357. https://doi.org/10.30958/AJE.9-2-10

Patricia Hughes. (2021). *Political Polarization Erodes Democracy*. Mindfulpolitics.Org. https://mindfulpolitics.org/political-polarization-erodes-democracy/

Pujirahayu, E. W. (2020). *Sosiologi Hukum*. Litera.

Pujirahayu, E. W. (2021). *Kontruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*. Thafa Media.

Pujiyono, Nur Rochaeti, Z. J. F. (2022). Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *19*(1), 85. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.84

Purba, J. L. P., & Widodo, P. (2020). Kajian Etis Penggunaan Isu Agama dalam Politik Polarisasi. *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*, *2*(2), 77. https://doi.org/https://doi.org/10.55884/thron.v2i2.23

Rudy. T. May. (2003). *Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya)*. Refika Aditama.

Satjipto Rahardjo. (2021). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Septiani, D. (2019). Social Media Campaigns in Indonesia: How Social Media has Transformed Indonesia's Democratization Process and Political Activity. *Journal of Digital Media and Policy*, *10*(3), 329. https://doi.org/10.1386/JDMP_00006_1

Suseno, F. M. (1997). *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Gramedia.

Testriono. (2018). *Polarisasi Politik Tak Melulu Buruk Asalkan Dua Syarat Terpenuhi*. Theconversation.Com. https://theconversation.com/polarisasi-politik-tak-melulu-buruk-asalkan-dua-syarat-terpenuhi-92279

 ISSN: 2830-2699

REFORMULASI PERATURAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

Muchammad Iksan[1], Wiranto Tri Setiawan[2], Wulan Fitriana[3]
[1]Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
[2]Mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro
[3]Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Email: mi214@ums.ac.id , Wirantotrisetiawan@gmail.com, wulanfitriana@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Korupsi sebagai suatu kejahatan telah banyak menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Lebih dari itu, tindak pidana korupsi yang telah membudaya di Indonesia telah melahirkan sebuah budaya moral yang jauh dari nilai-nilai ke Indonesian sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila. Di Indonesia pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum menemui kata ideal serta tidak memberikan efek jera meskipun telah mengatur sanksi secara berat. Hal ini salah satunya dikarenakan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku masih bernuansa atau warisan dari kolonial yang tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Diperlukan suatu metode pemidanaan baru yang dapat memberikan efek jera serta dapat menekankan kepada budaya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan reformulasi peraturan Tindak Pidana Korupsi melalui Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konsep pemidanaannya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis melakukan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan.

Kata Kunci: Reformulasi, Korupsi, Pancasila

Abstract

Corruption as a crime has caused huge economic losses for the country. More than that, the corruption that has become entrenched in Indonesia has given birth to a moral culture that is far from Indonesian valuesas contained in Pancasila. In Indonesia, the eradication of Corruption Crimes has not yet met the ideal word and does not provide a deterrent effect even though it has set heavy sanctions. This is partly because the regulations currently in effect are guided by the Criminal Code as a legacy from colonialism which is far from the values of the Indonesian nation. A new method of punishment is needed that can provide a deterrent effect and can emphasize a legal culture that is in accordance with the valuesin society. Therefore, it is necessary to reformulate the regulation of Corruption Crimes through the internalization of Pancasila values in the concept of punishment. Based on these thoughts, the authors conducted this research. The method used is juridical-normative by using a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach.

Keywords: *Reformulation, Corruption, Pancasila.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jika melihat dari sudut pandang sosiologis tindak pidana korupsi dapat dibedakan kedalam tiga model. Pertama, korupsi terjadi dikarenakan adanya sebuah kebutuhan (*corruption by need*), dalam hal ini diartikan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang diakibatkan karna suatu kondisi yang sedang ia alami. Kedua, korupsi terjadi dikarenakan sifat keserakahan (*corruption by greed*), dalam hal ini diartikan bahwa sifat serakah yang menjadi alasan atau faktor seseorang melakukan perbuatan korupsi meskipun

secara ekonomi seseorang tersebut cukup. Ketiga, korupsi karena kesempatan (corruption by chance), artinya korupsi terjadi dikarenakan adanya suatu kesempatan untuk orang tersebut melakukan aksinya atau perbuatannya.[1] Perbuatan korupsi merupakan salah satu perbuatan yang masuk dalam kategori kriminal, sebab perbuatan korupsi yang dilakukan telah memnimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi setiap orang atau individu maupun terhadap negara. Banyak pihak terutama negara yang harus bertanggungjawab kepada masyarakat luas. Di Indonesia Korupsi diatur sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau selanjutnya disebut UU TIPIKOR. Berdasarkan penjelasan yang ada pada Undang-Undang tersebut, korupsi harus diberantas secara serius dan masif karena merugikan keuangan negara. Selain itu, korupsi merupakanpelanggaran terhadap hak-hak sosial danekonomi masyarakat luas.

Korupsi yang telah mengakar menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat tidak hanya dalam bentuk materiil, namun secara formil baik dari segi waktu, tenaga dan pikiran pun dapatdikatakan sebagai suatu tindakan korupsi. Namun yang menjadi fokus perhatian masyarakat pada umumnya yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan dari segi materiil berwujud uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi, meski apabila dilhat dari segi formil korupsi dapat dijadikan suatu embrio untuk melakukan tindakan korupsi yang lebih besar seperti korupsi dengan jumlah nominal trilyunan rupiah yang membawa dampak sangat merugikan negara baik secara sosial dan ekonomi menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu sudah seharusnya diperlukan suatu upaya untuk penegakan hukum yang ajek serta tidak diskriminatif demi kemaslahatan memberantas korupsi agar menimbulkan efek jera dan menciptakan lingkungan yang baik dalam masyarakat.[2]

Hingga saat ini belum ada jawaban secara pasti dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Beberapa ahli menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit 'kanker ganas' yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut, yang dapat menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, serta dapat mematikan sosial politik suatu negara. Tindak pidana korupsi yang sudah mengakar secara kuat pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga tidak mudah dilakukan suatu upaya untuk memberantas karna tidak jarang terjadi pada saat penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri. Diperlukan suatu upaya yang tepat agar akar tindak pidana korupsi tidak hanya dicegah akan tetapi di kemudian hari tidak terjadi lagi.[3] Fakta tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan dapat disebut suatu kejahatan yang tergolong *extra ordinary crime* serta bertolak belakang dengan nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia. berkaitan dengan hal tersebut maka pengendalian korupsi saat sekarang ini masih banyak dipengaruhi oleh kendala norma dan kelembagaan. Problem integritas menjadi salah satu hal yang fundamental. Salah satu hal yang menjadi penyebab masih tingginya korupsi yaitu masih terdapat kurangnya transparansi, serta disebabkan karena lemahnya nilai-nilai sosial yang tertanam dalam diri koruptor.[4]

Maka dalam hal ini berkaitan dengan pengendalian korupsi maka peneliti akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi pengendalian penegakan hukum

1 Brian Lemuel Rachman, "*Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia",* Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April/2018, Hlm. 63

2 Bambang Waluyo,*"Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia",* Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume IV, Nomor 1, 2017, Hlm 627- 628

3 Romli Atmasasmita,*"Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional",* Bandung: Mandar Maju, 2004, Hlm 2

4 Wawan Heru Suyatmiko, *"Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020",* Integritas Jurnal AntiKorupsi, 2021, Hlm 169

dalam upaya menegakkan tindak pidana korupsi, maka peneliti ingin mengkaji dari unsur pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan menggunakan parameter pancasila sebagai basis dalam mereformulasi masalah penegakan hukum dalam konteks unsur pemidanaan, maka peneliti akan berbicara tentang bagaimana caranya menegakkan hukum itu sendiri dimana terdapat tiga unsur yang ingin dicapai diantaranya keadilan, kepastian, dan kemanfatan. Keadilan dalam proses penegakan hukum kental dengan nilai dan pesan yang tercantum dalam sila ke lima Pancasila. Penegakan hukum sebagai sebuah satu kesatuan dalam *criminal justice system* memiliki tugas penting memberikan keadilan sebagaimana pesan Pancasila tersebut selama ini masih dianggap kurang efisien dalam melakukan upaya penegakan tindak pidana korupsi. Sehingga sudah sepatutnya pula penegakan hukum yang selama ini telah berjalan dimana masih dapat dikatakan kurang efektif maka dibutuhkan suatu reformulasi penegakan hukum pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis pancasila.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah mengenai Reformulasi Peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dimana penjelasan ini didasari atas kondisi penegakan hukum khususnya dalam unsur pemidanaan dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia apakah sudah sesuai nilai Pancasila atau telah terjadi suatu pergeseran nilai.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam jenis penelitan yuridis-normatif,[5] penelitian dilakukan secara doktrinal dengan meneliti aturan mengeni Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi serta reformasi system penegakan yang berbasis Pancasila. Selain itu penelitian ini dapat dikatakan pula sebagai penelitian deskriptif analitis yang mengandung arti bahwa hasil dari penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis. Sehingga jenis dari penelitian ini dipilih sebagai cara penyajian dan bukan pokok penelitian itu sendiri.

Dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis berkaitan dengan hukum. Maka berdasarkan hal tersebut jenis data dalam penelitian ini terdiri dari: Data Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas: bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan hukum yang berbentuk buku, artikel atau makalah serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan beberapa bahan lain.[6] Dari data-data yang digunakan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu studi atas berbagai data sekunder atau dokumen, baik terhadap bahan hukum pimer, sekunder, maupun tersier kemudian diklasifikasikan berdasarkan materinya masing-masing.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

Perilaku korupsi merupakan suatu perilaku secara tegas dilarang dalam Islam. Hal ini dapat dilihat sebagaimana hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda "tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 188:

5 Soerjono Soekanto, *"Penelitian Hukum Normatif", J*akarta: PT. Raja Grafindo, 2004, Hlm 14

6 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, Cet. V*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Hlm 29

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Tindakan korupsi dalam Hukum Pidana Islam atau jinayah ditempatkan kedalam kategori jarimah takzir. Takzir dalam hal ini diartikan sebagai suatu sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilanggar, baik berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia, dan atas perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk dari sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist. Sehingga karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.[7]

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sudah sangat merusak tubuh penyelenggara negara, karena bangsa Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan berpotensi besar menghadapi zona negara gagal dimana hal tersebut bukan suatu anasir atau analisis yang dangkal, hal tersebut dapat dilihat dari data laporan Study World Economic Forum dan Universitas Harvard pada tahun 2002 tentang negara gagal, dari data tersebut menunjukkan bahwa dari 59 salah satunya negara Indonesia sudah dapat dikatakan masuk karakteristik negara gagal karena tingginya angka kriminalitas dan kekerasan, korupsi merajalela, serta suasana ketidakpastian hukum yang tinggi.[8] tingkat korupsi yang semakin meningkat tinggi dapat dilihat dari seringnya pemberitaan penangkapan pelaku para koruptor. Dan yang menjadi perhatian adalah yang menjadi pelaku korupsi di Indonesia saat ini telah dari berbagai lini, baik dari sektor eksekutif, legislative, yudikatif hingga sektor swasta. Dari data yang dihimpun dan dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang tinggi. dapat dikatakan bahwa tingginya putusan yang dijatuhkan pun tidak cukup mampu untuk mengurangi banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Angka korupsi yang tinggi pada suatu negara sejatinya dapat menjadi salah satu indicator untuk melihat seberapa efektifnya sistem hukum dari negara tersebut dalam upaya penanganannya, namun dilain sisi dengan tingginya angka korupsi yang terjadi juga dapat dijadikan pertanda jika pengenaan efek jera yang dijatuhkan atau pemidanaan terhadap para pelaku tersebut dianggap kurang. Hingga dapat diartikan bahwa diperlukan adanya suatu terobosan baru yang digunakan untuk menghukum atau mempidana para pelaku koruptor.[9] Suatu model pemidanaan yang dapat efektif menurunkan tingkat korupsi.

Di Indonesia upaya yang digunakan untuk menanggulangi korupsi yakni KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi sejauh ini lebih focus terhadap upaya penegakan hukum nya daripada upaya pencegahan. Namun dalam praktik penegakannya masih cenderung kurang efektif, hal ini tampak pada laporan tahunannya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang akan diurai dibawah ini.[10]Jika dilihat, kinerja kejaksaan dan KPK yang telah menyelesaikan banyak kasus merupakan suatu prestasi. Namun disisi lain, hal ini memperlihatkan bahwa korupsi di Indonesia memang sangat luar biasa dan memerlukan penanganan yang tegas.

7 Arini Indika Arifin,"Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", Lex et Societatis, Vol. III/ No.1/ Jan-Mar/2015, Hlm 72

8 Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi" Lex Crimen Vol.VI/No.1/Jan-Feb/2017 Hlm 64

9 Risqi A Ibrahim, "Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Anlalisis Ekonomi Mikro dalam Hukum Pidana, Skripsi, 2019, Hlm 49.

10 https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasuskorupsi-kerugian-negara-rp-567di akses pada jam 15.00 pada tanggal 11 Oktober 2021.

Di Indonesia regulasi terkait TIPIKOR sebenarnya telah ada sejak dulu sejak zaman penjajahan Belanda. mengenai tindak pidana korupsi sudah diatur pada kitab undang-undang hukum pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Dalam KUHP dapat ditemui sebanyak 13 Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana umum yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana korupsi yaitu:

1) Rumpun tindak pidana penyuapan yang terdiri dari beberapa Pasal yaitu Pasal 209, 210, 418, 419, serta Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2) Rumpun tindak pidana penggelapan yang terdiri berdasarkan Pasal 415, 416, dan Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3) Rumpun tindak pidana kerakusan yang terdiri dari beberapa pasal diantaranya ialah Pasal 423 serta Pasal 425 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4) Rumpun tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan relasi yang terdiri dari Pasal 387, 388, & Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seiring berjalannya waktu, pengaturan regulasi mengenai delik korupsi dalam KUHP dianggap menemui permasalahan dan tidak efektif. Hal ini dikarenakan tidak bisa menjangkau aspek-aspek lain dalam penegakan hukum korupsi yang semakin kompleks. Oleh sebab itu selanjutnya terhadap penegakan atau pemberantasan hukum tindak pidana korupsi dibentuk pula suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai *lex specialis* yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya disebut dengan UU No.20/2001.

Ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 20/2001 secara lengkap disebutkan:

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Serta Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya dapat disingkat menjadi UU.No 20/2001 secara tegas menyatakan:

> *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".*

Dan dipertegas dalam Pasal 4 bahwa:

> *"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negaratidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."*

Serta hingga kini Negara Indonesia belummemiliki undang-undang khusus perampasanaset dan hal perampasan aset hanya diaturdalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) danPasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001.[11]

11 Imelda F.K Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak

Menurut UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan TIPIKOR tersebut terdapat suatu kriteria atau unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi kriteria suatu perbuatan korupsi sebagaimana undang-undang tindak pidana korupsi adalah:

a) Terdapat unsur kerugian negara, meski hingga saat ini unsur kerugian bagi negara pembuktiannya karen deliknya bersifat delik materiel. Di dalam UU No. 31/1999 unsur kerugian negara tetap ada, kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga unsur kerugian negara tidak perlu dibuktikan.
b) Terdapat suatu perbuatan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena didalamnya terdapat penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Berkaitan dengan hal tersebut kriteria menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan telah diperluas karena terdapat istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun yang dilakukan oleh pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang-undang yang baru, kriterianya telah diperluas (Ridwan, 2014).[12]

Unsur-unsur suatu perbuatan tindak pidana korupsi yaitu:

1) Setiap orang
2) Menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur Subjek Hukum dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau dalam hal ini termasuk korporasi.[13] Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" lebih sulit dibuktikan karena untuk membuktikannya harus dapat dibuktikan terkait dengan bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi tersebut dilakukan. Namun secara teoritis, unsur "memperkaya diri" dapat dibuktikan dengan apabila pelaku TIPIKOR berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur "menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi", artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalah gunakan atau penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan unsur "merugikan keuangan negara" aparat penegak hukum bekerjasama dengan instansi terkait yaitu bersama dengan "Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memiliki peran dalam membantu penyidik pada saat proses penyidikan yang menghitung taksiran atau jumlah kerugian Negara.[14]

Adami Chazawi mendefinisikan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan, yaitu dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan "menyalahgunakan kewenangan" dapat mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yakni:

Pidana Korupsi", Jilid 45 No.4 Oktober 2016, Hlm 294

12 Muh. Kadarisman, "Penyalagunaan Kewenangan Administrasi: Determinan Reformasi Administrasi Publik Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 2020, Hlm 13.

13 Mohammad Sahlan, "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Adminitrasi", 2016, Hlm 280.

14 Muh. Kadarisman, "Penyalagunaan Kewenangan Administrasi: Determinan Reformasi Administrasi Publik Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 2020, Hlm 14.

a. seseorang yang menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimilikinya.
b. kedudukan atau jabatan yang didalamnya terdapat suatu kewenangan masih dimiliki.[15]

Unsur *"menyalahgunakan kewenangan"* dalam perbuatan TIPIKOR dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang dimiliki seseorang sebagai pejabat publik (menyalahgunakan kewenangan karena jabatan), dimana isi rumusannya sebagai berikut:

> *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah*).[16]

Dari rumusan-rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa regulasi yang ada saat ini lebih mengarah kepada pembalasan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pengaturan dalam undang-undang tipikor subyek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang dapat dijatuhi sanksi yakni dapat berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara maupun denda. Sedangkan bagi subjek korporasi pidana pokok dapat dikenakan dengan pidana denda, Pasal 2 Undang-Undang Tipikor menentukan pengenaan denda paling sedikit 200 juta dan maksimal denda 1 Milyar serta dalam Pasal 3 Undang Undang Tipikor menentukan pengenaan pidana denda minimal 50 juta dan maksimal 1 Milyar.

Pemberlakuan UU No.20/2001 tentang pemberantasan TIPIKOR pada unsur pemidanaan yang masih dapat dikatakan pemidanaan konvensional sanksi terhadap pelaku koruptor yang sudah diperberat sebagai salah satu upaya penanggulangan korupsi di Indonesia sudah dilakukan sejak lama. Dan ironisnya apabila melihat data dari Kejaksaan Agung dan KPK berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan. Selama tahun 2016 Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengklaim hasil kinerjanya, berhasil mengamankan uang negara sebanyak Rp.20,5 Trilyun dan USS 263,9 ribu, serta berhasil melakukan pemulihan keuangan negara senilai Rp. 49,2 miliar. Sedangkan KPK pada tahun 2016 telah berhasil melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan serta 77 kegiatan penuntutan, baik terhadap kasus korupsi baru maupun kasus korupsi sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya, serta berhasil melakukan eksekusi 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). hasil dari penanganan atas kasus korupsi tersebut lebih dari 497,6 milyar rupiah telah dimasukkan ke kas Negara dalam bentuk PNBP.[17] Dan pada laporan tahunannya Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan di tahun 2020 telah tercatat sebanyak 1298 kasus korupsi yang merugikan negara sebanyak 56,7 Triliun.[18]

2.2. Internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai kebijakan formulasi Tindak Pidana Korupsi

Keberadaan undang-undang TIPIKOR saat ini dianggap masih belum mampu menanggulangi terjadinya korupsi meskipun dalam pengaturannya telah diberi hukuman penjara yang berat. Paham mengenai penerapan pidana penjara secara berat guna

15 Mohammad Sahlan,"Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2016, Hlm 283.

16 Opcit, Hlm 4.

17 Sukmareni, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Pagaruyuang Law Journal Volume 1 No.2 Januari 2018, Hlm 161-162.

18 https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567 di akses pada jam 15.00 pada tanggal 11 Oktober 2021.

memberikan efek jera atau sebagai suatu sanksi yang dapat memberikan ancaman kepada seseorang untuk tidak melakukan perbuatan pidana dalam perkembangannya mengalami berbagai kritik. di kawasan Asia Pasifik beberapa kajian antikorupsi telah melakukan suatu riset dan menyatakan bahwa efektivitas kinerja antikorupsi di suatu negara sejatinya dapat berjalan tidak hanya semata-mata ditentukan oleh kinerja reformasi teknokratik administratif, melainkan ditentukan pula oleh dinamika politik, pola relasi, dan pilihan cara pandang para elitenya dalam menjalankan tradisi politik dan kekuasaan itu sendiri (Quah, 2012).[19] bahwa menurut H L. Packer pidana didasarkan pada 2 (dua)tujuan, yakni [20]:

1) Pidana adalah suatu proses untuk menghalau terjadinya suatu perbuatan jahat atau tindakan yang tidak dikehendaki untuk terjadi atau perbuatan yang salah.
2) Serta untuk memberikan suatu efek jera berupa penderitaan atau pembalasan yang sepadan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan jahat.

Salah seorang guru besar fakultas hukum Universitas Diponegoro, Barda Nawawi Arief mengatakan kritik terhadap pidana penjara dibedakan menjadi 3 kritik yaitu kritik dari sudut strafmodus yang menitikberatkan kepada sistem pembinaan atau treatment dan kelembagaan institusi, kritik dari sudut Strafmaat yang melihat kepada sudut lamanya pidana penjara, serta kritik dari sudut straftshort yang menekankan kepada penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai suatu jenis pidana yang ada kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara selektif.[21]Konsep pemidanaan dalam undang-undang tipikor masih terkesan konvensional tersebut dapat dikatakan tidak mencerminkan nilai-nilai atau semangat dari bangsa Indonesia.

Meskipun muncul setelah reformasi, keberadaan undang-undang tindak pidana korupsi masih belum mencerminkan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila. Hal tersebut dikarenakan dalam pembentukannya undang-undang tindak pidana korupsi tetap berpegangan atau mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan induk. Seperti yang diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini masih diberlakukan adalah peraturan yang muncul pada saat penjajahan atau kolonial. Sehingga tidak seutuhnya pengaturan yang diatur didalamnya mengandung nilai-nilai atau semangat bangsa Indonesia. Beberapa kelemahan tersebut maka diperlukan suatu pembaruan hukum pidana.[22] Oleh karena itu sudah saatnya Indonesia perlu melakukan suatu reformulasi hukum pidana salah satunya berkaitan dengan melakukan reformulasi pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang lebih berbasis kepada semangat atau internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Reformulasi hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi diperlukan sebagai suatu upaya menjaga budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan nilai moral religius sebagaimana yang terdapat dalam sila ke-1 (satu) Pancasila. Perilaku *corrupt* yang saat ini menjamur sangatlah tidak sesuai dengan nilai moral religius sebagaimana dalam sila kesatu Pancasila. Perilaku korupsi cenderung justru mengarah kepada nilai keserakahan. Perbuatan korupsi yang berasal dari keserakahan tersebut telah jelas dan nyata menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian Negara yang secara otomatis merugikan masyarakat. Keuangan atau anggaran negara yang semestinya

19 Wawan Heru Suyatmiko,"Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020", Integritas Jurnal AntiKorupsi, 2021, Hlm 173.

20 Badar Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, Hlm 4.

21 Barda Nawawi Arief, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm.34

22 Budi Suhariyanto, "Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara (Restorative Justice in Sentencing Corporate Business Optimization of Corruptionby Country Returns Losses), RechtsVinding Volume 5 No 3, 2016, Hlm 427.

dapat digunakan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat atau guna memberikan kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga perilaku korupsi yang saat ini semakin sulit dibendung ini juga telah menciderai nilai kemanusian yang terdapat dalam sila kedua Pancasila serta nilai kemasyarakatan sebagaimana yang terkandung dalam sila ke-3 hingga sila ke-5 Pancasila. Sehingga reformulasi pengaturan mengenai TIPIKOR justru diperlukan tidak hanya bertolak pada pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan pidana penjara yang berat sebagaimana yang terkandung pada peraturan-peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku, melainkan diperlukan perhatian pula sebuah sanksi yang dapat menjaga nilai-nilai yang telah di kristalisasi dalam masyarakat Indonesia.

Barda Nawawi Arief salah seorang guru besar pakar hukum pidana mengatakan upaya reformasi hukum pidana mulai dilakukan untuk meninjau dan menilai kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum Indonesia.[23] Terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan guna pembaharuan hukum pidana khususnya dengan mereformulasi pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kedalam konsep pemidanaannya. Opsi yang dapat dilakukan yaitu dengan memadukan antara jenis sanksi berupa pidana kerja sosial serta pengembalian kerugian negara. Formulasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pemidanaan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok selain pidana penjara. Sanksi pidana kerja sosial di Indonesia sendiri baru sebagai sebuah gagasan yang dimunculkan dalam perumusan RKUHP. Pidana kerja sosial dalam RKUHP dimasukan ke dalam jenis Pidana Pokok sebagaimana yang tertera dalam Pasal 65 RKUHP.[24]

Lebih lanjut dalam pasal 85 RKUHP dijelaskan bahwa Pidana Kerja Sosial dapat diberikan kepada pelaku TIPIKOR dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim dapat memberikan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Kemudian untuk pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam waktu tertentu saja yaitu paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. RKUHP pula mengatur mengenai akibat bagi terpidana jika tidak menjalankan pidana kerja sosial yang telah dijatuhkan terhadapnya. Bagi terpidana yang dijatuhi pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah tidak menjalankannya maka akan dikenakan hukuman berupa:

1) Harus mengulangi baik secara keseluruhan atau sebagian pidana kerja sosial yang diberikan;
2) Wajib Menjalankan secara menyeluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan hukuman pidana kerja sosial tersebut
3) Serta membayar secara keseluruhan atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial yaitu dalam bentuk terpidana menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat diganti atau dibayarkan.

Dalam hal mereformulasi pengaturan TIPIKOR pemberian pidana kerja sosial dapat dijadikan pidana pokok layaknya dalam RKUHP. Dalam implementasinya kemudian

23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai "Kebijakan Hukum Pidana",Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm. 30

24 Pidana Pokok dalam Pasal 65 RKUHP meliputi:
a. Pidana penjara;
b. Pidana tutupan;
c. Pidana pengawasan;
d. Pidana denda; dan
e. Pidana kerja sosia

pengenaan pidana kerja sosial dapat dilakukan setelah pidana penjara dilakukan oleh terpidana. Namun pengenaan pidana penjara tidak menerapkan sistem hukuman yang berat. Sehingga pidana penjara tetap dilakukan oleh terpidana sebagai bentuk untuk melakukan pembinaan sebelum bersentuhan dengan masyarakat. Setelah dilakukan pembinaan barulah kemudian terpidana menjalankan pidana kerja sosial yang langsung bersentuhan dan terjun langsung dengan masyarakat.

Penerapan pidana kerja sosial yang dapat diterapkan seperti melakukan pelayanan terhadap masyarakat, membersihkan jalanan atau pekerjaan sosial lain yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana kerja sosial seperti ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa Tindakan yang dilakukannya berupa korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu system sosial dan ketertiban umum. Oleh sebab itu bagi seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi atau TIPIKOR harus bertanggungjawab dengan cara terjun langsung ke masyarakat yang terdampak dari perbuatannya. Selain itu pengenaan sanksi pidana kerja sosial ini dapat menimbulkan efek jera dari aspek psikologi terpidana dikarenakan dalam prosesnya terpidana diawasi langsung oleh masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Belanda dalam Pasal 22c (Wetboek vanStrafrecht):Terbagi kedalam 3 jenis,tergantung dari PerintahPengadilan:Pidana Kerja Sosialmaksimum 240 jam, Pidana Kerja Sosialmaksimum 480 jam, malaysia dalam undang-undangnya yakni "Criminal Procedure Act593" disebutkan maksimal 240 jam kerja dan diterapkan dengan syarat, portugal dalam KUHP Portugal 1983 diterapkan sesuai dengan dari pidanadenda yang dijatuhkan.[25]

Ide penerapan Pidana kerja sosial merupakan sebuah internalisasi nilai ketuhanan dimana di dalamnya terkandung sebuah moral dan kemanusiaan sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua Pancasila karena konsep pemidanaan dalam bentuk pidana kerja sosial telah sejalan dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik karena selain bagian dari konsep pemidanaan didalamnya juga mengandung sanksi sosial. Dimana sebagai naluri manusia pasti akan merasakan gejolak moril, yang membuat narapidana merasa malu serta diharapkan dapat menjadikan hal tersebut efek jera. Pidana kerja sosial diharapkan dapat mendorong narapidana agar lebih berfikir berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan sehingga dengan hal tersebut maka diharapkan akan mampu mengendalikan kecenderungan hal-hal yang negatif. atas hal tersebut maka dapat dikaitkan dengan teori vonFeuerbach, yaitu suatu teori pencegahan secara umum yang dikenal dengan istilah psychologischezwangatau paksaan psikologis, yang artinya penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dapat memberikan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.

Atau opsi selanjutnya yang dapat dilakukan ialah dengan menerapkan sistem pengembalian kerugian negara sebagai kumulatif pemidanaan. Pelaku diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk memulihkan Kembali kerugian negara secara finansial yang ditimbulkan dari korupsi. Pengembalian kerugian negara pula dapat menjadi upya untuk memulihkan Kembali ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 31/1999 *juncto* UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan TIPIKOR dijelaskan sebagai berikut: "Pelaku TIPIKOR yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan pasal 3 tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian terhadap kerugian keuangan negara, tidak akan menghapuskan pidana terhadap pelaku. Sedangkan realitasnya unsur pemidanaan yang menitikberatkan pada penegakan pidananya belum mampu memberikan dampak yang efektif mengingat data yang telah diungkapkan pada Indonesia Corruption Watch

25 Jamin Ginting, "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia", Law Review Volume XIX, No.3-Maret 2020, Hlm 264.

masih cukup tinggi, unsur pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 4 tersebut diperlukan 'reformulasi dengan adanya pasal baru yaitu pengembalian negara dengan limitasi tertentu terkait dengan pengembalian, karena, hingga kini Negara Indonesia belummemiliki undang-undang khusus perampasanaset dan hal perampasan aset hanya diaturdalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) danPasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 dan pemidanaan tersebut.[26]

Meskipun demikian kerugian negara telah dilakukan oleh pelaku, sebaiknya tidak menghilangkan sanksi pidana kerja sosial. Sehingga meskipun telah melakukan pengembalian kerugian negara pelaku akan tetap menjalankan pidana berupa pidana kerja sosial, dan diperlukan suatu konsep pemidanaan secara kumulatif dengan limitatif tertentu terhadap pidana kerja sosial bukan konsep pemidanaan secara alternatif agar penekanan efek jera pada pelaku koruptor yang selama ini dirasa belum efektif mampu memberikan penjeraan pada pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa konsep pidana kerja sosial tidak melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab karena penerapan kerja sosial dalam hal ini terdapat limitasi tertentu sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan koruptor.

Pengaturan mengenai pidana kerja sosial serta pengembalian kerugian negara merupakan salah satu kumulatif dari konsep pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dari pemidanaan yang tidak diperoleh dari penjatuhan sanksi pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Maka dapat dikatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan tersebut perlu digantikan dengan sistem nonpunitive measure.[27]Penerapan pidana kerja sosial serta pengembalian kerugian negara merupakan suatu bentuk implementasi semangat dalam melakukan pembaharuan hukum pidana berdasarkan Pancasila dimana jika ditelaah dari setiap silanya mengandung suatu konsep berupa keseimbangan. Hal ini dikarenakan konsep pidana kerja sosial dan pengembalian kerugian negara berfokus kepada korban maupun pelaku. Adapun ide keseimbangan tersebut salah seorang Pakar Pidana yaitu Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan [28]:

1) Berupa keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu;
2) keseimbangan dapat berupa antara perlindungan terhadap kepentingan pelaku dengan kepentingan korban;
3) keseimbangan berupa antara factor objektif dan subjektif; ide *daad-dader strafrecht;*
4) keseimbangan antara kriteria formal dengan materil;
5) Keseimbangan yang dapat menjangkau antara kepastian hukum, fleksibilitas, dan keadilan; serta
6) Serta keseimbangan yang berkaitan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global.

Penerapan sistem pidana kerja sosial serta pengembalian kerugian negara yang kemudian diformulasikan ke dalam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang baru selaras pula dengan tujuan pemidanaan yang digagas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 54 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Draft 13 yang diformulasikan dalam konsep tujuan pemidanaan, bertujuan:

26 Imelda F.K Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Jilid 45 No.4 Oktober 2016, Hlm 294.

27 Nadia Utami Larasati, "Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender', Deviance: Jurnal Kriminologi, 2.1,2018, Hlm.59

28 Ira Alia Maerani, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, Hlm. 334

1) Untuk suatu upaya pencegahan TIPIKOR dengan menegakkan suatu rule atau norma hukum untuk pengayoman masyarakat
2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan yang diharapkan agar menjadi insan yang lebih baik, dan benar-benar membawa kebermanfaataan untuk lingkungan sekitar, nusa dan bangsa.
3) Upaya penyelesaian konflik akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan, serta untuk memulihkan keseimbangan dan agar tercipta rasa damai dalam masyarakat
4) Membebaskan rasa bersalah terpidana. Selain vonis hukuman yang berupa pidana penjara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku TIPIKOR, pemberian hukuman berupa pidana tambahan yaitu penjatuhan pidana denda lazim dilakukan.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan belum cukup efektif dalam implementasi unsur pemidanaannya, maka dari itu diperlukan suatu reformulasi kebijakan berbasis pancasila dalam hal penegakan pemidanaan seorang narapidana koruptor, diantaranya perampasan harta untuk pemulihan aset negara dengan limitatif tertentu, sehingga diperlukan suatu reformulasi kebijakan khususnya dalam Pasal 4 UU No.31/1999 *juncto* UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penerapan hukuman kerja sosial dengan suatu determinasi konsep pemidanaan secara kumulatif untuk menambah efek penjeraan bagi koruptor.

3.2. Saran

Dari beberapa uraian diatas, menurut peneliti untuk merealisasikan reformulasi sistem pemidanaan dalam pemberantasan TIPIKOR harus di imbangi dengan tipologi profesi hukum berkaitan dengan integritas moral dan karakter karena suatu efektivitas penegakan hukum, salah satu indikator dapat dilihat dari aparat penegakan hukum dalam menangani suatu perkara. Sistem hukum dengan tipologi profesi hukum merupakan dua unsur yang saling bersinergi dan berkaitan, sistem hukum yang baik tidak akan mampu mewujudkan efektivitas dalam upaya penegakannya apabila aparat penegak hukumnya tidak mampu menjalankan suatu tipologi profesinya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Arini Indika Arifin, *"Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam"*, Lex et Societatis, Vol. III/No.1/ Jan-Mar/2015.

Badar Nawawi Arief, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Barda Nawawi Arief, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, *"Kebijakan Hukum Pidana"*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010.

Bambang Waluyo, *"Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia"*, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume IV, Nomor 1, 2017

Budi Suhariyanto, *"Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara (Restorative Justice in Sentencing Corporate Business Optimization of Corruptionby Country Returns Losses),* RechtsVinding Volume 5 No 3, 2016.

Brian Lemuel Rachman, "*Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia",* Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April/2018.

Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, *"Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam PenangananPenyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi"* Lex Crimen Vol.VI/No.1/ Jan-Feb/2017.

K Bureni, *"Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi"*, Jilid 45 No.4 Oktober 2016.

Ginting Jamin, *"Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia",* Law Review Volume XIX, No.3-Maret 2020.

Ira Alia Maerani, *"Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila"*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.

Muh. Kadarisman, *"Penyalagunaan Kewenangan Administrasi: Determinan Reformasi Administrasi Publik Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"*, Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 2020.

Mohammad Sahlan, *"Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi",* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2016.

Nadia Utami Larasati, *"Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender',* Deviance: Jurnal Kriminologi, 2.1,2018.

Romli Atmasasmita, *"Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional",* Bandung: Mandar Maju, 2004

Soerjono Soekanto, *"Penelitian Hukum Normatif", J*akarta: PT. Raja Grafindo, 2004

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, Cet. V*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Risqi A Ibrahim *"Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Anlalisis Ekonomi Mikro dalam Hukum Pidana,* Skripsi, 2019.

Sukmareni, *"Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia",* Pagaruyuang Law Journal Volume 1 No.2 Januari 2018.

Wawan Heru Suyatmiko, *"Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020",* Integritas Jurnal AntiKorupsi, 2021.

Artikel

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasuskorupsi-kerugian-negara-rp-567 di akses pada jam 15.00 pada tanggal 11 Oktober 2021.

ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PILKADA KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

Rohmad Suryadi, S. Sos, MA
Prospek Research Center
e-mail: rohmadsuryadi85@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia sejak tahun 2005 merupakan implementasi sila keempat Pancasila dan menjadi perwujudan Konstitusi seperti yang diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Akan tetapi dalam prakteknya, Pilkada langsung juga terdapat kritik lantaran sebagai sarana perwujudtan demokrasi politik dari rakyat namun penentuan calon kepala daerah dominan ditentukan oleh elit politik yang berkuasa. Implikasinya terjadi protes yang muncul dari rakyat dengan memilih opsi abstain (tidak memilih) di dalam Pilkada. Penelitian ini dilakukan dengan analisis wacana kritis di Pilkada langsung Kota Surakarta Tahun 2020. Data penelitian diambil dari hasil survey Pilkada Kota Surakarta yang dilakukan oleh Prospek Research Center, berita media dan dari peraturan mengenai Pilkada langsung. Hasil penelitian menunjukan fenomena abstain dalam Pilkada di Kota Surakarta pada tahun 2020 menjadikan kualitas partisipasi demokrasi pada Pilkada 2020 menjadi partisipasi yang terendah. Masyarakat berpersepsi bahwa abstain adalah pilihan sah yang tidak melanggar konstitusi. Perilaku abstain menjadi bentuk protes ketika perwakilan rakyat yang berada di Partai Politik dianggap tidak mampu memunculkan calon sesuai harapan. Dengan adanya fenomena ini menunjukan legitimasi pemerintahan yang terbentuk mendapatkan tantangan, dimana walikota dan wakil walikota sebagai representasi kepemimpinan rakyat di tingkat kota harus menunjukan pembuktian kinerja yang lebih serius untuk mensejahterakan rakyat.

Kata Kunci: Pancasila, Pilkada langsung, Abstain, Surakarta

Abstract

The direct election of Regional Heads (Pilkada) in Indonesia since 2005 is the implementation of the fourth principle of Pancasila and the Constitution as mandated by Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution. However, in practice, direct Pilkada has also been criticized because it is a means of realizing political democracy from the people but the determination of the dominant regional head candidate is determined by the ruling political elite. The implication is that there are protests that arise from the people by choosing the option of abstention (not voting) in the Pilkada. This research was conducted using critical discourse analysis in the 2020 direct elections of Surakarta City. The research data were taken from the results of the Surakarta City Elections survey conducted by the Prospect Research Center, media news and from regulations regarding direct elections. The results showed that the phenomenon of abstention in the Pilkada in Surakarta City in 2020 made the quality of democratic participation in the 2020 Pilkada the lowest participation. The public perceives that abstention is a legitimate choice that is not prohibited by the constitution. Abstaining behavior becomes a form of protest when people's representatives in political parties are deemed unable to bring up candidates as expected. With this phenomenon, it shows the legitimacy of the government that is formed is getting a challenge, where the mayor and deputy mayor as representatives of the people's leadership at the city level must show more serious performance proof for the welfare of the people.

Keywords: *Pancasila, direct election, Abstain, Surakarta*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2005 merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat. Pilkada langsung

merupakan implementasi sila keempat Pancasila *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"*. Sebelum reformasi pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi wakil rakyat. Implementasi permusyaratan perwakilan dijalankan oleh wakil rakyat yang menjadi representasi rakyat. Pasca reformasi, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Implementasi permusyawaratan perwakilan dijalankan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang dianggap sebagai kanal aspirasi rakyat yang mengajukan calon dalam Pemilu. Meskipun tidak menutup kemungkinan calon perseorangan maju dalam Pilkada. Hal ini menunjukan implementasi nilai kerakyatan menjadi substansi bahwa kepala daerah adalah penerima mandat rakyat secara langsung dan harus menjalankan mandat itu secara baik karena kepala daerah adalah representasi rakyat yang dipimpinnya.

Pilkada langsung juga menjadi perwujudan Konstitusi seperti yang diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis"*. Ketentuan UUD 1945 ini menimbulkan konsekuensi untuk diadakannya Pilkada yang sampai sekarang ini dilakukan secara langsung. Meskipun secara tekstual sebenarnya ketentuan ini tidak secara tegas menyatakan pemilihan secara langsung. Namun karena pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dengan pemerintah pusat yang pemimpinnya (Presiden dan wakil presiden) dipilih secara langsung maka kepala daerah harus sinkron dengan pemerintah pusat yang harus dipilih secara langsung (Rozali Abdullah, 2005). Turunan peraturan dari pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ini kemudian terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Akan tetapi dalam prakteknya, pelaksanaan Pilkada langsung terdapat kritik lantaran Pilkada yang seharusnya sebagai sarana demokrasi politik bagi rakyat akan tetapi berjalan tidak sebagaimana mestinya. Kritik yang mengemuka antara lain dalam beberapa kasus, aspirasi rakyat tidak lagi menjadi penentu utama dalam memunculkan calon kepala daerah yang akan memimpin daerah selama lima tahun periode pemerintahan. Akan tetapi, penentuan kepemimpinan kepala daerah secara dominan banyak ditentukan oleh elit politik yang berkuasa. Pada titik ini, Pilkada disebut menyebabkan fenomena oligarki, klientelisme politik dan Politik Dinasti.

Secara umum, dalam konteks Indonesia partai politik bisa dinilai sebagai institusi yang paling "berkuasa" dan powerfull. Jika melihat susunan cabang-cabang kekuasaan yang diatur didalam konstitusi maupun didalam undang-undang, maka seluruh lembaga-lembaga (termasuk pemerintah daerah) diisi oleh anggota partai politik atau setidaknya pengisiannya dilakukan melalui mekanisme pelibatan (anggota) partai politik. Oleh karena itu penting untuk memastikan institusi partai politik tidak hanya menjadi alat untuk mencapai kekuasaan tetapi sebagai sarana partisipasi dan aspirasi politik warga negara (Reza Syawawi, 2021). Akan tetapi, faktanya fungsi pencapaian kekuasaan cenderung mengabaikan fungsi partisipasi dan aspirasi rakyat.

Sehingga muncul fenomena oligarki politik lantaran penentuan kekuasaan hanya ditentukan oleh kekuasaan segelintir orang dengan kekuasaan materi lebih dominan menentukan dalam suatu proses pemilihan umum. Menurut Kim Litelnoni (dalam Amalia Syauket, 2021) oligarki adalah sebuah pemerintahan yang mana kekuasaan terpusat hanya pada sekelompok orang kaya. Sebelum kelompok ini menjadi kelompok oligarki, mereka semata-mata menjadi orang kuat, yang kemudian bertransformasi membangun dinasti dan pada akhirnya menciptakan oligarki dalam pemerintahan. Oligarki ini dibentuk sebagai usaha mereka menjadikan kekuasaan politik sebagai sumber daya ekonomi untuk menguasai pemerintahan.

Oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan kekuasaan serta upaya perlindungan secara kolektif atau secara sederhana oligarki

didefinisikan sebagai sebuah sistem tempat berpusatnya seluruh kekuasaan politik pada segelintir orang kaya yang bekerjasama menyusun dan membuat kebijakan yang memberikan keuntungan kelompok secara finansial. (Robinson dan Hadiz , 2004)

Fenomena oligarki ini disebutkan semakin marak terjadi pasca orde baru, dengan lahirnya fenomena yang mengiringinya yang disebut klientelisme politik (Aspinall dan Berenschot, 2019). Dimana sistem kepartaian dan pemilihan umum (pemilu) terbukti menghasilkan sistem politik yang mengandalkan materi sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan *(clientelism).* Menurut Jonathan Hopkin (dalam Kartz dan Crotty, 2001) klientelisme adalah istilah yang menggambarkan distribusi manfaat secara selektif kepada individu-individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik.

Sistem yang demikian tentu menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan sistem demokrasi yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Ancaman ini semakin terasa manakala proses politik menghasilkan apa yang disebut sebagai korupsi politik, dimana kekuasaan yang diperoleh dan diperuntukkan hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok dari negara. (Reza Syawawi, 2021). Dampaknya banyak kepala daerah hasil Pilkada secara langsung yang terseret kasus korupsi. Sampai dengan Januari 2022, total ada 167 kepala daerah yang terjerat proses hukum di KPK. Jumlah itu terdiri dari 22 gubernur dan 145 bupati/wali kota. (Kompas, 2022)

Selain oligarki dan klientelisme politik, Pilkada langsung juga disebut menyebabkan terjadinya fenomena Politik Dinasti. Politik Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Politik Dinasti merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. Regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Politik Dinasti merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. (MH Susanti, 2017).

Fenomena di atas menjadi suatu problem tersendiri karena pelaksanaan Pilkada secara langsung secara substansial seharusnya menjadi implementasi Sila keempat Pancasila untuk mewujudkan demokrasi yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Namun yang terjadi justru penyimpangan dan mendegradasi nilai Pancasila dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang seharusnya menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila yang berketuhanan, berperikemanusiaan, memajukan persatuan dan mewujudkan keadilan sosial. Hal ini mengimplikasikan bahwa hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan nasional untuk menuju keadilan sosial (Widodo, 2015). Ketiga fenomena di atas yang menjadikan banyak pihak menyampaikan kritik bagi pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia pasca reformasi.

Oleh karena adanya fenomena yang justru menjadikan Pilkada langsung tidak demokratis itulah kemudian terjadi protes yang muncul dari rakyat sebagai pemilih yaitu dengan mmemilih opsi abstain (tidak memilih) atau menjadi golput (golongan putih) di dalam Pilkada langsung. Opsi abstain dapat dipahami sebagai sebuah "perlawanan" terhadap sistem permusyawaratan perwakilan yang dianggap tidak berjalan secara baik yang dijalankan oleh elit politik dalam partai politik. Lantaran tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam memunculkan calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada.

Fenomena abstain sudah menjadi hal yang lumrah dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Meski secara konstitusional, abstain tersebut tidak melanggar, dan secara hukum tidak ada unsur

pidana atau perdata yang dilanggar. Tapi masalah abstain bisa menjadi masalah dan menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia ke depan. Abstain dalam Pemilu selalu menarik untuk dikaji karena setiap faktor pemicu abstain dalam pemilu berbeda-beda. (Suwardi dan Budiyanto, 2020)

Dalam konteks lokal, Pilkada langsung di Kota Surakarta pada Tahun 2020 yang lalu terjadinya fenomena asbtain menarik untuk dikaji. Karena di dalam proses memunculkan pasangan calon kepala daerah penuh dengan dinamika dan dinilai terjadi politik dinasti dengan majunya putra Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota. Majunya putra presiden yang maju melalui restu ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Megawati Soekarno Putri mengubah konstelasi politik di tingkat lokal.

Dengan keputusan PDIP ini, akhirnya partai politik lainnya yang mempuyai kursi di DPRD Kota Surakarta dan berpotensi mengusung pasangan calon walikota alternatif melalui koalisi seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mendukung pasangan Gibran-Teguh karena semuanya mengikuti keputusan DPP partainya. Hanya tersisa satu partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak ikut mendukung tetapi juga tidak mampu menggalang koalisi melawan dominasi PDIP. PKS akhirnya memutuskan abstain dalam Pilkada 2020. Sementara pasangan Gibran-Teguh melawan calon perseorangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo). Munculnya pasangan calon perseorangan Bajo ini pertama kali dalam sejarah Pilkada di Kota Surakarta. Meskipun banyak kalangan yang menyebut sebagai calon boneka yang dimunculkan agar pasangan yang diusung koalisi PDIP tidak melawan kotak kosong.

Pilihan abstain pada Pilkada 2020 di Kota Surakarta ini menjadi fenomena yang cukup menarik, lantaran pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada perhelatan Pilkada menjadi meningkat dan tertinggi selama pelaksanaan pemilu di Kota Surakarta. Angka partisipasi dalam Pilkada 2020 juga mencatat angka partisipasi terendah dalam sejarah pelaksanaan Pilkada dan Pemilu di Kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah:

a. Bagaimanakah implementasi Pancasila Sila Keempat dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020?
b. Bagaimanakah perilaku abstain melawan praktek politik dinasti yang terjadi di dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengumpulkan data deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam degan maksud mengembangkan konsep atau pemahaman suatu masalah. (Sandjaja dan Herianto, 2006)

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan analisis wacana kritis. Secara spesifik analisis wacana kritis yang dipakai adalah Pendekatan Relasional Dialektikal *(Dialectical-Relational Approach/DRA)* atau biasa juga disebut dengan pendekatan perubahan sosial (Fairclough, 1989). Pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan Norman Fairclough adalah bahwa kegiatan berwacana sebagai praktik sosial. Hal ini menyebabkan ada hubungan yang berkaitan antara praktik sosial dan proses membentuk wacana. Untuk itu, harus dilakukan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi terbentuknya wacana. (Masitoh, 2020)

Data penelitian diambil dari literatur berupa data hasil survey Pilkada Kota Surakarta yang dilakukan oleh Prospek Research Center, data hasil Pilkada 2005 - 2020 yang dirilis KPUD Kota

Surakarta dan mengambil seputar berita media terkait politik dinasti, pilihan abstain di Pilkada langsung Kota Surakarta Tahun 2020. Serta mengambil sumber data sekunder dari peraturan mengenai Pilkada langsung. Analisis data dilakukan dengan analisis wacana kritis. Fokus wacana yang dianalisis adalah wacana abstain, politik dinasti dengan melihat kaitannya dengan konteks implementasi Pancasila sila keempat dalam Pilkada Surakarta Tahun 2020.

Setelah menganalisis data, kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1992) penarikan kesimpulan merupakan suatu usaha untuk mencari dan memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proporsisi. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data dan pengolahan data. Setelah melakukan verifikasi, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Pancasila Sila Keempat dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020

Apabila melihat adanya fenomena perilaku abstain yang terjadi di dalam Pilkada Kota Surakarta pada tahun 2020, implementasi Pancasila khususnya Sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" dapat dikatakan kurang terimplementasi dengan baik, dengan melihat fakta kuatnya kooptasi pengurus di tingkat pusat yang sangat dominan menentukan kemunculan calon walikota di Kota Surakarta.

Sehingga ruang musyawarah dalam partai politik yang diberikan amanah untuk menentukan calon pasangan calon walikota secara demokratis lebih memperhatikan perintah atau instruksi dari partai politik di tingkat pusat, daripada mengkomodasi aspirasi konstituen dari masyarakat di tingkat bawah.

Untuk mendalami fenomena Politik Dinasti dan pilihan abstain dalam Pilkada Koa Surakarta, dalam penelitian ini mengambil dua sumber berita sebagai bahan atau materi yang dianalisis melalui analisis wacana kritis. Dua berita tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Berita yang menggambarkan wacana Politik Dinasti dan Pilihan Abstain di Pilkada Kota Surakarta 2020

Kategori Isu	Judul Berita	Tangal Terbit, waktu	Sumber
Politik Dinasti	Politik Dinasti Gibran vs 'Wong Cilik' di Solo bagai Langit & Bumi	Selasa, 27 Oktober 2020 07:00 WIB	https://tirto.id/f6on
Pilihan Abstain	Pengamat Kritik Keputusan Abstain DPD PKS di Pilkada Solo	Rabu, 2 September 2020 03:37 WIB	https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/02/pengamat-kritik-keputusan-abstain-dpd-pks-di-pilkada-solo?page=all.

Wacana Politik Dinasti dalam pemberitaan tirto.id berangkat dalam konteks produksi teks yang sedang marak menjadi perbincangan publik lantaran majunya putra kandung Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Kota Surakarta dan menantu putra Presiden RI, Bobby Nasution di Pilkada Kota Medan. Meskipun dalam wacana Politik Dinasti

ini lebih banyak yang mengupas pencalonan Gibran yang merubah lanskap kontestasi Pilkada Kota Surakarta. Dalam teks wacana Politik Dinasti ini, tirto.id lebih memposisikan pada kubu yang mengkritik dan tidak sepakat dengan praktik Politik Dinasti tersebut.

Oleh karenanya, aktor sebagai nara sumber dalam produksi teks Politik Dinasti ini lebih banya yang diambil dari pihak yang sejak awal tidak setuju dengan adanya Politik Dinasti tersebut seperti politisi PKS Kota Surakarta, peneliti Nagara Institue, Ketua Yayasan Tikus Pithi yang mengusung calon perseorangan, Bajo. Meskipun ada statement Gibran yang dikutip dalam porsi yang sedikit dan tidak dominan. Dari wacana yang terbentuk dapat disimpulkan bahwa Politik Dinasti adalah praktek yang justru tidak baik dalam kelangsungan demokrasi. Sebagaimana teks yang dibangun dalam wacana Politik Dinasti tersebut:

> *"Alasan partai berasas Islam menyingkir dari medan laga adalah "demokrasi Solo sudah terbajak oleh dominasi sistem kepartaian," ujar Sekretaris PKS Solo, Daryono. Ia juga berkata, "Kreasi dan aspirasi daerah akhirnya terkungkung karena tidak bisa melewati dominasi."* (tirto.id, 2020)

Narasi *"demokrasi Solo sudah terbajak oleh dominasi sistem kepartaian"* muncul sebagai sebuah kesimpulan karena kegagalan koalisi alternative yang awalnya digalang PKS bersama partai non PDIP yang mempunyai kursi di DPRD akhirnya gagal terbentuk karena pengurus partai di tingkat kota harus mengikuti instruksi pengurus partai di tingkat pusat yang sudah memberikan rekomendasi kepada Gibran sebagai calon walikota Surakarta. PDIP Kota Surakarta yang pada awalnya mengusulkan pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa akhirnya harus mengikuti keputusan DPP PDIP yang merestui Gibran -Teguh untuk maju dalam kontestasi Pilkada.

Konsumen atau pembaca tirto.id dapat dilihat sebagai pembaca kritis dan dari kalangan terpelajar. Hal ini dapat dilihat dari ulasan yang cenderung mendalam dan dilengkapi dengan visualisasi info grafis yang menarik dari setiap pemberitaan. Pola nada yag dinarasikan atau *tone* yang muncul dari konsumsi teks mengenai Politik Dinasti ini cenderung bernilai negatif. Sebagaimana kutipan dalam narasi dalam paragraf sebagai berikut:

> *"Dengan penguasaan basis PDIP, basis pemilih Jokowi, dan kekuatan partai hasil kerja FX Hadi Rudyatmo, Wali Kota Surakarta dan ketua PDIP setempat, Gibran diprediksi menang mudah. Jokowi kemungkinan besar bakal punya Politik Dinasti di kampung halamannya sendiri. Bila Gibran menang, Jokowi adalah presiden pertama di Indonesia yang saat menjabat punya anak yang menjadi kepala daerah—perihal yang tak pernah terjadi sebelumya dalam demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto."* (tirto.id, 2020)

Dari sisi etika, dalam kontruksi wacana yang dilakukan dalam teks politik dinasti dinilai tidak etis dan belum pernah terjadi pada masa reformasi. Terlebih dalam suatu kesempatan pada tahun 2018, Gibran pernah mengatakan tidak akan mendukung politik dinasti. Namun pada tahun 2020 justru maju sebagai walikota ketika bapaknya masih menjabat sebagai Presiden RI saat ini. Pernyataan yang tidak konsisten dan berlindung di balik alasan bahwa pencalonan dirinya adalah Hak Asasi karena melalui kontestasi pemilihan tersebut menjadi wacana pinggiran yang mencoba melawan wacana dominan politik dinasti yang dikonstruksi media.

Aspek sosial budaya yang mempengaruhi terbentuknya wacana apabila dikaitkan dengan implementasi Pancasila sila keempat adalah ada hal yang tidak sinkron manakala sistem demokrasi Pancasila yang dibangun dalam nuansa kerakyatan, namun dalam prakteknya justru nuansa Politik Dinasti sebagai budaya kekuasaan feodal yang dipraktekan dalam arena kompetisi politik dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 tersebut. Pada bagian lain wacana politik dinasti yang diproduksi dalam media ini juga menampilkan

budaya yang seharusnya partai politik untuk memunculkan calon berdasarkan aspirasi dari bawah, justru terkalahkan dengan lobby ketua umum partai.

> *Semula, pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo telah menutup pintu bagi Gibran saat penjaringan calon. Mekanisme seleksi tertutup ini ditentukan oleh pengurus cabang, lalu diajukan ke pusat. PDIP Solo sudah menyodorkan Purnomo kepada Megawati. Memotong kompas, Gibran memburu tiket lewat Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah. Ia juga menemui Megawati selama masa tunggu rekomendasi. Akhir dari pertarungan: Gibran yang diberi restu, Purnomo tersingkir. Perkara kaderisasi dan senioritas serta mekanisme partai mengusulkan calon dari bawah diveto oleh Megawati.* (tirto.id, 2020)

Dari konstruksi wacana Politik Dinasti ini menunjukan kinerja partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi terdapat dari sisi internal partai politik itu sendiri, dimana pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik tidak mencermikan asas demokrasi. Pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasakan instruksi ketua umum partai politik dengan mekanisme penunjukan secara langsung. Dengan sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Proses tersebut dapat juga sebagai celah nantinya muncul budaya "hutang budi" dari kepala daerah ke ketua partai politik. Sehingga dikhawatirkan setiap kebijakan kepala daerah itu nanti akan didasarkan pada kepentingan partai politik pengusungnya. (Mulyono & Fatoni, 2019)

Sebagaimana wacana Politik Dinasti, wacana abstain yang diproduksi oleh tribunnews. com juga muncul sebagai wacana yang sedang marak menjadi perbincangan public setelah dilontarkan sebagai pilihan sikap politik oleh PKS sebagai partai yang gagal membangun koalisi dan memunculkan calon walikota alternative untuk Pilkada Kota Surakarta. Dalam wacana abstain yang terberitakan dalam media tribun ini cenderung memposisikan diri pada sisi yang mengkritik pilihan abstain sebagaimana pilihan diksi dalam judul tersebut.

Meskipun demikian, pemilihan aktor sebagai narasumber dalam produksi teks dipilih dari dua kubu yang berseberangan secara berimbang. Narasumber utama adalah pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia yang tidak setuju dengan sikap partai politik yang abstain, dan narasumber yang berasal dari politisi PKS sebagai representasi pemilih abstain dalam Pilkada Surakarta tahun 2020.

Dari konstruksi wacana yang dimunculkan dari judul yang cenderung bernada negatif dalam menilai abstain, namun apabila dibaca secara utuh wacana yang terbangun mengenai abstain cukup berimbang. Konsumen pembaca tribun bisa jadi adalah kalangan menengah yang mudah terpengaruh dengan judul yang cenderung sensasional, samar dan menimbulkan tanda tanya sehingga muncul keinginan untuk membaca dan mengikuti alur berita secara utuh.

Walaupun konstruksi wacana mengenai abstain diawali dengan judul, "Pengamat Kritik Keputusan Abstain DPD PKS di Pilkada Solo" akan tetapi porsi statemen pengamat dalam meyampaikan kritik justru lebih sedikit daripada pendapat yang setuju dengan abstain. Bagian narasi penting yang menjadi headline judul adalah pernyataan dari pengamat politik, Ujang Komarudin sebagai berikut:

> *"Tak bagus mengkampanyekan Golput. Itu bukan merupakan pendidikan politik yang baik untuk rakyat,"* ujar Ujang, ketika dihubungi (Tribunnews.com, 2020).

Teks yang secara vulgar menunjukan bahwa "golput atau abstain bukan pendidikan yang baik untuk rakyat", mengasumsikan bahwa partisipasi aktif dalam pilkada untuk menggunakan hak pilih adalah pendidikan politik yang baik yang seharusnya dijalankan

partai politik sebagai bagian pilar demokrasi. Namun asumsi peryataan ini hanya melihat partisipasi dalam satu sisi saja, sementara cenderung mengabaikan aspek proses dalam memunculkan calon apakah demokratis ataukah tidak, kapasitas calon yang maju apakah sesuai harapan masyarakat ataukah tidak. Padahal dalam pandangan partisipasi demokrasi, abstain adalah hal yang wajar.

Kondisi sosial budaya yang mempengaruhi wacana abstain yang dikonstruksikan dalam teks berita tribunnews.com ini adalah karena Golput menuai tafsir sebagai manifestasi sikap kritis yang menghendaki adanya perubahan sistem politik dalam *electoral law* dan *electoral process.* (Subanda, 2009). Oleh karenanya, alasan atas pilihan rasional dalam lingkup sosial budaya yang terjadi juga menjadi porsi yang cukup dominan yang disajikan dalam wacana abstain ini. Misalnya dalam narasi sebagai berikut:

> *Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto mengungkapkan, sikap abstain pada Pilkada Kota Solo merupakan bentuk perlawanan PKS terhadap dinamika politik di Kota Bengawan. (*Tribunnews.com, 2020)

Apabila dikaitkan dengan konteks implementasi sila keempat Pancasila, wacana abstain dalam Pilkada ini bisa jadi berlawanan dengan nilai Demokrasi Pancasila yang menghendaki partisipasi aktif rakyat dalam pemilihan secara langsung. Namun apabila dicermati secara mendalam wacana abstain bagi para pemilihnya adalah pilihan yang secara internal partai politik PKS itu adalah hal yang demokratis karena justru sesuai dengan kehendak rakyat. Lantaran alasan yang dikemukakan dalam wacana abstain tersebut disebutkan sesuai aspirasi masyarakat yang sesuai dengan jiwa demokrasi Pancasila bahwa nilai kerakyatan harus sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Sementara partai politik yang setuju dengan politik dinasti, dalam menjalankan mandat permusyawaratan perwakilan dianggap tidak merepresentasikan rakyat yang memilihnya. Sementara pilihan abstain mendapatkan legitimasi dari pilihan konstituen. Sebagaimana narasi dalam teks berikut:

> *Dia menjelaskan, sikap abstain itu muncul bukan tanpa alasan dan telah melewati proses yang sangat panjang. Mulai dari penjaringan para kader dan konstituen di tingkat DPD PKS Kota Solo kemudian diteruskan ke tingkat DPW Jateng hingga DPP Pusat. (*Tribunnews.com, 2020)

Wacana pilihan abstain yang dikonstruksi melalui pemberitaan dengan latar konteks perlawanan terhadap Politik Dinasti mendapatkan respon yang positif lantaran sisi keseimbangan wacana abstain cenderung lebih kuat. Sedangkan dalam wacana Politik Dinasti, persepsi negative terhadap praktek tersebut justru lebih dominan. Konstruksi wacana inilah yang mempengaruhi bagaimana masyarakat pemilih menentukan pilihan sebagai bentuk implementasi partisipasi rakyat dalam demokrasi Pancasila. Seberapa besar pemilih yang menganggap wajar Politik Dinasti dan seberapa besar pemilih yang menganggap wajar perilaku abstain dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 menjadi hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam.

3.2. Perilaku Abstain dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020

Hasil penelitian menunjukan fenomena abstain dalam Pilkada di Kota Surakarta pada tahun 2020 menjadikan kualitas partisipasi demokrasi dari semua pelaksanaan Pilkada menjadi partisipasi yang terendah di Kota Surakarta. Apabila dilihat dari data pelaksanaaan Pilkada di Kota Surakarta dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya tingkat partisipasi politik di Kota Surakarta sebagai berikut:

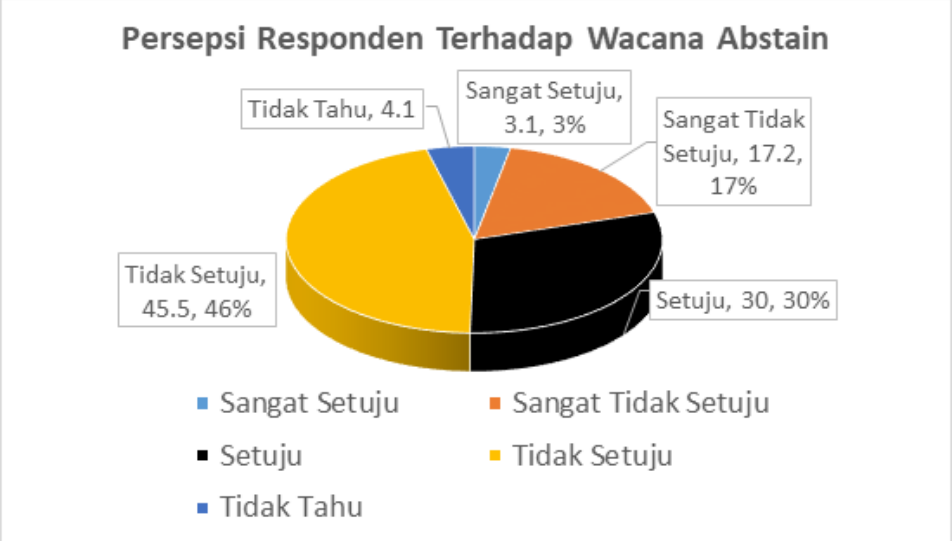
Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Kota Surakarta 2005 - 2020

Tahun	Angka Partisipasi	Angka Abstain
2005	74,91%	25,09%
2010	71,47%	28,53%
2015	73,04%	26,96%
2020	70,52%	29,48%

Sumber: Data KPUD Kota Surakarta (diolah)

Dari data di atas memperlihatkan, bahwa angka partisipasi pada Pilkada 2020 di Kota Surakarta hanya mencapai 70,52% tingkat partisipasi. Angka partisipasi ini menjadi angka partisipasi terendah sepanjang sejarah Pilkada di Kota Surakarta. Sementara sebanyak 29,48% tidak menggunakan hak pilih (abstain). Angka abstain ini menjadi angka abstain tertinggi sepanjang sejarah Pilkada di Kota Surakarta.

Mengenai tingginya angka abstain dalam Pilkada ini sudah diprediksi oleh Prospek Research Center melalui survey terhadap 400 responden pemilih di Kota Surakarta yang dilakukan satu bulan sebelum hari pemilihan. Pada survey saat itu, didapatkan data persepsi responden terhadap wacana abstain yang mulai ramai jelang pelaksanaan Pilkada. Data terkait persepsi masyarakat terhadap wacana abstain ini dapat dilihat pada gambar diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Hasil Survey Persepsi Responden Wacana Abstain

Dari hasil survey tersebut terlihat angka responden yang setuju dan sangat setuju dengan wacana abstain dalam Pilkada cukup banyak sebesar 30,30% Setuju dan 3,3% Sangat Setuju dengan wacana abstain. Meskipun bukan pilihan mayoritas, karena masih di bawah presepsi responden yang Tidak Setuju Abstain sebesar 45,46% dan Sangat Tidak Setuju sebesar 17,22%. Namun, jumlah responden yang mempunyai persepsi Setuju dengan wacana abstain ini menunjukan bahwa masyarakat pemilih memiliki persepsi yang independen dan cenderung berseberangan dengan arus partai politik yang mengusung pasangan calon walikota Surakarta.

Hasil survey yang menyatakan jumlah responden setuju dengan pilihan abstain tersebut linier dengan hasil Pilkada tahun 2020 dimana ada 29,63% pemilih yang tidak

menggunakan hak pilihnya. Selain itu terdapat data jumlah kartu suara yang tidak sah pada tahun Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 juga meningkat. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPUD Kota Surakarta, Nurul Sutarti dalam diskusi bertajuk "Menuju Zero Surat Suara Tidak Sah". Terdapat kenaikan surat suara tidak sah dari Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2019 dan Pemilihan Umum Walikota (Pilwalkot) Tahun 2020 di Kota Surakarta, dimana kenaikan tersebut merata di semua kecamatan. (Sutarti, 2021)

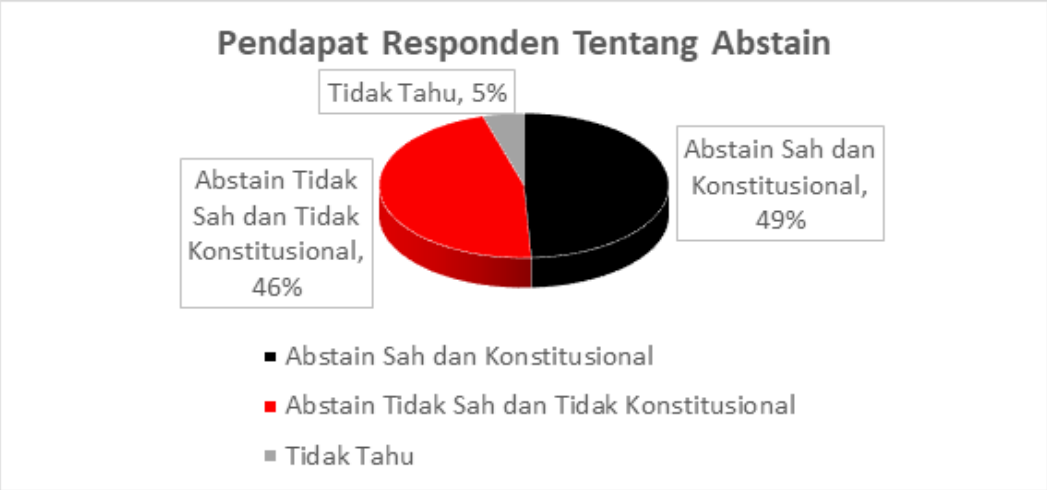
Tabel 2. Persentase Surat Suara Tidak Sah Perbandingan Pileg DPRD Kota Surakarta 2019 dan Pilwalkot Surakarta 2020

Kecamatan	Persentase Surat Suara Tidak Sah	
	Pileg DPRD Kota Surakarta 2019	Pilwalkot Surakarta 2020
Pasarkliwon	14,39%	7,38%
Laweyan	14,16%	6,69%
Serengan	12,11%	6,76%
Banjarsari	11,65%	6,62%
Jebres	8,74%	6,35%

Sumber: Data KPUD Kota Surakarta (diolah)

Data ini memperlihatkan seiring dengan maraknya persoalan yang mengiringi perjalanan sistem pemilihan langsung bagi para kepala daerah di tanah air, sikap skeptis dan apatis publik menjadi konsekuensi turunan yang tidak terelakkan. Pelaksanaan demokrasi di daerah tidak jarang hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan dan pertaruhan kepentingan sejumlah kalangan. Pemaknaan yang salah kaprah ini sering menimpa para kandidat yang kurang beruntung dalam tahapan pilkada. Ketika dinyatakan tidak layak bertarung dalam pilkada atau justru menelan kekalahan pada saat pesta demokrasi sudah digelar, maka berbagai bentuk aksi penyimpangan hukum sering digulirkan. (Simamora, 2011). Perilaku abstain menjadi bentuk protes ketika perwakilan rakyat yang berada di Partai Politik dianggap tidak mampu memunculkan calon sesuai harapan konstituen.

Berdasarkan peraturan mengenai PIlkada tidak ada sanksi terhadap perilaku abstain. Dari beberapa peraturan mengenai Pilkada seperti UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 13 tahun 2018 tidak ada sanksi atau larangan terhadap pilihan abstain. Karena memilih calon adalah Hak Warga Negara bukan Kewajiban. Sejalan dengan persepsi masyarakat bahwa abstain adalah pilihan sah yang bisa dilakukan oleh rakyat dan tidak melanggar konstitusi. Sebagaimana tergambar dari hasil survey sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Pendapat Responden Terhadap Pilihan Abstain di Pilkada

Dari survey terlihat bahwa mayoritas responden sebesar 49% menyatakan bahwa Abstain adalah pilihan yang sah dan konstitusional. Sementara responden yang menyatakan bahwa Abstain adalah pilihan yang tidak dan dan tidak konstitusional sebesar 46%. Terkait dengan persepsi yang menyatakan bahwa abstain san dan konstitusional menyebabkan tingginya angka abstain di Pilkada Kota Surakarta sehingga legitimisasi kemenangan pasanagan Walikota dan Wakilwalikota Surakarta, Gibran - Teguh menjadi kurang sempurna dan menemukan tantangan yang cukup besar untuk membuktikan janji kampanye selama pemerintahan. (Nurhayati, 2020). Dari pendapat responden ini juga memperlihatkan adanya perubahan paradigma bahwa memilih bukanlah suatu hal yang seakan wajib seperti yang terjadi pada masa orde baru, saat ini paradigma berubah bahwa memilih adalah hak. Sehingga menjadi hak pemilih untuk ikut memilih atau tidak memilih dalam pemilu/pilkada.

Berdasarkan hasil survey, juga terdapat hasil bahwa abstain terjadi bukan hanya karena alasan politik dinasti, namun juga karena kondisi pandemi yang terjadi namun pilkada tetap diadakan oleh KPU. Berdasakan data Survey didapatkan data alasan responden abstain karena adanya isu politik dinasti sebesar 33,5%, Karena alasan isu pandemi Covid-19 sebesar 41% dan alasan karena isu calon walikota kurang pengalaman di pemerintahan sebesar 48%. Pendapat responden yang memilih abstain yang paling besar adalah karena alasan kapasitas calon yang maju dianggap belum berpengalaman di pemerintahan. Hal ini menjadi kritik bagi pengusung bagi pasangan dari partai politik maupun dari perseorangan agar mencalonkan kandidat yang benar-benar memiliki kapasitas pengalaman di pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Implementasi sila keempat Pancasila tidak terimplementasi secara baik kontestasi Pilkada di Kota Surakarta tahun 2020. Terjadinya praktek politik dinasti dalam arena demokrasi di tingkat lokal ini dapat dilhat secara kritis bahwa pengamalan sila keempat Pancasila di partai politik belum dilakukan dengan bak. Wacana Politik dinasti dikonstruksikan sebagai praktik politik yang kurang beretika dan tidak sesuai dengan norma Pancasila yang seharusnya mengedepankan mekanisme yang demokratis, menjunjung tinggi nilai hikmat kebijaksanaan dan mengutamakan kerakyatan.

Dampak dari adanya praktik politik dinasti, wacana abstain justru dikontruksikan sebagai perlawanan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Namun wacana abstain ini juga tidak menunjukan implementasi yang baik dari sila keempat Pancasila yang seharusnya

menempatkan permusyawaratan perwakilan sebagai basis pilihan dalam Pilkada. Dengan tingginya suara abstain dan rendahnya partisipasi Pilkada langsung di Kota Surakarta pada tahun 2020 menunjukan legitimasi pemerintahan yang terbentuk mendapatkan tantangan yang cukup berarti, dimana walikota dan wakil walikota sebagai representasi kepemimpinan rakyat di tingkat kota harus menunjukan pembuktian yang lebih serius untuk mensejahterakan rakyat dan tidak tunduk bagi kepentingan oligarki politik dinasti.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Dr. Hidayat Nurwahid (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), peneliti Prospek Research Center, Redaksi Tribunnews dan Redaksi Tirto. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*

Secara Langsung. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers

Berenschot, W. & Aspinall, E. Riyadi, E. (Trans). (2019). *Democracy for Sale, Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia.* Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor.

Fairclough, N. (1989). *Language and Power.* New York, United States: Addison Wesley Longman.

Heriyanto, A. & Sandjaja, B. (2006). *Panduan Penelitian.* Jakarta, Indonesia: Prestasi Pustaka

Kartz, R.S., & Crotty, W.,(2001). *Handbook Partai Politik*. Bandung, Indonesia: Nusa Media

Miles, B. M. & Huberman, M., Rohendi, T. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru.* Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia Press.

Robinson, R & Hadiz, V.R. (2004). *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchi in an Age of Market.* New York, United States: Routledge Curzon.

Syauket, A. (2021). *Membangun Dinasti Politik Oligarki Yang Korup*.Jakarta, Indonesia: Kreasi Cendekia Pustaka

Journal article

Masitoh, M. (2020). Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Edukasi Lingua Sastra,* 18 (1), 66–76. https://doi.org/10.47637/elsa.v18i1.221

*Mulyono, G,P. Fatoni, R (2019).*Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.*, 7 (2), 97-107. http://doi.org/10.25273/citizenship.v7i2.2257

Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *Jurnal Mimbar Hukum,* 23 (1), 221-36. *https://doi.org/10.22146/jmh.16200*

Subanda, N (2009). Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput di Indonesia. *Jurnal Konstitusi,* 2 (1), 60-72. https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_lnk.php?id=*44*

Susanti, M.H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society,* 1 (2), 111-119. http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440

Suwardi, & Budiyanto, A. (2020). Abstentions Phenomenon (Golput) Direct Local Election. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance,* 12 (2), 203-212. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.203-212

Syawawi, R. (2021). Memutus Oligarki dan Klientelisme dalam Sistem Politik Indonesia melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik oleh Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18 (1), 139-152. https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.752

Widodo, W. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Civis, 5 (1), 679–691. https://doi.org/10.26877/civis.v5i1/Januari.629*

Webpage

Amali, Z. (2020). Politik Dinasti Gibran vs 'Wong Cilik' di Solo bagai Langit & Bumi, Retrieved from https://tirto.id/f6on

Candraditya, V, J. (2020). Kritik Keputusan Abstain DPD PKS di Pilkada Solo, Retrieved from https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/02/pengamat-kritik-keputusan-abstain-dpd-pks-di-pilkada-solo?page=all.

Galih, B. (2022). [Kabar Data] Mengurai Akar Masalah Korupsi Kepala Daerah Retrieved from https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/21/165028782/kabar-data-mengurai-akar-masalah-korupsi-kepala-daerah

Government publication

KPUD Kota Surakarta. (2020). *Hasil Perolehan Suara Pilwalkot Surakarta Tahun 2020.* Surakarta, Indonesia: KPUD Kota Surakarta

Sutarti, N (2021). *Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2020.* Surakarta, Indonesia: KPU Kota Surakarta

Company and Industry Reports

Nurhayati, N. (2020, November). *Rilis Hasil Survey Pilkada Surakarta Tahun 2020.* Retrieved from Prospek Research Center.

 ISSN: 2830-2699

QUO VADIS: HARMONISASI SISTEMATIKA PENGATURAN PILKADES PADA UU DESA TERHADAP KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI *PHILOSOPHISCHE GRONSLAG*

Brillian Feza Eryan Prasetya[1] dan Nunik Nurhayati[2]
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: [1]c100180299@student.ums.ac.id, [2]nn123@ums.ac.id

Abstrak

Dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bingkai negara hukum di Indonesia, maka diperlukan suatu gagasan konseptual yang dapat digunakan untuk menjangkau nilai luhur Pancasila selaku philosophische grondslag atau dasar falsafah bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut secara prinsipal diperlukan untuk memudahkan tercapainya tujuan nasional melalui peneguhan harmonisasi nilai-nilai Pancasila terhadap konstruksi hukum dan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia. Adanya upaya demokratisasi yang integralistik di Indonesia nampak pada diregulasinya asas penyelenggaraan pemilihan umum (langsung, umum, bersih, jujur, dan adil) terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta pemilihan kepala desa (Pilkades). Hal tersebut berarti pula bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan Pilkades itu dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara, yang notabene merupakan konsep demokrasi Barat dengan hasil akhir berupa kemenangan dan kekalahan. Hal tentu berpotensi menimbulkan konflik identitas pada pluralitas masyarakat di daerah. Sedangkan jika bercermin pada histori pengaturan hukum pemilihan kepala daerah yang masih menyisakan kondisi onrechtszekerheids, tentu harapannya Pilkades tidak bernasib sama terhadap hal tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menerapkan metode yuridis-normatif. Hal itu pada prinsipnya dilakukan melalui pendekatan secara historis, konseptual, dan yuridis, yang berkaitan dengan problematika a quo. Sehingga dalam menjangkau solusinya akan dianalisis berdasarkan kajian yang bersifat literature research.

Kata Kunci: Demokrasi Indonesia; Pancasila; Dasar Falsafah Negara; Pilkades.

Abstract

In effort to realize people's sovereignty within the framework of the rule of law in Indonesia, a conceptual idea is needed that can be used to reach the noble values of Pancasila as the philosophische grondslag or philosophical foundation of the Indonesian nation. This is principally needed to facilitate the achievement of national goals through strengthening the harmonization of Pancasila values on the construction of law and the concept of people's sovereignty in Indonesia. The existence of an integralistic democratization effort in Indonesia can be seen in the regulation of the principles of holding general elections (direct, general, clean, honest, and fair) on the implementation of regional head elections and village head elections (Pilkades). This also means that in practice, the implementation of regional head elections and the Pilkades is carried out by means of voting, which incidentally is a concept of Western democracy with the final result in the form of victory and defeat. This certainly has the potential to cause identity conflicts in the plurality of communities in the region. Meanwhile, if we reflect on the history of regional head election legal arrangements which still leave conditions onrechtszekerheids, of course we hope that the Pilkades will not suffer the same fate in this regard. Therefore, in this study, we will examine the problems that have been formulated by applying the juridical-normative method. In principle, this is done through a historical, conceptual, and juridical approach, which is related to the a quo problem. So that in reaching the solution, it will be analyzed based on studies that are literature research.

Keywords: *Democracy in Indonesia, Pancasila, Philosophical Foundation of the Nation, Pilkades.*

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara merdeka yang lahir dari hasil perjuangan seluruh rakyat, yang bersatu melawan keberadaan kolonialisme. Hal tersebut kemudian menjadi spirit utama yang mampu membendung jiwa nasionalisme untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara berdaulat, adil, dan makmur. Secara historis, puncak daripada semangat nasionalisme kala itu berujung pada terlaksananya proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dalam prosesnya berhasil melegitimasi keberadaan Pancasila serta Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai *modus vivendi* dalam berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan kedaulatan rakyat serta supremasi hukum secara proporsional. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan mukadimah Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, terdapat implikasi atas adanya substansi yang integralistik berkelindan dengan teori kedaulatan negara, kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat (Suryawati, 2018). Sehingga karakter negara hukum yang berlaku di indonesia tidaklah mutlak seperti halnya konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*, melainkan suatu konsep negara hukum yang Pancasilais. Arif Hidayat, dalam pandangannya menegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Pancasila dengan kharakter khusus yang melekat di dalamnya (Rahmatullah, 2020).

Hans Kelsen dalam perspektif teori *rechtsstaat*-nya, secara substansial menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara konsep negara hukum dan penerapan sistem demokrasi di suatu negara yang dapat dikaji berdasarkan atas adanya jaminan kedaulatan hukum, mekanisme pertanggungjawaban kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan keberadaan peradilan administrasi negara, serta adanya perlindungan terhadap keberadaan HAM (Aswandi & Roisah, 2019). Meskipun konsep negara hukum di Indonesia berpatron pada nilai luhur Pancasila, namun secara prinsipal keberlakuannya tetap mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara limitatif termaktub dalam Batang Tubuh Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan jaminan HAM dalam konstitusi negara tersebut secara yuridis tenar dengan sebutan hak konstitusional.

Berkelindan dengan adanya upaya demokratisasi yang berlangsung di Indonesia sejak era kemerdekaan hingga saat ini, maka dapat dimengerti bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, negara menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Konsep demokrasi tersebut, di Indonesia tidak hanya diimplementasikan dalam skala nasional saja. Hal itu pada prinsipnya diterapkan juga pada tataran regional yang saat ini dikenal sebagai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (pemilihan kepala daerah). Terlepas dari adanya pro dan kontra yang pernah terjadi pada sistematika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, secara prinsipal hal tersebut saat ini diterapkan secara Luber dan Jurdil, sebagaimana pula Pemilu itu diselenggarakan. Hanya saja dalam ihwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kesatuan lembaga penyelenggaranya bersifat regional dan prosedur penyelesaiannya sengketanya berbeda (meskipun pernah disamakan dengan Pemilu, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi).

Selain daripada itu terdapat pula upaya demokratisasi di wiayah otonomi tingkat ketiga (desa), yang telah dilegalisasi melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dan selanjutnya dikenal dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Secara yuridis konstitusional, keberadaan Pilkades itu pada hakikatnya berpangkal pada ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang selanjutnya menjadi dasar dilegalisasinya UU Desa saat ini. Secara prinsipal, asas penyelenggaraan Pilkades tersebut diatur sebagaimana halnya asas

penyelenggaraan Pemilu, yaitu Luber dan Jurdil. Namun dalam hal penyelenggara dan prosedur penyelesaian sengketa, antara Pemilu dan Pilkades secara prinsipal sangatlah berbeda.

Adanya upaya penyeragaman asas dalam penyelenggaraan Pilkades terhadap asas Pemilu sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan suatu kondisi ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheids*), sebagaimana hal itu pernah terjadi pada sistematika pengaturan hukum mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia (Safwandy, Husni, & Rasyid, 2019). Meskipun secara yuridis (berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) UU Desa) Pilkades tidak diselenggarakan oleh kesatuan lembaga penyelenggara Pemilu yang secara hierarkis juga ditugaskan sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Daerah, namun legalitasnya yang berada ditataran *legi inferior* berpotensi terpengaruh oleh campur tangan politik yang tidak menentu dan memungkinkan terjadinya kondisi *onrechtszekerheids* di masa mendatang.

Sehingga berdasarkan pada konsep pemikiran sebagaimana yang telah diargumentasikan dalam uraian di atas, maka dalam kesempatan penulisan artikel ini akan dilakukan pengkajian terhadap permasalahan hukum yang berkelindan dengan sistematika pengaturan pada penyelenggaraan Pilkades di Indonesia. Terhadap hal tersebut, selanjutnya akan disinkronisasikan terhadap hakikat konsep demokrasi di Indonesia yang selaras dengan Pancasila selaku *Philosophische Grondslag*. Dengan demikian, solusi yang rekomendatif atas permasalahan yang terjadi dapat diupayakan secara bijak sebagai perwujudan cita negara hukum Pancasilais yang menjamin kepastian hukum secara adil dan beradab. Dalam ihwal pemetaan substansi pada pembahasan artikel ini, maka rumusan masalah yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana hakikat konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila selaku *Philosophische Grondslag* di Indonesia?
2) Bagaimana kesesuaian pengaturan hukum penyelenggaraan Pilkades pada UU Desa terhadap konsep demokrasi Pancasila ?

2. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian hukum (*legal research*), pengkajian terhadap permasalahan yang hendak dibahas akan dilakukan secara sitematis dan senantiasa mengacu pada metode ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan (dalam hal ini ilmu hukum), dengan intensi untuk memperoleh kebenaran atas permasalahan yang terjadi (Muhaimin, 2020). Sebagai upaya untuk menemukan titik terang atas permasalahan yang hendak dikaji, maka pendekatan dalam penulisan artikel ini secara prinsipal akan dilakukan dengan cara menerapkan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*). Secara keilmuan, penerapan *normative law research* itu pada hakikatnya bersifat *literature research* (penelitian secara kepustakaan), dan karakternya itu kontras terhadap metode penelitian hukum empiris yang lebih menekankan pada *field study* atau dikenal pula sebagai studi lapangan (Nurhayati & Said, 2021). Selanjutnya, berdasarkan pada penerapan *normative law research* sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penulisan artikel ini akan dianalisis melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta ditunjang dengan mengualifikasikan informasi substansial yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian ilmiah, maupun sumber lain dari internet dengan validitas yang akurat. Sehingga dalam implementasinya hal tersebut dapat dilaksanakan baik secara *online* maupun *offline*, sesuai dengan kondisi keberadaan sumber pustaka yang hendak digunakan. Setelah seluruh data telah terhimpun dan terkualifikasikan dengan baik, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap permasalahan yang hendak dikaji sebagai sarana untuk memperoleh solusi yang rekomendatif. Dalam ihwal penelaahan atas permasalahan esensial sebagaiman yang telah dirumuskan pada penulisan artikel ini, maka hal tersebut akan dijangkau melalui *conceptual approach* (pendekatan secara konseptual), *historical approach* (pendekatan historis), dan juga dengan *statue approach* (pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku),

(Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual ditelaah dengan cara meninjau kembali terhadap konsep demokrasi yang sesuai dengan kehendak nilai luhur Pancasila, yang selanjutnya disimpulkan untuk dianalisis koherensinya terhadap sistematika pengaturan penyelenggaraan Pilkades pada UU Desa. Untuk pendekatan secara historis, pada prinsipnya akan dilakukan melalui pengkajian terhadap pendapat ahli dan/atau tokoh nasional, yang secara historis pernah berkontribusi dalam penggagasan konsep demokrasi Indonesia yang Pancasilais. Hasil daripada kajian tersebut, berikutnya akan dihimpun serta disesuaikan untuk menunjang materi pembahasan dalam penulisan artikel ini. Sedangkan untuk pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut akan dilakukan melalui peninjauan pada Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkelindan dengan pengaturan sistematika penyelenggaraan Pilkades, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki korelasi terhadap permasalahan yang hendak dikaji. Hal tersebut selanjutnya akan dianalisis secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan standar keilmuan di bidang hukum, guna melimitasi pembahasan yang akan diteliti. Dalam ihwal penarikan kesimpulan pada bagian akhir penulisan artikel ini, hal itu akan dilakukan secara komprehensif melalui perbandingan kontekstual terhadap hasil pengkajian masalah yang terjadi, dan untuk selanjutnya akan diperoleh suatu solusi yang rekomendatif untuk dapat diimplementasikan dikemudian hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hakikat Konsep Demokrasi yang Sesuai dengan Nilai Luhur Pancasila selaku *Philosophische Gronslag* di Indonesia

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang Pancasilais, pada prinsipnya memosisikan kedudukan hukum tersebut sesuai dengan nilai luhur Pancasila, yang terdiri dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan; serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara historis, keberlakuan konsep negara hukum di Indonesia menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu *imposed from outside* yang diberlakukan untuk membangun suatu peradaban yang terbarukan dan perilaku bernegara yang berdasarkan pada hukum (Aswandi & Roisah, 2019). Sedangkan secara yuridis konstitusional, keberlakuan konsep negara hukum di Indonesia tersebut pada dasarnya dilandasi oleh adanya ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang secara implisit menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga hal tersebut kemudian dapat dimaknai bahwa, keberlakuan negara hukum di Indonesia telah mengalami suatu proses penyesuaian secara sosiokultural dan oleh sebab itu maka implementasi negara hukum di Indonesia tentu memiliki karakteristik tersendiri, yaitu sesuai dengan nilai luhur dalam Pancasila.

Di sisi lain, dengan berdasarkan pada argumentasi sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat suatu penegasan yang dapat menjelaskan bahwa negara hukum Pancasilais itu dilahirkan di Indonesia secara yuridis adaptif, sehingga tidak mutlak terhadap konsep negara hukum "*Rechtsstaat*" dan "*rule of law*" yang mayoritas dianut oleh negara Barat, maupun konsep "*socialist legality*" yang dianut oleh mayoritas negara Eropa Timur. Hal tersebut secara prinsipal menunjukkan pula bahwa keberadaan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sangatlah esensial, karena kedudukan Pancasila tersebut berperan secara primer di dalam menentukan arah pandangan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan konteks pemahaman Pancasila sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa serta bernegara, dapat dimengerti

bahwa berdasarkan pada histori pembangunan hukum di awal era kemerdekaan Indonesia, telah didapati adanya istilah Belanda yaitu "*philosophische gronslag*", sebagaimana yang diungkapkan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI berikut ini (Mahmodin, 2018):

> "Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada Sidang Dokuritzu Zunbi Tjoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka …. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: *philosofische gronslag* daripada Indonesia Merdeka. *Philosofische gronslag* itulah pedoman, filsafat …. di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi."

Berdasakan pada pernyataan sebagaimana tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa terdapat upaya yang serius di dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar falsafah/ filsafat dalam berbangsa serta bernegara. Berkelindan dengan penafsiran atas kemunculan istilah *philosophische gronslag* di dalam sejarah pembangunan hukum di Indonesia, hal itu secara prinsipal di maknai sebagaimana halnya pengertian daripada *weltanschauung* yang dalam bahasa Jerman berartikan fundamental, filsafat, pikiran, jiwa, serta suatu hasrat yang mendalam, yang dalam hal ini diselaraskan dengan upaya pembangunan kemerdekaan Indonesia agar kekal dan abadi (Hady, 2016). Megawati Soekarnoputri, di dalam suatu karya tulisnya, turut memberikan penegasan terkait dengan keberadaan Pancasila yang secara substasial merepresentasikan kristalisasi daripada cita-cita luhur bangsa dan citra kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga hal tersebut telah berhasil menempatkan Pancasila sebagai *philosophische gronslag* atau *weltanschauung* (Soekarnoputri, 2021).

Dalam perspektif keilmuan di bidang ilmu hukum, secara prinsipal dapat dimengerti bahwa terdapat keterkaitan teoretis yang dapat dijangkau pada keberadaan suatu filsafat dengan keberlakuan suatu hukum di masyarakat. Hal itu sebagaimana ditegaskan pula oleh Sudikno Mertokusumo yang secara substansial menyatakan bahwa, keberadaan filsafat hukum itu pada prinsipnya berkedudukan sebagai sarana untuk menggali secara mendalam tentang karakter hukum yang beragam bentuknya, serta sebagai acuan untuk mencari *das Ding an sich* (jati diri) atas suatu hukum (Mertokusumo, 2019). Sehingga hal tersebut berarti bahwa, peran filsafat sangatlah mendasar di dalam penciptaan suatu hukum di masyarakat. Hal itu dapat pula diibaratkan sebagaimana keberadaan aliran sungai yang ada di sekitar kita. Hubungan kausalitas antara filsafat dengan hukum adalah sebagaimana halnya dengan keberadaan hulu dan hilir pada aliran sungai. Jadi, secara prinsipal antara hukum dan filsafat itu seyogianya memiliki keselarasan yang koheren, guna terwujudnya cita hukum yang sesuai dengan harapan.

Dalam perspektif yuridis konstitusional, keberadaan Pancasila sebagaimana tersebut di atas secara eksplisit termuat pada Alenia keempat di dalam mukadimah Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan prinsip *geldingtheorie*, I Dewa Gede Atmadja dkk., menegaskan bahwa keterikatan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 di Indonesia pada hakikatnya telah memenuhi perihal sebagai berikut (Atmaja, Wiyono, & Sudarsono, 2015):

1) Keberadaan Pancasila sebagai dasar falsafah negara (sebagai dasar filosofis);
2) Terjadinya peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai "maha sumber hukum" bersifat revolusioner terhadap lahirnya "tata hukum baru", sebagaimana pula pernyataan Bung Karno yang menegaskan bahwa UUD 1945 adalah "*Revolotie Grondwet*" atau UUD Revolusi (sebagai dasar yuridis);
3) Diterima dan ditaatinya Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 oleh seluruh rakyat Indonesia (sebagai dasar sosiologis).

Sehingga berdasarkan pada argumentasi yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka di dalam mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa serta bernegaranya, bangsa

Indonesia harus senantiasa berpegang teguh pada niai luhur Pancasila dan tidak dibenarkan untuk cenderung secara mutlak terhadap prinsip lain diluar daripada Pancasila itu sendiri (misal: liberalisme, sosialisme, dlsb.). Hal itu pada hakikatnya adalah bersifat mendasar, mengingat bahwa kedudukan Pancasila tersebut ialah sebagai *philosophische gronslag* atau *weltanschauung* yang telah disepakati secara mufakat oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan atas keberlakuan konsep negara hukum Pancasilais di Indonesia, maka selanjutnya dapat dimengerti bahwa secara yuridis konstitusional terdapat amanat konstitusi yang menengaskan validitas keberadaan kedaulatan rakyat, guna mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkesejahteraan (Pasal 1 Ayat (2) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945). Lukman S. AZ, secara substansial dalam perspektifnya juga menegaskan bahwa, hubungan antara negara hukum dengan sistem demokrasi merupakan suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki interelasi yang saling berhubungan, khususnya berkelindan dengan pengimplementasian kedaulatan rakyat secara demokratis melalui keberlakuan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku terhadapnya (Wiguna, 2021).

Dalam ihwal diterapkannya konsep negara hukum yang berdasarkan pada nilai luhur Pancasila, maka secara otomatis seyogianya konsep demokrasi di Indonesia itu juga memiliki relevansi terhadap hal tersebut. Namun di dalam perspektif keilmuan, sering kali didapati adanya disharmoni yang terjadi diantara *das sollen* (harapan) dan *das sein* (kenyataan). Hal tersebut sebagaimana dapat dimengerti bahwa, dalam ihwal menerapkan konsep demokrasi di Indonesia itu secara historis telah mengalami berbagai macam penafsiran pada setiap periode politik, yang secara dinamis memengaruhinya. Sehingga sampai saat ini implementasi konsep demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia terbagi menjadi beberapa periodisasi, yang terdiri dari: periode demokrasi liberal di awal masa revolusi; periode demokrasi terpimpin di era orde lama (otoriter); periode demokrasi pancasila di era orde baru (otoriter); dan periode demokrasi konstitusional di era reformasi, (Anggraini & Yuspin, 2022). Berdasarkan adanya periodisasi terhadap penerapan demokrasi di Indonesia tersebut, hal itu menunjukkan bahwa terdapat dominasi pengaruh politik yang secara dinamis berpotensi menimbulkan suatu kondisi ketidakpastian dalam ranah yuridis maupun empiris. Meskipun di era orde baru yang bersifat otoriter menerapkan konsep demokrasi yang dilabeli dengan prinsip Pancasila, namun dalam praktiknya hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan menyimpang dari prinsip demokrasi serta nilai luhur Pancasila (MZ, 2021). Maka dari itu, diperlukan suatu pemahaman konseptual secara mendasar terkait dengan hakikat konsep demokrasi yang relevan dengan nilai luhur Pancasila.

Dalam menggagas demokrasi Indonesia di awal era kemerdekaan, Soekarno secara substansial menegaskan dalam pernyataannya pada Sidang BPUPKI Tahun 1945 bahwa demokrasi Indonesia itu jangan sampai dipersamakan terhadap demokrasi di Barat yang hanya bersifat politis semata, melainkan harus dibangun dengan konsep permusyawaratan yang berpinsipkan *politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid* (Yuhana, 2020). Dalam tulisan Bung Hatta, dapat dimengerti pula bahwa kondisi saat perumusan cita demokrasi Indonesia terdapat tiga perspektif yang berbeda dikalangan para pemimpin Indonesia saat itu, diantaranya yaitu: penganut paham sosialis Barat, penganut paham islamisme, dan penganut paham kolektivisme (Hatta, 2018). Selanjutnya di sisi lain, masih dalam konteks pembahasan mengenai gagasan demokrasi Indonesia pada Sidang BPUPKI Tahun 1945, Muh. Yamin dan H. Agus Salim sepakat bahwa demokrasi Indonesia dilaksanakan dengan berdasarkan pada permusyawaratan mufakat yang selaras dengan ajaran islam serta sesuai dengan tatanan yang berlaku di Indonesia (Yuhana, 2020). Secara prinsipal, berdasarkan histori mengenai demokrasi Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil

suatu ikhtisar yang menegaskan bahwasanya dalam gagasan konseptual mengenai wujud daripada demokrasi di Indonesia itu tidaklah imperatif, melainkan bersifat bebas sesuai dengan kehendak rakyat sebagaimana pengamalan Sila Keempat pada Pancasila.

Secara Filosofis, Bung Hatta memaknai demokrasi Pancasila itu sebagai pewujudan daripada dasar moralitas yang secara integral diselaraskan di atas keberadaan dasar politik di Indonesia (Hatta, 2018). Sehingga dengan adanya konsep pemahaman tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan dalam berdemokrasi di Indonesia agar mampu menjangkau keadilan sosial secara komprehensif. Seiring dengan berlalunya waktu, kondisi ketatanegaraan di Indonesia telah mengalami berbagai macam penyesuaian hingga terjadinya empat kali amandemen terhadap Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang pada akhirnya menyepakati konsep demokrasi konstitusional berupa Pemilu secara Luber dan Jurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis (berdasarkan Pasal 22 E Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (3) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945). Meskipun kedua konsep tersebut secara yuridis konstitusional tidaklah berada dalam satu rezim hukum yang sama, namun secara prinsipal hal tersebut memiliki kesamaan asas serta teknis yang cenderung menggunakan metode *voting* atau tenar dengan sebutan pemungutan suara. Dalam ihwal penerapan konsep demokrasi semacam itu, dalam praktiknya ternyata masih menimbulkan berbagai macam persoalan yang memerlukan solusi sebagai penyelesaian terhadap perkara yang terjadi. Hal tersebut terlihat dengan adanya 1812 perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) berdasarkan rekapitulasi sejak tahun 2004 hingga saat ini (MKRI, 2015). Di sisi lain, dalam ihwal sistematika pengaturan hukum terkait dengan pemilihan kepala daerah secara yuridis sempat menilbulkan suatu kondisi *onrechtszekerheids*, sebagai akibat dari adanya perkara yang mendasari Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terkait dengan konstitusionalitas rezim hukum pemilihan kepala daerah dan kewenangan MK dalam memutus sengketanya. Hal itu secara prinsipal telah berdampak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang semula dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat di daerah (DPRD) lalu kini dipilih secara langsung oleh rakyat dengan berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 2015 beserta dengan aturan perubahannya.

Berdasarkan atas adanya beberapa persoalan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perlu kiranya bangsa ini kembali meneguhkan hakikat daripada konsep demokrasi yang benar-benar sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Hal itu secara prinsipal dimaksudkan agar terwujudnya harmonisasi kedaulatan rakyat dan hukum secara proporsional di Indonesia. Sehingga, di dalam mewujudkan cita demokrasi yang Pancasilais itu minimal harus mampu menjaga kestabilan hukum dan politik, agar tujuan dalam bernegara lebih mudah untuk direalisasikan secara komprehensif. Berdasarkan pada Posita 4 dan 5 dalam uraian pokok perkara di Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, secara prinsipal terdapat pula kritik terhadap konsep demokrasi kita saat ini yang cenderung menerapkan sistem *voting* sebagaimana corak dalam penerapan demokrasi liberal, dan perlunya menggagas kembali konsep demokrasi permusyawaratan mufakat sebagaimana nilai luhur yang terkandung pada Pancasila. Hal tersebut dapat dibenarkan keberadaannya, mengingat secara historis memang bangsa kita dalam permusyawarahannya tidak menghendaki konsep demokrasi yang berlainan terhadap kepribadian asli kita. Proses filtrasi memang masih memungkinkan untuk terjadi, namun bukan berarti secara mutlak mengadopsi suatu sitem demokrasi untuk dipaksakan berlaku di Indonesia.

Dalam menjangkau konsep demokrasi yang berdasarkan pada nilai luhur Pancasila, hal itu secara prinsipal dapat dipahami sebagaimana histori pada peristiwa permusyawarahan menjelang diproklamasikannya negara Indonesia, yang pada akhirnya disepakati secara mufakat dengan memilih Soekarno dan Moh. Hatta untuk mewakili pernyataan kemerdekaan

bagi bangsa Indonesia saat itu (Rinardi, 2017). Hal itu jika ditelaah secara filosofis, maka dapat dimengerti bahwa semangat kolektivitas atas rasa senasib dan sepenanggungan saat itu pada akhirnya mampu membawa bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaannya. Meskipun dalam setiap perbedaan senantiasa ada pro dan kontra, namun dengan berlandaskan pada semangat kekeluargaan yang natural serta komprehensif maka hal itu akan memberikan titik terang di dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Dengan berdasarkan pada paradigma kontekstual sebagaimana tersebut di atas, maka dalam menggagas demokrasi Pancasila itu bukan hanya semata-mata dimaknai sebagaimana bunyi sila keempat pada Pancasila. Namun hal itu semestinya dimaknai secara komprehensif, sehingga di dalam menggagas konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila itu pada prinsipnya adalah membangun suatu sistem demokrasi yang naturalis atau jika memang mengharuskan untuk impor terhadap konsep demokrasi dari bangsa lain (sebab alasan mendasar), maka setidaknya terlebih dahulu dilakukan filtrasi terhadap substansi integralistik daripada nilai-nilai Pancasila sebagaimana berikut:

1) Religiositas, sebagai nilai moral yang harus sesuai dengan prinsip Ketuhanan;
2) Humanitas, sebagai nilai insani yang harus mampu menjaga harkat dan martabat setiap insan;
3) Solidaritas, sebagai nilai kekeluargaan yang harus dibangun dalam bingkai persatuan dan kesatuan;
4) Representatif konsensualitas, sebagai nilai demokratis yang dibangun dalam keterwakilan yang proporsional dengan berdasarkan pada prinsip musyawarah mufakat; dan
5) Proporsionalitas, sebagai nilai keadilan yang harus mampu menjangkau kesejahteraan secara lahir dan batin.

Sehingga dalam ihwal menggagas suatu konsep demokrasi di Indonesia, tidaklah hanya bertumpu pada keberadaan nilai dalam Sila Keempat Pancasila saja, melainkan harus mampu memenuhi nilai-nilai Pancasila secara runtut dan integralistik.

3.2. Kesesuaian Sistematika Pengaturan Pilkades pada UU Desa terhadap Kedudukan Pancasila selaku *Philosophische Gronslag* di Indonesia

Desa merupakan suatu wilayah yang terdiri dari kesatuan masyarakat hukum adat dengan kepemilikan otonomi secara asli, bulat, dan utuh, yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan di wilayah keberadaannya, sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam prinsip hidup orang Jawa, terdapat istilah yang melekat dan sering digunakan dalam kesehariannya, yaitu "*Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata*" (Santosa, 2010). Hal tersebut memiliki makna secara filosofis, yaitu menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap wilayah atau desa itu memiliki adat istiadatnya masing-masing yang harus diakui serta dihormati sebagaimana pula halnya tatanan atau peraturan hukum dalam bernegara. Berdasarkan yuridis konstitusional, keberadaan desa sebagaimana tersebut di atas telah dilegalisasikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 18B Ayat (2) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang saat ini melahirkan UU Desa di Tahun 2014. Terhadap keberadaan UU Desa yang berlaku saat ini, secara yuridis menegaskan bahwa terdapat keberlakuan atas prinsip rekognisi dan subsidiaritas (pengakuan dan penguatan kewenangan) bagi desa untuk menunjang terselenggaranya otonomi dalam pemerintahan di desa (Wardiyanto, Aminah, & Martanto, 2016). Secara prinsipal, pelaksanaan otonomi pada pemerintahan di desa tersebut diwujudkan dalam konsep musyawarah desa, yang pada praktiknya akan diselenggarakan secara bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa (Pemdes), dan partisipasi daripada masyarakat desa yang bersangkutan (Pamungkas, 2019).

Berdasarkan atas dilegalisasinya UU Desa pada Tahun 2014 silam, hal itu menunjukkan bahwasanya terdapat upaya untuk memandirikan desa sehingga keberadaannya diatur secara terpisah dari UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Dalam ihwal pemerataan implementasi demokrasi di Indonesia, maka dapat dimengerti bahwa terdapat upaya penguatan penyelenggaraan Pilkades melalui keberlakuan UU Desa, yang legalitasnya terklasifikasikan sebagaimana berikut ini:

Aspek Legalitas Pilkades	Ketentuan UU Desa
1) Legalitas atas Penyelenggaraan Pilkades;	► Diatur dalam Pasal 31 Ayat (1 sampai 3) *jo.* Pasal 34 Ayat (1) dan (2) UU Desa.
2) Legalitas atas Prosedur Penyelenggaraan Pilkades;	► Diatur dalam Pasal 32 Ayat (1 sampai 4) *jis.* Pasal 34 Ayat (3 sampai 6), Pasal 36 Ayat (1 sampai 3), dan Pasal 37 Ayat (1 sampai 5) UU Desa.
3) Legalitas atas Persyaratan bagi Calon Kepala Desa;	► Diatur dalam Pasal 33 Huruf (a sampai m) *jo.* Pasal 39 Ayat (1) dan (2).
4) Legalitas atas Persyaratan bagi Pemilih dalam Pilkades;	► Diatur dalam Pasal 35 UU Desa.
5) Legalitas atas Penyelesaian Sengketa dalam Pilkades.	► Diatur dalam Pasal 37 Ayat (6) UU Desa.

Sedangkan, secara yuridis penyelenggaraan Pilkades selanjutnya diatur melalui PP No. 43 Tahun 2014 beserta dengan perubahannya, dan Permendagri No. 112 Tahun 2014 beserta perubahannya. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dimengerti pula bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) dan (2), menunjukkan adanya upaya penyelarasan terhadap teknis Pemilu di dalam menerapkan Pilkades. Hal itu sebagaimana ketentuan tersebut secara substansial menegaskan bahwa, Pilkades dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa dengan berdasarkan pada asas Luber dan Jurdil. Hal itu tentu akan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, mengingat secara yuridis keduanya berasal dari rezim hukum yang berbeda, penyelenggara yang berbeda secara kelembagaan, serta mekanisme penyelesaian yang diatur secara berbeda pula.

Secara historis, kondisi sebagaimana tersebut di atas pernah terjadi dalam sistematika pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang implementasinya diupayakan selaras terhadap penyelenggaraan Pemilu. Hal itu sebagaimana diaturnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara demokratis, dengan berdasarkan pada prinsip Luber dan Jurdil (Pasal 2 Bagian Kesatu, Bab II dalam UU No. 1 Tahun 2015). Di sisi lain, adanya upaya pengaturan hukum semacam itu berdampak secara signifikan terhadap validitas *legal standing* bagi lembaga penyelenggaraannya serta kewenangan atas lembaga peradilan yang hendak menyelesaikan dan memutus sengketanya (Ansori, 2017). Meskipun terdapat Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, yang secara prinsipal telah menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah bagian daripada rezim hukum Pemilu, namun kenyataannya hal itu memicu permasalahan hukum baru, yaitu terkait dengan legalitas KPU Daerah di dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya inkonsistensi secara politis dan yuridis, yang kemudian berdapak pada munculnya fenomena *onrechtszekerheids* di dalam pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Huda & Nasef, 2017).

Meskipun hingga saat ini belum ada Putusan MK yang menegaskan terkait dengan kejelasan rezim hukum Pilkades, namun pada prinsipnya hal itu harus senantiasa diperhatikan

serta dikaji secara mendalam, agar keberadaannya tidak bernasib sama dengan kondisi yang terjadi pada pengaturan hukum pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, keberadaan Pilkades saat ini secara yuridis melekat pada konstitusionalitas UU Desa, yang berarti pula bahwa keberadaan Pilkades itu diatur pada tataran peraturan perundang-undangan dan bukan melekat pada konstitusinya. Meskipun ditelaah secara konstitusionalitasnya, maka yang akan ditemukan hanyalah keberadaan Pasal 18 B Ayat (2) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang secara normatif menegaskan tentang adanya amanat untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional yang melekat dan masih hidup sesuai dengan prinsip NKRI. Hal itu dapat berarti pula bahwa dalam amanat Pasal tersebut pada prinsipnya hendak mengakui keberadaan suatu tatanan atau sistem sosial kemasyarakatan, yang bersifat mendasar, naturalis, serta yang hidup secara multikultural di dalam satuan terkecil NKRI. Lantas, terhadap keberadaan Pilkades yang berdasarkan UU Desa diselenggarakan secara Luber dan Jurdil, mungkin masih bisa disangkut-pautkan terhadap konstitusionalitas Pasal tersebut. Namun hal itu akan menjadi bermasalah ketika penerapannya kemudian dikaitkan terhadap Pasal 22 E Ayat (1) dan (2) pada Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara prinsipal keberlakuan asas tersebut masih bisa diterima sepanjang dimaknai sebagai penyelarasan asas semata. Tetapi, ketika asas tersebut kemudian mengilhami teknis pelaksanaan Pilkades yang dipersamakan terhadap teknis Pemilu secara *voting* atau pemungutan suara terbanyak, maka hal itu tentu merupakan suatu kerancuan hukum yang akan memicu terjadinya kondisi *onrechtszekerheids*. Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 2014 beserta dengan aturan perubahannya tentang aturan pelaksana UU Desa, dapat dimengerti bahwa Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:

1) Persiapan pelaksanaan kegiatan Pilkades;
2) Pencalonan kepala desa;
3) Pemungutan Suara; dan
4) Penetapan kepala desa terpilih.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah tersebut, semakin jelas bahwasanya terdapat upaya penyamaan teknis pelaksanaan Pemilu terhadap Pilkades yang dilakukan secara *voting* atau berupa pemungutan suara dengan sistem perolehan suara terbanyak. Sedangkan, secara yuridis konstitusional dapat dimengerti bahwa Pemilu itu dilaksanakan secara Luber dan Jurdil untuk memilih keanggotaan dalam badan legislatif pusat dan daerah, serta untuk memilih Presiden sekaligus wakilnya, yang diselengarakan melalui KPU (Berdasarkan Pasal 22 E Ayat (1), (2), dan (5) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945). Sehingga hal itu jelas berbeda dengan Pilkades yang menurut Pasal 32 Ayat (2) UU Desa, dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD.

Secara historis, dalam pandangannya mengenai sistem demokrasi di Indonesia, Bung Hatta menyatakan bahwa (Hatta, 2018):

> "Negara-negara Indonesia lama adalah negara feodal yang di kuasai oleh raja dan otokrat. Sungguhpun begitu di dalam desa-desa sistem demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat istiadat. Bukti ini menanam keyakinan bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan,... Seperti Kata pepatah Minangkabau "*indak lakang dek paneh, indak lapuk dek ujan*"."

Hal tersebut pada prinsipnya menunjukkan bahwasanya kedaulatan rakyat di Indonesia itu berasal dari kesatuan masyarakat yang paling dasar atau dimaknai pula secara umum dengan sebutan desa. Dengan adanya semangat kebersamaan (rasa senasib dan sepenanggungan) yang erat secara kewilayahan, maka seiring dengan berjalannya waktu

hal tersebut menjelma menjadi suatu adat istiadat yang kokoh, hingga membuatnya mampu bertahan dalam segala keadaan.

Dalam konteks keberadaan Pilkades itu sendiri, berdasarkan riwayat sejarahnya diperkenalkan pada sekitar Tahun 1811-1816, oleh Tuan Raffles selaku Gubernur Jendral Belanda kala itu (Absori & Prasetya, 2021). Namun saat itu namanya ialah pemilihan lurah, yang diselenggarakan dengan pengaruh konsep demokrasi Barat. Hal tersebut secara prinsipal merupakan pengaruh politik yang dilakukan oleh Belanda untuk mengikis pengaruh raja-raja yang berkuasa di zaman itu (Elwan, 2019). Sehingga, sejak saat itu posisi kepala desa berdasarkan kehendak daripada masyarakat dan bukan lagi berdasarkan atas dasar kehendak raja yang berkuasa. Di sisi lain, dengan adanya spirit kekeluargaan serta kekerabatan yang mengakar kuat pada kehidupan di desa, terhadapnya didapati adanya suatu konsep permusyawarahan secara langsung, yang mengerucut menjadi suatu tradisi dan kemudian dikenal sebagai sistem permusyawaratan-perwakilan (Sirajuddin, Ibrahim, Hadiyantina, & Haruni, 2016).

Berdasarkan perihal mengenai demokrasi Pancasila sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan pertama di atas, maka dapat dimengerti bahwa secara prinsipal demokrasi Indonesia itu semestinya bersifat naturalis dan berlandaskan pada nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga seharusnya konsep permusyawaratan-mufakat dalam demokrasi desa sebagaimana tersebut di atas, dapat menjadi spirit utama bagi terwujudnya *genuineness* atas demokrasi Pancasila di Indonesia. Namun, hal tersebut nampaknya akan sulit dilaksanakan jika upaya liberalisasi terhadap demokrasi kita itu terus dilakukan, seperti halnya yang dilakukan oleh Belanda terhadap pemilihan lurah di era penjajahannya saat itu. Maka dari itu, berdasarkan pada substansi nilai luhur Pancasila yang telah diklasifikasikan dalam pembahasan pertama di atas, kemudian dapat diperoleh analisis sebagaimana berikut ini:

Substansi Nilai Luhur Pancasila	Analisis Kesesuaian Pilkades terhadap Substansi Nilai Luhur Pancasila
1) Religiositas;	Secara Prinsipal Pilkades dapat dikatakan kurang memenuhi aspek religiositas dalam Pancasila. Hal tersebut karena sistem pemungutan suara terbanyak dalam Pilkades berpotensi memiliki ketidaksesuaian terhadap nilai permusyawarahan-mufakat yang merupakan representasi dari kearifan lokal serta nilai religiositas yang dipegang teguh dan diyakini oleh bangsa Indonesia.
2) Humanitas;	Berdasarkan berlakunya demokrasi dengan cara pemungutan suara terbanyak sebagaimana halnya yang diimplementasikan pada penyelenggaraan Pilkades saat ini, maka dapat dikatakan bahwa secara formalitas memang hal itu bisa mengakomodasi hak masing-masing orang untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Namun hal tersebut menjadi kurang manusiawi ketika partisipasi setiap orang itu hanya diposisikan sebagai formalitas saja dalam penyelenggaraan Pilkades. Semestinya ada suatu kemufakatan yang lahir atas permusyawarahan bersama, sehingga mampu menghadirkan sosok-sosok pemimpin desa yang bisa merepresentasikan kehendak masyarakatnya secara proporsional.

3) Solidaritas;	Secara prinsipal penyelenggaraan Pilkades melalui pemungutan suara terbanyak dapat dikatakan masih kurang di dalam memenuhi aspek solidaritas sebagaimana cerminan daripada nilai persatuan yang kokoh dalam Pancasila. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraan Pilkades itu pada praktiknya bisa membuat kondisi sosial masyarakat menjadi terpecah belah karena pilihan yang berbeda-beda. Hal itu turut menimbulkan pula adanya kelompok mayoritas dan minoritas di masyarakat yang timbul ketika dan bahkan setelah Pilkades itu dilaksanakan. Pada dasarnya fenomena tersebut sering muncul, karena di dalam penyelenggaraan Pilkades melalui pemungutan suara terbanyak itu hanya mampu menjangkau pada aspek formalitas belaka, tanpa memperhatikan kondisi batin dalam sosial kemasyarakatannya.
4) Representatif Konsensualitas;	Atas dasar diselenggarakannya Pilkades melalui cara pemungutan suara terbanyak, maka hal itu dapat dikatakan kurang bisa merepresentasikan kehendak masyarakat secara mufakat dan hanya menjangkau pada dominasi suara terbanyak saja. Sehingga pada prinsipnya penyelenggaraan Pilkades saat ini masih kurang di dalam memenuhi aspek representatif konsensualitas tersebut.
5) Proporsionalitas.	Berdasarkan atas adanya kekurangan yang terdapat pada aspek pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka hal itu secara otomatis berdampak pula pada kurang terpenuhinya aspek proporsionalitas sebagai perwujudan daripada nilai kesejahteraan yang berkeadilan secara lahir dan batin.

Dalam ihwal penelaahan yang dilakukan sebagaimana tertera pada tabel di atas, maka dapat dimengerti bahwa penerapan opsi "sesuai" dan "kurang sesuai" itu pada prinsipnya dipilih karena mempertimbangkan adanya ketidakmungkinan terhadap kondisi mutlak atas suatu penilaian "tidak sesuai". Sehingga penggunaan frasa yang serupa dengan makna "kurang sesuai" dinilai lebih tepat untuk melakukan analisis secara proporsional.

4. KESIMPULAN

Dalam menjangkau konsep demokrasi di Indonesia itu pada prinsipnya akan senantiasa berkaitan erat dengan keberadaan Pancasila, yang dalam kedudukannya adalah sebagai *philoshopische gronslag* bagi bangsa Indonesia. Hubungan keduanya sangatlah mendasar, hal itu mengingat adanya amanat Konstitusi (Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dan supremasi hukum di Indonesia diatur dalam lingkup yang serumpun agar keduanya dapat berjalan secara harmoni dan proporsional. Sehingga semestinya diantara keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Di sisi lain dalam keterkaitan antara filsafat dengan hukum, maka sudah semestinya keberlakuan demokrasi di Indonesia itu diatur secara selaras terhadap nilai luhur yang terkandung pada Pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan Pancasila adalah demokrasi yang memiliki kesesuaian konsep terhadap kultur dan budaya yang mengakar pada kehidupan masyarakat Indonesia, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila secara runtut dan integralistik. Keberadaan sistem pemungutan suara yang

identik dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia saat ini dinilai terlalu berporos kepada konsep Barat yang rata-rata masyarakatnya memiliki kultur homogen, individualistik, dan juga kapitalistik. Sehingga dalam ihwal penerapan demokrasi Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila, nampaknya perlu dikaji lagi secara lebih mendalam, agar hal itu tidak menimbulkan suatu kondisi *onrechtszekerheids* dalam pengaturan hukumnya maupun kepincangan di dalam penerapannya.

Adanya upaya demokratisasi yang terjadi di Indonesia saat ini, hal itu dapat dilihat dari adanya penyelarasan terkait dengan penerapan sistem pemungutan suara secara Luber dan Jurdil dalam Pemilu, terhadap sistem pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan bahkan saat ini juga telah diterapkan pula pada penyelenggaraan Pilkades melalui keberlakuan UU Desa Tahun 2014. Hal itu tentu menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum secara mendasar, mengingat ketiganya berasal dari rezim hukum yang berbeda-beda. Dengan bercermin pada histori pengaturan hukum mengenai pemilihan kepala daerah yang mengalami kondisi *onrechtszekerheids* akibat dari adanya kerancuan dalam pengaturan hukumnya, maka dalam ihwal penyelarasan teknis pemungutan suara terbanyak pada penyelenggaraan Pilkades semestinya perlu dikaji ulang secara filosofis, historis, maupun sosiologisnya. Hal tersebut pada prinsipnya perlu dilakukan untuk menjaga marwah supremasi hukum dan kedaulatan rakyat secara proporsional dengan berlandaskan pada nilai luhur Pancasila, selaku *philosophische gronslag* atau *weltanschauung* yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan pada analisis terhadap kesesuaian antara Pilkades dan nilai luhur pada Pancasila, maka dapat dimengerti bahwa penerapan sistem pemungutan suara dengan kemenangan berdasarkan atas suara terbanyak pada Pilkades, dinilai masih kurang sesuai terhadap moralitas nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sehingga berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya hal tersebut dapat ditindak lanjuti secara konstruktif dan/atau evaluatif, melalui berbagai kajian-kajian ilmiah yang terkait dengan permasalahan *a quo*. Dan jika di dalam pengkajian tersebut terbukti ada pertentangan secara prinsipal, maka terhadapnya sangat penting untuk dipertimbangkan kembali secara matang dan serius, utamanya terkait dengan perlu atau tidaknya amandemen terhadap Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 itu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Atmaja, I. D., Wiyono, S., & Sudarsono. (2015). *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum.* Malang: Setara Press.

Hady, N. (2016). *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi.* Malang: Setara Press.

Hatta, M. (2018). *Demokrasi Kita (Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat.* Bandung: Sega Arsy.

Huda, N., & Nasef, I. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Kencana.

Mahmodin, M. M. (2018). *Politik Hukum di Indonesia.* Depok: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi).* Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2019). *Teori Hukum.* Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataran University Press.

Santosa, I. B. (2010). *Nasihat Hidup Orang Jawa.* Yogyakarta: Diva Press.

Sirajuddin, Ibrahim, A., Hadiyantina, S., & Haruni, C. W. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan*

Daerah (Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Malang: Setara Press.

Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa.* Surabaya: Airlangga University Press.

Yuhana, A. (2020). *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Gagasan dan Implementasi).* Bandung: Fokusmedia.

Artikel Jurnal:

Absori, & Prasetya, B. F. (2021). Effort for Constitutional Rights of Candidate Village Head in Dispute on the Resultof Village Head Election. *International Journal of Law, 7*(6), 11-19.

Anggraini, P. D., & Yuspin, W. (2022). Dinamika Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum Era Pemerintahan Demokrasi di Indonesia. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 14*(1), 54-73.

Ansori. (2017). Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. *Jurnal Konstitusi, 14*(3), 554-572.

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1*(1), 128-145.

Elwan, L. O. (2019). Model dan Dampak Mobilisasi PolitikPemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016). *Jurnal Publicuho, 1*(4), 1-17.

MZ, H. I. (2021). Eksistensi Demokrasi dan Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ganec Swara: Media Informasi Ilmiah Universitas Mahasaraswati Mataram, 15*(2), 1211-1221.

Nurhayati, I. Y., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2*(1), 1-20.

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review, 2*(2), 210-229.

Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *Jurnal 'ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan, 4*(2), 39-44.

Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2*(1), 143-150.

Safwandy, A. M., Husni, & Rasyid, M. N. (2019). Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21*(3), 361-376.

Soekarnoputri, M. (2021). The Establishment of Pancasila as the Grounding Principles of Indonesia. *Jurnal Pertahanan, 7*(1), 122-136.

Suryawati, N. (2018). Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi. *Prosiding Simposium Nasional SIPENDIKUM.* Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 116-123.

Wiguna, M. O. C. (2021). Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15*(1), 133-148.

Webpage:

MKRI. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi.* Dipetik Juli 26, 2022, dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PHPU&jnsperkara=1&https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PHP.&jnsperkara=1.

 ISSN: 2830-2699

MODEL IDEAL SUKSESI KEPEMIMPINAN DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

[1]M.Junaidi, S.Ag., M.H., [2]Diana Setiawati, L.LM.,
[1,2] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: [1]mj122@ums.ac.id, [2]Ds170@ums.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujua untuk mengetahui model ideal suksesi kepemimpian nasional dalam demokrasi di Indonsia. Hal didasarkan bahwasanya Kontinuitas atau suksesi dalam kepemimpinan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, karena suksesi tersebut akan menentukan keberlangsungan hidup mereka, Dari banyaknya kasus hukum yang menjerat para pemimpin dalam pemerintahan negara Indonesia, serta didapatinya pemimpin yang tidak kompeten dan hanya bermodalkan relasi dan uang saja, dapat disadari bahwa ternyata Indonesia secara keseluruhan belum dapat mempersiapkan penerus melalui perencanaan suksesi untuk memimpin atau mewakili rakyat, Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan suksesi kepemimpinan yang ada dan dibutuhkan di Indonesia. Dimulai dari berbagai kelemahan dan persoalan muncul dalam sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia saat ini, mulai dari partisipasi politik berbiaya tinggi hingga lemahnya sistem kaderisasi kepemimpinan, Penelitian ini dilakukan dengan studi menggunakan metode kajian pustaka dengan fokus pembahasan pada pemahaman mengenai suksesi secara kesluruhan, Pandangan islam dalam kepemimpinan, pemilihan pemimpin dengan mengembalikan prinsip musyawarah mufakat sebagai ciri demokrasi pancasila; dan berlangsungnya kaderisasi para pemimpin,

Kata Kunci: Suksesi Kepemimpinan, Kepemimpinan Nasional, Sistem Pemilihan.

1. PENDAHULUAN

Munculnya seorang pemimpin dapat dipahami sebagai suatu akibat norma sosial sebagai suatu kebutuhan dan consensus atau kesepakatan bersama dalam masyarakat tersebut, Pendalaman konsensus ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem dimana bagian-bagiannya saling berhubungan satu sama lain, Interaksi sosial yang tercipta pada dasarnya selalu menuju kepada terjadinya integrasi dan keseimbangan sosial yang dinamis, Dalam Integrasi sistem sosial inilah konsensus dalam masyarakat mengenai nilal-nilai kemasyarakatan tertentu menjadi salah satu faktor penting yang ada didalamnya. Disinilah pemimpin dipahami sebagai simbol untuk menjaga suatu tatanan sistem sosial dan tata tertib atas dasar norma sosial yang ada.

Berbeda dengan pendekatan konsensus, pendekatan coercion atau dominasi memahami bahwa masyarakat selalu mengandung konflik. Konflik itu merupakan suatu gejala terjadinya potensi disintregasi perubahan sosial dalam masyarakat, yang oleh karena itu masyarakat hanya dapat terintegrasi melalui suatu dominasi atau coercion oleh kelompok sosial lainnya, Dahrendrof menggambarkan sistem seperti ini dengan istilah ICAS (lmperalively Coordinated Mssociations), dari pendekatan coercion ini dapat dikatakan bahwa dengan demikian bangunan sistem sosial akan dapat terintegrasi dengan sebenar-benarnya atas dominasi sekelompok orang terhadap masyarakat, Ini berarti dalam proses integrasi tersebut terjadi hubungan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas melalui coercion atau dominasi, dimana mereka yang mempunyai otoritas akan menguasai kelompok yang tidak mompunyai otoritas.

Dari pendekatan coercion muncul anggapan bahwa pemimpin merupakan simbol kekuatan yang memaksa, mereka tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Dengan kata lain pemimpin bukan hasil dari consensus atau kesepakatan bersama, akan tetapi lebih merupakan suatu unsur dominasi atas pemimpin masyarakat.

Menurut pendekatan behavioral atau tingkah laku, faktor-faktor psikologislah yang membuat seorang pemimpin bisa muncul. Bagi pendekatan ini terjadi interaksi antara tiga komponen, yaitu faktor lingkungan, predisposisi dan political response, Faktor lingkungan ini meliputi, lingkungan sosial, politik dan ekonomi, Lingkungan merupakan kumpulan variabel yang mempengaruhi muncul atau terbentuknya sikap seseorang. Karena itu lingkungan tidak saia yang melingkupi seseorang, akan tetapi yang lebih penting kemudian adalah lingkungan sebagaimana ditafsirkan oleh seseorang tersebut, Faktor lingkungan ini akhinya membentuk predisposisi seseorang, yaitu suatu kecenderungan psikis yang sudah siap untuk memberikan reaksi secara psikologis, bergantung pada stimulus yang diberikan, Dan akhirnya dari kedua faktor itu memunculkan political response dari seseorang untuk bertindak menjadi aktor politik tertentu.

Bagi penganut Marxisme konservatif, mereka tidak percaya kepada peranan dan eksistensi pemimpin, Mereka juga tidak percaya faktor psikologis begitu berperan, karena mereka menganggap bahwa dalam masyarakat selalu terjadi konflik antar kelas, Lantaran selama masih terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat maka selama itu pula akan terjadi konflik kelas dalam masyarakat, kaarena itu bagi pendekatan marxisme konservatif yang menganggap esensial di dalam masyarakatnya adalah adanya konflik kelas, Pemimpin merupakan akibat dari konflik kelas dari masyarakat, Struktur sosial dan ekonomi sudah berjalan sedemikian rupa sehingga munculnya pemimpin merupakan bagian dari arus umum besar sejarah (part of the general course of development), hal ini dikatakan Ralp Milinband sebgai trans generational history, yaitu suatu proses sejarah yang menganggap individu tidak terlalu menjadi bagian penting untuk memainkan peran menentukan.

Di dalam teori soCial movement, Niel Smellser mengungkapkan pentingnya pemimpin dalam memobilisir suatu gerakan sosial dan politik, Tanpa unsur pemimpin niscaya Gerakan sosial tidak akan muncul kepermukaan, apalagi untuk berhasil mencapai tujuan. (Mark N.Hagopian, l978), Senada dengan Niel Smellser adalah Erick Hotffer dan Gustave Le Bon yang menganggap pentingnya pemimpin dalam melahirkan dan menentukan keberhasilan suatu gerakan sosial dan politik (Mark N.Hagopian, 1976).

Pemimpin atau penguasa ketika memegang kekuasaannya cenderung mengeksploitasi kehidupan masyarakat sehingga menguntungkan kepentingannya. Tidak itu saja, bahkan penguasa sering kali mampu mengembangkan apa yang disebut Gaetano Mosta sebagai suatu politikal formula atau Pareto yang menyebutnya sebagai derivitionso politics, yaitu basis moral dan hukum bagi keberadaan para elit dalam banteng kekuasaannya. Untuk menginterograsi aspirasi masyarakat dengan elit maka perlu suatu "instrumen kohesi moral", Tanpa instrument itu eksistensi elit akan cenderung dipersoalkan oleh masyarakat,

Dengan demikian ketika pemimpin berkuasa cenderung mensosialisasikan dan memaksakan kepentingannya kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol publik. Bahkan pemimpin, kalau dipahami dengan pendekatan coercion, berusaha menggunakan kekuasaannya sebagai instrument untuk memenuhi kepentinganya.

Ralp Milinband menguatkan pendapat di atas, yaitu adanya usaha dari penguasa. pemimpin untuk mempertahankan kekuasaannya dan membenarkan tindakannya dengan cara process of messive indoctrination, Penguasa atau pemimpin merupakan lembaga fungsional dari negara yang berusaha memobilisasi ideologi untuk membenarkan tindakannya dalam masyarakat, Menurut Allhusser secara inslitusional ada dua institusi yang terlibat dalam memobilisasi ideologi, yaitu pertama Repressive State Apparetus (RSA) dan kedua ldiological State Apparatus (lSA), Lembaga yang pertama berperan untuk memelihara kekuasaan negara melalui kekuatan fisik, seperti polisi dan militer, Lembaga yang kedua merupakan lembaga

yang berperan membenarkan keabsahan penguasa melalui penyebaran ideologi negara, Kalau negara dipertahankan melalui RSA berarti negara itu dipertahankan secara direct domination sedangkan jika negara dipertahankan melalui ideologi maka disebut indirect domination (Allan Swingewood, 1977).

Kesimpulan teoritisnya adalah, pola kepemimpinan yang kompleks dan berjenjang, yang kehadiran pemimpinnya mungkin sebagai simbol eksploitasi antara mereka yang memimpin dan yang dipimpin atau bahkan merupakan konsensus diantara masyarakat tersebut untuk mengukuhkan sistem sosial dengan cara memunculkan pemimpin yang mereka kehendaki, dan pemimpin ketika mereka berkuasa selalu berusaha mempertahankan legitimasi kekuasaannya, baik melalui lembaga ideologi maupun lembaga militer, Mereka selalu menciptakan formula politik atau mengusahakan tercapainya hegemoni negara dengan cara mempertahankan ideologi.

Kepemimpinan inilah yang nantinya akan menentukan kemajuan dan langkah bangsa atau negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan, Maka dari itu dibutuhkanlah suatu pembentukan maupun pengawasan terhadap calon-calon pemimpin, baik dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah itu sendiri, proses inilah yang kerap disebut sebagai suatu suksesi kepemimpinan, dan suksesi kepemimpinan inilah yang menjadi hal vital bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Atas dasar di atas, penulis ingin meneliti peminpin ideal di indonrsia serta model ideal dalam suksesi kepemimpinan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki,yang berhubungan dengan model ideal suksesi kepemimpinan di Indonesia.Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011, hlm. 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang, Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengn cara penggabungan dan analisis data yang bersifat induktif (Sugiono. 2010: 9). Menurut Poerwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Sedangkan Djam'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya,

Dilihat dari pendapat beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode kualitatif deskriptif merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mendapatkan data yang menyajikan data apa adanya tanpa manipulatif yang hasilnya menekankan pada maknanya atau pemaknaannya. Penyusunan makalah ini dilakukan dengan mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan dan dilakukan beberapa perbaikan dalam sistematika penulisan yang disertai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait sehingga makalah tersebut dapat tersaji secara runtut dan mudah dipahami.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan, dalam pengertian lain kepemimpinan adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

Hampir setiap literatur-literatur tentang kepemimpinan memberikan gambaran yang ideal tentang kepemimpinan, hal ini dapat dimengerti, karena masnusia membutuhkan kepemimpinan itu, dan dari waktu ke waktu kepemimpinan menjadi tumpuan harapan dari manusia, sehingga dewasa ini masalah kepemimpinan semakin menarik perhatian banyak kalangan terutama dalam kajian komtemporer, sebab kepemimpinan memiliki dimensi yang luas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah perihal memimpin atau cara memimpin, kepemimpinan bisa dirumuskan sebagai kiat mempengaruhi orang banyak agar mau bekerjasama memperjuangkan tujuan-tujuan yang ingin mereka capai, kemudian beberapa para ahli pun juga mengutarakan pendapatnya tentang pengertian kepemimpinan, yang antara lain:

1) Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu (Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961, 24).
2) Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Shared Goal, Hemhiel & Coons, 1957, 7).
3) Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama (Rauch & Behling, 1984, 46).
4) Kepemimpinan adalah kemampuan seni atau tehnik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya.
5) Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan (Jacobs & Jacques, 1990, 281).
6) Kepemimpinan adalah seni dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (John Piffner).
7) Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Slamet, 2002: 29)
8) Kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 1983:123)
9) Kepemimpian adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan (Robbins, 2002:163).
10) Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa (Ngalim Purwanto 1991:26).

Jadi, berdasarkan berbagai pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa definisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk meneapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengafuhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi.

Idealnya seorang pemimpin itu memegang kekuasaan sesuai dengan bidang dan keahlian dan bakatnya. Sebab tanpa hal tersebut, seorang pemimpin akan menemui kesulitan dalam melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri, kesulitan mawas diri dan kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga secara rasional pemimpin dituntut kepandaiannya untuk memimpin jalannya perkumpulan yang berada dalam wewenangnya sesuai dengan misi perkumpulan itu dibentuk secara bersama, misalnya sebuah negara yang dipimpin oleh kepala negara.

Pemimpin adalah inti dari suatu organ. Ini berarti bahwa organ tersebut akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin, kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin, seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya, seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama, dalam melaksanakan kepemimpinan, pemimpin memiliki berbagai tugas utama, yang menurut James A.F Stonen, tugas utama tersebut meliputi:

1) Pemimpin bekerja dengan orang lain.

   Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, dalam rangka mencapai tujuan bersama.

2) Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akontabilitas).

   Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik, pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan bawahannya tanpa kegagalan.

3) Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas

   Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas, dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada bawahan, kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara efektif.

4) Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual

   Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. yang selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat, serta pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.

5) Manajer adalah seorang mediator

   Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).

6) Pemimpin adalah politisi dan diplomat

   Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi, sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.

Kemudian menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah:

1) Peran hubungan antar perorangan, fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi.
2) Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.
3) Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

Dalam suatu kepemimpinan, islam pun juga menyadari bahwa akan sulit menerima apabila ada sekelompok masyarakat hidup tanpa seorang pemimpin, yang dari itu Nabi Muhammad SAW berpesan "apabila kalian bertiga atau lebih dalam suatu perjalanan, maka angkatlah salah seorang diantara kalian sebagai pemimpinnya", yang dari pesannya tersebut, menunjukkan signifikasi seorang pemimpin dalam masyarakat.

Secara normatif, al-Qur'an menggunakan tiga term yang menunjukkan makna kepemimpinan.

1) Khilafah

   Khilāfah adalah sebuah sistem kepemimpinan yang pernah dirumuskan dan diaplikasikan pada masa islam klasik. Para ulama masa lalu telah mencoba memahami dan memformulasikan konsep khilafah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an tentang kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan berbangsa,

2) Wilayah

   Wilayah artinya kepemimpinan. Orang yang memimpin disebut wali. Secara umum pemimpin umat adalah Allah Ta'ala, Rasulullah saw dan orang-orang beriman.

3) Imamah

   Imamah adalah sistem kepemimpinan dan orang yang memimpin disebut imam. Imamah adalah kepemimpinan yang bersifat umum, baik kepemimpinan negara atau kepempinan "ibadah mahdah" seperti shalat. Pemimpin dalam ruang lingkup orang-orang yang bertakwa adalah "imām li al-muttaqīn" atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa

Pemimpin dalam islam adalah orang yang paling berkualitas diantara anggota komunitas. Allah Ta'ala Maha Tahu siapa diantara umatnya yang paling berkualitas hingga diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah "Al-Musthaf" atau orang pilihan yang dipilih dan diangkat oleh Allah SWT, lalu pemimpin yang bukan nabi dan rasul dipilih dan diangkat oleh orang-orang diantara mereka.

Al-Qur'an mengisyaratkan umat islam memilih pemimpin dengan "khairu ummat" yaitu umat terbaik yang memiliki syarat:

1) Adil
2) Berilmu pengetahuan yang luas
3) Sehat indrawi seperti sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan.
4) Sehat anggota tubuh dari kekurangan yang menghalanginya melakukan aktivitas.
5) Memiliki pemikiran yang cerdas dalam menyikapi perkembangan politik dan kemaslahatan umat.
6) Berani dalam menegakkan kebenaran.

3.2. Kepemimpinan di Indonesia

Sejak orde lama hingga orde baru, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan, Suksesi kekuasaan di Indonesia ada yang melalui proses pemilihan umum, namun

ada pula yang melalui proses penyerahan kekuasaan dalam situasi yang penuh ketegangan politik, Peristiwa G30s menjadi titik awal terkikisnya kekuasaan Soekarno dari panggung politik, Presiden Soekarno akhirnya benar-benar jatuh pada 1966 dengan penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar/SP 11 Maret) 1966 kepada Soeharto.

Supersemar sebenarnya bukanlah transfer kekuasaan dari presiden Soekarno kepada Soeharto, melainkan perintah untuk pengamanan kekuasaan, penyerahan Supersemar ditafsirkan sebagai kudeta merangkak, Proses kudetanya tidak langsung menjatuhkan, melainkan secara perlahan-lahan, Bahkan setelah kekuasaan beralih, Soekarno masih berstatus sebagai presiden, Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto, Yang dimana sejak saat itulah, Soeharto tampil sebagai pemimpin baru yang mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan-tindakan politis untuk mengikis kekuasaan Soekarno.

Tindakan-tindakan politis dan langkkah-langkah kekuasaan Soeharto masa dualism iniberujung pada tanggal 12 Maret 1967, Dimana sidang MPRS mencabut kekuasaan Soekarno dari kursi kepresidenan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden, Sejak saat itulah muncul orde baru yang akan berkuasa hingga 32 tahun kedepan, dan dikurun waktu yang tersebutlah terjadi berbagai ketidakseimbangan kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia.

Soeharto di awal kekuasaannya menggunakan strategi "reformasi nanti", yaitu melakukan reformasi politik secara bertahap, kompromi dengan mempengaruhi para pemimpin oligarki partai, dan penekanan dwi fungsi ABRI pada kekaryaan dalam urusan non militer (Mohtar Mas'oed, 1989), Kemudian dalam pemilu 1971 dengan kemenangan partainya, yaitu Golkar secara telak, maka pada tahun 1973 parpol "dipaksa" untuk melakukan fusi menjadi tiga, yang terdiri dari Golkar, PPP dan PDI, Dengan suara telak yang ada pada partai Golkar serta Soeharto sebagai Presiden, sejak saat itulah parpol, khususnya PPP dan PDl seakan hanya menjadi partai penggembira saja dan sebagai pelengkap partai politik di Indonesia karena ditahun-tahun mendatang Golkar selalu menjadi pemenang pemilu.

Menanggapi kekuasaan otoriter Soeharto itu, muncullah suatu gerakan yang didasarkan atas tuntutan rakyat kepada pemerintah yang secara umum di latar belakangi oleh penyelewengan dan perlakuan tidak adil di berbagai bidang, seperti politik, hukum, dan ekonomi, Di mana di semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Gerakan inilah yang kemudian dinamakan dengan gerakan reformasi,

Gerakan reformasi ini kemudian menciptakan suatu masa reformasi atau masa transisi yang kemudian membuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi, Masa ini dimulai dari puncak Gerakan reformasi dimana kepemimpin BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Pada masa transisi ini, Habibie kemudian membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan yang ada.

Sistem yang dijalankan oleh Habibie lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan, dan kemudian di masa ini pula, partai politik menjadi independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer, Selain itu Habibie juga menerapkan pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan, Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR, Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan

nasional, demokrasi inilah yang menjadi suatu proses suksesi kepemimpinan hingga saat ini menemani pemilihan umum.

3.3. Upaya Suksesi

Dalam suksesi suatu kepemimpinan, di Indonesia terjadi berbagai upaya untuk melakukannya, upaya-upaya ini diantaranya:

a. Pembentukan Karakter.

Pembentukan karakter seseorang dimulai sejak dini, yang pembentukannya dapat terjadi dan tumbuh dari berbagai tempat dan berbagai hal, pertumbuhan karakter ini dapat terjadi baik di sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar.

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk pembentukan karakteristik seseorang. Sebagai contoh, Pendidikan karakter seorang pemimpin di sekolah pada tingkat sekolah menengah atas dapat dilakukan dengan hal pembiasan dan dimulai dari hal yang sederhana seperti aktif mengikuti organisasi, menjadi ketua kelas, jujur, sopan dan santun, serta selalu taat pada peraturan dan tata tertib yang ada.

Dalam hal kaitannya dengan proses suksesi kepemimpinan yang dimana tidak bisa lepas dari karakter yang luhur dalam dirri seoorang pemimpin, komponen yang ada di sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memantau dan mengarahkan peserta didik agar menjadi pribadi yang bijak, jujur, kritis, serta bertanggung jawab, Karena bila mana seseorang tidak dapat menguasai hal-hal tersebut, Maka akan berdampak kurang baik dalam pengembangan karakter pada peserta didik yang diharapkan dapat menjadi pemimpin di masa depan.

Pembentukan watak dan pendidikan karakter tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, akan tetapi seluruh pihak atau komponen yang ada disekitar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar dan bahkan secara keseluruhan juga harus ikut aktif dalam membentuk karakter seseorang, Dalam keluarga seseorang akan dilatih untuk disiplin, bertanggung jawab, taat, dan jujur kepada apa yang di tetapkan dan diharuskan dalam keluarga mereka, Bahkan dalam keluarga, seseorang juga dapat terlatih kemempuan berdemokrasi dan berpolitik mereka melalui adanya musyawarah keluarga, Begitupun juga di dalam masyarakat dan lingkunagan sekitar mereka, yang dengan ditanamkannya karakter diri yang luhur, seseorang tersebut diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin ideal dimasa depan nantinya.

b. Kaderisasi salam Partai Politik.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan merupakan suatu keharusan dalam menyelesaiakan berbagai permasalahan dalam organisasi, Untuk menghasilkan pemimpin yang berkulitas, dapat dimulai dari rekrutmen dan kaderisasi yang baik, Untuk lingkup kepemimpinan nasional, mekanisme kaderisasi dalam suatu partai politik sangat penting, sebab dalam era demokrasi saat ini, partai politik menjadi salah satu pilar utama karena peranannya yang sangat penting, seperti dalam proses seleksi kepemimpinan nasional dan pengisian jabatan publik. Namun kenyataannya, mayoritas partai yang berdiri saat ini belum mampu memaksimalkan mekanisme kaderisasi ataupun pola rekrutmen yang semestinya sehingga kerap kali terjadi politik kekerabatan.

Selain itu, partai politik sering memotong mata rantai kaderisasi dengan mengutamakan calon Pilkada, Pilgub maupun Pileg dari kalangan artis yang rekrut secara instan karena faktor popularitas dengan harapan dapat mendulang suara untuk kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya, banyak kader partai yang menjadi pemimpin

nasional tidak mampu memilkul tugas dan tanggungjawab yang diberikan, dan seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya.

Yang maka dari itu, Partai harus menciptakan pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup dibentuk dan diadakan nya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus, kemudian mengambil suatu model rekrutmen yang terbuka dan demokratis serta menerapkan sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan, lalu partai juga haruslah membentuk suatu jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi.

Selain lanhgkah tersebut, Partai politik juga perlu untuk menerapkan affirmative action dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik. Selain itu kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partapo politik, parlemen dan jabatan publik lainnya; yang model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Pemilihan Umum (Pemilu).

Puncak dari suatu suksesi yaitu adalah pemilihan seorang pemimpin, Yang maka dari itu, Pemerintah telah menerapkan pemilihan umum untuk rakyat memilih orang-orang untuk mengisi atau menempati jabatan tertent,. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung.

Ada enam asas pemilu di Indonesia, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk mewujudkan demokrasi, demi terciptanya tujuan pemilu yang demikian, tentunya diperlukan suatu kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suaranya, dan demi terwujudnya pemilu yang tertib dan adil, maka pemerintah telah menetapkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dengan bantuan kembaga dan badan di bawahnya,

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kepemimpinan akan menentukan kemajuan dan langkah suatu bangsa atau negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan, Kepemimpinan yang baik tentunya harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik dan layak pula, Maka dari itu dibutuhkanlah suatu suksesi kepepemimpinan, Suksesi kepemimpinan ini sendiri, tepatnya di Indonesia, tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan sesuai dengan UUD 1945, suksesi tersebut dapat ditempuh dari berbafgai upaya seperti pembentukan karakter kepemimpinan seseorang sejak dini, kemudian pengkaderan yang sehat oleh partai politik, yang pada akhirnya dipuncaki oleh bentuk nyata demokrasi terhadap kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum, yang peran aktif pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh sangat diperlukan demi terpilihnya seorang pemimpin yang ideal dalam kepemimpinan yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia.

Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia haruslah terus berusaha dalam membentuk karakter dan mempercerdas diri dengan ilmu dan pengalaman, serta ikut berperan aktif dalam politik yang sehan dan ikut serta menggunakan hak suara kita dalam pemilu, yang dimana tindakan-tindakan tersebut dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur serta dapat mencapai cita-cita yang didamba-dambakan.

REFERENSI

Supriyadi, Bambang. (1997), "Suksesi Kepemimpinan di Indonesia" Jurnal Perspektif Volume.2, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Surabaya.

Daswati. (2012), "Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gyaa Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi" Jurnal Academica Fisip Untad, Palu.

Tjiang, Canice Gerry Hermawan. (2014), "Studi Deskriftif Perencanaan Suksesi Kepemimpinan pada Perusahaan Keluarga di Bidang Konstruksi Sidoarjo" AGORA Vol.2, Srabaya.

Harahap, Insan Harapan. (2017), Kaderisasi Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kpeemimpinan Nasional, Universitas Bakrie, Jakarta.

Nugroho, Puji. (2020), Peran Sekolah Dalam Pembentukan Pendidikan Karakter pada Era Revolusi Industri 4.0, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang.

Haris, Syamsuddin dkk. (2016), Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jurdi, Fajlurrahma. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana

Tri, Widodo. (2012). Dukungan Amerika Serikat Terhadap Karir Politik Soeharto, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.